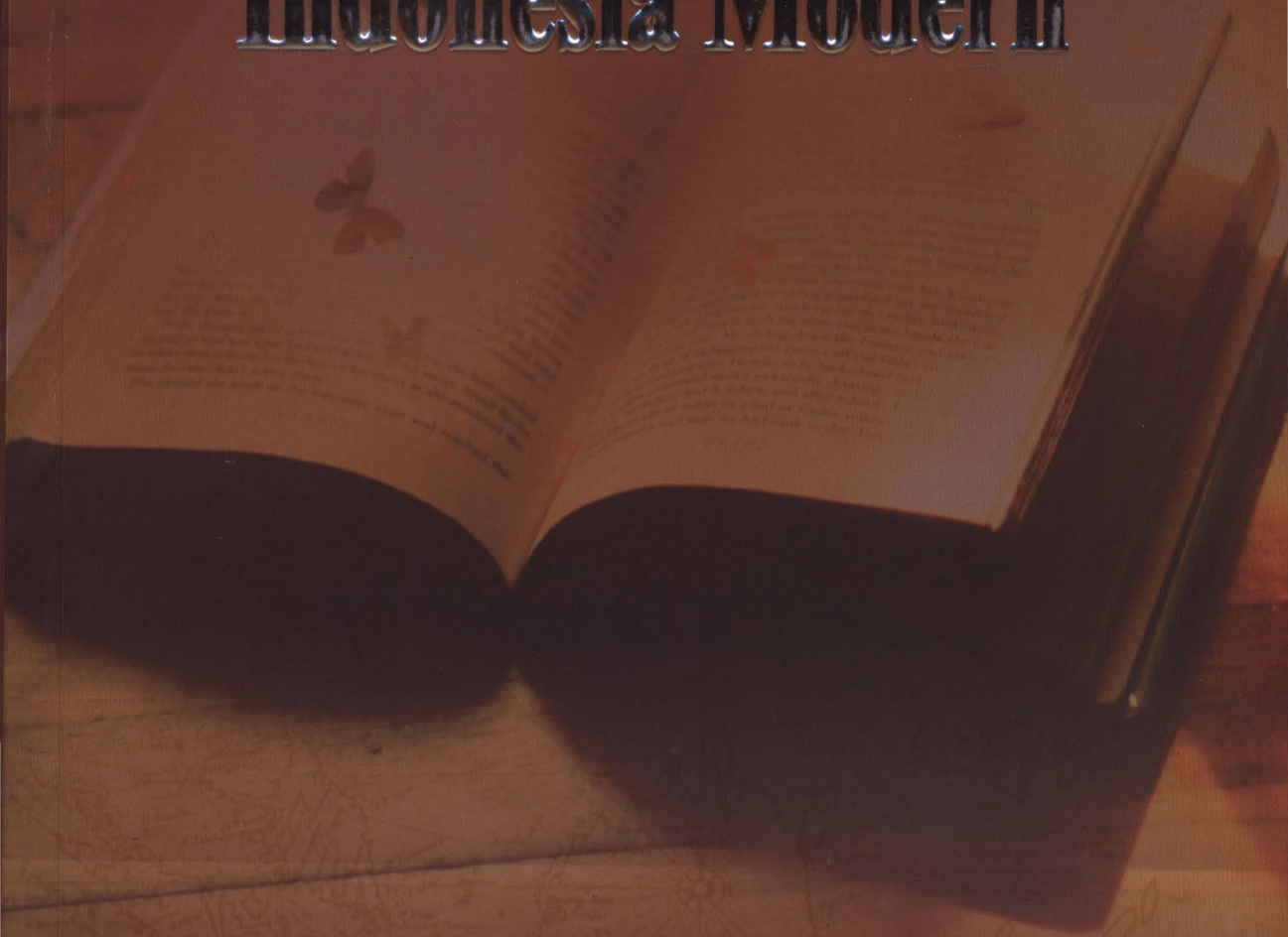


Sejarah Pemikiran Indonesia Modern



Sejarah Pemikiran Indonesia Modern



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Pengarah :

Kacung Marijan (Direktur Jenderal Kebudayaan)

Endjat Djaenuderadjat (Direktur Sejarah dan Nilai Budaya)

Penulis :

- **Bab I. Kondisi di Hindia Belanda**
(La Ode Rabani dan Restu Gunawan)
- **Bab II. Kesadaran Berorganisasi sebagai Simbol Kemajuan**
(G. Ambar Wulan dan Restu Gunawan)
- **Bab III. Dasawarsa Ideologi Pergulatan Pemikiran Bangsa 1920 – 1930 an**
(Restu Gunawan)
- **Bab IV. Nasionalisme dan Kebudayaan**
(Ibnu Wahyudi)
- **Bab V. Pemikiran tentang Dasar Negara dan Konstitusi**
(Saleh As'ad Djamhari dan Restu Gunawan)
- **Bab VI. Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru**
(Susanto Zuhdi)

Editor :

Taufik Abdullah

Penyelaras Bahasa :

Amurwani Dwi L

Tata Letak :

Agus Antoso

Penerbit :

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telp./Fax . : 021-5725044

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku

tanpa izin dari penerbit

ISBN : 978-602-17497-8-4

KATA PENGANTAR

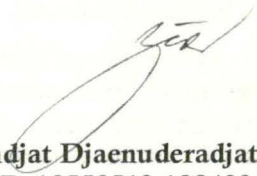
Kegiatan Penulisan Buku Sejarah Pemikiran Tokoh Bangsa, merupakan satu diantara upaya untuk mengungkapkan pengumpulan, peranan dan pengaruh gagasan-gagasan dari para tokoh bangsa baik yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan agama dalam mendirikan, memperjuangkan dan membangun bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa Indonesia adalah sebuah keharusan untuk menggugah ingatan kolektif terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa.

Demikian para tokoh melahirkan pemikiran-pemikiran mereka untuk memperbaiki dan memajukan Bangsa Indonesia dalam berbagai hal. Perdebatan dan dialog dilakukan dengan tujuan kemajuan bangsa-negara Indonesia. Perdebatan tidak menyurutkan para tokoh untuk tetap menjalin pertemanan diantara mereka.

Penulisan buku Sejarah Pemikiran Indonesia Modern ini merupakan bentuk paling sederhana untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta renungan dari para tokoh bangsa. Melalui penerbitan buku ini mudah-mudahan dapat digunakan sebagai teladan bagi generasi penerus bangsa untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa di masa kini dan masa mendatang.

Kepada para penulis dan narasumber, atas kontribusinya, kami mengucapkan terimakasih. Akhirnya saya berharap mudah-mudahan buku ini dapat memberikan inspirasi dan semangat nasionalisme bagi masyarakat Indonesia dan generasi muda pada khususnya, serta dapat menjadi pegangan bahan ajar bagi guru-guru sejarah.

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya



Endjat Djaenuderadjat
NIP. 19550512.198403.1.002

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

Assalamu'alaikum wr wb.

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 dalam sejarah Indonesia adalah periode kolonisasi dari Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu pula perlawanan di daerah-daerah di Tanah Hindia dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal. Mereka menentang dominasi kekuatan militer kolonial yang melakukan perlawanan terhadap raja-raja dan tokoh-tokoh lokal seperti ulama dan guru. Perlawanan lokal itu terus dilakukan dan tumbuh sebagai jiwa nasionalisme saat itu.

Pada gilirannya nasionalisme terus tumbuh dengan masuknya pengaruh politik etis. Para pemuda yang mendapat pendidikan barat mulai menggagas ide-ide segar untuk menjadi suatu bangsa yang terlepas dari koloni Belanda. Gagasan nama " Indonesia " muncul saat para pemuda Hindia belajar di Belanda. Cita-cita kemajuan dan hasrat demokrasi yang semula keinginan akan kesetaraan sosial, kemudian tumbuh menjadi sebuah solidaritas yang mengatasi batas-batas primordial. Benih lahirnya bangsapun mulai tertanam.

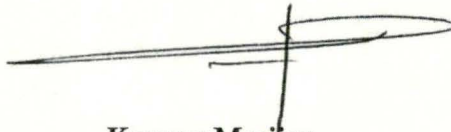
Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) merupakan pembuka lembaran baru dalam proses *Nation Formula*. Ketika landasan kepulauan dan daerah dari Komunitas baru, yang disebut bangsa, secara simbolik dianggap berakhir. Sejak saat itu pula secara ideologis keabsahan organisasi kedaerahan ditentukan oleh keterkaitannya dengan komunitas baru yang disebut Bangsa Indonesia.

Begitulah, Indonesia adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa untuk mengikat masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa ditengah keberagaman etnis, suku, agama, atau golongan. Kesepakatan yang ada bukanlah dimaknai sekedar adanya Indonesia, tetapi ada sebuah kemauan bersama untuk memikirkan dan memajukan bangsa

serta upaya mewujudkan cita-cita bersama. Pemikiran tokoh pendiri bangsa dimasa lampau yang menjadikan terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba melainkan lahir dari sebuah proses yang panjang, dengan adanya kesadaran nasional yang melahirkan gerakan nasional dengan tetesan airmata, keringat, dan darah untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan dan kemajuan.

Pemikiran tokoh ini menjadi sebuah teladan, namun saat ini belum diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Derasnya arus globalisasi, mengikis ingatan kolektif terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa yang mengakibatkan hilangnya karakter dan jatidiri generasi bangsa. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kalangan muda khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Kacung Marijan
NIP. 1964.0325.198901.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vi
 P E N D A H U L U A N	 1
BAB I KONDISI DI HINDIA BELANDA	33
1.1. Politik Etis	33
1.2. Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern	36
1.3. Perkembangan Transportasi dan Tumbuhnya Kota-kota Kolonial	38
1.4. Transportasi Darat	41
1.5. Perkembangan Komunikasi	45
1.6. Perkembangan Pers di Hindia Belanda	47
 BAB II KESADARAN BERORGANISASI SEBAGAI SIMBOL KEMAJUAN	 55
2.1. Boedi Oetomo – Sarekat Islam dan Organisasi Modern	56
2.2. Solidaritas Hindia: Indische Partij	65
2.3. Solidaritas Kesukuan: Pergerakan Pemuda Insuler	69
2.4. Solidaritas Keagamaan: Jong Islamiten Bond	78
2.5. Solidaritas Nasional: Perhimpunan Indonesia	85
2.6. Solidaritas Indonesia: Sumpah Pemuda	91
2.7. Pergerakan Perempuan	98
 BAB III DASAWARSA IDEOLOGI PERGULATAN PEMIKIRAN BANGSA 1920 – 1930-AN	 111
3.1. “Hasrat Kemajuan” di Hindia Belanda	111
3.2. Islam dan Kebangsaan	115
3.3. Nasionalisme Politik	119
3.4. Politik Ko dan Nonkoperasi	134

BAB IV NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN	155
4.1. Kenasionalan dan Kemodernan	155
4.2. Kemodernan dalam Sastra dan Film	159
4.2.1 Puisi	161
4.2.2 Prosa	166
4.2.3 Drama	167
4.2.4 Film	168
4.3 Kenasionalan atau Keindonesiaan yang Terefleksikan	169
4.4. Polemik Kebudayaan	183
4.4.1 Polemik sebagai Representasi Dialektika Pemikiran ..	183
4.4.2 Polemik Mengenai Indonesia dan Keindonesiaan	186
4.4.3 Polemik Mengenai Orientasi Kebudayaan	195
4.4.4 Polemik Mengenai Sistem Pendidikan	199
 BAB V PEMIKIRAN TENTANG DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI	 207
5.1. Janji Kemerdekaan	208
5.2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)	210
5.3. Pemikiran tentang Dasar Negara	211
5.4. Pemikiran Tentang Undang-Undang Dasar	233
 BAB VI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN ORDE BARU	 253
6.1. Pendahuluan	253
6.2. Kekecewaan Terhadap Demokrasi Parlementer : Kembali ke UUD 1945	257
6.3. Kepribadian Nasional Masa Demokrasi Terpimpin	258
6.4. NEFOS versus OLDEFOS	266
6.5. Dari Tragedi Nasional ke Pembangunan Nasional	270
6.6. Jatidiri dan Demokrasi Pancasila	273
6.7. Wawasan Nusantara dan Globalisasi	276
 DAFTAR PUSTAKA	280
BIOGRAFI PENULIS	292

PENDAHULUAN

PENGANTAR : SEJARAH PEMIKIRAN INDONESIA MODERN

Sejarah: sistem keilmuan, rekonstruksi peristiwa, wacana

Ketika kedudukan politiknya telah mulai goyah Presiden Sukarno menyampaikan pidato dengan judul yang boleh dikatakan bernada filosofis juga , “*Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*”. (Agustus 1966) Sebuah judul yang memikat, memang, hanya saja terlepas dari isi dan pesan pidato diucapkan di hari Proklamasi itu, timbul juga pertanyaan “apakah peringatan seperti ini perlu?” Bukankah seseorang, sebagai anggota masyarakat, tidak bisa dan bahkan tidak mungkin meninggalkan sejarah? Bukankah ia adalah bagian dari dinamika sejarah? Bukankah sejarah praktis berarti percikan kejadian dalam untaian dan jalinan kehidupan sosial dalam perjalanan waktu? Atau, jika maknanya hendak dipersempit, bukankah sejarah bisa juga dipahami sebagai letupan kejadian dan peristiwa yang dialami masyarakat dalam arus perjalanan kehidupannya? Karena itulah percikan-percikan sejarah itu biasa juga teringat ataupun tercatat dan malah sering meninggalkan bekas. Jika begini halnya maka bisa juga dikatakan bahwa hanya orang yang menghindar dari kehidupan sosial yang mungkin dapat “meninggalkan sejarah”. Hanya ia yang membiarkan dirinya dalam kesendirian yang mungkin terlepas dari belitan sejarah. Tetapi apakah mungkin kehidupan terlepas secara total dari belitan ikatan sosial yang “mensejarah” itu?

Apapun mungkin isi pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan Bung Karno, dengan judul pidato seperti ini ia telah mengingatkan bahwa dalam menghadapi tantangan yang sedang menghadang kehidupan bangsa jangan sampai pelajaran dari pengalaman yang pernah dilalui kehidupan bangsa terlupakan begitu saja. Dengan seruan ini ia juga ingin mengatakan bahwa sejarah bukanlah sekadar rentetan peristiwa dan tidak pula hasil rekonstruksi dari rangkaian peristiwa yang pernah terjadi di suatu tempat dalam perjalanan waktu. Sejarah adalah pula sesungguhnya perbendaharaan dari pengalaman masyarakat dan bangsa dari masa ke masa. Karena itulah sejarah biasa pula dianggap dan bahkan dirasakan sebagai rangkaian dan kumpulan kearifan yang mungkin bisa “dibelanjakan” dalam menghadapi gejolak peristiwa yang sedang dan mungkin akan terjadi.

Ketika pidato historis itu diucapkan Bung Karno sebenarnya tidak hanya berpetuah tentang kearifan hidup berbangsa dan bernegara. Ada realitas sosial-politik yang keras yang sedang dihadapinya dan terlebih lagi oleh bangsa yang dicintainya. Bukankah pidato itu diucapkan ketika bangsa dan negara sedang berada dalam krisis integrasi yang teramat memprihatinkan? Bung Karno sendiri? Ia juga menyadari apa artinya krisis kewibawaan. Karena itu bisa jugalah dipahami kalau penafsiran politik dengan begitu saja terpakaikan dalam memahami pidato ini. Pidato dengan judul filosofis yang cenderung moralis ini bisa ditafsirkan sebagai usaha Bung Karno untuk mengingatkan bangsa atas jasa dan pengorbanan para aktor sejarah yang telah berbuat bagi bangsa dan tentang pengalaman sejarah bagaimana jadinya kalau persatuan yang selama ini dipelihara tersingkirkan karena pergolakan politik, yang telah semakin mengancam integrasi bangsa. Maka bisa jugalah dipahami kalau ada saja dugaan bahwa pidato ini adalah saluran untuk mengingatkan bangsa akan arti kehadiran diri dan peranan Bung Karno dalam perjalanan sejarah bangsa.

Tetapi sudahlah, penilaian politik memang cenderung mencari sesuatu di balik ucapan yang kedengarannya seperti memantulkan kearifan. Karena itu biarkanlah dugaan akan hasrat politik yang terkandung di belakang pidato ini berlalu begitu saja. Masalah dari seruan “jangan tinggalkan sejarah” ini barulah muncul ketika pemahaman yang bertolak dari hasrat dominasi telah mewarnai sikap dan nilai yang dikenakan pada peristiwa yang telah dilalui itu. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kita juga berhadapan dengan berbagai

pancaran makna sejarah yang *inspiring*, terasa seperti memberikan ilham, dan sebagai ajakan untuk melangkah ke hari depan yang cerah. Bukankah dalam suasana hati seperti ini kita biasa sekali merayakan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai “Hari Kemerdekaan”, meskipun secara faktual kedaulatan negara –bangsa barulah terwujud pada tanggal 27 Desember 1949—ketika kedaulatan Republik Indonesia secara resmi diakui. Tetapi bukankah pada tanggal 17 Agustus semuanya dirasakan sebagai bermula? Ketika proklamasi kemerdekaan telah diucapkan maka roda revolusi nasional pun berputar dengan keras. Ketika itulah pengorbanan, pengabdian, yang dilalui dengan “*blood and tears*” demi tercapainya kemerdekaan bangsa menjadi acuan yang tak teringkari. Tanggal dan peristiwa yang dirayakan itu dirasakan sebagai wakil yang otentik dari cita-cita dan harapan bangsa yang tak kunjung padam.

Hanya saja tidak pula jarang suatu peristiwa mendapatkan makna yang dibimbing oleh hasrat dominasi politik dan kemudian dipelihara sebagai mitos-nasional. Jika hal ini telah terjadi kemungkinan semakin menjauhnya kenangan dari peristiwa historis yang otentik tidak selamanya terelakkan. Ketika mitologisasi peristiwa, yang dibimbing oleh hasrat dominasi, dikumandangkan dan diajarkan sebagai representasi yang otentik dari dinamika idealisme yang mengilhami kehidupan kebangsaan maka kekeliruan dalam sistem pengetahuan pun tidak terhindarkan. Kekaburan dalam sistem kesadaran sejarah pun tidak pula terelakkan. Mitologisasi peristiwa yang dibimbing oleh hasrat hegemoni atau bahkan dominasi itu dengan mudah bisa mengancam terjadinya pengingkaran realitas historis yang sesungguhnya. Ketika hal itu telah terjadi makna historis yang *artificial*, buatan, bisa dirasakan dan dianggap sebagai representasi dari realitas historis yang otentik. Maka kesadaran sejarah pun tidak pula lebih daripada kesadaran palsu belaka. Nanti ketika ketenangan telah tercapai dan kepalsuan itu telah tersibak siapapun akan bisa berkata tentang betapa “sejarah hanyalah alat dalam usaha peneguhan hegemoni” atau bahkan sejarah itu hanyalah *tableau* dari kengawuran manusia.

Sebuah contoh yang menarik yang sampai kini tetap diulang-ulang bahkan juga-- dan malah terlebih lagi-- oleh para pejabat tinggi negara ialah mitos “350 tahun di bawah kolonialisme Belanda”. Mitos ini sangat menyesatkan meskipun mungkin bertolak dari hasrat pembuktian betapa perlawanan modern, yang dibimbing oleh hasrat nasionalisme—suatu ideologi yang melebur semua kesatuan etnis, golongan dan agama dalam suatu idee kesatuan—akhirnya berhasil

membawa bangsa “ke gerbang kemerdekaan”. Sudah di awal 1950-an Resink, guru besar hukum, dengan pendekatan hukum internasional menolak keabsyahan historis dari apa yang dianggap sebagai pengalaman kesejarahan bangsa ini. Tetapi lebih dari pada itu mitos “350 tahun” adalah juga pengingkaran terhadap keragaman pengalaman sejarah yang dialami berbagai daerah di bumi Nusantara ini. Mitos yang diperkenalkan Gubernur Jenderal de Jonge dan malah -- dengan maksud yang bertolak belakang -- sangat dipopulerkan oleh Bung Karno memperlihatkan pengingkaran atas kenyataan historis yang dialami berbagai kesatuan politik dalam wilayah yang kemudian bernama Indonesia. Berbagai corak hubungan politik dan kebudayaan serta alam pemikiran inilah yang kemudian --ketika waktunya telah sampai--bersatu dalam ikatan kesejarahan, kebangsaan dan kenegaraan.

Ambillah beberapa contoh dari halaman sejarah beberapa wilayah yang kini telah menjadi bagian dari negara-bangsa, Republik Indonesia. Kalau dalam abad 17 Mataram, Aceh-Darussalam, bahkan juga Banten, Goa-Tallo, Ternate, dan Tidore tampil dengan memperlihatkan sinar keperkasaan, maka abad 18 adalah masa ketika Palembang dan Jambi asyik bersaing, meskipun terjalin oleh ikatan kesejarahan yang akrab. Abad ini adalah pula saat ketika Riau-Johor, di bawah aliansi Sultan, yang mewakili unsur Melayu dan berkedudukan di Johor, dengan Yang Dipertuan Muda, yang keturunan pelaut-advonturir Bugis, yang berkedudukan di pulau Penyengat, di kepulauan Riau, tampil sebagai saingan yang tidak mudah didekati Belanda, yang telah menguasai Malaka sejak pertengahan abad 17 (1641). Di suatu saat, sebagaimana *Tuhfat an Nafis*, karya besar ciptaan Raja Ali Haji, pujangga Melayu abad 19, dengan imajinatif mengisahkan keberhasilan Riau-Johor menghancurkan armada Belanda (akhir abad 18) Tidak puas dengan kemenangan ini Raja Haji, Yang Dipertuan Muda Johor-Riau, melanjutkan perangnya dengan menyerbu Malaka. Maka naskah inipun melukiskan dengan sangat mengharukan peristiwa gugurnya Raja Haji ketika ia menyerbu benteng Belanda, yang mendapat bantuan armada Belanda yang kebentulan datang pada waktu yang tepat.

Akhir abad 16 dan sepanjang abad 17 adalah masa ketika kesultanan Aceh-Darussalam sibuk memelihara dan mengembangkan ajaran dan filsafat ke-Islaman dalam bahasa Melayu. Terlepas dari ajaran tasauf yang dianutnya sampai kinipun syair-syair religius yang dihasilkan Hamzah Fansuri masih terasa juga sebagai menggugah perasaan. Tetapi sejak berpulangnya Abdurrauf al-Singkili, ahli tafsir

yang terkemuka, tradisi keilmuan dalam bahasa Melayu yang kreatif ini dilanjutkan oleh para ulama dari daerah lain—Banjarmasin, Palembang, bahkan kemudian juga Bima. Tradisi keilmuan dalam bahasa Melayu ini terus berlanjut sampai percetakan telah dikenal, di Pulau Penyengat, tempat bersemayam Raja Muda dari Kesultanan Riau-Johor, keturunan bangsawan-advonturir yang berasal dari Bugis. Pada sisi lain awal abad 19 adalah pula saat ketika Minangkabau menghadapi “revolusi keagamaan”, dengan munculnya gerakan Padri. Meskipun secara internal gerakan ini berakhir dengan terciptanya perumusan yang ideal tentang hubungan adat adan agama, pergolakan internal ini memberi kesempatan bagi Belanda untuk melakukan ekspansi kemiliteran (1821). Ketika akhirnya Tuanku Imam Bonjol (1837) berhasil ditangkap, Minangkabau pun mulai memasuki zaman kolonial. Tetapi ingatan dan peninggalan sejarah mencatat juga bahwa pada akhir dekade pertama dari abad 20 Minangkabau telah mulai menjadi kancah pergumulan intelektual keagamaan. Ketika inilah pemikiran modernisme Islam mulai melansir usaha reformasinya.

Akhirnya sebuah pertanyaan yang bersifat kronikel harus tertanyakan juga. Bagaimanakah secara logis bisa diterangkan kalau seketika Cornelis de Houtman mendarat di Banten maka dengan begitu saja Belanda menguasai seluruh wilayah yang dalam kesadaran nasionalisme modern dianggap sebagai persada tanah air Indonesia? Bagaimanakah harus dijelaskan bahwa kekuasaan itu berlanjut sampai tahun 1942, ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan militer Jepang? Bukankah masa 350 tahun berarti bermula sejak kedatangan Cornelis de Houtman (1596) sampai dengan kejatuhan Hindia Belanda ke tangan militer Jepang? Seketika logika telah dipisahkan dari pemahaman dan pengetahuan sejarah maka di waktu itu pula realitas historis telah tertinggal. Tiba-tiba sejarah telah mengalami transformasi menjadi dongeng. Maka lupakan sajalah fakta sejarah bahwa bahkan setelah beberapa bulan setelah berada di Banten, Belanda ini telah diusir, meskipun kemudian beberapa orang anak kapal sempat juga menetap di pantai Utara Bali. Dan Bali dan Aceh, bahkan juga pedalaman Sulawesi Selatan baru jatuh ke tangan Belanda di awal abad 20. Apakah daerah-daerah ini tidak termasuk Indonesia?

Mitologisasi sejarah—ketika sebuah peristiwa dijadikan sebagai simbol dari suatu hasrat kultural dan bahkan, lebih sering, politik--adalah hal yang biasa. Jika sejarah adalah cacatan tentang sesuatu yang terjadi *di sana* di suatu waktu, maka mitos -sejarah adalah hal yang *ingin*

dirasakan dalam sistem kesadaran sebagai sesuatu yang riil dan aktual. Tidak satu bangsa pun yang terlepas dari kecenderungan menjadikan satu atau deretan peristiwa sejarah yang aktual sebagai simbol dari idealisme bersama. Mitologisasi sejarah malah biasa juga terjadi untuk dipakai sebagai alat peneguhan tekad agar hal dan peristiwa yang membayangkan kesamaan dengan sesuatu yang tak diinginkan seakan-akan tidak pernah terjadi. Tetapi pengingkaran sejarah—atau penisbian kepastian sejarah (*historical certainty*), demi keutuhan mitos, hanya berarti pembodohan. Berapa lamakah kita terbiasa mengejek diri sendiri sebagai “*inlander*” atau kata lain yang membayangkan subordinasi kultural, andaipun kata itu bukan lagi bersifat politik?

Sebagai hasil rekonstruksi dari berbagai ragam peristiwa dan kejadian yang dialami masyarakat, sejarah mungkin dapat juga menghasilkan kesimpulan yang memancarkan kearifan. Sejarah pun mungkin bisa juga mengisyaratkan tentang hal-hal yang sebaiknya dihindarkan. Bukankah sebuah kearifan lama – “*Belajar pada yang sudah, melihat tuah pada yang menang*” – mengajarkan tentang kearifan kesejarahan ini? Dengan melakukan perbandingan sejarah—ketika berbagai peristiwa yang terjadi di tempat dan waktu yang berlainan diperbandingkan—semacam kecenderungan umum dalam dinamika sejarah mungkin juga bisa dilukiskan. Bahkan sebenarnya bisa juga dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan teoretis dari berbagai cabang ilmu sosial bertolak dari pemahaman atas berbagai gejala dan peristiwa kesejarahan. Tetapi memang mitologisasi sejarah bisa juga membawa beberapa kemungkinan. Di samping memungkinkan bertambahnya keakraban dengan rasa-hayat kesejarahan yang *inspiring*, mitologisasi sejarah dapat juga menyembunyikan hasrat dominasi politik dan ekonomi dan bahkan juga keabsahan dari hegemoni wacana. Memang mitologisasi bisa mengaburkan realitas kesejarahan bahkan secara ekstrim.

Krisis politik dan sosial yang pernah menjangkiti kehidupan sosial-politik bangsa mungkin bisa dipakai sebagai contoh. Pada tanggal 30 September jalan 1 Oktober 1965 enam jenderal dan seorang perwira muda mati dibunuh oleh sebuah gerakan yang berusaha melancarkan *coup*. Ketika, beberapa hari kemudian, mereka dikuburkan dengan upacara kenegaraan yang semestinya, mereka pun disebut sebagai “pahlawan revolusi”. Aneh? Tetapi mengapa bukan harus demikian? Bukankah peristiwa pembunuhan ini terjadi ketika negara dan bangsa secara ideologis dikatakan sedang berada dalam suasana ‘*a summary of*

many revolutions in one generation”, sebagaimana Pemimpin Besar Revolusi menyebutnya dengan mengutip ucapan seorang ilmuwan asing? Bukankah mereka adalah para pembesar negara yang didengungkan sedang berada dalam suasana revolusi itu? Jadi keutuhan logika telah didapatkan pada sistem sosial-politik yang dianggap sebagai sesuatu syah secara konstitusional.

Penamaan itu dimungkinkan karena usaha *coup* yang telah menjatuhkan korban yang teramat mahal itu ternyata berhasil digagalkan. Beberapa jam setelah pembunuhan para perwira itu terjadi, usaha *coup*, yang dilancarkan oleh gerakan, yang kemudian disebut oleh rejim yang tampil sebagai pemegang kekuasaan, Gestapu/PKI, berhasil digagalkan. Maka peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober itupun disebut dan dikenang sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”. Keberhasilan menumpas usaha *coup* tidak dikatakan sebagai bukti akan keterampilan militer. Usaha terkutuk ini digagalkan karena sesuatu yang berada di luar realitas empirik. Maka “kesaktian Pancasila” pun dijadikan sebagai faktor penentu. Sang pelaksana berhasil mengatasi usaha *coup* karena ia merasa dirinya sebagai personifikasi dari sesuatu yang “sakti”, Pancasila. Ketika penamaan itu telah diberikan maka saat itu pula kekuasaan yang diraih diartikan sebagai sesuatu yang telah mendapatkan legitimasi historis.

Hanya saja kalau ingatan kesejarahan sempat dibangkitkan lagi maka terbentanglah serentetan peristiwa dari sejarah bangsa yang kini masih terasa pahit juga. Pembunuhan para jenderal dan penumpasan usaha *coup*—dua kejadian yang merupakan suatu kesatuan peristiwa—ternyata tidaklah sekedar kejadian yang mencapai klimaksnya ketika peralihan kekuasaan telah terjadi. Peristiwa pembunuhan di pagi buta itu membuka pintu bagi terjadinya tragedi kemanusiaan yang teramat dahsyat yang pernah dialami bangsa. Tragedi kemanusiaan ini mungkin terlupakan atau sengaja dilupakan bahkan diingkari selama bangsa berada di bawah kekuasaan negara yang serba menguasai. Tetapi ketika kekuasaan itu mengalami krisis dan bahkan berakhir maka seperti dengan tiba-tiba saja anak-bangsa pun tersadar betapa dendam telah menjadi bagian dari kehidupan kebangsaan. Rupanya mitologisasi sejarah yang dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman dan bahkan kesadaran sejarah tidak bisa meniadakan dendam. Mitologisasi sejarah hanya menyimpannya dalam sistem kesadaran dari sebagian anak bangsa untuk waktu yang terbatas saja.

Seandainya kasus-kasus seperti di atas diikuti, sebuah pertanyaanpun tertanyakan juga, “apakah sejarah hanyalah penyimpanan segala corak kebanggaan dan kemegahan di samping pemeliharaan berbagai jenis dendam sosial dan bahkan yang bersifat pribadi?” Tetapi sebelum pertanyaan ini dijawab kejernihan masalah sebaiknya didapatkan lebih dahulu. Pertama, para ahli sejarah tentu bisa saja berdebat tentang berbagai permasalahan keilmuan dan teori bahkan juga metodologi sejarah. Mereka pun bisa pula mempersoalkan atau bisa saja saling setuju tentang kesahihan sumber dan corak rekonstruksi dan dinamika peristiwa (“bagaimana terjadinya”), di samping kepastian terhadap jawab “apa, siapa, bila, dan di mana”. Bahkan bisa saja mereka tidak merasa perlu berdebat tentang “mengapa” peristiwa yang dikisahkan itu terjadi. Soalnya ialah harus diakui juga sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang hampir selalu berada dalam suasana perdebatan. Sejak masa Yunani Kuno, Thucydides, yang sadar akan perbedaan “sebab” dengan “alasan” tentang terjadinya peristiwa, mengajukan kritik terhadap cara pengisahan yang disampaikan Herodotus, sang “bapak Sejarah”, yang dianggapnya terlalu terlarut dalam suasana mitologis. Sampai sekarang pun perdebatan di kalangan sejarawan mengenai masalah sejarah sebagai sebuah cabang keilmuan yang ingin mendapatkan kebenaran dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, apalagi dalam renungan falsafah, masih berlanjut juga. Jangan – jangan yang kita dapatkan “bukanlah rekonstruksi masa lalu”, kata seorang teoretikus (Hayden White) tetapi “realitas literer”. Bukankah semua hal yang dikisahkan—tentang apapun juga— diungkapkan dalam rangkaian kata-kata dalam tatanan kalimat?

Tetapi sudahlah, sebab seketika masalah teori dilanjutkan kita telah memasuki wilayah permasalahan yang berbeda. Begitulah, setiap kali sejarah dibicarakan berarti usaha mengingat dan mengisahkan peristiwa yang pernah terjadi telah begitu saja menjadi suatu kemestian. Inilah dimensi kedua dari sejarah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan. Tanpa rekonstruksi peristiwa yang pernah terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu, sejarah telah tampil sebagai renungan filosofis saja. Karena itulah pada tahap ini sejarawan selalu menekankan pentingnya masalah “*how the story should be told*”, bagaimana kisah-sejarah harus dikisahkan, dan sibuk pula saling mengingatkan agar mendapatkan kisah yang sah dan benar. Jadi bisalah dipahami juga kalau kejengkelan akademis tidak terelakkan jika yang didapatkan hanyalah daftar kejadian saja. Contoh : “Pada tahun 1627 (*bila*), Sultan Agung (*siapa*) mengerahkan pasukan kesultanan Mataram untuk

menaklukkan (*apa*) Batavia (*di mana*)". Apakah ini sejarah? Jelas bukan, kalimat ini tidak lebih daripada kronikel alias daftar dari letupan peristiwa saja.

Setelah peristiwa masa lalu itu dikisahkan dan diterangkan-- bukan sekedar disajikan dalam bentuk daftar kejadian-- setiap orang bisa saja terlibat dalam kancah wacana kesejarahan. Apakah makna dari semua yang dikisahkan itu dalam kehidupan sosial (apapun mungkin aspek kemasyarakatan yang menjadi perhatian utama)? Kalau hal ini telah ditanyakan, meskipun hanya dalam hati saja, maka dimensi ketiga dari sejarah telah dimasuki. Kisah sejarah yang disampaikan itu sesungguhnya adalah pula sebuah *discourse*, sebuah wacana-- mengatakan sesuatu tentang "sesuatu". Ketika sejarah pembunuhan telah direkonstruksi, umpamanya, maka pesan akan kekejaman perbuatan itu telah ikut terbawa. Jadi bisalah dipahami juga kalau sebagai sebuah wacana, kisah kesejarahan ini bisa dan bahkan biasa juga memancing wacana tandingan. Kemungkinan ini mungkin saja terjadi meskipun tidak ada perselisihan tentang otentisitas dari unsur-unsur kronikel dari sejarah yang dikisahkan itu.

Bagi sejarawan sebenarnya *discourse* atau wacana intelektual itu telah dimulai ketika ia merencanakan dan melakukan penelitian tentang peristiwa yang terjadi di suatu tempat dalam masa tertentu. Mengapakah hal itu atau peristiwa ini bukannya yang lain yang ingin diteliti dan dikisahkannya? Mengapakah peristiwa "itu", bukannya peristiwa "lain" yang direkonstruksi sehingga menjadi kisah sejarah?" Jawab yang paling mungkin ialah karena ia ingin mengatakan "sesuatu" yang bisa disuarakan lewat penceritaan peristiwa itu.

Hanya saja seketika hasil karyanya telah diumumkan dan menjadi milik publik ia--sang sejarawan-- telah kehilangan monopoli dari sistem wacana. Orang lain mungkin memahami makna dari peristiwa yang dikisahkannya itu dengan cara pandang yang berbeda. Sang pembaca bisa saja melihat aspek yang tersembunyi di balik kisah sejarah itu. Ia malah bisa saja memberikan pemahaman yang berbeda dari apa yang sesungguhnya ingin dikatakan sang sejarawan. Karena itu dapatlah dipahami juga kalau tingkat *persuasiveness* dalam sistem wacana menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan seorang sejarawan.

Wacana atau boleh juga disebut diskursus, *discourse*, yang bertolak dari kenyataan sejarah empiris adalah landasan dari pemikiran dan pemahaman kesejarahan serta kesadaran sejarah. Pemahaman

sejarah dirumuskan ketika berbagai peristiwa dan kejadian dikaitkan dengan struktur sosial-ekonomi dan bahkan kultural serta wilayah tempat terjadinya. Bagaimanakah peristiwa itu atau kaitan berbagai peristiwa itu harus dipahami? Ketika peristiwa dari terjadinya pemogokan kaum buruh telah dicatat dan menjadi bagian sejarah, maka corak pemahaman kesejarahan berusaha memahami dinamika dari hubungan buruh dan majikan, tetapi ketika kisah perlawanan masyarakat dari sebuah desa terhadap sistem eksploitasi yang dijalankan oleh penguasa setempat telah direkonstruksi, maka pesan sejarah apakah yang bisa didapatkan? Maka mudahlah dipahami kalau wacana tentang betapa pentingnya keadilan sosial bisa tampil begitu saja. Pemahaman sejarah tidaklah berhenti pada pengetahuan tentang hal-hal empirik yang bisa dicatat, tetapi berlanjut juga pada usaha untuk mencari dan menemukan pesan yang berada di belakang kesemuanya.

Kalau saja pengetahuan akan peristiwa yang telah berlalu telah melahirkan pemahaman dengan dinamika sejarah maka kesadaran sejarah pun akan terbina juga. Dalam situasi ini rekonstruksi dari peristiwa sejarah bisa dirasakan sebagai mengatakan “*sesuatu tentang sesuatu*”. Ketika tewasnya seorang anak kecil dalam suatu serangan militer telah dikisahkan, bukankah terasa juga apa arti konflik bersenjata bagi kemanusiaan. Dalam sistem kesadaran maka peristiwa yang pernah terjadi dan telah direkam oleh catatan atau kisah sejarah itu tidak berhenti pada dirinya. Kesadaran sejarah bukan saja memungkinkan tumbuhnya berbagai corak perasaan – entah sedih, entah gembira, entah apa saja—tetapi bisa juga menjadi inspirasi atau bahkan aspirasi untuk memikirkan atau bahkan mengajak untuk melakukan sesuatu.

Ketika merenungkan perjalanan sejarah bangsa bukankah kadang-kadang timbul juga pertanyaan faktor apakah yang menyebabkan terbentuknya “bangsa Indonesia”? Bagaimanakah harus diterangkan pengetahuan sederhana tentang fakta empiris yang menyatakan bahwa ada sekian ratus suku-bangsa atau --mungkin lebih tepat-- sekian puluh pusat kekuasaan di bumi Nusantara ini dalam perjalanan waktu akhirnya menciptakan kesadaran akan kesatuan bangsa? Betapapun ujian akan keutuhan bangsa ini selalu saja menjadi bagian dari dinamika kehidupan bangsa, namun keutuhan kesadaran ini berhasil juga dipertahankan dan bahkan akhirnya berhasil menciptakan sebuah negara nasional. Jawab yang paling sederhana tentu harus dimulai dari realitas kesejarahan yang tercatat. Pertama, tentu saja, harus diakui juga betapa kolonialisme Belanda telah mengubah peta

dari wilayah Nusantara, yang juga telah mempunyai batas kewilayahan yang jelas, yaitu merangkul wilayah Hindia Belanda. Dalam peta baru ini pemerintah kolonial mendirikan kota-kota baru dan memperluas kota-kota lama dan bahkan tak jarang membuat jalan dan jembatan yang bisa menghubungkan kota-kota yang berada dalam satu pulau. Dalam perjalanan zaman kota-kota ini berhasil juga menjadi daya tarik – baik karena dorongan ekonomis yang dipancarkan kekuatan kolonial maupun disebabkan dorongan tradisional untuk mengharungi wilayah baru. Meskipun bercorak hirarkis yang kolonial, secara bertahap komunitas kota yang bersifat pluralistis terbentuk juga. Ketika kebudayaan- cetak telah mulai menyebar, hubungan tanpa tatap muka pun dimungkinkan untuk berjalan semakin intens. Hanya saja tentu bisa juga dicatat bahwa perubahan yang dibawa kolonialisme mungkin tidak berarti apa-apa jika saja situasi hubungan dagang dan kultural yang telah terjadi jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa dari dunia Barat tidak ikut memainkan peranan penting.

Dalam sejarah purbakala bisa dipelajari juga fakta betapa kesatuan-kesatuan etnis dan pusat-pusat kekuasaan di Nusantara telah lama juga terlibat dalam berbagai corak hubungan. Dari ingatan kolektif masyarakat lokal ataupun tradisi historiografi yang ditinggalkan oleh berbagai pusat kekuasaan lama tampaknya betapa ikatan kesejarahan dan mitologis tidak terlupakan. Di samping prasasti –prasasti yang ditemukan di beberapa daerah, naskah-naskah lama banyak juga meninggalkan kesaksian tentang hubungan yang tidak bersifat timbal balik ini. Hubungan dagang biasanya tidak pernah dengan begitu saja terhenti betapapun hambatan yang datang karena usaha ekspansi dan bahkan monopoli kekuatan asing telah mengancam. Tradisi *meubesan*—kawin mawin sesama keluarga kerajaan dari pusat kekuasaan yang berbeda-beda --adalah pula usaha yang biasa dilakukan untuk mengatasi hubungan antar-kekuasaan tradisional yang tak pernah stabil. Tetapi lebih penting lagi ialah adanya hubungan kebudayaan yang sambung bersambung. Bagaimanakah harus diterangkan fakta sederhana betapa sekian banyak daerah yang tidak berbahasa Melayu, tetapi meninggalkan naskah-naskah yang bernuansa kesejarahan ataupun keagamaan yang ditulis dalam bahasa Melayu?

Sejak abad akhir abad 15 atau awal 16-- zaman yang dikenang dalam tradisi Jawa sebagai saat ketika *Sirna ilang krta ning bhumi* terjadi. Inilah ungkapan yang melambangkan jatuhnya Majapahit. Ketika kerajaan ini jatuh sebuah lapisan baru kebudayaan telah mulai

menyebar. Islam telah menjadi bagian dari dinamika sejarah Jawa. Maka lembaran sejarah pun bisa berkisah bahwa di samping hubungan dagang, penyebaran Islam dari satu daerah ke daerah lain telah semakin lancar dan bahkan ada kalanya seperti sambung- bersambung. Para mubaligh yang berasal dari satu daerah mulai asyik menyebarkan pengaruh Islam ke daerah-daerah lain. Ada daerah yang mencatat peristiwa ini dalam naskah-naskah, yang boleh disebut sebagai historiografi tradisional, tetapi banyak juga yang merekam dalam ingatan kolektif sebagai tradisi lisan, yang diwariskan turun temurun.

Apakah arti kesemua pengetahuan dari rekaman yang diambil dari *networks of collective memories*, jaringan ingatan kolektif, dari komunitas-komunitas lokal, ketika kesamaan pengalaman di bawah kolonialisme diketahui dan dirasakan? Sekian banyak contoh bisa diajukan. Namun yang jelas, andaikan tidak kesemuanya, bagian yang terekam dalam struktur ingatan memperlihatkan betapa pengalaman masa kini bukan saja sekadar memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang masa lalu dari daerah-daerah lain tetapi juga membentuk suatu corak kesadaran sejarah. Seandainya berbagai kisah perlawanan terhadap penetrasi kolonialisme di berbagai daerah sempat dibaca dan dipahami apa pulakah reaksi psikologis yang datang memasuki kesadaran? Maka mestikah diherankan kalau Snouck Hurgronje dalam penyamarannya sebagai seorang Islam di Mekah menemukan bahwa para jemaah atau pemukim yang berasal kepulauan Nusantara menyatakan simpati mereka pada perlawanan Aceh menghadapi usaha penetrasi kekuasaan Belanda di peralihan abad 19 ke abad 20?

Begitulah, jika kaji diulang lagi, seandainya tidak diketahui bahwa tulisan Bung Hatta (1928), *Indonesia vrij—Indonesia Merdeka*—adalah sebuah kesaksian politik dan pembelaan hukum, pidato-pleidoi—nya ini bisa saja dianggap sebagai sebuah testimoni sejarah. Bukankah pidato ini *berkisah tentang realitas sejarah* dan kemudian memberi tafsiran atau *interpretasi tentang pengalaman kesejarahan*. Bertolak dari tafsiran tentang pengalaman kesejarahan inilah makna dari dinamika sejarah bisa didapatkan. Kalau pengetahuan telah didapatkan dan tafsiran telah pula diberikan maka mestikah diherankan kalau sang pejuang kemerdekaan dengan berani meramalkan, bahkan—lebih tepat ingin menentukan-- *arah perjalanan sejarah*? Pidato yang menghantam kolonialisme dan membela tumbuhnya perasaan nasionalisme di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pemuda terpelajar Indonesia,

bisa juga dilihat sebagai sebuah *historical discourse*. Demikian juga halnya dengan pidato pembelaan, *pleidooi* Bung Karno, *Indonesie klaagt aan, Indonesia Menggugat* (1930). Pidato pembelaan tokoh nasionalis terkemuka ini berkisah juga—meskipun dengan memetik penemuan ilmuwan asing—tentang kemelaratan rakyat karena dihisap oleh kolonialisme yang kapitalistik.

Kedua pidato-pembelaan itu bukan saja menggugat keabsyahan moral dari kolonialisme, tetapi juga menyatakan keabsahan historis dari pergerakan nasionalisme Indonesia. Tidak kurang pentingnya kedua buku pembelaan ini, seperti juga berbagai karya lain yang ditulis oleh para pentolan pergerakan kebangsaan, menyampaikan *visi masa depan bangsa*.

Pemahaman atau bahkan usaha untuk mendapatkan *realitas empiris kesejarahan*—“apakah yang terjadi di mana dan bila”—adalah awal yang tak bisa dihindarkan. Karena berdasarkan pengetahuan inilah pemahaman tentang realitas masa kini lebih mungkin dipahami. Berdasarkan pemahaman akan corak dinamika kesejarahan yang telah dilalui itulah persepsi masa depan lebih mungkin bisa dirumuskan. Kalau telah begini mestikah diherankan jika para pendekar kemerdekaan bangsa bisa saja berbicara tentang “panggilan sejarah” dalam mendayung biduk perjuangan ke arah kemerdekaan bangsa?

Seorang sejarawan—atau siapapun juga—kalau mau tentu bisa saja mempelajari sejarah dunia di sepanjang zaman. Atau, lebih mungkin, ia ingin berkonsentrasi pada semua aspek kesejarahan dari setiap periode dari mata-rantai sejarah Indonesia—dari Sabang sampai Merauke. Hanya saja jika kedalaman pemahaman sejarah yang hendak dicapai pilihan fokus utama harus dilakukan. Bukan saja tentang wilayah dan zaman bahkan juga tema-tema kesejarahan tertentu dari zaman dan wilayah yang tertentu pula. Sedangkan pemupukan kesadaran sejarah memerlukan strategi pendidikan kesejarahan yang kreatif and inspiratif. Karena itu bolehlah dikatakan betapa kealpaan paedagogis telah terjadi kalau sejarah hanya diperlakukan sebagai kronikel – daftar kejadian dan nama-nama tokoh—apalagi kalau pelajaran sejarah dengan jelas telah memperlihatkan kecenderungan wacana yang hegemonik—menyuarakan hasrat sang pemegang kekuasaan. Masalahnya ialah kesadaran sejarah yang inspiratif hanya bisa dipupuk dengan pilihan peristiwa dan kejadian sejarah objektif tetapi menyampaikan kisah yang bersifat integratif—memperkuat kesatuan bangsa -- dan inspiratif dalam kegairahan menuju masa depan

yang mendekati idaman bangsa. Jadi semestinyalah pula pelajaran sejarah merupakan bagian dari usaha melaksanakan salah satu pesan dari Pembukaan UUD—“mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kenyataan empiris, pemahaman sejarah dan panggilan kesejarahan

Ketika para mahasiswa yang datang dari “tanah Hindia (Belanda)”, mengganti nama organisasi mereka, *Indische Vereeniging*, menjadi nama yang telah memperlihatkan kecenderungan ideologis, *Indonesische Vereeniging*, sebuah pertanda yang semakin jelas atas rasa keterlibatan dalam pergerakan kebangsaan telah menaik. Pertanda ini menjadi lebih jelas juga ketika nama yang masih memakai bahasa Belanda diganti dengan nama yang memakai bahasa Indonesia. Organisasi mahasiswa di negeri asing itu—di negeri Belanda—diubah menjadi *Perhimpunan Indonesia* (1925). Kecenderungan ideologis pun dengan jelas diperlihatkan ketika dalam waktu yang bersamaan nama majalah organisasi diganti dari *Hindia Poetra* (1923) menjadi *Indonesia Merdeka* (1924) dan sebuah semboyan diperkenalkan -- *Indonesie Vrij Nu*. Semakin jelaslah bahwa mereka—para mahasiswa yang belajar di “negeri pertuanan” (*in het land van de overheerser*) itu --secara terang-terangan telah melibatkan diri dalam pergerakan politik kebangsaan. Mereka – setidaknya sebagian dari mereka yang mempunyai perhatian pada dunia jurnalistik-- secara teratur mengirim tulisan-tulisan yang memancarkan semangat nasionalisme ke surat-surat kabar yang terbit di tanah air, negeri yang secara resmi masih disebut *Nederlandsch Indie*. Mereka malah semakin memancarkan sinar kepemimpinan dalam pemikiran kebangsaan. Apalagi mereka—terutama pimpinan organisasi— juga melibatkan diri dalam kegiatan anti-kolonialisme yang bersifat internasional. Dengan kegiatan yang semakin meningkat dan kecenderungan ideologis yang semakin radikal ini mestikah diherankan kalau para mantan pejabat kolonial yang kini telah aktif kembali di kampung halaman mereka, di negeri Belanda, menjadi semakin resah saja. Akhirnya pimpinan *Perhimpunan Indonesia* (P.I.), Mohammad Hatta, sang ketua, dan tiga orang kawannya (1927) ditangkap. Mereka dituduh mengadakan persekongkolan untuk mempersiapkan pembangkangan.

Begitulah, enam bulan setelah ditangkap Hatta dan kawan-kawannya dihadapkan ke muka pengadilan Den Haag (Maret 1928). Seketika Hatta, mahasiswa ekonomi dari Rotterdam ini, membacakan pidato pembelaannya dengan judul yang sangat sederhana tetapi teramat menantang, *Indonesia Vrij*, sebuah klassik dalam sejarah

pergerakan kebangsaan Indonesia telah pula dihasilkan¹. Mahasiswa yang baru berumur 26 tahun tetapi telah dianggap sebagai seorang tokoh pergerakan nasional ini memulai pidatonya dengan uraian singkat tentang betapa anak-anak sekolah menengah di Indonesia—negeri yang secara resmi masih disebut “Hindia Belanda”—telah aktif dalam berbagai corak kegiatan politik. Sejak menginjak sekolah menengah pertama (MULO) mereka telah ikut organisasi kepemudaan yang memperlihatkan kecenderungan nasionalisme. Berbeda halnya dengan anak-anak Eropa seusia mereka. Anak-anak Eropa telah mulai sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. “Dalam masyarakat kolonial”, kata sang pesakitan yang telah pula umum diakui di tanah airnya sebagai salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan,

”anak muda dengan cepat belajar realitas yang keras. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kesengsaraan dan kemiskinan massa yang terinjak-injak; betapa mereka mula-mula menerima nasib dan betapa selama puluhan tahun secara pasif menanggung siksaan dari sistem yang membawa kematian. Mereka merasakan dan memahami kesengsaraan dan penderitaan rakyat mereka”.

Pada hal mereka, kata pemimpin muda yang kemudian dikenal dengan panggilan keakraban, Bung Hatta, “berasal dari pejabat kelas atas atau keluarga pribumi yang kaya”. Anak-anak muda kalangan atas ini harus “memilih apakah meniru orang tua mereka dalam kehidupan yang rutin, dengan senang hati dan penuh kepatuhan mengikuti secara membabi buta segala perintah dari atas, menghindari dari segala corak idealisme dan hanya berfikir tentang karir dan cara untuk mendapatkan kepuasan.”

Setelah menyampaikan observasi atas realitas historis ini Hatta pun sampai juga pada interpretasi tentang mengapa ketimpangan generasi ini bisa terjadi, bahkan di kalangan atas masyarakat pribumi sekalipun. “Inilah ironi dari masyarakat kolonial”, katanya. “Masyarakat ini bahkan dikecam oleh mereka yang dilahirkan di kalangan pejabat.” Tetapi mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah mereka tidak mempunyai rasa terima kasih? “Sama sekali bukan demikian”, kata Hatta. “Kesadaran nasional berbicara lebih keras dari suara darah (keturunan).” Kalau telah begini maka tampaklah betapa “dalam cita-nasional segala motif dan pertimbangan yang bersifat pribadi harus tersingkir”. Hanyalah dalam masyarakat kolonial ketimpangan yang seperti ini bisa terjadi. Tidak ada dilema seperti ini, kata Hatta, di negeri yang merdeka, karena “di sini perbedaan pandangan bisa diungkapkan sejujur mungkin”. Anak-anak jajahan mempelajari juga pengalaman

sejarah negara –negara merdeka di Eropa dan bahkan sejarah Eropa umumnya. Mereka mempelajari juga pergolakan nasional dan perjuangan para pahlawan yang dibangga-banggakan bangsa-bangsa di Eropa. Sebaliknya dalam sejarah tanah air mereka sendiri “setiap perlawanan terhadap penetrasi orang kulit putih dicap sebagai pemberontakan dan revolusi”. Anak-anak Indonesia harus seperti “beo mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan mereka, seperti Diponegoro, Tuanku Imam, Teuku Umar dan banyak yang lain adalah pemberontak, pembangkang, teroris dan sebagainya. Pada hal mereka adalah pahlawan nasional, seperti halnya dengan Willem van Oranje, William Tell, Mazzini, Garibaldi, dan lain-lain, yang harus kami hormati”.²

Begitulah dari pidato ini tampak bahwa Hatta lebih dulu mulai dengan *observasi* atas realitas kekinian dan kemudian diikuti oleh *interpretasi* kesejarahan – “mengapa realitas kekinian seperti itu bisa terjadi?”. Apakah yang menyebabkan anak muda terpelajar dan berasal dari kalangan atas masyarakat pribumi terlibat dalam pergerakan nasionalisme? Maka iapun memberi *jawab teoretis* yang disampaikannya ialah betapa ketimpangan logika dari masyarakat kolonial bisa menjadi akar dari tumbuhnya semangat nasionalisme. Setelah datang dan belajar di Eropa mereka semakin sadar juga apa arti perasaan kemerdekaan. Di Eropa mereka terbebas dari kesempitan dari suasana masyarakat kolonial yang menyesak dada. Hal inilah yang memperkuat kesadaran mereka untuk tampil sebagai pemimpin di masa depan. Mereka pun mulai mempersiapkan diri demi tugas di masa depan.

Hatta membantah pendapat sebuah surat kabar Belanda yang mengatakan bahwa mereka, para mahasiswa Indonesia, terlibat politik karena mereka telah terputus dari masyarakat sendiri. “Tidak Yang Mulia, ini bukanlah sebab yang sesungguhnya. Yang benar ialah kami telah terbebas dari jebakan kolonial dan karena itu telah mendapatkan kepercayaan diri sendiri. Dari sini kami bisa melihat dengan jelas *kolonialisme* yang sesungguhnya. Pengetahuan inilah yang menjadi landasan perjuangan kami”. Menjelang akhir pidatonya Hatta pun membuat kesimpulan.

“Ini (kemerdekaan) adalah hukum besi sejarah. Hanya situasi cara bagaimana gerakan kemerdekaan itu berkembang tergantung pada penguasa. Merekalah yang menentukan apakah kemerdekaan itu didapatkan dengan darah dan air mata atau secara damai”

Sepenggal kutipan dari salah satu karya klasik dalam sejarah modern Indonesia ini memperlihatkan betapa sang penulis

mengungkapkan tiga fase dalam rekonstruksi kesejarahannya. Pertama, seperti telah disinggung sepintas lalu, ia menyampaikan observasi yang berpihak atas realitas sosial-politik. Ia berkisah tentang betapa anak-anak muda yang masih menginjak sekolah menengah telah tertarik pada aktivitas yang bernuansa politik. Kedua, iapun memberi jawaban spekulatif tentang mengapa kenyataan ini bisa terjadi. Dan akhirnya, ketiga, akibat dari aktivitas politik ini maka terumuskanlah apa yang boleh dianggap sebagai “panggilan sejarah”. Berdasarkan alur pemikiran ini dapatlah dikatakan bahwa lahirnya pergerakan nasionalisme Indonesia adalah akibat dari pemahaman tentang pergumulan dan pengalaman kesejarahannya yang telah dan masih terjadi.

Begitulah halaman-halaman pertama dari pidato pembelaan Bung Hatta yang disampaikan di pengadilan Den Haag ini memperlihatkan dengan ringkas tahap-tahap ke arah terumuskannya sikap dan pemikiran politik. Dari contoh singkat ini tampaklah bahwa lain dari pada *filosofat*, suatu disiplin keilmuan yang ingin mencari dan menemukan “kebenaran yang hakiki dari realitas yang multi-kompleks”, *sejarah pemikiran* bertolak dari kesadaran dan pemahaman terhadap realitas kemasyarakatan yang empiris dan yang bisa diamati. Maka jawab atas pertanyaan tentang arah perkembangan tatanan sosial, bahkan juga politik, yang dianggap sebagai pemecahan dari permasalahan yang dipancarkan realitas, bertolak dari pemahaman ini. Pidato pembelaan Bung Hatta, seperti juga halnya dengan pidato pembelaan Bung Karno, *Indonesia Menggugat*, di hadapan pengadilan kolonial di Bandung (1931) memang dengan tertib mengikuti tahap-tahap dari proses pemikiran ini –mulai dari pengamatan atas realitas empiris (meskipun dengan mengutip buku-buku hasil studi ilmuwan asing) kemudian interpretasi terhadap hasil pengamatan itu dan akhirnya pemecahan permasalahan. Hanya saja pemecahan atas ketimpangan situasi itu tidak lain daripada terwujudnya kemerdekaan bangsa.

Kedua pidato pembelaan itu diucapkan ketika perumusan dari tujuan pergerakan kebangsaan Indonesia telah berada pada tahap yang matang. Kemerdekaan sebagai tujuan pergerakan kebangsaan telah semakin menjadi wacana yang biasa. Lebih daripada itu perdebatan dalam strategi perjuangan pun bukan lagi sekadar diperdebatkan tetapi telah pula diwujudkan dalam pilihan perilaku politik. Apakah tujuan ke arah tercapainya kemerdekaan bangsa sudah harus sejak waktu ini diwujudkan sistem perilaku yang pasti? Apakah untuk mencapai tujuan ini harus diperlihatkan dalam penolakan kerjasama dengan kekuasaan kolonialisme -- sebagaimana yang disuarakan golongan non-kooperator?

Ataukah strategi bekerja sama dengan kekuasaan kolonial perlu dijalankan dengan harapan secara bertahap kemerdekaan bisa dicapai -- seperti yang dijalankan golongan ko-operator? Lebih daripada perdebatan strategi perjuangan di masa Bung Hatta menyampaikan pidatonya pergerakan kebangsaan Indonesia telah memasuki masa pertarungan ideologi.

Tetapi kalau akar sejarah pemikiran politik kebangsaan ditelaah, maka tampaklah bahwa *pemecahan masalah*, bukannya penghamparan realitas empiris dan bahkan juga tidak pemahaman atas realitas empiris, yang lebih dulu tampil ke dalam wilayah publik. Ketika majalah *Insulinde* (1901-1904) yang terbit di kota Padang, mempropagandakan tentang betapa pentingnya masyarakat didera oleh semangat "*kemajuan*" untuk memasuki "*dunia maju*", majalah ini tidak memerlukan argumen yang bertolak dari realitas empiris. Seruan "*kemajuan*" telah langsung sampai ke jantung pemecahan masalah. Realitas empiris rupanya sudah terlalu jelas. Tanpa harus dikatakan realitas yang tak terbantahkan itu telah berada di hadapan mata. Realitas yang tidak dikatakan ialah "Kompenie" adalah pemenang dan penguasa negeri "kita" dan kompeni memperlihatkan bahwa kekuasaan ini adalah bagian dari "negeri maju". Jika realitas kehidupan "kita" dibanding dengan dunia luar, seperti Eropa dan juga Jepang, jelaslah "kita" kalah dan tampak pula terbelakang. "Kita" tidak atau belum menjadi bagian dari "dunia maju".

Dalam suasana keinginan untuk memberikan pemecahan terhadap realitas empiris yang tidak perlu lagi dikatakan ini pulalah Abdul Rivai dalam tulisan-tulisannya yang dimuat dalam *Warta Hindia* -- majalah yang terbit di negeri Belanda di awal abad 20--memperkenalkan berbagai istilah yang bernada sosiologis tetapi sesungguhnya mengajak "bangsa Hindia" (istilah yang dipakainya) untuk memasuki dunia baru. Dalam tulisan-tulisannya Rivai, yang sedang memperdalam ilmu kedokteran sambil bekerja sebagai redaksi majalah, berusaha membangkitkan kesadaran akan keharusan historis untuk memasuki "dunia maju". Untuk keperluan itu, katanya, "bangsa Hindia" harus mendirikan perkumpulan "kaum muda". Tetapi ia memperingatkan juga jika "bangsa Hindia telah mencapai kemajuan mereka harus tetap bangsa Hindia". Ketika seruan Rivai akan perlunya mendirikan perkumpulan ditanggapi secara positif oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo dalam tulisannya dalam surat kabar berbahasa Jawa, *Retno Dhumilah*, iapun menganjurkan agar "kaum muda" Jawa mendirikan perkumpulan. Kalau sekiranya tidak tahu caranya, katanya, "tanyakanlah pada dokter Rivai".³

Pendekatan wacana dan pemikiran yang langsung pada pemecahan masalah tanpa merasa perlu memberi argumen berdasarkan realitas empiris boleh dikatakan suatu kecenderungan yang dominan. Ketika kehidupan kota yang bersifat pluralistik dan hirarkis yang berdasarkan ras telah memancarkan suasana baru hasrat untuk menjadi bagian yang menguntungkan dari suasana itu bisa terasa menantang juga. Apalagi dalam suasana yang telah melampaui keterikatan pada masyarakat tradisional dan mulai memasuki zaman kebudayaan-cetak. Ketika zaman ini telah dimasuki berita dan informasi tentang negeri lain telah bisa diketahui dari kejauhan bahkan pemikiran baru bisa didapatkan tanpa harus mendengar langsung dari si pembicara.

Secara simbolik tahun 1912 boleh dianggap sebagai saat ketika perubahan dari alur pemikiran yang bertolak dari pemecahan terhadap realitas empiris yang tidak dikatakan itu. Perubahan dalam irama pemikiran 'anak Hindia' yang mengimpikan "kemajuan"—suatu nada pemikiran yang kemudian (di tahun 1930-an) dituduh dokter Amir, bekas ketua *Jong Sumatranen Bond*, sebagai "membeo" kebudayaan Barat—terjadi ketika Suwardi Suryaningrat menanggapi dengan sinisme yang tajam kebanggaan historis Belanda, yang berhasil "100 tahun yang lalu" mengusir kekuasaan Prancis (Napoleon). "Jika saya seorang Belanda", katanya "saya tidak akan merayakan kemerdekaan bangsa saya di tengah-tengah rakyat jajahan". Tetapi ketika "*Als ik eens Nederlander was*" "dilansir dalam terjemahan bahasa Melayu, seakan-akan tiba-tiba saja hakikat dari realitas kolonialisme telah terpampang begitu saja. Siapakah yang bisa disalahkan kalau dalam harapan memasuki "dunia maju" itu ingatan akan perlawanan melawan kolonialisme bisa muncul juga? Maka Suwardi pun disingkirkan, meskipun ia dibolehkan memilih negeri Belanda. Tetapi sementara itu romantisme "kemajuan" telah mengalami perubahan yang drastis juga.

Bukanlah suatu kebetulan jika ketika fakta kehidupan yang berada di bawah kolonialisme yang diperlihatkan, meskipun hanya dalam bentuk sindiran ("jika saya seorang Belanda"), keinginan untuk merumuskan siapa "kita" yang sesungguhnya mulai pula dilakukan. Siapakah "bangsa Hindia" itu? Kata ini hanya diucapkan dan tampaknya ditujukan bagi penduduk kota, yang telah berada dalam suasana kebudayaan cetak. Siapakah "bangsa Hindia" itu sebagai suatu kesatuan sosial yang merasa telah terlepas dari ikatan tradisional? Ketika inilah realitas empiris baru ini dirumuskan. *Indische Partij* (1912) pun tampil dengan memudahkan masalahnya. Dengan tegas partai ini membedakan *trekkers*, yang mundur mandiri dari Hindia ke negeri lain, dengan *blijvers*, sang penetap yang bisa dianggap sebagai "bangsa" dari

kepulauan ini. Tetapi apa artinya? Apakah hanya “para pejabat Belanda” yang bertugas “di tanah Hindia” saja yang bukan bagian dari “bangsa Hindia”? Maka *Sarekat Islam*, organisasi yang berdiri tanpa ideologi politik tetapi dengan jelas menyatakan identitas diri—“Islam”. Dalam proses selanjutnya pencarian nama dari komunitas yang terasa telah semakin memperlihatkan kediriannya pun dilanjutkan.

Proses pencarian ini dilakukan para terpelajar sampai akhirnya kata yang berasal dari konsep geografis dan antropologis dijadikan sebagai nama dan simbol dari komunitas baru—komunitas yang telah mengatasi ikatan tradisional—“Indonesia”. Ketika nama baru ini telah dijadikan simbol perjuangan, maka pergumulan ideologis tentang bentuk dan masa depan komunitas baru, yang disebut “*bangsa*” ini pun bermula pula, tetapi dengan begini ternyata pula bahwa “*bangsa*” bukanlah sesuatu yang diwarisi dari nenek moyang. “*Bangsa*” adalah hasil imajinasi yang kreatif ketika berbagai realitas baru telah tampil menantang dan di saat ingatan kepada kelampauan dirasakan sebagai sumber inspirasi dalam melangkah ke depan. Setelah kehadiran “*bangsa*” telah ditanamkan dalam sistem kesadaran berbagai asumsi filosofis atau bahkan politik tentang eksistensi “*bangsa*” mulai pula diperdebatkan. Maka perdebatan tentang apa yang dianggap sebagai makna sesungguhnya dari konsep “Nasionalisme” bermula. Mestikah diherankan kalau pergerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa Eropa dan Asia menjadi bahan pelajaran dan perbandingan?

Sejak *Sarekat Islam* berhasil menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menimbulkan kesadaran baru dan bahkan meningkatkan rasa –percaya diri baru di kalangan masyarakat semakin intens juga ketika itu pula perdebatan ideologis bermula. Pergolakan internal S.I ini sangat dimungkinkan karena menurut ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial organisasi ini tidak bisa mempunyai cabang-cabang. Setiap apa yang disebut “cabang” itu dimungkinkan mendapatkan *rechtspersoon*. Maka secara hukum cabang itu praktis telah merupakan organisasi yang mandiri. Begitulah, ketika S.I.- Semarang telah mulai bermain dengan cita-cita sosialisme, yang bersifat internasional, karena pengaruh tokoh sosialis Belanda yang berdiam di Semarang, *Centraal S.I.* yang tidak mempunyai hak untuk menguasai cabang-cabangnya, memulai usaha “ideologisasi Islam”. Bagaimanakah ajaran dari sebuah agama direnungkan dan dirumuskan sebagai sebuah ideologi yang langsung berhadapan dengan corak ideologi-ideologi yang lain? Dalam suasana inilah para pemikir Islam merenungkan dan menanggapi kemunculan berbagai corak pemahaman, strategi perjuangan dan bahkan cita-cita politik yang diajukan oleh partai dan

organisasi lain. Bagaimanakah Islam, sebuah agama universal, menanggapi berbagai corak pemikiran politik yang muncul dalam sebuah bangsa, yang baru diciptakan dalam imajinasasi sejarah tetapi diperjuangkan dalam ikatan kolonialisme?

Sejak itu setahap demi setahap berbagai corak ideologi yang ingin dijadikan landasan dalam usaha mencapai masa depan semakin banyak bermunculan. Bahkan ketika ini pula “nasionalisme kedaerahan”, yang dinamakan Bung Hatta sebagai “*cultureel nationalisme*”, merumuskan makna ideologis dari kehadiran dirinya. Pada tahun 1920 Budi Utomo mengadakan “Kongres Nasionalisme Jawa, yang tentu saja ingin menghidupkan kebudayaan dan etika sosial “Kejawaan” dalam konteks masyarakat modern. Maka bolehlah dikatakan bahwa sejak akhir tahun 1910-an dan terutama sejak awal tahun 1920-an sampai dengan awal tahun 1930-an, sebagai “*a decade of ideologies*” dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana persaingan ideologi inilah Bung Karno menulis esei panjang yang berjudul “Nasionalisme, Islam dan Marxisme” (1926), yang menganjurkan persatuan dari pengikut ketiga ideologi dalam usaha mencapai kemerdekaan bangsa.

Ketika “dasawarsa ideologi” telah dimasuki tahap –tahap dalam alur pemikiran, seperti yang dengan jelas diperlihatkan Bung Hatta dalam pidato pembelaannya, *Indonesia Vrij*, telah mulai mengabur. Keputusan akhir mendahului segala argumen yang menjadi dasarnya. Argumen tentang keabsahan historis dari keputusan historis yang dibuat Kongres Pemuda II (Oktober 1928), yang kini dikenal sebagai “Sumpah Pemuda” adalah hasil studi yang menyusul sedikit demi sedikit kemudian. Seketika tekad akan kesatuan bangsa dan tanah air dinyatakan serta ikatan kebahasaan diucapkan maka rasa kebebasan dalam perumusan simbol-simbol ideologis terbuka begitu saja. Bukankah idiom utama telah diakui bersama? Ketika ini pula berbagai slogan sosial dan politik dipakai sebagai simbol dari ideologi yang diperjuangkan.

Kalau *sama rata, sama rasa*, yang pernah diperkenalkan Mas Marco ketika kesadaran politik baru mulai tumbuh, bahkan juga “marhaenisme” yang disuarakan Bung Karno lebih bernada kesamaan sosial, maka seruan “*Indonesia Merdeka, Islam Mulia*”, yang diperkenalkan PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia). Partai yang sangat berpengaruh di Sumatra Barat dan Tapanuli Selatan di awal tahun 1930-an ini ingin menjembatani perdebatan Islam dan nasionalisme dengan memperkenalkan ideologi “Islam dan Kebangsaan”.

Tetapi memang sejak pertengahan 1930-an atau lebih tepat 1933 perdebatan ideologis praktis telah terhenti. Ketika itu para ideolog dan pemimpin partai yang dianggap radikal telah diasingkan. Kalau di pertengahan 1920-an tokoh komunis, yang dicurigai akan berontak—dan memang kemudian terjadi di tahun 1926 (di Banten) dan 1927 (di Silungkang, Sumatra Barat)—telah lebih dulu dibuang ke Digul, maka pada tahun 1933 tokoh-tokoh utama dari partai yang menjalankan taktik non-kooperator ditangkap dan diasingkan. Sukarno ke Flores dan kemudian ke Bengkulu, Hatta dan Sjahrir dan kawan-kawan sesama pimpinan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) ke Digul. Tetapi kemudian—konon karena protest para intelektual Belanda yang tidak bisa menerima cendekiawan didikan Belanda dibuang ke tempat yang dianggap sedemikian merendahkan-- Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda-Neira. Dalam pengasingan ini mereka tetap menjalankan aktivitas sebagai intelektual – Hatta menulis buku filsafat Yunani, Sjahrir menulis untuk *Poedjangga Baroe* dan Sukarno sibuk mempelajari pemikiran Islam dan mulai merenungkan ideologi bahkan landasan kenegaraan yang mungkin bisa merangkul semua—tetapi sementara itu perdebatan ideologis memberi kesan seakan-akan telah terlepas dari ikatan kepartaian.

Begitulah sejak diperlakukannya politik *rust en orde* dengan keras dan bahkan boleh dikatakan konsisten juga, corak wacana pun berubah, meskipun rasa kebangsaan tetap dipupuk dan hasrat kemerdekaan tak dibiarkan mati. Dalam suasana inilah para nasionalis yang telah melibatkan diri dalam dunia pendidikan mengecam betapa sistem pendidikan yang diperkenalkan Belanda, yang dikatakan menekankan “materialisme, individualisme, rasionalisme, intelektualisme” telah menjauhkan generasi muda dari landasan kebudayaan mereka sendiri. Tetapi seketika kritik pedas yang dihasilkan Kongres Pendidikan ini dilontarkan ke khalayak ramai berbagai macam reaksi pun datang. Maka di tengah kegersangan yang dirasakan dalam wilayah politik pergerakan kebangsaan apa yang kini dikenal sebagai “Polemik Kebudayaan” bisa juga mewarnai kehidupan intelektual bangsa. Bertolak dari keharusan perlunya “semboyan yang tegas” dan didasari oleh landasan akademis yang menyatakan bahwa “masa pra-Indonesia telah mati semati-matinya”, seorang pengarang dan penyair muda –usia, Sutan Takdir Alisyahbana tampil dengan mengingkari realitas persambungan sejarah. Kini Indonesia telah lahir dan bangsa baru ini harus menciptakan dunianya yang baru pula. Dengan semangat polemik yang menyala-nyala ia dengan tegas ingin menciptakan Indonesia yang telah diperkaya oleh nilai-nilai esensial dari dunia Barat—dunia peradaban yang telah menampilkan diri sebagai pemenang.

Jika direnungkan kembali terasa juga bahwa di saat “polemik kebudayaan” itu terjadi di waktu itu pula sesungguhnya pemahaman historis tentang makna dari kehadiran “bangsa baru”, yang dinamakan “Indonesia” ini diperdebatkan. Apakah Indonesia adalah sebuah bangsa yang “telah jadi” (*in the state of being*) ataukah sesungguhnya masih dalam “tahap pembentukan” (*the state of becoming?*) Terlepas dari keyakinan akademisnya yang sesungguhnya, ketika Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan “masa prae Indonesia telah mati semati-matinya” ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia menempatkan dirinya sebagai sebuah bangsa yang sedang berada dalam proses *nation building*. Inilah bangsa yang telah berada pada tahap perjuangan ketika corak dan landasan kehidupan dan corak kebudayaan bangsa harus ditentukan. “Indonesia” adalah sebuah realitas yang telah selesai. Karena itulah bangsa yang telah diciptakan ini harus meletakkan landasan bagi terjadinya proses modernisasi yang bisa diandalkan dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain.

Tetapi bagi para penentanganya Indonesia adalah sebuah bangsa yang masih berada dalam proses *nation formation*, ketika segala sumber-sumber yang bermanfaat dari tradisi dan kenangan sejarah daerah-daerah harus dipakai dan dijadikan sebagai milik bersama. Inilah Indonesia yang masih memerlukan berlangsungnya berbagai corak *process of inclusion* timbal balik—ketika unsur-unsur integratif dari berbagai daerah dan kebanggaan etnis dijadikan sebagai milik bersama. Mestikah diherankan kalau lontaran-lontaran pemikiran yang terlempar dalam “polemik kebudayaan” ini sampai kini masih *relevant*.

Sementara itu dunia sastra mulai pula menginjak zaman baru. Dengan corak dan gaya yang berbeda-beda, sejak awal pertumbuhan di zaman modern puisi asyik dengan nyanyian cinta tanah air—mula-mula “Andalas ku, sayang” kemudian “Indonesia”. Sedangkan prosa, terutama yang diwujudkan dalam bentuk novel, mengambil *romantic love* yang bersifat pilihan pribadi sebagai simbol dari sikap kritis terhadap konservatisme adat tradisional. *Romantic love* adalah pula simbol dari keinginan melangkah untuk memasuki dunia baru, yang “maju dan modern”. Tetapi ketika perkembangan nasionalisme telah semakin meluas dan di saat kesadaran sosiologis tentang modernitas telah semakin mendalam juga, pertanyaan “ke mana arah kebudayaan” tidak selamanya terhindarkan. Novel *Belenggu*, ciptaan Armijn Pane, yang diterbitkan menjelang kejatuhan Hindia Belanda, hanya diakhiri pertanyaan “untuk jalan ke arah manakah pintu ini terbuka?”. Maka begitulah novel ini mempertanyakan rasa kepastian yang

dipertentangkan oleh para perumus ideologi kepartaian dan peserta “polemik kebudayaan”.

Sementara itu partai-partai kebangsaan yang menjalankan politik kooperator, yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial, masih terus melanjutkan proses pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Mereka juga berusaha mencoba setahap demi setahap mendapatkan konsesi kolonial demi semakin terwujudnya negara-nasional. Dalam suasana inilah Sutomo, pendiri Budi Utomo ketika ia masih muda (1908), berhasil mengajak Budi Utomo, yang telah menjadi partai kooperator yang terkemuka, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi – tiga partai yang bercorak kedaerahan, bersama-sama melebur diri ke dalam Partai Indonesia Raya (*Parindra*) yang didirikan di tahun 1935. Maka setidaknya pada tingkat nasional kecenderungan yang disebut Bung Hatta “nasionalisme kultural” kini secara formal telah semakin mendekati masa berakhirnya. Tetapi harapan untuk mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial hanya menghasilkan kekecewaan belaka.

Dan Perang Pasifik pun telah semakin mendekat juga. Untuk beberapa lama kegelisahan ideologis dan intelektual menjangkiti kehidupan bangsa. Apakah akibat dari perang yang akan meletus ini bagi kehidupan bangsa?

Perbenturan pemikiran ideologis dalam konteks negara – bangsa

Hatta masih berada di Banda Neira, di pulau kecil tempat pengasingannya ketika ia mengetahui bahwa Perang Dunia II telah meletus. Menanggapi peristiwa besar ini iapun menulis artikel yang dengan tegas mengatakan bahwa bagaimanapun juga bangsa Indonesia harus berpihak pada kekuatan demokratis. Kekuatan ini lebih memberi harapan bagi kemerdekaan bangsa daripada kekuatan fascisme. Meskipun dengan nada yang lebih lunak, suara yang sama dikumandangkan juga oleh Bung Karno, dari pengasingannya di Bengkulu.

Akhirnya perembesan perang di Eropa terjadi juga. “Perang Asia Timur Raya” (*Dai Toa senso*) menyebar ke Asia. Dan perang pun bisa saja membawa berbagai hal yang sebelumnya tidak terduga. Maka begitulah, ketika tentara Dai Nippon dalam waktu yang relatif sangat singkat berhasil mengalahkan pemerintah Hindia Belanda (Maret 1942) kedua pemimpin ini ternyata diperlukan Jepang. Maka berbagai corak

political games pun harus dimainkan juga—mungkinkah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membantu Jepang, yang lebih dulu telah dinilai sebagai fascisme militer?

Penderitaan dan kegetiran zaman pendudukan tentara Jepang adalah kisah sejarah yang seperti enggan untuk didiamkan saja. Ketidakwaiban apakah yang tidak terjadi dalam masa tiga setengah tahun (Maret 1942-Agustus 1945) pendudukan militer Jepang itu? Tetapi ketika waktunya telah datang—di pertengahan tahun 1945-- pemerintah militer Jepang dengan resmi membuka sidang-sidang BPUPKI (Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Meskipun yang diundang sebagai anggota/peserta hanyalah para pemimpin dan pejabat yang berada di pulau Jawa saja, tetapi bukankah pulau ini sejak masa kolonial Belanda telah menjadi pusat kegiatan para pemimpin dan tokoh yang berasal dari berbagai daerah? Memang ternyata banyak juga anggota BPUPKI berasal dari daerah-daerah di luar Jawa.

Sidang-sidang BPUPKI ini boleh dikatakan sebagai klimaks dari proses pertumbuhan cita-cita nasionalisme Indonesia dan perbenturan ideologi tentang corak kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dalam sidang-sidang BPUPKI inilah untuk pertama kalinya segala aliran pemikiran yang bertolak dari kesadaran ideologis yang berbeda-beda dikemukakan dan diperdebatkan. Meskipun dengan gaya debat yang serba ekspres tetapi dalam sidang BPUPKI ini pula keputusan dibuat dan dirumuskan. Dibayangi oleh suasana perang Pasifik yang telah semakin kritis sidang-sidang BPUPKI tidak membiarkan segala sesuatu diperdebatkan berlarut-larut. Kesepakatan dan kesimpulan akhir yang bisa disetujui bersama lebih dipentingkan daripada landasan argumen dan alur pemikiran ideologis yang berbelit-belit. Dalam waktu yang teramat singkat – sejak akhir Mei sampai akhir Juli, 1945--proses *nation formation* yang formal pun mencapai klimaknya yang terpenting .

Dalam sidang BPUPKI inilah hal-hal yang fundamental dalam kehidupan kenegaraan dibicarakan dan diperdebatkan—mulai dari bentuk dan sistem kenegaraan (maka dipilih negara kesatuan, yang merupakan republik yang demokratis), batas wilayah negara (maka yang dipilih konsep “Indonesia Raya”) dan akhirnya landasan kenegaraan atau apa yang disebut *philosophische grondslag*. Tidak banyak perdebatan tentang masalah yang pertama, tetapi tentang wilayah negara sebuah problem muncul juga. Konsep romantik (ketika itu) “Indonesia Raya”, yang mendapat suara terbanyak – entah karena bujukan Sukarno, entah Yamin--berarti melingkupi bekas Hindia Belanda

ditambah Tanah Semenanjung dan wilayah di Borneo Utara, yang berada di bawah kekuasaan Inggris, serta Timor Timur, yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Maklumlah “kemerdekaan” dikira akan didapatkan sebagai hadiah dari *Tenno Haika*, Kaisar Jepang. Tetapi seketika Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan—bukannya yang mendapatkannya sebagai “hadiah dari Jepang”—tuntutan kewilayahan hanya terbatas pada wilayah bekas “Hindia Belanda” saja. Sedangkan pilihan untuk menentukan landasan kenegaraan menjadi perdebatan yang timbul tenggelam yang nyaris tanpa henti—antara Pancasila dan Islam—betapapun Indonesia telah mengalami masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer dan dua periode otoriter dengan nama “demokrasi terpimpin” dan “demokrasi Pancasila”. Hanya saja setelah terjadi perbaikan dalam beberapa kata (“tujuh kata” dalam Mukaddimah yang berganti nama menjadi Pembukaan UUD) dan mencoret kata “beragama Islam” dalam artikel tentang syarat untuk dipilih sebagai Presiden, UUD hasil kerja BPUPKI itu bertahan sampai tahun 2000 – kecuali selama sembilan tahun (1950-1959) ketika UUD RIS dan UUD Sementara 1950 dipakai.

Memang dalam perjalanan sejarahnya Republik Indonesia, yang diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus, 1945, sempat juga menjalankan tiga UUD, yaitu UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan UUD Sementara 1950. Ketika Presiden Sukarno melihat bahwa kemacetan dalam roda pemerintahan disebabkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi parlementer maka pada tanggal 5 Juli 1959 iapun mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan “kembali ke UUD 1945” yang bercorak presidential. Berbeda dengan kedua UUD yang lain dalam UUD 1945 Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti halnya dengan DPR, anggota MPR dipilih dalam Pemilu. Meskipun tidak langsung memperhatikan dan menilai pekerjaan lembaga eksekutif MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, yang berkewajiban merumuskan Garis Besar Haluan Negara.

Terlepas dari kritik tentang ketidak-stabilan pemerintahan—mulai dari “revolusi sosial”, “kabinet jatuh bangun” dan “keresahan daerah” dan sebagainya -- masa revolusi dan zaman demokrasi parlementer (ketika UUD Sementara 1950 masih diperlakukan) adalah pula periode dalam kehidupan kenegaraan yang diwarnai oleh perdebatan pemikiran dan perbenturan ideologis. Jika dalam “dasawarsa

ideologi” perdebatan ideologi lebih merupakan perbenturan pemikiran maka dalam “zaman demokrasi parlementer”, perdebatan ideologi telah menyangkut masalah kekuasaan. Di samping berbagai corak pemikiran kreatif yang bersifat independen, tidak sedikit pula pernyataan dan keputusan politik yang dibuat di dalam masa kedua periode itu mewarnai kehidupan bangsa. Politik luar negeri yang “bebas aktif” dijalankan. Peralihan yang spontan dari negara “federal”, yang terbentuk karena intervensi agresi Belanda, menjadi “negara kesatuan” terlaksana, meskipun unsur separatis RMS sempat berontak. Dalam suasana ini pula sebuah manifesto kebudayaan yang menekankan sifat keterbukaan kebudayaan Indonesia dengan berani dikeluarkan. “ Kami adalah ahli waris yang syah dari kebudayaan dunia”, katanya. Maka mestikah diherankan kalau ketika ini pula novel modern membebaskan diri dari obsesi pada *romantic love* yang terbebas dari keharusan adat yang dikatakan tradisional? Revolusi adalah kisah patriotisme romantik yang mengasyikkan. Tetapi dalam kepadatan tumpahan pemikiran dan bahkan ideologi, yang terjadi dalam zaman yang dikatakan rejim penggantinya sebagai “demokrasi liberal” ini, ternyata tidak selamanya bisa membawa ketenangan politik.

Dalam kajian Herbert Feith dan Lance Castles dikatakan bahwa antara tahun 1945-1965 meskipun berbagai masalah kenegaraan telah menjadi pemikiran yang kadang-kadang diperdebatkan, tetapi ada lima *streams of political thought* dan tujuh masalah yang diperdebatkan. Lima “aliran” (jika istilah politik Indonesia yang diperkenalkan Geertz dalam kancan ilmiah internasional) ideologis yang mewarnai kehidupan politik Indonesia, ialah apa disebut kedua editor itu “ nasionalisme radikal” (antara lain Sukarno), “tradisionalisme Jawa” (antara lain Supomo), “Islam”(antara lain Natsir dan pernyataan NU), “ Sosialisme demokrasi (antara lain Sjahrir), dan “Komunisme” (hanya tulisan-tulisan Aidit yang dikutip). Sementara itu buku ini juga mencatat berbagai corak pemikiran, yang terlepas dari ideologi formal kepartaian tentang hal-hal yang menyangkut masalah kenegaraan.⁴

Sebagai sebuah *political event* dalam konteks negara yang baru menginjak proses demokratisasi Pemilihan Umum 1955 sangat berhasil. Namun dinamika politik yang dihasilkan oleh Pemilu bahkan semakin menjauhkan negara dari cita-cita bersama. Jika diberberapa daerah terjadi berbagai tuntutan yang dengan cepat dituduh pemerintah pusat sebagai “pemberontakan”, maka di tingkat pusat krisis kabinet yang saling bergantian pun tak terelakkan. Bung Karno pun semakin tak sabar

dengan kedudukan konstitusional sebagai “simbol negara” dan semakin jengkel pula dengan kegagalan Dewan Konstituante mendapatkan 2/3 suara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya, dengan dukungan Angkatan Darat, ia mengambil keputusan yang drastis. Pada tanggal 15 Juli 1959 ia mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan Republik Indonesia “kembali ke UUD 1945”. Republik Indonesia pun memasuki periode baru dalam sejarah kehadirannya —Demokrasi Terpimpin telah berdiri. Dewan Konstituante dibubarkan dan setahun kemudian DPR pun “dibersihkan” dari Masyumi dan PSI -- dua partai yang dituduh terlibat dalam PRRI. Dengan landasan ideologi-politik yang disebut MANIPOL-USdek (*Manifesto Politik—UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional*) dan Indonesia pun dengan resmi meninggalkan demokrasi yang disebut “liberal”. Prinsip “musyawarah-mufakat” pun dikumandangkan. Inilah sistem yang dikatakan sesuai dengan “kepribadian nasional”. Prinsip NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dijadikan sebagai landasan kesatuan politik. Maka Sukarno, sang Presiden, menjadikan esei yang ditulis Sukarno, seorang mahasiswa yang telah terlarut dalam semangat perjuangan bangsa, sebagai landasan persatuan bangsa. Indonesia pun memasuki zaman “revolusi nasional”, yang sesungguhnya adalah “*a summary of many revolutions in one generation*”. Ketika itu pula Indonesia menampilkan diri sebagai pemimpin dari *New Emerging Forces*, yang berhadapan kekuatan *Old Established Forces* -- dua kekuatan yang tak bisa menemukan kesesuaian.

Tetapi “suasana revolusioner” yang dibangkitkan Presiden ternyata tidak berhasil menciptakan persatuan betapapun indoktrinasi diselenggarakan dengan penuh gairah. Ketika puncak kejenuhan berada dalam suasana serba revolusioner yang gagal menciptakan kemakmuran yang diimpikan maka konflik pun terjadi. Indonesia memasuki periode baru—suatu periode yang tak pernah terbebas dari suasana dendam yang tersimpan. Tetapi kini “revolusi” telah diganti menjadi “pembangunan”. Orde Baru telah berdiri. Maka Indonesia pun mengalami periode panjang tetapi “sedikit sejarah”.

Demokrasi Terpimpin atau yang disebut Orde Lama tidak mematikan keragaman ideologi, tetapi dengan indoktrinasi Manipol – Usdek dan semboyan persatuan Nasakom menjadikan ideologi kehilangan kemampuan wacana. Dalam suasana serba- revolusioner ini dan di saat konflik internal – dengan istilah “aksi sepihak” di daerah

pedesaan Jawa Tengah dan Timur—serta semangat “konfrontasi” terhadap pembentukan Malaysia, yang dituduh sebagai alat Oldefos, petaka di pagi buta 1 Oktober 1966 terjadi. Indonesia pun tergelincir dalam situasi konflik dan akhirnya Pemimpin Besar Revolusi, yang telah sempat pula diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup, memilih berhenti daripada membawa negara semakin terlarut dalam situasi konflik politik internal sesama anak bangsa.

Indonesia pun memasuki “zaman baru”. Orde Baru telah berdiri. Zaman serba revolusioner telah digantikan oleh “era pembangunan semesta”. Kini pembangunan ekonomi bukannya pemupukan semangat revolusi yang menjadi pegangan. Zaman teknokratis yang developmentalis telah bermula. Dalam perjalanan karirnya Orde Baru tampil juga sebagai pengubah peta Indonesia—kota-kota baru dan jalan serta jembatan baru dibuat, sedangkan kota-kota lama diperbesar. Tetapi dalam suasana ini pemikiran yang dianggap pantas diketengahkan hanyalah yang berkaitan dengan “pembangunan”. Meskipun sejak awal telah tampak dominasi militer yang ber- multi-fungsi. Setelah memberikan suasana keterbukaan relatif maka ketika waktunya telah sampai, seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin yang telah dinamakan Orde Lama, Orde Baru pun menampilkan diri sebagai “negara yang serakah” Inilah negara yang menjadi pemegang hegemoni makna (*the hegemony of meaning*) dan monopoli wacana (*the monopoly of discourse*). Negara adalah penentu makna Pancasila, yang telah dijadikan “azas tunggal” dan karena itu merupakan bahan utama indoktrinasi.

Ketika waktunya telah datang dan Orde Baru pun harus mengakhiri karirnya. Ketika Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya berarti Republik Indonesia selama hampir 40 tahun, sejak 15 Juli 1959 sampai 11 Maret 1997, berada di bawah kekuasaan dua “negara serakah”, yang mencoba untuk menguasai semua—mulai dari politik, ekonomi sampai dengan wacana kemasyarakatan. Meskipun kedua regim secara ideologis menyandarkan diri kepada UUD 1945 dengan Pembukaan yang mengatakan “Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”, tetapi dengan gaya yang berbeda-beda kedua regim menjadikan diri mereka sebagai penentu alur pemikiran sosial-politik. Bahkan dalam lapangan kebudayaan pun kedua regim menempatkan diri sebagai “guru” yang mengharuskan anak-anaknya untuk patuh pada ajaran yang diberikan.

Bisalah dibayangkan juga kalau dalam situasi ini suasana dan corak pemikiran yang terlontarkan sangat tergantung pada turun naiknya gaya otoritarianisme yang meliputi dunia kekuasaan bahkan juga dalam wilayah di luar bidang kekuasaan. Jika Demokrasi Terpimpin ter-obsesi oleh pemikiran yang serba revolusioner, maka dengan kecenderungan develop mentalisme teknokratis yang dipeliharanya Orde Baru hanya tertarik pada hal dan pemikiran yang menjanjikan “pembangunan” dalam pengertian suatu yang bisa dilihat.

Maka bisalah dipahami kalau ketika masa panjang dari corak pemerintahan yang memegang hegemoni makna itu telah berakhir para cendekiawan dan pemikir harus mengais-ngais dalam usaha mencari idee-ide baru yang segar. Mestikah pula diherankan kalau mereka tertatih-tatih ketika mencoba membebaskan diri dari sistem pemikiran dan wawasan yang telah rutin dan bahkan tak jarang juga telah dirutinkan.

Penutup

Baik sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah usaha untuk merekonstruksi pengalaman masyarakat dalam perjalanan zaman sejarah mengharuskan sikap yang objektif—kejujuran mengungkapkan peristiwa yang tidak akan terulang lagi. Tetapi bagaimanakah akan menghalangi menyusupnya subjektivitas ketika kisah yang mungkin ditulis seobjektif mungkin itu telah direnungkan? Maka ketika itulah makna sejarah datang menyelip dan di saat itu pula pelajaran dari peristiwa di masa lalu bisa menggugah perasaan dan membangkitkan pikiran.

Kalau telah begini bagaimanakah akan menghalangi kekaguman akan kepekaan perasaan dan ketajaman pikiran dari mereka yang pernah disebut sebagai “perintis kemerdekaan”. Mereka--anak jajahan – membayangkan dan memperjuangkan terbentuknya sebuah “bangsa” dari pecahan sekian puluh dan bahkan sekian ratus kesatuan etnis. Bagaimanakah mereka bisa membayangkan akan adanya dan semakin kuatnya —seperti kata seorang pujangga Perancis – “*le desir de vivre ensemble*”. Maka ketika “hasrat untuk hidup bersama” semakin kuat dirasakan maka ketika itu keinginan kebebasan dari kolonialisme pun tak tertahankan. Berbagai pemikiran yang kreatif dikemukakan dan akhirnya ketika waktunya telah datang perjuangan dengan “darah dan

air mata” untuk dilakukan demi tegaknya sebuah negara-bangsa yang telah diimpikan.

Sejarah pemikiran Indonesia modern memang bermula dari penghadapan diri pada realitas keterbelakangan tetapi dalam perkembangannya mencapai klimaks dengan hasrat sebagaimana dirumuskan oleh Pembukaan UUD, sebuah dokumen ketika para pendekar bangsa masih berada dalam “*the period of innocence*”, ketika panggilan dan bujukan kekuasaan masih berada entah di mana. Mestikah diherankan kalau setelah kemerdekaan bangsa bisa diraih pergulatan pemikiran tidak hanya terjadi antara ideologi-ideologi, yang diperjuangkan oleh partai-partai politik, tetapi juga idealisme yang membayangkan masa depan bangsa yang diinginkan.

Adalah suatu tragedi-kesejarahan yang sempit dan mungkin masih dilalui bangsa ketika pergumulan politik internal bisa menyebabkan tampilnya pemenang sebagai penguasa. Maka sampai kinipun bangsa masih tertatih-tatih dalam berusaha untuk menemukan kembali pemikiran yang jernih dan kreatif untuk “melupakan luka lama, membangun hari kini, dan merintis masa depan”.

Sejarah memang berkisah tentang hal-hal yang telah berlalu, tetapi jika dilihat dalam kejernihan pikiran sejarah – pengalaman yang pernah dilalui itu—bisa juga memberikan “seteguk kearifan” dalam usaha tanpa henti untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana diamanatkan oleh para pendekar kemerdekaan bangsa.

Catatan Akhir :

- 1) Mohammad Hatta, “ Indonesie Vrij” dalam *Verspreide Geschriften*, Djakarta, Amsterdam, Surabaya : C.P.J van der Peet, 1952. Buku yang memuat 53 tulisan Bung Hatta dalam bahasa Belanda ini diterbitkan pada ulang tahunnya yang ke-50, dengan team editor terdiri dari teman-temannya, baik yang sama-sama belajar di negeri Belanda ataupun kawan separtai (Pendidikan Nasional Indonesia) dan dua sekretaris pribadi Bung Hatta. Kumpulan tulisan dalam bahasa Indonesia yang pernah dimuat dalam koran-koran Indonesia juga diterbitkan dalam tahun yang sama. Mohammad Hatta *Kumpulan Karangan*, Djakarta, 1952
- 2) Tiga nama ini—Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Teuku Umar (Johan Pahlawan)--boleh dikatakan adalah “pahlawan nasional” pertama yang dijadikan simbol perjuangan bangsa. Di tahun 1930-an beberapa nama lagi mulai juga diperkenalkan oleh para tokoh pergerakan.
- 3) Uraian ringkas lihat Taufik Abdullah, *Indonesia: Towards Democracy*. Singapore: ISEAS, 2009
- 4) Herbert Feith & Lance Castles (eds), *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*, Ithaca and London; Cornell University Press, 1970.

BAB I

KONDISI DI HINDIA BELANDA

1.1. Politik Etis

Akhir abad ke 19, Van Kol yang menjadi juru bicara golongan sosialis melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Hindia Belanda. Ia menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada satu per sen pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Selain itu Van Deventer, pada tahun 1899 menulis sebuah karangan dalam majalah *De Gids* berjudul “Hutang Kehormatan”. Dalam tulisan itu Van Deventer menyatakan, bahwa dari hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, negeri Belanda telah memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 sampai dengan tahun 1878, keuntungan yang telah diperoleh tidak kurang dari 187 juta gulden. Hal itu merupakan hutang Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda yang perlu dikembalikan, sekalipun dalam bentuk lain.¹ Untuk itu perlu memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat jajahan. Andai kata Negeri Belanda tidak mendapat keuntungan dari daerah jajahan, sudah menjadi kewajiban merekalah untuk bertanggung jawab terhadap tanah jajahannya.² Anjuran Van Deventer itu kemudian terkenal dengan sebutan “Trilogi Van Deventer” atau “Trias Etika”, yang berisi pendidikan, irigasi, dan emigrasi.

Hasil dari upaya tersebut, pada awal abad ke-20, sekolah rendah pemerintah seluruhnya berjumlah 601, dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 37 juta. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah ada pula sekolah swasta, yang umumnya

diperuntukkan bagi penduduk non-pribumi, sebanyak 359 buah. Di beberapa daerah sekolah yang didirikan *missie* dan *zending* berjumlah 451 buah. Secara keseluruhan jumlah sekolah 1.501. Peranan sekolah *missie* dan *zending* membuat ketidakseimbangan ini lebih mencolok lagi. Di seluruh daerah Minahasa yang berpenduduk kira-kira 450 ribu, sekolah pemerintah berjumlah 115 buah, sekolah partikular 14 dan sekolah dari gereja 237 buah, sedangkan di bagian selebihnya di Sulawesi seluruh sekolah belum melebihi 20 buah (pada tahun 1895 jumlah yang tercatat 14 buah). Di seluruh Sumatra, kecuali daerah Tapanuli Utara, jumlah sekolah pemerintah, swasta dan *missie* jumlahnya 98 buah, sedangkan di Tapanuli Utara, daerah Batak-Kristen, jumlah ketiga jenis sekolah tersebut sebanyak 200 buah³.

Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 Europese Lagere School (ELS) di seluruh Hindia Belanda, dengan jumlah murid anak pribumi sebanyak 1.545, sedangkan jumlah murid Eropa berjumlah 13.592. Dari sekolah ini murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke STOVIA di Batavia yang telah mengalami beberapa kali pembaruan sejak didirikan pada tahun 1851, atau secara teoretis bisa saja melanjutkan ke *Hoogere Burgelijke School (HBS)*. Namun, pada prakteknya, hal ini hampir tidak mungkin dilakukan karena hanya kurang dari satu persen tamatan ELS yang bisa menikmati pendidikan lima tahun HBS. Untuk bisa masuk HBS, persyaratannya sangat berat, mulai dari ujian masuk hingga pembiayaan.⁴ Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk masuk sekolah pegawai, atau OSVIA yang jumlahnya kira-kira enam buah. Setelah belajar berharap bisa menduduki tempat yang tertinggi dalam kepegawaian yaitu menjadi bupati. Sekolah yang lebih umum ialah *Kweekschool* (Sekolah Raja) yang jumlahnya sebanyak lima buah terdapat di Surakarta, Bandung, dan tiga di luar Jawa, yaitu di Ambon, Manado, dan Bukittinggi.

STOVIA di Jakarta mempunyai tempat yang unik dalam sejarah kebangsaan. Di STOVIA mulai bersemi semangat nasionalisme, mula-mula bersifat ke-Jawa-an, kemudian bersemi dan berbau ke-Hindia-an. Sebagai satu-satunya sekolah dokter untuk pribumi, STOVIA adalah sekolah pertama yang mengumpulkan murid-murid dari seluruh penjuru tanah air. STOVIA juga berperan penting dalam pengembangan bahasa Melayu. Van Ophuysen yang terkenal sebagai perumus ejaan Melayu pernah mengajar di sekolah ini. Sementara itu, Sekolah Raja di Bukittinggi tidak hanya mendidik calon guru, tetapi juga mendidik calon pegawai pemerintah.

Bangsawan Aceh yang telah dikalahkan Belanda, juga dikirim ke Sekolah Raja. Begitu juga anak dari golongan atas lainnya dari seluruh Sumatra.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pendidikan di kalangan bumiputera, maka pada awal abad 20 dimulai sistem sekolah desa atau *volkschool*, dengan lama sekolah 3 tahun, yang didirikan oleh masyarakat setempat dengan subsidi dan bimbingan dari pemerintah. Sekolah yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Van Heutz pada tahun 1908 ini, cepat berkembang dan meluas. Pada tahun 1913 menurut Gubernur Ballot di Sumatra Barat, terjadi peningkatan jumlah sekolah desa pada tahun 1915 yaitu dari 111 buah meningkat menjadi 350 buah. Kenaikan yang pesat dari sekolah desa ini boleh dikatakan umum di seluruh daerah yang telah mengalami penetrasi lebih lanjut dari pemerintah kolonial. Dalam sepuluh tahun saja, antara tahun 1910 sampai dengan tahun 1920 di seluruh "Hindia Belanda" jumlah murid yang memasuki sekolah desa naik dari 71.239 menjadi 423.314. Pada tahun 1930 jumlah murid telah naik sampai 1.229.666 dan tahun 1940 jumlahnya hanya naik menjadi 2.186.374 orang. Jika ditambah dengan murid-murid yang melanjutkan ke sekolah sambungan atau *Vervolgschool*, maka pada tahun 1930 jumlah murid keseluruhan ialah 1.482.736. Dengan demikian murid sekolah sambungan hanya 253.736. Pada tahun 1940 jumlah murid sekolah sambungan naik sedikit menjadi 282.358 orang.

Kecenderungan seperti ini juga tampak pada sekolah-sekolah Barat yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, baik milik pemerintah maupun swasta bersubsidi. Pertumbuhan yang mencolok didapati pada dasawarsa ketiga, sedangkan pada dasawarsa keempat, terlihat pula proses perkembangan melambat. Antara tahun 1900 dan tahun 1910 murid-murid pribumi dari HIS dan ELS naik dua kali lipat menjadi 5.108. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan sekolah *schakel*, yang menghubungkan sekolah "bumiputra" dengan sekolah "Belanda". Hal ini membantu peningkatan jumlah sekolah "Belanda". Antara tahun 1910 dan tahun 1930 kenaikannya mencapai delapan kali lipat atau dengan angka absolut menjadi 43.411. Pada tahun 1940, jumlah murid ketiga jenis sekolah tersebut tercatat 88.223 orang. Murid yang tidak sanggup menyelesaikan sekolah jumlahnya cukup tinggi. Puncak kemajuan pendidikan gaya Barat sampai berakhirnya masa penjajahan Belanda, prosentase murid yang sanggup mendapatkan ijazah kira-kira seperempatnya saja atau 25 persen.

Seperti sekolah rendah, perkembangan yang terpenting dari jaringan dan jumlah sekolah menengah juga terjadi antara tahun 1910 sampai tahun 1930. Setelah tahun 1930 terjadi pasang turun dan naik yang saling bergantian pada setiap tahunnya. Sekolah-sekolah kejuruan "Bumiputera" tetap memainkan peranan penting. Pada tahun 1930 murid dari sekolah kejuruan terdiri dari sekolah-sekolah guru (normal), mantri kesehatan, pertukangan, perkebunan, dan magang, berjumlah 15.716 orang. Pada kelompok "Belanda", jumlahnya hanya 5.233 orang. Dalam jumlah ini telah terhitung murid-murid MOSVIA, PHS (sekolah dagang), *Ambachtschool*, *Kweekschool*, HIK, dan sebagainya, sedangkan jumlah murid pribumi yang sekolah di MULO pada waktu yang bersamaan mencapai angka 6.906 orang.⁵

Setelah tahun 1930, seperti telah dikatakan di atas, perkembangan sekolah pemerintah dan swasta bersubsidi, berjalan lambat. Hal ini disebabkan pada dasawarsa itu dimulai politik penghematan, sebagai akibat *malaise* yang menimpa perekonomian dunia. Apalagi Gubernur Jenderal Colijn, yang mulai memerintah tahun 1931 adalah seorang konservatif. Ia mengatakan, bahwa pemerintah Belanda sangat kuat, "sekuat Mont Blanc di pegunungan Alpen". Ia menjalankan "politik apa yang mungkin", bukan kebijakan yang bersumber pada "apa yang diinginkan". Di samping itu, tenaga terdidik yang dihasilkan sekolah tidak sanggup lagi ditampung oleh lowongan kerja yang tersedia. Hal inilah yang antara lain mendorong Komisi Penyelidik HIS, yang dipimpin oleh Schrieke untuk menasehatkan kepada pemerintah pada tahun 1930 supaya tidak lagi menambah jumlah HIS, karena masalah sekolah tidak saja menyangkut soal tersedianya tenaga yang diperlukan, tetapi juga permintaan yang muncul.

1.2. Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern

Dampak positif pengajaran sistem Barat bagi kalangan elite tradisional adalah penguatan dasar legitimasi atau keabsyahan bagi kedudukan mereka. Dengan pengajaran Barat, elite tradisional ini merasa lebih percaya diri sebab pada mereka telah terkumpul dua sumber keabsyahan, yaitu keturunan berdasarkan tradisi yang terkait erat dengan asas pewarisan jabatan (*erfelijkshaidbeginsel*),⁶ dan pengajaran Barat, yang memungkinkannya untuk menjadi perantara dengan penguasa asing. Karena itu, tuntutan bagi pengajaran Barat sangat keras

bergema di kalangan mereka. Banyak kalangan bangsawan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Barat, bahkan akhirnya anak-anak ini menjadi terpengaruh budaya Barat, karena peran “Bapak asuh” yang sangat kuat. Misalnya yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje terhadap putra-putra Bupati Serang, P.A.A. Djajadiningrat dan Hoessein Djajadiningrat, putra Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah, dan lain-lain. Di samping Snouck Hurgronje, masih ada sejumlah nama lain yang mempunyai perhatian seperti itu terhadap kelompok orang pribumi seperti Abendanon, Engelenberg, Van Lith, dan Hardeman.

Tuntutan untuk memperoleh pendidikan Barat, semakin meluas karena dimulainya pelebaran kelas pegawai oleh pemerintah kolonial. Hal ini langsung mengancam kedudukan keluarga pegawai lama yang hanya bertopang pada kebanggaan keturunan. Untuk mempertahankan harkat dan status kepegawaian, yang dulu didasarkan hubungan dengan raja, maka kini harus diperoleh melalui ketrampilan teknis menurut corak Barat. Tanpa hal ini kegoncangan dalam kepegawaian tidak bisa dielakkan. Begitulah umpamanya, pada tahun 1905 bupati Tuban mengeluh, bahwa dari 260 orang priyayi yang baru diangkat di Keresidenan Rembang hanya sepuluh orang saja yang mendapat pendidikan di OSVIA. Pada tahun 1940 semua *regent*, yang jumlahnya 65 orang, dan sebagian besar patih di Jawa adalah tamatan OSVIA. Sebagian dari mereka telah menduduki perguruan tinggi. Dari jumlah 340 wedana, sepersepuluhnya adalah tamatan dari sekolah yang sama.

Di luar kepomongprajaan lembaga pengajaran Barat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih yang dapat dipekerjakan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa pada tahun 1941 tercatat 90 sarjana hukum pribumi bekerja pada badan-badan pemerintahan, di antaranya 54 orang bekerja di bawah Departemen Kehakiman, 306 orang dokter bekerja pada Dinas Kesehatan. Pada tingkat lebih rendah dapat disebut bahwa pada tahun tersebut 58 dari jumlah 139 orang mantri hutan adalah orang pribumi asli, sebanyak 139 orang pula bekerja sebagai mantri pertanian, dan sebanyak 63 orang bekerja sebagai mantri hewan. Semuanya adalah tenaga terlatih dan termasuk kelas atas dan menengah dalam struktur kepegawaian.

Para pejabat baru banyak yang mendapatkan kedudukan pemerintah berasal dari golongan bawah. Dalam hal ini sekolah menjadi saluran mobilitas sosial dan menjadi titik tolak ke arah transformasi sosial. Anak-anak dari pegawai rendah, karena

pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah dicapai oleh orang tua mereka.⁷

Namun jumlah antara lowongan kerja di pemerintah dengan jumlah lulusan tidak seimbang. Sehingga ketidakmampuan pemerintah kolonial menampung lulusan sekolah, menyebabkan timbulnya kaum intelektual yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem kolonial. Pada saat makin memuncaknya gerakan kebangsaan pada tahun 1930-an, hal tersebut tampak mencuat dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta, usaha-usaha penerbitan, koperasi dan sebagainya. Peleburan dari sifat sekolah "Belanda" sekaligus memupuk semangat kebangsaan dan merintis ke arah terbentuknya corak masyarakat lain yang bukan kolonial. Sekolah Barat telah berfungsi sebagai katalisator untuk terwujudnya dua jenis elite, yaitu birokrat moderen dan kaum intelektual. Keduanya berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tetapi berada dalam lingkungan politik dan sosial yang berbeda. Keduanya mempunyai tempat atas susunan hierarki sosial, tetapi yang pertama lebih didukung oleh legitimasi politik, sedangkan yang lain oleh keunggulan ilmu. Birokrat modern ini disebut juga priyayi birokrat untuk di Jawa, dan di Tatar Sunda dikenal sebagai *menak* lama.⁸

1.3. Perkembangan Transportasi dan Tumbuhnya Kota-kota Kolonial

Pada 1845 satu kapal uap Belanda dialokasikan untuk melayani pelayanan pos di Singapura dan mengangkut surat dan penumpang ke Batavia terus ke Surabaya⁹. Munculnya permukiman orang Belanda di berbagai tempat di wilayah pantai di luar Jawa mendorong para pengusaha untuk secara aktif membuka usaha di dalam pelayanan pos dan angkutan penumpang. Di bawah kontrak pengiriman pos dan penumpang yang dibuat pada 1850 dengan sindikat baru Willem Cores de Vries, hubungan pelayaran kapal uap diperluas dari Jawa ke permukiman Belanda yang ada di Padang, Makasar, Menado, Ternate, dan Ambon.

Perusahaan yang didirikan oleh berbagai bangsa terus berkembang dan memberikan pelayanan pengiriman pos dan angkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain di Asia Tenggara. Di Kepulauan Philippina, penguasa Spanyol pada 1854 menyediakan pelayanan angkutan menggunakan kapal uap bagi perjalanan laut setiap bulan menghubungkan Hongkong (yang pada akhir dasawarsa 1850an

selama beberapa tahun diambil alih oleh perusahaan pelayaran angkutan pos). Pada akhir 1860-an satu kapal uap Prancis ditetapkan untuk melayani rute antara Singapura dan Batavia dan sudah barang tentu melanjutkan perjalanannya ke Hongkong terus ke Manila.

Sebelum dibukanya terusan Suez, pusat-pusat pantai utama berada di India, Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Pembukaan terusan Suez pada Desember 1869 mengkonsolidasikan integrasi yang lebih dekat antara Asia dan Eropa meskipun terjadi pula diversifikasi dalam jaringan pelayaran. Sebelum 1870 hanya Inggris dan Prancis yang mampu memberikan pelayanan angkutan pos dengan subsidi pemerintah, kekuatan kolonial yang lain membangun sendiri jaringan langsung antara negeri induk dengan wilayahnya di Asia; bendera *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (SMN) mulai berlayar pada 1871 dan bendera Spanyol dikibarkan oleh Olano dan Larinaga & Co. pada 1873.

Gagasan untuk memunculkan angkutan kapal oleh swasta di Hindia Belanda muncul sekitar 1850¹⁰. Selama ini angkutan kapal di Hindia Belanda dilaksanakan secara proteksionis sehingga mengundang kritik dari kaum liberal. Pada 1825, pemerintah Belanda menyewa kapal asing seperti kapal milik perusahaan Inggris Firma Maclain Watson & Co. *ss Baron van der Capellen* yang berbobot mati 114 last dengan harga 6.000 sampai 8.000 gulden sebulan. Pada 1827 satu kapal lain juga disewa di Singapura. Dengan semakin ramainya kapal yang dioperasikan maka pemerintah memikirkan untuk mengembangkan berbagai kota pelabuhan yang ada di utara pulau Jawa.

Hiruk pikuknya perkembangan perusahaan pelayaran di antara negara-negara Eropa dan Asia mendorong pemerintah Belanda untuk mengembangkan armada lautnya yang dioperasikan di Hindia Belanda. Kapal-kapal tersebut semula bukan milik perusahaan swasta tetapi milik pemerintah di Negeri Belanda. Pada pertengahan abad ke-19 perkembangan armada angkutan laut pemerintah Belanda di Asia Tenggara berkembang secara pesat. Pada 1845 jumlah kapal yang dioperasikan adalah 4 buah, pada 1847 bertambah menjadi 6, dan tiga tahun kemudian jumlah kapal yang dioperasikan meningkat menjadi 10 buah. Kapal tersebut melayani angkutan barang dan penumpang serta dinas pos dari Batavia ke Singapura kemudian pengangkutan ke Eropa bekerjasama dengan armada Inggris.

Pada 1852 pemerintah Hindia Belanda meneken kontrak baru dengan C. de Vries yang diberi ijin untuk membuka jalur pelayaran

antara Batavia – Bengkulu – Padang pergi pulang dan dari Batavia ke Makasar lewat Semarang dan Surabaya pergi pulang setiap musim timur sebulan sekali. Pada musim barat setiap dua bulan pelayaran diarahkan ke Ambon, Ternate, Menado dan Makasar. Dalam kontrak tertanggal 1 Juni 1854, de Vries diberikan konsesi untuk membuka jalur pelayaran baru yaitu ke Muntok, Kepulauan Riau. Jalur ini berangkat dari Batavia lewat Muntok terus ke Singapura pergi pulang. Subsidi yang diberikan pemerintah dalam mengangkut surat dinas sungguh sangat memuaskan. Pada tahun pertama subsidi yang diberikan kepada perusahaan pelayaran sebesar f.140.000,- kemudian menjadi f.130.000,- atau rata-rata f.9,69 dan f.8,73 setiap mil. Dengan semakin meluasnya jangkauan jaringan pos yang harus dilayani maka pemerintah menaikkan besarnya subsidi menjadi f. 10,56 untuk setiap mil. Naiknya subsidi tersebut bukan saja berarti bahwa pemerintah ingin agar penyampaian pesan dari satu daerah ke daerah lain terjamin tetapi juga dapat diartikan bahwa pemerintah ingin mendorong agar perusahaan pelayaran milik swasta berkembang sehingga jaringan pelayaran dapat menembus setiap titik penting bagi kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Pada 4 Februari 1888 parlemen Belanda mensyahkan dibentuknya perusahaan pelayaran yang lebih menjamin angkutan barang dari tanah jajahan ke Negeri Belanda. Perusahaan tersebut dinamakan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM)¹¹. Perusahaan KPM diberi hak untuk mengangkut barang dan penumpang dari Hindia Belanda ke Eropa. Untuk angkutan pos subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ini adalah lebih tinggi daripada subsidi yang diberikan kepada perusahaan Inggris. Fasilitas bagi angkutan penumpang juga dilakukan pembenahan seperti tempat duduk penumpang dibagi menjadi kelas utama, kelas satu sampai kelas lima. Tarif untuk perjalanan dinas pegawai pemerintah dan tarif angkutan barang juga lebih rendah.

Depresi ekonomi 1930-an yang membawa dampak buruk pada perusahaan perkebunan di Sumatra Timur mengakibatkan terjadinya arus balik para pekerja perkebunan yang berasal dari Jawa. Mobilitas tenaga kerja pada dasawarsa ini tentu melibatkan kapal laut terutama yang mempunyai pangkalan keberangkatan di Sabang atau Belawan Deli. Dari pelabuhan keberangkatan itu para pekerja diangkut menuju ke berbagai pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa seperti Batavia, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Sementara produksi industri perkebunan seperti karet dan tembakau terhenti karena terikat pada perjanjian

internasional maka angkutan barang dari berbagai pelabuhan di Hindia Belanda ke Eropa terhenti. Pada tahun 1937 keadaan tampak membaik dan kehidupan industri mulai hidup. Namun belum lagi kegiatan ekonomi di Hindia Belanda pulih benar Bala Tentara Jepang mendarat di beberapa daerah di Jawa dan Kalimantan tanpa memperoleh perlawanan yang berarti dari militer Belanda. Maka beralihlah penguasaan atas Hindia Belanda dari Belanda ke Bala Tentara Jepang pada Maret 1942.

1.4. Transportasi Darat

Gagasan perlunya membangun jaringan angkutan di Jawa oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda telah terjadi pada bagian pertama abad ke-19 saat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang kemungkinan membangun jaringan kereta api yang menghubungkan antara Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta terus ke Priangan dengan berbagai jaringan sempalan di berbagai kota. Perusahaan kereta api negara di Hindia Belanda (S.S.) untuk pertama kalinya membangun rute Surabaya – Pasuruan – Malang; kemudian diikuti oleh pembangunan jaringan di tempat lain baik di Pulau Jawa maupun Sumatra. Pemberian konsesi kepada pengusaha swasta antara lain tertuang dalam surat keputusan tertanggal 18 Januari 1882 yang diberikan kepada N.I.S. untuk membangun jaringan antara Tegal – Balapulang. Pada September 1895 jaringan Semarang – Cirebon digunakan untuk angkutan trem uap. Dengan Surat keputusan tanggal 23 Januari 1883 jaringan Belawan – Medan - Deli-Tuwa dan Medan – timbang Langkat diberikan kepada *Deli Spoorweg Maatschappij*. Jaringan yang menghubungkan kota Batavia – Bekasi yang dibangun oleh *Bataviasche Oosterspoorwegmaatschappij* ijin pembangunannya tertuang dalam surat keputusan tertanggal 19 Februari 1884. Jaringan tersebut untuk masa kemudian diperpanjang terus ke kota Karawang.

Setelah pertengahan 1880-an, pembangunan jalan kereta api pemerintah berjalan dengan cepat sehingga pada pergantian abad, jaringan rel yang ada di Jawa bukan hanya menghubungkan kota pedalaman dengan kota pantai tetapi juga menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman. Di luar Jawa pembangunan jaringan pada akhir abad-ke19 dipusatkan di daerah Aceh, yang menghubungkan kota Medan dengan kebun tanaman ekspor di sekitarnya di Sumatra Utara dan kota di pantai barat Sumatra. Pada 1911 persetujuan diberikan

pemerintah untuk membangun jaringan dari Palembang ke Selat Sunda meskipun sampai 1927 kegiatan ini belum selesai. Pada waktu itu bagian di utara, selatan, dan barat Pulau Sumatra belum dihubungkan oleh jaringan yang terpadu. Sementara itu pada 1922 jaringan rel kereta api juga dibangun di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kota Makassar dengan kota Takalar.

Angkutan kereta api mempunyai arti yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatra bersama-sama dengan angkutan darat yang menggunakan sarana jalan darat. Angkutan kereta api maupun angkutan kendaraan bermotor diperlukan untuk memindahkan barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Jaringan rel kereta api yang ada di Jawa antara lain berada di Yogyakarta yang masuk wilayah kerja jaringan barat dan wilayah Surakarta yang masuk wilayah kerja jaringan timur. Jaringan rel kereta api di Jawa pada 1936 mempunyai lebar rel 1,067 meter yaitu lebar normal rel kereta api. Mempunyai panjang rel untuk jaringan utama sepanjang 2.270 kilometer dan jaringan cabang sepanjang 580 kilometer. Di samping itu terdapat kereta dengan rel ukuran kecil yaitu 0,60 meter sepanjang 79 kilometer yang digunakan untuk mengangkut tebu dari areal tanam ke pabrik gula pada musim giling. Dengan demikian panjang jaringan rel kereta api S.S. di Jawa adalah 2.929 kilometer. Kecuali 79 kilometer jaringan rel dengan lebar 0,60 meter seluruh jaringan rel milik S.S. di Jawa adalah 1.067 meter. Wilayah luar Jawa telah memperoleh perhatian S.S. karena kepentingan pemerintah kolonial dan pengusaha swasta juga terdapat di wilayah tersebut.

Perusahaan *Zuid Sumatra Staatstramwegen* membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 kilometer dan di Palembang sepanjang 152 kilometer yang telah beroperasi pada 1917. Jaringan yang pertama adalah menghubungkan kota Panjang - Haji Pemanggilan yang dihubungkan dengan kota Kertapati dan Muara Enim. Untuk jaringan dari Kertapati akan mempertemukan ruas dari Musi dan Ogan dengan kota Palembang. Pada 1917 ruas Muara Enim dan lokasi tambang Bukit Asam di Tanjung diselesaikan sepanjang 13 kilometer. Bekerjasama dengan Dinas Angkutan Mobil dan Darat jaringan ke Palembang akan disempurnakan. Jaringan Palembang – pelabuhan Lampung memang diharapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Di Aceh jaringan kereta dengan rel ukuran 1.067 meter yang menghubungkan Ule-ule dengan Kutaraja telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum pada November 1876. Pada 1897 jaringan Kuta Raja – Lam Baru juga telah dikerjakan. Jaringan rel kereta terus dikembangkan di wilayah pantai Utara dan Timur dimana jaringan Pangkalansusu – Besitang telah selesai dikerjakan pada 1917. Dari Pangkalansusu jaringan rel diteruskan ke Arubaa dan dari Besitang pada pertengahan 1919 dibuka jaringan yang menghubungkannya dengan jaringan milik *Delispoorwegmaastchappij*.

Perkembangan kereta api di Pulau Sumatra Barat menghadapi kendala. Bukit Barisan yang mempunyai ketinggian di Subang 1.050 meter dan di Padang Panjang sekitar 773 meter adalah berada di atas rata-rata ketinggian yang dapat ditolerir. Pada 1833 dibangun jaringan jalan kereta gerobak di lembah Anai untuk memperbaiki jalan angkutan antara Padang Panjang dan Padang. Pada 1870 seorang insinyur tambang W.H. de Greeve menyatakan dalam satu laporan kepada pemerintah tentang kemungkinan eksploitasi ladang batubara Ombilin. Laporan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan menugasi Dr.R.D.M. Verbeek untuk melakukan penelitian tentang potensi tambang batubara tersebut. Pada 1873 J.L. Cluysenaer ditugasi pemerintah untuk meneliti tentang kemungkinan membangun jaringan rel kereta api yang mendukung kepentingan pemerintah kolonial di Sumatra Barat secara keseluruhan maupun bagi pengangkutan batu bara dari dataran tinggi Padang ke pelabuhan di pantai barat Sumatra pada khususnya. Hasil laporan tersebut diterbitkan berturut-turut pada 1876, 1878, dan 1884.

Mengingat potensi ekonomi Sumatra Barat cukup besar untuk dikembangkan di masa kemudian maka pemerintah kolonial memandang perlu untuk memperluas jaringan kereta api di daerah ini. Dengan surat keputusan tertanggal 13 Juli 1895 ditetapkan untuk memperpanjang jaringan rel kereta api *Fort de Kock* – Payakumbuh sepanjang 32 kilometer yang selesai pada 15 September 1896. Pada akhir 1917 jalur utama Pelabuhan Emma – Padang – Padang Panjang – Sawah Lunto sepanjang 105 kilometer dihubungkan dengan jalur lain yaitu Padang – Puluayer, Lubukalur - Sungai Limau dan Padang Panjang – Payakumbuh sepanjang 95 kilometer, secara bersama-sama jalur tersebut sepanjang 245 kilometer.

Setelah pertengahan abad ke-19, perluasan jaringan kereta api telah memberikan bentuk pelayanan angkutan darat yang murah sepanjang rute yang telah lama terbentuk meskipun jaringan baru juga diperlukan untuk mengangkut penumpang dan barang dari pabrik menuju stasiun terdekat.

Mobil pertama yang diketahui diimpor ke Asia Tenggara adalah di Singapura pada 1896. Di Sumatra Utara mobil digunakan pertama kali pada 1902. di Rangoon pada 1905. Pada awal abad ke-20 mobil masih merupakan barang yang langka kecuali di beberapa daerah seperti Philipina dimana pengaruh Amerika berkembang.

Pembangunan jaringan jalan raya di luar Jawa tidak berjalan secara cepat. Sungai menjadi kendala bagi pembangunan jaringan jalan raya lintas Sumatra yang membentang sepanjang pantai barat dan pantai timur Sumatra. Jalan darat yang mempunyai peranan penting pada dasawarsa 1920-an adalah pengerasan dari jalan setapak yang pernah ada yang menghubungkan dataran tinggi di Sumatra Barat dengan ujung pelayaran sungai yang mengalir sampai pantai timur Sumatra dan Selat Malaka. Meskipun rel kereta api telah dibangun di wilayah yang berbukit-bukit, jalan darat terbukti merupakan sarana transportasi yang lebih murah dalam pengadaannya. Persaingan antara perusahaan angkutan darat dengan perusahaan angkutan kereta api dalam menyediakan angkutan umum di kota semakin tampak di permukaan.

Di Asia Tenggara kota pelabuhan seperti Jakarta (1882), Rangoon (1884) Singapura (1885) dan Surabaya (1890) mengikuti pola pelayanan yang dikembangkan di kota-kota di Eropa dan Amerika dengan membangun jaringan trem uap sebagai angkutan umum. Fasilitas ini mendorong gaya hidup di sub-urban bagi orang kaya di Eropa dan yang lebih penting, angkutan ini dapat melayani mobilitas harian para pekerja menuju atau dari kota pelabuhan. Sedikit ketinggalan dibandingkan dengan Eropa, pada 1890-an angkutan kota mulai menggunakan tenaga listrik. Sementara itu, di beberapa negara mulai membangun jaringan seperti Bangkok pada 1893, Batavia (1899), Calcutta (1902), Hongkong dan Mandalay (1904), Penang dan Singapura (1905), Rangoon dan Manila (1906). Pelayanan angkutan kota ini ditunjang atau bahkan harus bersaing dengan sejumlah besar angkutan lokal tradisional seperti di Jawa dan Philipina, bersaing dengan kereta kuda. Pada mulanya mobil menggantikan angkutan kereta kuda

yang sebelumnya lazim digunakan orang Eropa dan Orang Cina kaya. Pada periode antara PD I dengan Perang Dunia II mulai terjadi persaingan antara taksi dan jipney dengan angkutan kereta api pada jaringan utama. Persaingan itu menjadi semakin tajam pada 1930-an ketika ada tuntutan yang serius bagi adanya fasilitas angkutan umum yang murah.

1.5. Perkembangan Komunikasi

Pada abad ke-18 pelayanan pos di Hindia Belanda telah dilayani oleh lembaga swasta. Untuk mengantar surat dari Batavia ke berbagai tempat di Hindia Belanda ada petugas yang disebut pecalang. Untuk pengiriman surat dari Batavia ke Cirebon, Tegal dan Semarang pada 1754 memerlukan waktu 14 hari.¹² Untuk mengirim surat dari Negeri Belanda ke Hindia Belanda dilakukan oleh kapal Kumpeni maupun kapal asing yang melayari rute Eropa ke Asia Tenggara memakan waktu 7,5 bulan.

Pada 1746 kantor pos pertama kali didirikan di Batavia. Waktu itu ada dua pegawai pos, seorang bertugas sebagai penerima surat, paket, dan titipan lain yang akan dikirim, seorang yang lain bertugas mengantarkan surat, paket dan titipan lainnya ke alamat yang dituju. Keadaan semacam ini tidak berlangsung lama karena pada 1747 penerimaan surat dilakukan dengan kotak surat atau semacam bis surat. Karena banyak keluhan maka pada 1789 dibuat aturan tentang pengiriman surat oleh swasta.

Untuk keperluan pengiriman surat maka Daendels pada masa kekuasaannya membangun jalan pos. Pada 29 Mei 1808 Daendels bercita-cita pengiriman surat harus sampai ke alamat dalam waktu 3 kali 24 jam. Untuk itu setiap residensi diangkat pegawai pos. Pada 18 Juni 1808 reorganisasi pelayanan pos dilakukan. Jawa dibagi menjadi 4 distrik: distrik Banten, melayani hantaran pos dari Banten ke Batavia; distrik Batavia, dari Batavia sampai Karang Sambung; Distrik Semarang, dari Karang Sambung sampai Semarang; Distrik Surabaya, melayani hantaran dari Semarang ke Surabaya. Di setiap distrik diangkat seorang komisarisan jalan dan pos. Di samping itu sebuah kantor pos umum dan stasiun bagi pengiriman berbagai macam titipan juga didirikan.

Pengiriman surat lewat pos dari Batavia ke Bogor dilakukan setiap hari. Pengiriman surat ke berbagai tempat lain dilakukan dua kali seminggu. Petugas penghantar surat dari Batavia ke Bogor harus berangkat sepagi mungkin dan pada setiap 6 pal (1 pal= 1,5 kilometer) tersedia seorang petugas pengganti. Antara Bogor dan Surabaya didirikan 12 tempat penginapan, setiap penginapan terdapat 6 atau 8 kamar tidur yang bagus. Di antara penginapan tersebut terdapat pasanggrahan. Perubahan terjadi dalam frekuensi pengiriman surat yaitu sejak 1828 pengiriman surat semula tiga kali perminggu diubah menjadi dua kali per minggu.

Pada 1871 angkutan kereta api antara Batavia – Jatinegara dibuka untuk pertama kali yang sangat bermanfaat bagi petugas pos. Tujuh tahun kemudian dikeluarkan peraturan bahwa pengiriman pos dilakukan dengan angkutan kereta api. Jalur kereta api antara Anyer – Batavia dan antara Batavia – Bandung – Yogya –Surabaya terdapat fasilitas pengiriman pos. Di beberapa tempat yang kereta api cepat tidak berhenti serta tempat yang tidak ada setasiun kereta api didirikan kantor pos pembantu.

Pelayanan pos di luar Jawa memperoleh perhatian pemerintah kolonial tak lama setelah layanan itu dibangun di Jawa. Di Sumatra pelayanan pos dilakukan dengan mobil yaitu di Palembang Boven Landen serta di Pantai Timur Sumatra, yang prakteknya selain melayani pengiriman surat juga melayani angkutan penumpang dan barang. Masalah lain yang dihadapi pengantar pos di luar Jawa seperti di Distrik Lampung adalah adanya gangguan binatang buas seperti gajah. Pegawai pos di Aceh dalam menjalankan tugasnya sering menghadapi gangguan sehingga mereka dipersenjatai dengan rencong atau *klewang*.

Pelayanan telegraf dimulai sejak 1855 dengan Peraturan Ratu yang memungkinkan pengadaan elektro magnet telegraf. Jaringan telegraf bagi kepentingan umum dibangun sejalan dengan dibangunnya jaringan rel kereta api karena berita pemberangkatan kereta api diatur dengan sistem komunikasi antar setasiun dengan telegraf. Dengan demikian di setiap stasiun dan halte selalu tersedia sarana komunikasi telegraf. Setelah dikeluarkannya ijin pembukaan jaringan komunikasi oleh Ratu Belanda pada 1855, jaringan yang dibangun pertama kali adalah antara Batavia – Bogor, dengan jaringan ini pula pengiriman berita pertama kepada Gubernur Jendral lewat telegram dilakukan pada

23 Oktober 1856. Dua tahun berikutnya dibuka saluran telegraf Batavia – Surabaya dengan saluran cabang Semarang – Ambarawa. Pada 1859 jumlah kantor tilgram di seluruh Jawa telah mencapai 28 tempat dengan panjang jaringan 2.700 kilometer.

Untuk mendukung kepentingan militer dan bisnis maka perluasan jaringan telegraf di Jawa maupun di luar Jawa semakin penting. Pada 1866 pemasangan jaringan di Sumatra telah disetujui. Pemasangan pertama dilakukan di Telukbetung. Pada 1871 jaringan telah masuk kota Padang dengan panjang jaringan 1200 kilometer, dan ke Singkel sepanjang 600 kilometer.

Teknologi transportasi dan komunikasi mempunyai sumbangan penting bagi perubahan yang terjadi di Hindia Belanda. Perkembangan pengaruh penguasa Barat di Jawa yang sudah mapan pada abad ke-19 dapat diperluas ke luar Jawa karena dukungan transportasi dan komunikasi.

1.6. Perkembangan Pers di Hindia Belanda

Pada paroh ke-2 abad ke-19, penerbitan pers berkembang di kota-kota selain Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pada tahun 1880, di Cirebon lahir surat kabar *Tjiremai*, yang berlangsung sampai pada awal abad ke-20. Di Bandung muncul *De Preanger Bode* pada tahun 1895 di bawah redaksi R.J. De Vries yang bekerja sama dengan firma Kolff & Co.

Di Sumatera pada tahun 1884 muncul *Deli Courant*, yang dimodali oleh pengusaha tembakau, Deen. Lima tahun kemudian, di Deli terbit pula *Sumatra Post*. Di Padang, pada tahun 1893 terbit *Sumatra Bode* dan pada 1899 muncul *De Padanger*. Di Palembang, tahun 1898 lahir *Nieuws en Advertentieblad voor Residentie Palembang, Djambi en Banka*, yang terbit dua kali seminggu untuk kepentingan perusahaan minyak di sekitar tempat itu. Pada tahun 1901 di Kota Raja terbit *Nieuws en Advertentieblad voor Atjeh en Onderhoorigheden*. Di Sulawesi, pada tahun 1902 terbit *Makassarsche Courant* di Makasar, dan di Kalimantan tahun 1894 terbit *Bandjermasingsch Nieuwsblad* di Banjarmasin.

Secara umum sejak akhir abad ke-19, tulisan-tulisan dalam surat kabar mulai bersifat kritis terhadap politik kolonial Belanda di Hindia Belanda. Sebagai contoh, *Bondsblad* (terbit 1897), surat kabar milik

Indische Bond (perkumpulan orang-orang Indo-Belanda), sering mengekspresikan perjuangan kaum Indo untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan golongan Eropa totok dalam bidang politik.

Selain surat kabar yang berbahasa Belanda, orang-orang swasta Eropa juga menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Menurut Ahmad Adam ada tiga kategori surat kabar berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh orang-orang swasta Eropa yaitu budaya atau pendidikan, gereja, dan komersial.¹³

Dalam cakupan kategori budaya atau pendidikan, terdapat surat kabar mingguan *Bromartani* yang terbit pada 1855 di Surakarta. Pengelola mingguan ini adalah C.F. Winter Sr. dan anaknya, G. Winter. *Bromartani* berisi berbagai artikel tentang ilmu pengetahuan, berita-berita dari luar negeri, berita kelahiran, kematian, penawaran dan pelelangan, keputusan pemerintah, pengangkatan pegawai pemerintah, artikel-artikel tentang pertanian dan industri, hikayat atau dongeng, dan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana-mana. Pada tahun yang sama, di Surakarta terbit juga *Poespitamantjawarna* di bawah pimpinan redaksi De Jonge Winter. Kedua surat kabar tersebut ditulis dalam bahasa Jawa *kromo inggil* dan memuat artikel tentang pengetahuan, kebudayaan, dan informasi-informasi lainnya seperti berita kelahiran, pengumuman pemerintah, pengangkatan pegawai, dan lain-lain.

Dalam kategori komersial, terbit antara lain mingguan *Soerat Kabar Malaijoe* di Surabaya pada tahun 1856. Mingguan ini berbahasa Melayu, di bawah redaksi Führi, dan memuat berita-berita perdagangan di Jawa Timur. Lange & Co. di Batavia menerbitkan mingguan berbahasa Melayu *Soerat Chabar Betawi* pada tahun 1858. Surat kabar ini ditulis dengan huruf latin dan Arab, dan memuat berita tentang perdagangan dan peristiwa-peristiwa di Batavia serta daerah-daerah lain di Jawa. Van Dorp di Semarang menerbitkan *Selomporet Melajoe* pada tahun 1860, dan berlangsung sampai dengan tahun 1911. *Selomporet Melajoe* memuat terutama advertensi, berbahasa Melayu pasar, dan ditujukan untuk kepentingan bisnis.

Untuk kepentingan gereja, pada tahun 1868 di Minahasa terbit majalah bulanan *Tjahaja Siang*, dengan editornya Graafland yang dibantu oleh para pembantu pendeta dan murid-murid sekolah misi. *Tjahaja Siang* memuat terutama hal-hal keagamaan dan pendidikan.

Untuk penyebaran agama Kristen, di Batavia terbit mingguan *Biang Lala*. Mingguan ini berisi artikel-artikel tentang agama Kristen dan kisah-kisah dari Bibel, dan editornya adalah J.M. Arnold.

Pada awal abad ke-20, seiring dengan kebangkitan nasionalisme Cina di Jawa, orang-orang Cina peranan juga ikut meramaikan usaha penerbitan surat kabar. Pada tahun 1901, terbit *Li Po* di Sukabumi, kemudian disusul oleh penerbitan *Pewarta Soerabaja* (1902), *Warna Warta* (Semarang, 1902), *Chabar Perniagaan* (Batavia, 1903), *Ik Po* (Surakarta, 1904), *Djawa Tengah* (Semarang, 1909), dan *Sin Po* (Batavia, 1910). Pers milik orang Cina peranan itu menawarkan lahan pekerjaan baru bagi golongan intelektual bumiputera di kota-kota yang tidak suka bekerja sebagai pangreh praja. Bagi golongan intelektual bumiputera, pers Cina peranan yang menggunakan bahasa Melayu itu memiliki arti penting sebagai media untuk menyebarkan ide-ide mereka. Menurut Heather Sutherland, pers Cina peranan menjadi model bagi pers bumiputera, dan memberikan pengalaman profesional bagi orang-orang bumiputera sebagai editor dan reporter.¹⁴

Setelah orang-orang Belanda dan Cina memelopori usaha dalam bidang penerbitan pers, orang bumiputera juga tergugah untuk terjun dalam bidang jurnalistik, terutama setelah berdiri organisasi-organisasi yang bersifat kebangsaan dan keagamaan. R.M. Koesoemo Oetoyo dapat disebut sebagai orang Jawa pertama yang menerbitkan surat kabar. *Pewarta Prijaji*, surat kabar ini terbit untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 1900.

Surat kabar *Pewarta Priyayi* memuat artikel yang berhubungan dengan dunia priyayi. Isi *Pewarta Prijaji* mendorong masyarakat priyayi agar mengetahui berbagai aturan yang harus dijalankan baik oleh kalangan priyayi sendiri maupun untuk masyarakat umum, menambah pengetahuan para priyayi sebagai bekal menjalankan tugas sebagai pegawai pangreh praja, dan hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan kebudayaan Jawa. Surat kabar dengan bahasa Melayu rendah ini diterbitkan di Semarang sebagai bulanan. R.M. Koesoemo Oetoyo memegang pimpinan redaksi dan editor utama. Di halaman muka tertulis nama surat kabar itu dalam huruf kapital: PEWARTA PRIJAJI. Di bawahnya ditulis keterangan:

“Soerat kabar Boelanan, aken bergoena Prijaji Djawa di Poelo Djawa dan Madoera. Redacteur: Raden Mas Oetoyo, Djoeroebasa Djawa di Soerakarta, Dikaloewarkan dan ditjita di Semarang-Drukkerij en Boekhandel Directeur P.A. van Asperen van der Velde.”

Surat kabar ini berhenti terbit pada pertengahan tahun 1903, karena pemimpin redaksinya terlampaui sibuk dengan jabatan barunya sebagai Bupati Ngawi.

Medan Prijaji merupakan media bagi orang bumiputera untuk mengekspresikan pandangannya tentang kesejahteraan dan pendidikan rakyat bumiputera, saluran untuk menyampaikan kritik terhadap golongan priyayi yang korup dan pegawai negeri yang mengeksploitasi *wong cilik* atau rakyat jelata.¹⁵ *Medan Prijaji* merekrut jurnalis-jurnalis yang telah berpengalaman untuk staf redaksinya, yaitu Martodarsono, G. Gandawinoto, dan Marco Kartodikromo. Karena kritik-kritiknya yang keras terhadap pemerintah kolonial, pada Maret 1910 Tirtoadisoejo diasingkan selama 2 bulan ke Teluk Betung, Lampung.¹⁶ Setelah kembali dari pengasingannya, Tirtoadisoejo kembali bekerja sebagai kepala editor *Medan Priyayi*. Karena Tirtoadisoejo masih terus melancarkan kritik-kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, *Medan Prijaji* harus dihentikan penerbitannya pada tahun 1912.

Sejak Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, pers menjadi alat untuk mengungkapkan perasaan bangsa yang dijajah. Pembentukan Budi Utomo segera disusul oleh pendirian organisasi-organisasi lainnya, seperti Sarekat Islam, Indische Partij dan Partai Komunis Hindia (PKI) yang masing-masing menerbitkan surat kabar sebagai “corong” organisasi.

Sarekat Islam Surabaya menerbitkan *Oetoesan Hindia* (1913-1923) setelah Kongres Sarekat Islam pada tanggal 26 Januari 1913. Redaktornya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, Sosroboto, dan Tirtodanoedjo. Sebagai “corong” Sarekat Islam, *Oetoesan Hindia* menyuarakan Islamisme dan bersifat radikal nasionalistis. Pada tahun 1923, *Oetoesan Hindia* terpaksa menghentikan penerbitannya, karena terjadi perselisihan internal dalam Sarekat Islam, dan banyak pelanggan yang tidak membayar uang langganan.

Oetoesan Hindia bukan satu-satunya media Sarekat Islam. Sarekat Islam Surakarta menerbitkan *Sarotomo*, dan Sarekat Islam Betawi

memiliki *Pantjaran Warta*. Sarekat Islam Semarang memiliki harian *Sinar Djawa* (1914-1918), yang kemudian bernama *Sinar Hindia* (1918-1924). Harian ini diwarnai oleh kritik-kritik tajam para jurnalis dan redaktornya seperti Semaoen, Darsono, dan Marco Kartodikromo. Pemerintah kolonial mewaspadai *Sinar Hindia* sebagai surat kabar ekstrimis. Sarekat Islam Cilacap mempunyai organ *Pantja Indra* (1916-1917), dan Sarekat Islam Sokaraja, Banyumas, mempunyai *Perasaan* (1919).

Indische Partij, yang berdiri pada tahun 1912 dan dibubarkan pada tahun itu juga, memiliki *Het Tijdschrift* dan *De Expres*. Redaktornya yang terkenal adalah E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoekoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Kedua surat kabar itu berbahasa Belanda, dan mengekspresikan cita-cita untuk mencapai kesatuan dan kemerdekaan Indonesia. Karena sikap politik ini, Douwes Dekker, Tjipto Mangoekoesoemo, dan Suwardi Soerjaningrat diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913. Dari Belanda, mereka tetap melakukan perjuangan politik dan jurnalistik.

Setelah Partai Komunis Hindia berdiri pada tahun 1920, khasanah pers Indonesia semakin beragam karena munculnya surat kabar milik partai komunis dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Pada tahun 1925 terdapat lebih dari 20 penerbitan partai komunis di berbagai kota.

Pada pertengahan dekade ke-2 sampai abad ke-20, pers bumiputera semakin menunjukkan warna ke-Indonesiaannya. Pada tahun 1924, para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme Indonesia secara jelas yaitu *Indonesia Merdeka*.

Pada 1900-an hasrat akan kemajuan yang telah dimulai kurang lebih pada dasawarsa terakhir abad sebelumnya, telah mewujudkan dalam bentuk tumbuhnya masyarakat koperasi yang mendirikan toko-toko priyayi di beberapa tempat. Jika pada dasawarsa terakhir abad ke 19 beberapa kelompok dan asosiasi kecil lokal dibentuk oleh kalangan priayi dan guru, pada 1900 kebutuhan akan organisasi masyarakat Jawa yang lebih besar dan beranggotakan kelompok yang lebih luas lebih dirasakan lagi oleh kalangan elit kaum pribumi. Dalam sebuah artikel di *Pewarta Priayi*, R.M. Tjokroadikoesoemo mendorong agar para pemuka priyayi mendirikan sebuah organisasi Jawa yang dapat menggali soal

persatuan Jawa, kerja sama saling menguntungkan, pengembangan pendidikan, mendorong priyayi Jawa agar menghargai profesi di bidang pertanian dan perdagangan, mendorong semangat belajar, memupuk minat membaca surat kabar dan buku, serta memungkinkan orang Jawa mengerti kewajiban mereka terhadap masyarakat dan pemerintah. R.M. Tjokroadisurjo juga mengusulkan kendati orang Belanda dan Jawa bisa menjadi anggota, pemimpin organisasi ini seyogyanya bupati, patih atau wedana.

Kepedulian akan kemajuan yang sangat mempengaruhi masyarakat Hindia Belanda memberi Brousson ide mendirikan majalah yang bisa menjadi juru bicara intelektual baru itu. Pada pertengahan 1902, Brousson membuat kesepakatan dengan Abdul Rivai untuk menerbitkan sebuah majalah bergambar di Belanda untuk diedarkan di Hindia Belanda¹⁷. Pada Juli 1902, *Bintang Hindia* terbit untuk pertama kali didirikan oleh Brousson dan Abdul Rivai di Negeri Belanda. Atas usaha Brousson dalam mempertahankan bantuan dari pemerintah justru menjadikan *Bintang Hindia* lembaga separuh resmi milik pemerintah pada tahun ketiga kehadirannya. Ketika *Bintang Hindia* diluncurkan pada akhir 1902, Abdul Rivai sedang bersiap untuk ujian masuk sekolah kedokteran di Amsterdam, pada saat yang sama ia juga sedang menunggu keputusan dari Kementerian Jajahan yang pada 5 November 1899 ia surati untuk meminta penjelasan mengenai kemungkinan dirinya dan lulusan Sekolah Dokter Jawa lainnya dibebaskan dari ujian itu. Selama di Amsterdam, sebagaimana Brousson, Rivai juga dihubungkan dengan kepemimpinan Algemeen Nederlandsch Verbond dan Vereeniging Oost en West. Dua organisasi yang beranggotakan mantan pejabat Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda ini dikenal sebagai penyokong utama politik etis. Dari merekalah biasanya Brousson memperoleh bantuan. Pada akhir 1902, dewan pimpinan kedua asosiasi ini menyurati Kementerian Jajahan mendesak pemerintah agar menyokong *Bintang Hindia* yang bertujuan: mempromosikan pertumbuhan kebudayaan pribumi dan memperkuat ikatan antara Belanda dan wilayah jajahannya.¹⁸

Surat kabar yang tercetak itu dalam catatan sejarah sebagaimana yang diidentifikasi oleh Robert van Niel bahwa pada akhir abad XIX sudah ada surat kabar yang berbahasa Jawa dan Melayu. Pada tahun 1912 di Hindia Belanda telah terbit dua belas (12) surat kabar di kota-

kota besar di Indonesia seperti Batavia, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Padang. Dari 12 terbitan itu, 6 di antaranya terbit di Padang.¹⁹ Fakta ini menunjukkan dua hal, pertama kebutuhan informasi tercetak (budaya membaca) warga Padang sangat membutuhkan bahan bacaan. Dari membaca itu pula terbuka wawasan baru tentang dunia luar yang lebih maju. Kedua, adalah terjadinya peningkatan sosial ekonomi. Perkembangan ekonomi menjadi penunjang pembiayaan percetakan surat kabar sehingga terus berlanjut, di samping sumber daya manusia yang memang menunjang untuk hadirnya surat kabar sudah tersedia melalui pendidikan di Sumatera Barat.

Pada tahun 1900 lahir kesadaran baru di mana kelas sosial baru ikut terseret ke dalam arus pusaran politik. Ide-ide kemajuan, persamaan nasib, dan konflik yang terus terjadi melahirkan kesadaran dan makin gigihnya perlawanan terhadap kolonial Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia dan Cina menjadi sebagian dari faktor utama yang menggerakkan sejarah pada arus perubahan ini. Organisasi yang bersifat nasional lahir pada tahun 1908 sebagai perkumpulan nasionalis pertama di Jawa, yakni Budi Utomo.²⁰ Organisasi Budi utomo merupakan perkumpulan kaum muda kelas priyayi yang mengenyam pendidikan dengan tujuan pada pemberdayaan kebudayaan dan mendorong berdirinya sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia. Gerakan ini kemudian menjadi sebagian dari tumbuhnya kesadaran nasional²¹ dan munculnya arah baru dalam gerak sejarah Indonesia yang dipelopori oleh kaum muda Indonesia yang berpendidikan.

Catatan Akhir :

- 1) Nina Herlina; Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern, dalam Taufik Abdullah (ed); *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid V*; Jakarta: IBVH, 2012, hal. 243.
- 2) Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*; Jakarta: KPG, 2008, hal. 331.
- 3) Nina Herlina; *op.cit*, hal. 244
- 4) *Ibid*.
- 5) *Ibid*; hal. 246
- 6) Taufik Abdullah; *Indonesia Toward Democracy*; Singapore: ISEAS; 2009; hal. 5-7.
- 7) *Ibid*; hal 7-9
- 8) Nina Herlina; *op, cit*, hal. 263.
- 9) Soegijanto Padmo; Transportasi dan Komunikasi, dalam Taufik Abdullah (ed); *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid V*; Jakarta: IBVH, 2012, hal. 154-157.
- 10) *Ibid.*,
- 11) *Ibid.*, hal. 157
- 12) *Ibid.*, hal. 165 - 169
- 13) Dewi Juliati dan Gusti Asnan, Pers Bumiputera: Media Ekspresi Nasionalisme Indonesia; dalam Taufik Abdullah (ed); *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid V*; Jakarta: IBVH, 2012, hal. 296.
- 14) *Ibid.*, hal. 298
- 15) Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm. 212
- 16) *Ibid.*, hal. 224.
- 17) *Ibid.*, hal. 167.
- 18) *Ibid.*, hal. 169.
- 19) Taufik Abdullah, *Materi Pengarahan Penulisan Sejarah Pemikiran Tokoh Bangsa tanggal 26-27 Oktober 2013 di Jakarta*.
- 20) W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, *op.cit.*, hlm. 50.
- 21) *Ibid*.

BAB II

KESADARAN BERORGANISASI SEBAGAI SIMBOL KEMAJUAN

Pendidikan di Hindia Belanda diarahkan pada dua bidang yaitu pendidikan kedokteran (STOVIA) di Batavia dan sekolah teknik di Bandung. Sekolah kedokteran diadakan karena pertimbangan kesehatan yang menakutkan pemerintah kolonial Belanda, jika terserang penyakit. Epidemik kusta, kolera, dan cacar di beberapa daerah di Jawa seperti di banyumas, Surabaya, dan Batavia telah melahirkan ketakutan baru pada penduduk Eropa yang ada di Hindia Belanda. Pada saat yang sama jumlah dokter ahli dalam bidang penyakit tropis sangat terbatas jumlahnya. Wabah penyakit dan terbatasnya jumlah dokter inilah kemudian pemerintah kolonial Belanda mengadakan pendidikan Dokter di Batavia.

Sekolah teknik yang didirikan di Bandung diadakan dengan pertimbangan kebutuhan tenaga kolonial yang terbatas dalam berbagai pekerjaan teknis. Kondisi itulah yang memaksa kolonial mengubah kebijakan untuk mengedepankan pendidikan. Pada perkembangannya, politik etis yang salah satunya adalah implementasi dalam bidang pendidikan, perlahan tapi pasti telah menjadi bibit lahirnya “hasrat kemajuan” dan kesadaran sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Pendidikan telah melahirkan bibit generasi muda yang menyadari pentingnya mengatur diri sendiri, pentingnya menyadarkan masyarakat pribumi tentang identitasnya. Sekat-sekat cultural harus dileburkan untuk memupuk kesatuan, sekat-sekat kedaerahan harus dicairkan untuk mencapai tujuan bersama, kemajuan dan kebangkitan Hindia (Indonesia). Suasana ini menjadi pelecut lahirnya semangat kebangsaan.

Munculnya sekolah-sekolah di Hindia Belanda telah mendorong adanya hasrat untuk menuntut ilmu dari kalangan bumiputera. Akibat dari kemajuan pendidikan ini maka banyak pula dari kalangan bumiputera yang mengambil peran sebagai pegawai di berbagai kantor milik pemerintah kolonial selain sebagai guru, dan berbagai pekerjaan lainnya. Hal ini telah mendorong munculnya kelompok priyayi baru, yaitu kelompok masyarakat baru yang diperoleh karena mendapat peran baru sebagai kalangan terpelajar. Kaum terpelajar inilah, yang telah memunculkan pergerakan kebangsaan kebudayaan pertama yang terorganisir di antaranya yang dicetuskan oleh seorang pensiunan Dokter Jawa, Mas Wahidin Sudirohusodo yang berusaha meningkatkan bangsa Jawa melalui pengetahuan barat maupun warisan budaya sendiri. Berkat usaha dua siswa sekolah STOVIA yaitu Raden Soetomo dan Raden Gunawan, hasil perjuangan pemuda pada masa awal ini akhirnya memungkinkan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Organisasi yang baru terbentuk ini beranggotakan kaum tua yang berasal dari bangsawan Jawa. Sampai tahun 1909 Boedi Oetomo sudah beranggotakan 10.000 orang yang berasal dari Jawa dan Madura yang anggotanya hampir semua pelajar tingkat enam ke atas.¹

2.1. Boedi Oetomo – Sarekat Islam dan Organisasi Modern

Secara historis lahirnya STOVIA tidak terlepas dari berjangkitnya berbagai wabah penyakit menular dan berbahaya di daerah Karesidenan Banyumas pada 1851. Pemerintah Kolonial yang menerima laporan tersebut memiliki gagasan untuk menerbitkan buku tuntutan kesehatan yang dibagikan ke para kepala desa (lurah) dalam bahasa Jawa dan Melayu. Tujuannya agar setiap desa dapat menjaga kesehatan penduduknya, namun cara ini tidak memberikan hasil memuaskan. Selanjutnya, muncul gagasan baru untuk membentuk kelompok kesehatan dari kalangan penduduk yang dilatih dalam perawatan kesehatan. Untuk itu pemerintah memutuskan beberapa pemuda sehat dan cakap dari seluruh penjuru Pulau Jawa yang pandai menulis dan membaca huruf, baik Jawa maupun Melayu, minimal berumur 16 (enam belas) tahun untuk dididik di Rumah Sakit Militer di Weltevreden, Batavia (sekarang: Jakarta). Sebanyak 30 (tiga puluh) orang pemuda berhasil terseleksi untuk menjalani pendidikan yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun sebagai juru kesehatan dan setelah lulus bergelar “Dokter Jawa”.

Dalam perkembangannya, Direktur Sekolah Dokter Jawa, yaitu Dr. C. Eijkman pada 1889 mengajukan usul, agar pendidikan diselenggarakan selama 5 (lima) tahun. Usul ini disambut dengan saran lain, yaitu pelajar Sekolah Dokter Jawa hendaknya berasal dari lulusan *Europeesche Lager School* (ELS) dan pendidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hingga 8 (delapan) tahun. Sejak 1901, upaya pengembangan mutu Sekolah Dokter Jawa ditingkatkan menjadi *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). Dr. H.F. Roll yang disebut sebagai “Bapak STOVIA” memimpin sekolah itu sejak berdiri, yakni pada 1901 hingga 1908.

Usaha Dr. H.F. Roll tidak hanya berhenti pada perubahan Sekolah Jawa menjadi STOVIA, tetapi ia meneruskan dengan mendirikan gedung sekolah sesuai dengan gagasannya. Meskipun dana menjadi halangan utama dalam pembangunan gedung ini, berkat keuletannya ia dapat mengumpulkan sumbangan sebesar 178.000 gulden untuk membangun gedung STOVIA yang diresmikan pada 1902. Dengan dibukanya gedung baru STOVIA, bentuk pendidikannya pun menyesuaikan keadaan, seperti Tingkat Persiapan (*Voorbreiding*) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Sementara itu, Tingkat Kedokteran (*Geneeskundige*) ditambah waktu belajarnya menjadi 6 (enam) tahun. Lulusan STOVIA tidak lagi memperoleh gelar Dokter Jawa, tetapi bergelar *Inlandsch Arts*. Sejak 1903, penerimaan STOVIA diperketat dengan mengadakan ujian saringan.

Setelah berjalan selama 11 (sebelas) tahun dengan beberapa perubahan. Pada 1913 STOVIA mengalami reorganisasi yang meliputi perbaikan kurikulum; penyelenggaraan praktikum yang dilakukan secara terpisah sesuai tingkat dan jurusan; lama pendidikan untuk Tingkat Persiapan berlangsung selama 3 tahun dan untuk Tingkat Kedokteran menjadi 7 tahun; penambahan tenaga pengajar dan para asisten; serta perubahan gelar bagi para lulusan yang semula *Inlandsch Arts* (1902) menjadi *Indisch Arts*. Selain itu, STOVIA mulai menerima calon pelajar dari segala bangsa dengan biaya sendiri. Sejak 1919, pembaharuan gedung STOVIA terus dilakukan, diantaranya pemindahan klinik beserta pendidikan klinis ke *Centrale Burgelijke Ziekeninrichting* (CBS) di Salemba (sekarang: Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo /RSCM).

Sekolah yang mendidik para calon dokter tersebut memiliki kedudukan “canggung”, begitu pula dalam menyebut para pelajarnya. Mereka tidak menamakan diri “siswa” atau “murid” yang mereka anggap agak ‘rendah’ dari sisi tingkat. Selain itu, mereka juga tidak menyebut “*leerling*”, karena sebutan itu tidak memperlihatkan

perbedaannya dengan sekolah-sekolah lain yang setingkat. Oleh sebab itu, mereka memilih kata “*eleve*” dari bahasa Perancis, yang berarti ‘murid’. Penamaan ini dianggap lebih diterima di kalangan mereka, selain belum ada yang menggunakannya, sebutan itu terasa khusus bagi pelajar STOVIA. Namun, istilah “*eleve*” kemudian mengalami perubahan pengucapan menjadi ‘klepek’ untuk menyebut pelajar STOVIA, hal ini disebabkan adanya pengaruh logat Betawi. Pada perkembangannya, penyebutan “klepek’ justru diterima sebagai suatu kehormatan, di samping sebutan itu dapat menciptakan keakraban tersendiri di kalangan para pelajar STOVIA².

Gedung STOVIA yang merupakan sebuah kompleks itu terdiri dari beberapa bangunan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan dikelilingi dengan pagar rapih dan kokoh yang menyebabkan orang luar tidak mudah untuk memasuki area sekolah tersebut. Untuk menjaga disiplin para “klepek” dan mencegah keleluasaan orang dari luar masuk ke wilayah itu, di bagian depan kompleks terdapat pintu gerbang besar yang terbuat dari besi berjeruji. Pada malam hari terdapat peraturan, bahwa bagi para pelajar Tingkat Persiapan hanya diperbolehkan ke luar asrama hingga pukul 20. 00 (malam) dan bagi para pelajar Tingkat *Geneeskundig* hingga pukul 22.00 (malam).

Gedung STOVIA yang terletak di *Hospitaalweg* memiliki dua tempat sebagai satelit terbesar, yakni gedung “Langen Sawo” dan *Sumatraans Commensalenhuis* (SCS). Keduanya terletak di Kwitang dan tidak jauh dari gedung STOVIA. Di kedua tempat tersebut merupakan titik temu para “klepek” untuk membicarakan berbagai masalah tanpa agenda mulai dari yang paling ringan hingga topik-topik politik saat itu.

Sekolah dokter ini memiliki tempat unik dalam sejarah kebangsaan sebagai tempat berseminya semangat nasionalisme yang semula bersifat ke-Jawa-an, kemudian berkembang menjadi ke-Hindia-an. Dalam hal ini, STOVIA adalah sekolah pertama yang mengumpulkan murid-murid dari berbagai daerah dan tinggal dalam sebuah asrama. Selain itu, di lembaga pendidikan ini, para pelajar menerima ilmu pengetahuan dan pendidikan secara Barat yang membawa pengaruh terhadap terbukanya wawasan para pelajar menjadi semakin luas, terutama terkait kondisi masyarakat jajahan, baik yang dijajah maupun penjajahnya. Kaum pelajar ini menjadi semakin memahami tentang anggapan-anggapan lama mengenai kesukuan, perbedaan-perbedaan yang diperbesar oleh penjajah dalam rangka politik “memecah belah”.

Kondisi ini meningkatkan kesadaran munculnya bibit solidaritas nasional, seperti mulai lenyapnya secara lambat laun batas-batas kesukuan, terutama ketika mulai berinteraksi satu sama lain, karena mereka tinggal dalam satu asrama yang membawa pada rasa senasib sepenanggungan. Proses kebangsaan semakin tidak tertahankan dengan menyaksikan adanya praktik-praktik tidak wajar dan melanggar perikemanusiaan serta keadilan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap rakyat terjajahnya. Hal ini menumbuhkan rasa ketidakpuasan para pemuda pelajar terhadap keadaan masyarakat koloni dimana mereka hidup. Kesadaran terhadap lingkungan disekelilingnya tersebut mendorong para pemuda pelajar bertindak untuk mengangkat derajat bangsanya dan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Sebagai alat perjuangan, mereka mendirikan organisasi modern yang sekaligus dapat menjadi tempat mereka melatih diri sebagai pemimpin³.

Seperti, pelajar Soetomo yang tercatat sebagai mahasiswa STOVIA pada 1903 bersama-sama 13 orang dari beberapa daerah, mendirikan Perkumpulan Boedi Oetomo bersama kawan-kawannya, diantaranya, R.M. Goembrek, M. Soeraji, M. Goenawan Mangoenkoesoemo, M. Mohammad Saleh dan M. Soeleiman. Lahirnya Boedi Oetomo didorong oleh keadaan sangat kompleks dari rakyat yang tertindas oleh penjajah. Kondisi keterlantaran rakyat terjajah mendorong hasrat para kaum pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan pelajar yang bertujuan mempercepat usaha ke arah kemajuan rakyat. Kebetulan pada akhir 1907, dokter Wahidin Soedirohoesodo dari Badan Bantuan Pendidikan atau *Studiefonds* yang bertujuan menolong para pemuda Indonesia agar dapat menuntut pendidikan di Perguruan Tinggi, mengadakan ceramah yang mendapat sambutan antusias dari para pelajar STOVIA. Ceramah tersebut telah menginspirasi mereka untuk segera membentuk suatu perhimpunan⁴.

Soetomo yang waktu itu berusia 19 tahun, segera menghubungi para pelajar lainnya di luar Batavia. Ia menulis surat tentang cita-citanya untuk mendirikan perhimpunan pelajar kepada kawan-kawan pelajar di Yogyakarta, Semarang, dan Magelang. Perwujudan hasrat ini dipercepat dengan adanya berita bahwa pada Mei 1908 pemerintah Hindia Belanda akan membuka Sekolah Opsir Bumiputra. Pendirian sekolah itu mendapat sambutan, terutama dari kalangan pejabat pemerintah serta sebagian rakyat yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya tentang maksud terselubung dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, para pelajar STOVIA tetap mencurigai maksud pemerintah tersebut. Mereka

prihatin melihat rakyat yang terpecah belah sikap mereka terhadap pendirian Sekolah Opsir Bumiputra yang dibiayai dengan pajak rakyat. Dalam praktiknya, sekolah ini hanya dinikmati oleh anak-anak bangsawan dan setelah lulus mereka diarahkan untuk patuh pada pemerintah. Cara ini semakin menjauhkan mereka dari pemikiran kebangsaan.

Di samping itu, kesadaran terhadap kondisi kemiskinan rakyat dan kehidupan feodalisme yang membelenggu mereka merupakan hal yang antagonis. Pada 20 Mei 1908 dalam sebuah ruang kelas STOVIA dengan dihadiri beberapa pemuda dicetuskan perkumpulan Boedi Oetomo yang diketuai Soetomo. Oleh karena tindakan tersebut, Soetomo dan kawan-kawannya harus menghadapi sikap para dosen STOVIA yang menuduh para pemuda ini melawan pemerintah Hindia Belanda. Tuduhan itu disertai ancaman, apabila kegiatan tersebut tidak dihentikan maka Soetomo akan dikeluarkan dari sekolah. Suatu keberuntungan bagi Soetomo dan kawan-kawan, karena direktur STOVIA, Dr. H.F. Roll mendiskusikan persoalan Soetomo dan berhasil menenggang perasaan para dosen yang anti Boedi Oetomo dengan mengemukakan pertanyaan:

“Apakah di antara tuan-tuan yang hadir di sini tidak ada yang lebih ‘marah’ dari Soetomo waktu tuan-tuan berumur 18 tahun?”

Dr. H.F. Roll yang berpikiran maju memberikan sumbangan pemikiran guna membantu perjuangan para pelajar Sekolah Dokter Jawa.

Sejak berdiri Boedi Oetomo di gedung STOVIA, pihak pemerintah kolonial Belanda mengikutinya dengan cermat. Himpunan dokumen-dokumen resmi sekitar 1907-1910 terdapat dalam buku Dr. Van der Wall, berjudul *“De opkomst van de Nationalistische Indisch”* (Munculnya gerakan nasional di Hindia Belanda) berisi uraian betapa tajamnya pemerintah mengamati periode awal abad 20. Namun, menurut laporan resmi pemerintah, bahwa Boedi Oetomo sebagai satu usaha yang berkeinginan untuk terus maju dianggap tidak berbahaya. Walaupun demikian, pemerintah memberikan peringatan pula apabila suatu saat Boedi Oetomo muncul dengan tujuan-tujuan politik tersembunyi, maka organisasi itu diancam dibubarkan.⁵

Selain itu, pemerintah mensinyalir pula, pengaruh Douwes Dekker terhadap para pelajar STOVIA sangat besar sekali. Pengaruh pribadi Douwes Dekker terhadap para pemuda pelajar STOVIA lebih kuat bila dibandingkan dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di

Bataviaasch Nieuwsblad. Dalam hal ini, Douwes Dekker secara intensif mengadakan hubungan yang erat dengan para pelajar STOVIA. Oleh karena keakraban dan kekayaan literatur yang dimilikinya, rumah Douwes Dekker di Kramat, Jakarta yang lokasinya tidak jauh dengan gedung STOVIA, seolah-olah dijadikan “ruang bacaan” bagi para pelajar STOVIA. Di tempat ini, Douwes Dekker secara terus menerus mengisji jiwa para pelajar dengan semangat juang dan patriotisme. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila rumah Douwes Dekker disebut sebagai tempat kelahiran “jiwa Boedi Oetomo” yang memancar dari pikiran dan tindakan Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan kawan-kawan. Kemudian, Douwes Dekker mendapat julukan “temannya orang Jawa di kalangan pelajar itu”. Bahkan, oleh Soetomo dan kawan-kawannya di STOVIA, Douwes Dekker disebut sebagai “calon” yang mestinya ikut duduk dalam pengurus Boedi Oetomo⁶.

Pergerakan Boedi Oetomo pada taraf pertama memang bukan pergerakan politik, dan keanggotaannya juga masih terbatas pada suku Jawa dan Madura. Dalam 5 (lima) tahun pertama Boedi Oetomo benar-benar merupakan kancah atau muara keinginan-keinginan bergerak maju dengan medan tanpa ada yang membatasi. Adapun, hal yang hendak dicapai adalah kehidupan terhormat bagi bangsa yang dapat ditafsirkan menjadi watak khas perjuangan guna mencapai kemerdekaan dari semua pergerakan kebangsaan di Indonesia. Di sinilah letak martabat pergerakan Boedi Oetomo sebagai perintis kebangkitan nasional dalam membangun solidaritas modern dan pada akhirnya pergerakan itu mengalami kemunduran pada 1913 akibat munculnya aliran-aliran baru yang lebih radikal.

Berdirinya Boedi Oetomo, seolah menjadi pelita bagi munculnya organisasi pemuda-pemuda yang lainnya. Satiman Wirjosandjojo seorang pelajar STOVIA pada tahun 1915, mengambil inisiatif mendirikan perhimpunan untuk para pelajar pendidikan menengah dan lanjut. Satiman pada tahun 1912, telah menjadi berita besar ketika memprotes keras peraturan tentang pakaian di sekolah kedokteran di Batavia. Pada waktu itu pelajar Jawa diwajibkan mengenakan *jarik* (kain) dan *udheng* (ikat kepala). Di atas *udheng* itu dikenakan topi berlambang kedokteran. Suatu pemandangan yang menggelikan, karena calon-calon dokter yang biasanya berasal dari kalangan priyayi itu dicemoohkan sebagai ‘kondektur trem’. Satiman berjuang agar para pelajar dapat mengenakan pakaian bebas. Setelah dipertimbangkan, akhirnya direktur STOVIA memutuskan untuk meluluskan permohonan

itu, karena ternyata pakaian Jawa lebih mahal daripada pakaian barat dan lebih bebas memakainya.⁷

Satiman bersama Kadarman dan Soenardi mendirikan Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia), di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. Yang menjadi anggota organisasi ini terdiri dari 50 orang pelajar STOVIA. Tujuannya adalah mengadakan satu tempat latihan untuk calon-calon pemuka nasional yang cinta tanah air. Kebanyakan anggotanya adalah dari Jawa Tengah dan Timur. Murid-murid dari Sunda dan Madura berpendapat bahwa perkumpulan ini terlalu sempit yang terfokus pada Jawa. Akibat kritik ini, pada kongres pertama di Solo tahun 1918, Tri Koro Dharmo namanya diubah menjadi Jong Java dengan maksud untuk menarik golongan dari Sunda, Bali dan Madura. Meskipun sudah membuka diri, kenyataannya anggota yang ikut Jong Java adalah kebanyakan pemuda dari Jawa, hal ini terbukti pada kongres ke-2 tahun 1919, hanya sedikit dihadiri wakil yang tidak berbahasa Jawa. Jong Java hampir setiap tahun mengadakan kongres. Dalam kongres ke-5 tahun 1922 di Solo, Jong Java menetapkan bahwa tidak akan mencampuri aksi dan propaganda politik, kegiatan lebih diarahkan pada hubungan antar murid sekolah menengah, mempertinggi perasaan kebudayaan sendiri, dan olah raga. Jong Java berkewajiban membentuk calon pemimpin laki dan perempuan, sedangkan pembicaraan politik dijalankan untuk menambah pengetahuan. Anggota baru akan ikut dalam politik kalau sudah lulus sekolah. Dalam kongres tahun 1924, beredar wacana yang dibawa oleh R Sam (Samsuridjal) dibawah pengaruh Agus Salim, yang ingin membagi keanggotaan Jong Java yang pada waktu itu jumlahnya sekitar 2.000 orang, akan dibagi dalam 2 kelompok, anggota muda berumur di bawah 18 tahun tidak boleh mencampuri urusan politik, anggota yang berumur di atas 18 tahun boleh ikut dalam gerakan politik yang akan dibimbing oleh golongan ke 3 Jong Java. Dengan demikian Jong Java diharapkan akan ada gunanya. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Akibatnya kekecewaan ini, para pendukung mengusulkan untuk keluar dari organisasi ini dan mendirikan Jong Islamieten Bond.⁸

Semakin meresapnya faham Indonesia Raya, mengakibatkan Jong Java mengubah arah organisasi. Pada kongres 1926 di Solo perkumpulan berubah haluan untuk memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan dengan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya serta ikut dalam menyebarkan dan memperkuat faham keIndonesiaan.

Sebelumnya ketua RT Djaksodipuro yang kemudian berganti nama RT Wongsonegoro dalam pidatonya juga mengatakan bahwa Jong Java tidak hanya membangun Jawa Raya tetapi juga Indonesia merdeka nantinya⁹.

Perubahan pandangan di kalangan Jong Java, telah membawa perkumpulan ini pada dilema fusi atau federasi. Dalam kongresnya pada Desember 1927 di Semarang masalah fusi dan federasi belum bisa terjawab, meskipun dorongan untuk Indonesia merdeka semakin kuat dan tidak hanya pada Jawa Raya. Rasa satu tanah air dan satu bangsa di kalangan kaum muda menyebabkan neraca pertimbangan menyebelah ke fusi. Dalam kongres Jong Java, pada tanggal 31 Desember 1928 di Yogyakarta, Jong Java menetapkan untuk berfusi dan menyatakan sudah datang masanya untuk membuktikan dengan tindakan nyata bahwa perkumpulannya dapat mengorbankan dirinya. Adanya kontak dengan organisasi pemuda dari daerah lain, akhirnya pada kongres keempat Jong Java diputuskan untuk mengadakan federasi dengan Jong Sumatranen Bond. Dalam kongres tersebut juga diputuskan untuk menerjemahkan surat-surat Kartini yang dihimpun oleh Abendanon dalam buku yang berjudul *Door Duisternis tot Licht*. Selain itu, dalam kongres-kongres selanjutnya Jong Java telah memutuskan agar bahasa Melayu lebih banyak dipergunakan dalam Jong Java. Putusan ini sangat penting karena akan menjadi jembatan dalam kongres pemuda. Dalam kongres Jong Java yang ke-9 pada tanggal 27 – 31 Desember 1931, diputuskan untuk mengganti perkataan *Inlandsch* (bumi putera) dengan perkataan *Indonesisch* (Indonesia).¹⁰

Organisasi pergerakan yang ikut menguatkan semangat nasionalisme Indonesia lainnya adalah Sarikat Islam (SI). Sarikat Islam lahir dari induk Sarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin pada tahun 1911. H. Samanhudi adalah seorang pedagang yang berasal dari Laweyan Solo Jawa Tengah. Sarikat Islam lahir pada tahun 1912 di Solo sebagai reaksi atas monopoli perdagangan batik Cina di Lawean Solo. Seperti diketahui, orang-orang Cina dalam perdagangannya di Hindia Belanda selalu di bawah perlindungan kolonial Belanda. Jika SI lahir atas respon melawan dominasi Cina dalam perdagangan batik, maka sama saja dengan SI ikut melawan pemerintah kolonial Belanda. SI juga didirikan untuk tujuan melindungi pedagang pribumi dari penguasaan para pedagang Cina. Realitas itu pada kenyataannya melahirkan persaingan antara pedagang pribumi di bawah perlindungan Sarikat Islam dengan para pedagang Cina yang

dilindungi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dampak dari melawan pemerintah pada akhirnya harus diterima Sarikat Islam berupa pelarangan aktivitasnya.

Sarikat Islam kemudian melanjutkan perjuangannya di Surabaya. Di Surabaya SI berkembang baik di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Syarikat Islam Surabaya menggunakan rumah HOS Tjokroaminoto sebagai tempat memikirkan dan merumuskan pergerakan. Sukarno menjuluki rumah HOS Tjokroaminoto dengan sebutan “Dapur Nasionalisme Indonesia”.¹¹ Tokoh-tokoh yang lahir dari SI yang digembleng di Surabaya di antaranya adalah Semaoen, tokoh SI cabang Semarang yang kemudian menjadi tokoh PKI yang sangat terkenal. Selain itu, Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo, tokoh Islam fundamentalis yang menginginkan Negara DI/TII dan lahirnya Negara Islam Indonesia.

Di bawah HOS Tjokroaminoto, SI di Surabaya menggunakan landasan ideologis Islam untuk membangun kesadaran kebangsaan. Islam dimunculkan sebagai *counter* atas perkembangan arus kristenisasi dan melawan ideologi kolonial sebagai penjajah. Tampilnya SI dalam perjuangan dan pemikiran kebangsaan menjadi justifikasi atas adanya pendapat bahwa Islam pada awal abad XX menjadi salah satu kekuatan pembebas dari belenggu penjajah. Pada level ini beberapa pergerakan kebangsaan melawan kolonial Belanda di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Banten, Aceh, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat menjadi bukti pembenar atas ideologi tersebut.

SI dalam perjuangannya di bawah HOS Tjokroaminoto tidak menggunakan senjata, tetapi melalui bangunan gagasan melawan kolonialisme dengan organisasi sosial politik. Organisasi SI telah mengisi ruang ingatan anak bangsa tentang pentingnya harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penindasan serta berbagai kewajiban pajak. Sarikat Islam dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh pemikiran Pan-Islamisme yang berkembang di Mesir. Tokoh pemikir Pan-Islamisme adalah Sayid Jamaluddin Al Afghani. Pemikiran tokoh Mesir itu menawarkan sosialisme Islam sebagai sosialisme sejati. Sosialisme Islam lebih baik daripada sosialisme Marxis yang cenderung mengingkari keberadaan Tuhan. Bukti adanya pengaruh tradisi pemikiran Mesir dalam tubuh SI diketahui dari HOS Tjokroaminoto. Menurutnya, “*Sosialisme Islam menjadi lebih baik seiring dengan meningkatnya keimanan kaum muslimin dan kian menguatkan rasa persaudaraan sesama muslim*”.

SI pada periode awal terkesan berbagi peran dengan Muhammadiyah karena sama-sama mengusung roh pembaharuan Islam. Perbedaannya terletak pada orientasi ruang peranannya. Muhammadiyah lebih menggarap sosial keagamaan masyarakat, sedangkan SI menggarap segmen politik. Keanggotaan SI juga sangat terbuka dan tidak seperti Budi Utomo yang hanya dimasuki kaum bangsawan dan terdidik.

Pada tahun 1913 berdiri *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) sebagai bagian dari konflik antara Sarekat Islam dan kaum komunis. Di antara pendirinya adalah orang-orang Belanda Sneevliet, Brandseder dan Dekker, sedangkan dari tokoh pribumi adalah Semaun. ISDV pada awalnya mencari kontak dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam dan Indische Partij tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1920 ISDV berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan ketua Semaun dan wakil ketua Darsono, selanjutnya pada tahun 1924 diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada kongres yang pertama tahun 1920 keputusan penting yang diambil bahwa partai komunis Indonesia menggabungkan diri kepada *Comunistische Internationale* (Comintern) dan akan mengambil sikap kooperasi dengan pertimbangan agar dapat berbicara secara leluasa di *Volksraad*. Meskipun demikian nama-nama yang diajukan oleh partai komunis tidak satupun yang dipanggil oleh Pemerintah kolonial. Mulai tahun 1924 PKI menyebarkan pengaruhnya ke pedesaan Jawa dan keluar Jawa dan sejak itu partai menyiapkan untuk mengadakan revolusi. Dorongan anarkhis lebih kuat mengarah pada penggulingan terhadap pemerintah Belanda yaitu memberontak yang dianggap lebih baik daripada menerima dominasi kolonial. Sehingga pada tahun 1926 terjadi pemberontakan di Banten dan 1927 terjadi pemberontakan di Sumatera Barat. Pemberontakan itu dengan mudah ditumpas oleh pemerintah karena tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya sebanyak 13.000 orang ditangkap, sekitar 1.300 orang dibuang ke Digul. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, sehingga para pengikutnya yang di luar negeri mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di antara tokohnya adalah Tan Malaka, sedangkan Semaun, Darsono dan Alimin meneruskan propagandanya untuk mendukung aksi revolusioner di Indonesia.¹²

2.2. Solidaritas Hindia: *Indische Partij*

Munculnya tulisan di berbagai media merupakan sarana edukasi secara informal yang memiliki *value* bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Bahkan, tulisan-tulisan yang dimuat, seperti di *Bataviaasch*

Nieuwsblad dianggap membahayakan pemerintah. *Bataviaasch Nieuwsblad* yang dipimpin J.H. Ritman memiliki nama baik di kalangan kaum pelajar, karena dinilai obyektif. Surat kabar tersebut bersifat bebas dan tidak menurut haluan pemerintah kolonial secara membabi buta. Oleh karena itu, surat kabar ini memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembang kesadaran para pelajar, seperti dari STOVIA terhadap persolan solidaritas Hindia. Selanjutnya, pada Mei 1912, *Het Tijdschrift* yang kemudian terkenal dan juga menjadi bacaan kaum cendekiawan bumiputera pun diterbitkan sebagai majalah berkala untuk menggantikan *Bataviaasch Nieuwsblad*.

Pada September 1912 terbit pula harian *De Express* yang berhaluan revolusioner nasionalistis. E.F.E. Douwes Dekker¹³ sebagai redaktur mengajak para pemuda yang berjiwa nasionalis untuk menjadi pembantu tetap di majalah tersebut, seperti R.M. Soewardi Soerjaningrat¹⁴, sedangkan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menjadi anggota dewan redaksi. Bergabungnya ke dua tokoh tersebut menguntungkan Douwes Dekker dalam menambah kekuatan guna mewujudkan misi majalah dalam mengkritisi pemerintah kolonial. Ketiganya, yakni Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo bekerja bahu membahu yang kemudian dikenal dengan sebutan "*Janget Kinatelon*" atau "Tiga Serangkai".

Sesudah aliran nasionalisme dan revolusioner disiarkan melalui *Het Tijdschrift* dan *De Express* sebagai alat propaganda mampu memasuki alam pikiran dan perasaan para pemuda pergerakan, kedua media ini menjadi pelopor kelahiran *Indische Partij* yang didirikan oleh "Tiga Serangkai" pada 6 September 1912. Partai ini, sejak lahir secara langsung memperkenalkan diri sebagai partai politik yang berhaluan kebangsaan, kerakyatan dan kemerdekaan. Secara historis, *Indische Partij*, perkumpulan ketiga yang berdiri pada masa suasana Kebangkitan Nasional saat itu, setelah Budi Utomo dan, kemudian Sarekat Islam, merupakan organisasi yang secara awal mengembangkan faham persatuan dan kemerdekaan bagi bangsa Hindia. Para pemimpin *Indische Partij* berusaha menyadarkan rasa kebangsaan bangsa Hindia dan mempersiapkan menjadi bangsa yang bebas merdeka. Dalam hal ini, Boedi Oetomo dan Sarekat Islam hanya membatasi keanggotaannya pada pribumi, tetapi *Indische Partij* tidak hanya kalangan pribumi saja, tetapi siapa pun atau dari bangsa apapun yang lahir di Hindia dan mencintai tanah airnya, dapat diterima menjadi anggota organisasi ini. Jadi, peranakan Eropa, peranakan Arab, peranakan Cina dapat diterima

sebagai anggota *Indische Partij*, asalkan mereka mengakui Hindia sebagai tanah tumpah darahnya. *Indische Partij* yang bertujuan mempersiapkan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dianggap sangat membahayakan pemerintah kolonial Belanda.

Ketika awal didirikan *Indische Partij*, banyak orang Indo Belanda masuk ke dalam partai itu. Namun, jumlah tersebut menjadi berkurang, setelah Douwes Dekker tidak menerima orang-orang Indo yang menuntut sebagai golongan minoritas. Douwes Dekker menghendaki agar orang-orang Indo justru meleburkan diri sebagai bangsa Hindia. Dalam persoalan identitas dirinya pun, Douwes Dekker sebagai orang Indo Belanda tidak pernah menggunakan kebangsaan Belanda. Ia selalu menggunakan kebangsaan *Indier*, hal ini dilatarbelakangi belum adanya istilah *Indosier* atau “orang Indonesia” waktu itu. Ketika dipromosikan sebagai doktor di bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss, ia harus memberitahukan kebangsaannya. Ia menyebut *Indier* dan ditolak, oleh karena secara internasional istilah *Indier* merupakan nama kebangsaan bagi India. Akhirnya, Douwes Dekker menggunakan kebangsaan *Javaan* yang berarti orang Jawa¹⁵.

Kaum Indo Belanda merasa sangat kecewa terhadap ucapan Douwes Dekker yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh memiliki tanah, karena bumi Hindia hanyalah diperuntukkan bagi putera-puteri Hindia saja. Mereka yang ingin memiliki tanah harus menjadi orang Hindia terlebih dahulu dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh rakyat, seperti ronda malam dan lain-lain. Sementara itu, Douwes Dekker pun beranggapan untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka dan berdaulat haruslah bersemboyan “*rawe-rawe rantas malang malang putung*”, seperti yang tertulis dalam lencana *Indische Partij* berbentuk perisai. Kewarganegaraan tidak memperdulikan asal kebangsaan, dalam hal ini yang terpenting adalah mau mengakui Hindia sebagai tanah airnya untuk menjadi anggota *Indische Partij* yang dapat menjadi pemersatu dalam penderitaan bersama di koloni.

Walaupun *Indische Partij* masih sangat muda usianya, namun langkah-langkahnya sangat tegas dan revolusioner. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut dikirimkan kepada pemerintah untuk meminta disahkan dan diakui sebagai badan hukum. Dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomer 1 tanggal 4 Maret 1913 permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa perkumpulan itu didasarkan pada tujuan politik yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Menurut pasal 111 Perarutan Pemerintah Hindia

Belanda, organisasi semacam itu harus dilarang dan tidak dapat disahkan AD/ART-nya. Pada 5 Maret 1913, pimpinan partai mengajukan lagi permohonan kepada pemerintah untuk pengesahan dan pengakuan sebagai badan hukum. Dalam permohonan kedua ini diadakan perubahan Anggaran Dasarnya. Dalam pasal 2 Anggaran Dasar disebutkan bahwa perkumpulan dicabut dan diganti kata-kata seperti yang tercantum pada Anggaran Dasar *Insulinde*. Perkumpulan *Insulinde* merupakan perhimpunan orang-orang Belanda peranakan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan politik, meskipun lebih banyak ditekankan pada bidang sosial. Walaupun demikian, pemerintah tetap menolak dengan Surat Keputusan tertanggal 11 Maret 1913¹⁶.

Pada 31 Maret 1913 pucuk pimpinan partai mengambil keputusan dengan maksud hendak menyelamatkan anggota-anggotanya, karena *Indische Partij* akan dibubarkan, yakni dengan memindahkan para anggotanya memasuki *Insulinde* yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Dengan cara ini, *Indische Partij* dianggap tetap “ada”. Menurut Douwes Dekker, hal yang sangat penting dan dibutuhkan adalah suatu organisasi nasional yang harus berjuang untuk persiapan-persiapan nyata dalam mencapai persamaan derajat dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Hindia.

Akibat tulisan-tulisan yang sangat kritis dan dianggap membahayakan pemerintah kolonial maka tokoh-tokoh “Tiga Serangkai” ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Semula Soewardi akan dibuang ke Pulau Bangka, dr. Tjipto ke Banda Neira dan Douwes Dekker ke Timor Kupang. Tetapi keputusan itu diubah menjadi pengusiran dari tanah air ke negeri Belanda. “Tiga Serangkai” ini merupakan korban pertama sejak tanah Hindia diliputi suasana kebangkitan nasionalnya. Hukuman Pemerintah Kolonial terhadap Tiga Serangkai itu mendapat simpati besar dari teman-teman seperjuangan yang lain. Hal ini terbukti dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan, antara lain oleh Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memungkinkan “Tiga Serangkai” itu berangkat ke tempat pembuangan bersama keluarga mereka. Hal ini adalah bukti munculnya rasa setia kawan dan solidaritas di kalangan pergerakan rakyat saat itu.

Pada 6 September 1913, tepat pada hari ulang tahun *Indische Partij*, R.M. Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia menuju ke negeri Belanda, tempat pengasingan. Sungguhpun mendapat hukuman buangan, namun semangat kemerdekaan ketiganya tidak

pernah patah. Salah satunya, Soewardi yang menuliskan pesan kepada kawan-kawannya yang ditinggalkannya di atas kapal “Bulow”, saat kapal berlayar di Teluk Benggala, dengan judul “*Vrijheidshedenking en Vrijheidsberooving*”. Tulisan berisi gugatan tertanggal 14 September 1913, yakni agar bangsanya tidak turut dalam merayakan peringatan kemerdekaan Belanda dan lebih dari itu ia menginginkan agar pesta perayaan yang telah direncanakan dibatalkan dan dianggap menyakitkan hati. Selain itu, pada kaum Indo, Soewardi mengingatkan bahwa sebenarnya mereka telah dijauhkan dari yang berdarah murni dan tidak termasuk bangsa berkulit putih. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lagu “*Wie Neerlands Bloed*” (Siapa yang Berdarah Belanda), Soewardi mengharap agar mereka mau masuk atau menyatu dengan golongan pribumi, seperti yang dilakukan E.F.E. Douwes Dekker, yakni berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

2.3. Solidaritas Kesukuan: Pergerakan Pemuda Insuler

Pada permulaan abad 20 merupakan penanda adanya isyarat-isyarat yang menunjukkan kemajuan oleh perkembangan pendidikan modern yang membawa kesadaran Kaum Pelajar terhadap kehidupan disekelilingnya. Seperti, lahirnya Boedi Oetomo dalam lingkungan pendidikan STOVIA pada 1908. Di tanah Minangkabau juga muncul semangat kebangsaan, pada 1910 berdiri perkumpulan *Adabiah* yang dipelopori oleh kaum muda Islam, diantaranya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah. Perkumpulan ini kemudian mendirikan sekolah *Adabiah* yang mengajarkan pengetahuan umum dan pelajaran Agama Islam. Bagi daerah Minangkabau yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka perkembangan perkumpulan *Adabiah* merupakan suatu yang wajar. Pada 1914, Haji Abdullah Ahmad dan Mohammad Taher Marah Sutan mendirikan H.I.S Adabiah yang diakui diberi subsidi pemerintah Hindia Belanda.

Tokoh Mohammad Taher Marah Sutan yang mendirikan “Syarikat Usaha”, menduduki posisi penting dalam perkembangan faham kebangsaan dan kemajuan di tanah Minangkabau yang perannya dapat disejajarkan dengan dr. Wahidin Soedirohoesodo dalam mengembangkan kemajuan dan kebangsaan di Pulau Jawa. Dalam hal ini, Taher Marah Sutan merupakan penabur benih, pendorong semangat, dan pencipta iklim perkembangan faham kebangsaan, terutama di kalangan Kaum Muda, seperti Mohammad Hatta, Bahder Johan, Nazir Datuk Pamuncak, dan Mohammad Yamin¹⁷.

Sementara itu, di kalangan STOVIA pun mulai bangkit untuk mendirikan perkumpulan pelajar, meskipun dalam suasana kesukuan. Pada 7 maret 1915, di Batavia Satiman Wirsandjojo, Kadarman, Soenardi, dan para pemuda lainnya mendirikan Tri Koro Dharmo yang berarti Tiga Tujuan Mulia (Sakti, Budi, Bhakti). Perkumpulan ini bertujuan, *pertama* membentuk ikatan antara para pelajar bumiputera pada sekolah menengah dan kursus pengetahuan kejuruan; *kedua* yakni untuk menyebarkan pengetahuan bagi anggota-anggotanya; *ketiga* yakni membangkitkan serta mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan Jawa serta menciptakan rasa persaudaraan di antara berbagai suku yang terdapat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.

Namun, orang Sunda sebagai suku terbesar di Jawa Barat tidak mau menerima pimpinan dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Para pelajar Sunda, Bali, dan Madura merasa, bahwa Tri Koro Dharmo¹⁸ menjadi monopoli suku Jawa. Menguatnya gagasan untuk mewujudkan kebudayaan Jawa Raya yang meliputi juga kebudayaan suku-suku, selain suku Jawa, telah mendorong diselenggarakan Kongres pada 12 Juni 1918 di Solo. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir daerah asal semua pelajar yang mendukung perubahan nama dari Tri Koro Dharmo menjadi Jong Java.

Kongres ini berharap menemukan pemecahan masalah, sehingga para pelajar Sunda, Bali, dan Madura dapat segera menjadi anggota dari organisasi baru tersebut, karena mereka memiliki latar belakang budaya yang sama. Tujuan dari Jong Java, yakni: *Pertama*, mengadakan latihan bagi calon-calon pemuka nasional. *Kedua*, Memupuk cinta tanah air harus menjadi dorongan, karena tanah air kekurangan pimpinan yang cakap. *Ketiga*, berusaha untuk menarik perhatian umum pada perkembangan kebudayaan Jawa. *Keempat*, mempertebal persaudaraan di antara semua suku bangsa Indonesia yang hidup di sini¹⁹.

Dalam prakteknya, hanya sebagian kecil para pelajar dari daerah-daerah lain menggabungkan diri ke dalam Jong Java. Pada hakikatnya, para pelajar Jawa merupakan mayoritas dari seluruh anggota perkumpulan tersebut. Di Solo, pada 1919 diadakan kongres ke II yang dihadiri sejumlah besar para pelajar Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan agenda persoalan semi politik. Pembahasan masalah ini hendak menunjukkan dalam tubuh Jong Java masih terkandung perasaan kuat dalam menumbuhkan rasa persatuan antar suku-suku bangsa di Hindia. Namun, salah satu pembahasan yang disampaikan dokter Satiman Wirjo Sandjojo sebagai pembicara dalam konperensi menekankan bahwa seolah-olah suku Jawa lebih tinggi dari suku

lainnya. Begitu pula, saat menerangkan dan menggambarkan sifat-sifat khas kebudayaan Jawa, ia terbawa pada penilaian subyektivitas yang berlebihan. Hal ini menyebabkan munculnya kritik-kritik tajam yang berkembang menjadi perdebatan politik, sehingga ketua sidang merasa perlu untuk menanggihkan rapat itu. Walaupun dalam kenyataannya, dokter Satiman merasa bahwa ia telah melampaui batas, dan saat beristirahat ia menemui lawan-lawan diskusinya serta meminta maaf atas pernyataan-pernyataan yang membawa pada suasana ketersinggungan suku-suku lainnya. Perdebatan itu merupakan kejadian unik dari konperensi saat itu.

Kongres Kebudayaan Jawa yang berlangsung selama 5 hari dapat berjalan dengan lancar, terlepas dari “insiden Satiman” yang sempat menyebabkan suasana suram. Namun, kondisi itu segera pulih kembali dengan adanya sikap-sikap yang meyakinkan dari para pembicara lainnya. Pelaksanaan kongres di dalam suasana kebudayaan yang damai di Solo, menjadikan para peserta menyadari pentingnya manfaat mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan Jawa sesuai sifat-sifatnya sendiri di tengah perkembangan sistem pendidikan gaya Barat saat itu²⁰. Pada kongres-kongres Jong Java selanjutnya, seperti Kongres ke-III nya di Solo pada 1920 dan Kongres ke-IV pada 1921 di Bandung pembicaraan sekitar semi politik masih terus berlangsung. Namun demikian, mengenai sikap Jong Java terhadap aksi dan propaganda politik belumlah jelas. Ketidakjelasan sikapnya terhadap persoalan politik itu menjadikan langkah Jong Java dalam mengakomodasi usulan-usulan yang berkaitan dengan pembangunan kolektif suku bangsa Indonesia, terutama pada kalangan pelajar-pelajar dan pemuda mengalami hambatan.

Berbagai pernyataan berkaitan hubungan Jong Java dengan aktivitas politik bangsa Indonesia dan, khususnya kaum pergerakan baru terjawab ketika pada Kongres ke-V di Solo pada Mei 1922, Jong Java dengan tegas memutuskan bahwa secara organisasi dan individual anggota Jong Java tidak diperbolehkan mencampuri urusan politik, termasuk menghadiri aksi dan propaganda politik. Hal itu semakin diperkuat dengan keputusan Kongres Luar Biasa Jong Java pada Desember 1922 yang menetapkan bahwa tujuan Jong Java hanyalah mengadakan hubungan antar murid sekolah menengah, mempertinggi perasaan untuk kebudayaan sendiri, menambah pengetahuan umum dari para anggota, dan melakukan olah raga²¹.

Berkaitan dengan keputusan ini, bagi anggota Jong Java yang menginginkan dirinya untuk terjun dalam bidang politik hanya

diperbolehkan setelah tamat sekolah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran para pelajar terhadap aktivitas politik kalangan pergerakan mengalami hambatan. Para pelajar Jong Java seakan-akan telah terpasung oleh aturannya sendiri, sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam upaya merespon tuntutan masyarakat luas yang tengah membutuhkan obor penerang dalam usaha mencapai pembebasan nasional.

Walaupun demikian, kebekuan terhadap gagasan-gagasan pembaharuan dalam tubuh Jong Java tidak berlangsung lama. Pada Kongres ke-VII di Yogyakarta pada Desember 1924, pengurus besar Jong Java atas nama ketuanya, Samsuridjal mengusulkan tiga persoalan yang seharusnya diberlakukan agar Jong Java menjadi lebih dinamis dan aspiratif terhadap persoalan-persoalan rakyat. Dengan usulan tersebut, diharapkan agar Jong Java mampu memunculkan kaum muda yang patriotik dan berwawasan kerakyatan. Samsuridjal memandang penting bagi Jong Java untuk melakukan kegiatan yang lebih mendatangkan semangat dan karakter jiwanya serta perasaan nasionalistik dalam dirinya. Baginya anggota yang sudah dewasa (di atas 18 tahun) hendaknya dibebaskan untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Menurut pandangan Samsuridjal, bahwa untuk membantu pemberian kegiatan kursus-kursus itu dibutuhkan anggota-anggota luar biasa yang bisa mengarahkan jalannya kegiatan itu.

Usulan ini dimaksudkan agar Jong Java bisa meningkatkan komitmen kebangsaannya. Sebagai jalan menuju arah tersebut, yakni dengan mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi anggota Jong Java yang beragama Islam, karena agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Hindia. Selain itu, menurutnya, banyak para pelajar yang kurang paham lagi mengenai ajaran Islam. Dengan memahami ajaran-ajaran agama Islam, Jong Java dapat mengikatkan diri dengan perasaan rakyat, dan untuk meningkatkan rasa patriotism anggota Jong Java, sejak awal anggotanya harus mulai dilibatkan dalam aktivitas politik.

Namun, usulan Samsuridjal tentang pembaharuan di dalam tubuh Jong Java ditolak kongres dengan alasan bahwa ia dituduh tengah bermain politik. Di samping itu, tengah beredar Sarekat Islam (SI) telah menyusupi Jong Java. Dalam kritiknya, Haji Agus Salim memandang bahwa Jong Java telah menjauhkan pemuda pelajar dari agama Islam. Keadaan ini menjadikan Jong Java semakin terperangkap ke dalam kebekuan terhadap isu-isu di luar organisasi, terutama berkaitan dengan semakin menguatnya gagasan pembebasan nasional Indonesia. Pada

1926 atas inisiatif ketuanya, yakni Soenardi Djaksodipoero, Jong Java kembali membuka diri terhadap gagasan persatuan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Proses penyadaran tersebut semakin menguat dan akhirnya pada 30 Desember 1929 berdasarkan putusan kongresnya yang terakhir, Jong Java dinyatakan meleburkan diri dalam Indonesia Muda. Namun, akibat kesadaran yang terlambat itu, sebagian besar anggotanya membentuk dan membangun organisasi baru yang aspiratif terhadap gagasan persatuan bersama rakyat. Salah satunya, pada 1925 Samsuridjal yang kemudian mendirikan Jong Islamieten Bond yang ingin mewujudkan persatuan nasional dengan dasar perjuangan bercirikan Islam.²²

Sementara itu, para pemuda Sumatra yang belajar di STOVIA juga mendirikan perkumpulan dengan nama Jong Sumatranen Bond (JBS) pada 9 Desember 1917. Tujuan dari perkumpulan ini untuk mempererat hubungan antara para pemuda pelajar Sumatera, menanamkan kesadaran terhadap tugas ke depan sebagai pemimpin dan pendidik bangsa, menghidupkan dan menjunjung tinggi kepribadian Sumatera. Meskipun, JSB berdiri dan bermarkas di gedung STOVIA, tetapi anggota-anggotanya tidak hanya terdiri dari para pelajar STOVIA saja, melainkan juga berasal dari luar. Diperkirakan, waktu itu anggotanya berjumlah 150 orang, sedangkan yang belajar di STOVIA sekitar 33 orang. Di antara anggota JSB yang bukan pelajar STOVIA adalah Mohammad Hatta dari PHS dan Mohammad Yamin dari Rechtschool. Dalam perkembangannya, cabang-cabang JSB terdapat di enam tempat di Jawa, dua tempat di Padang dan Bukittinggi.

Banyaknya tokoh JSB yang berasal dari tanah Minang, seperti Mohamad Amir, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Bahder Djohan, dan lain-lain tidak terlepas peran pemuda Nazir Datuk Pamuncak, yang juga anggota JSB, pulang ke Padang setelah menamatkan pendidikannya di HBS. Semula, ia hendak melanjutkan studinya ke Universitas Leiden di Belanda, namun harus tertunda oleh karena pelayaran ke Eropa saat itu terhalang akibat berkecamuknya Perang Dunia I (1914-1918). Pada waktu itu, ia diminta oleh pengurus pusat JSB untuk memberikan penerangan tentang tujuan JSB dan sekaligus diminta untuk mendirikan cabang di Padang dan di Bukittinggi. Atas bantuan Mohammad Tahir Marah Sutan, dapat diselenggarakan rapat pada malam hari di antara para pemuda pelajar di gedung Syarikat Usaha di Padang. Rapat dihadiri para pemuda pelajar Sekolah Raja Bukittinggi yang sedang bertanding sepak bola di Padang. Dalam rapat tersebut, pemuda Nazir Datuk Pamuncak berpidato dalam

bahasa Belanda yang biasa dilakukan oleh para pelajar dalam pertemuan-pertemuan (*vergaderingen*). Saat itu, bahasa Indonesia belum dipergunakan secara umum.

Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa para pemuda Jawa telah mendirikan perkumpulan dua tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemuda Sumatera harus segera bergerak dengan mendirikan perkumpulan. Nazirpun secara keras sambil menunjuk kearah timur:

"Lihatlah ke sana ke pinggir langit, matahari kemegahan bangsa telah terbit!".

Nazir kemudian menjelaskan tentang tujuan JSB, yakni: *Pertama*, memperkuat tali persaudaraan antara para pemuda Sumatera yang masih belajar serta menanam kesadaran dalam jiwanya, bahwa mereka mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya. *Kedua*, menimbulkan perhatian pada anggotanya dan orang lain terhadap tanah dan bangsa Sumatera serta untuk mempelajari adat istiadat, kesenian, bahasa-bahasa, pertanian dan sejarah Sumatera.

Pidato Nazir berlangsung kurang lebih satu jam ini telah menggugah hati para pelajar yang hadir pada acara tersebut, terutama bagian kalimat "menanam keinsyafan dalam jiwanya, bahwa pemuda mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya". Kata-kata itu tampaknya menyentuh para pemuda, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, Bahder Djohan, dan lain-lain. Kedatangan Nazir ke tanah kelahirannya itu ternyata membuahkan hasil, yakni berdirinya cabang JSB di Padang dan di Bukittinggi. Setahun kemudian, pada 1919 JSB telah mengadakan Kongres Pertama di Padang. Sementara itu, Mohamad Amir, Mohammad Hatta, Bahder Djohan, dan Mohammad Yamin terpilih sebagai pengurus JSB yang bergerak dalam dunia perjuangan kepemudaan dan kebangsaan. Dalam Kongres Pertama JSB, juga mendirikan tugu peringatan di kota Padang, yang salah satu sisinya tertulis: *"Ter herinnering aan het eerst Congres van JSB, 1919"* yang berarti "Peringatan Kongres JSB Pertama, 1919".²³

Banyak pula pengaruh berdirinya JSB pada berbagai segi kehidupan di Minangkabau. Di Bukittinggi seorang siswa STOVIA anggota JSB berpidato di muka umum dengan ucapan *"Saudara-saudara yang tercinta"*. Ucapan tersebut menimbulkan kehebohan yang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang adat istiadat dan tidak lagi menghormati orang tua. Ungkapan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjalin hubungan kekerabatan. JSB juga mendorong hilangnya hambatan terhadap perkawinan antara suku. Pernah pula terjadi seorang gadis akan melangsungkan perkawinannya dengan seorang pemuda

Jawa, tetapi pihak keluarga gadis tidak menyetujuinya, karena berlainan suku. JSB membela dan memihak perkawinan antar suku, akhirnya kedua anak muda itu mencapai cita-citanya untuk membina rumah tangga.

Mohammad Yamin merupakan pimpinan JSB yang secara intens membangun hubungan dengan pembinaan faham rasa kebangsaan Indonesia. Walaupun demikian, pada 1920 cita-cita kebangsaan Indonesia masih samar-samar. Bahkan, Mohamaad Yamin sendiri pada 1920 itu belum berpegang pada faham kebangsaan Indonesia. Ia masih bergerak dalam lingkungan daerah, seperti pada bunyi sajaknya, *“Andalas, Tanah Airku”* yang menganggap Andalas atau Sumatera sebagai Nusa Harapan. Saat itu, Mohammad Yamin yang baru berusia 17 tahun telah membawa perubahan pemaknaan dari Minangkabau menjadi Andalas.

Terlebih, para guru Belanda, utamanya pengajar Ilmu Sejarah dan Ilmu Bumi selalu mengajarkan bahwa *“Molukken is het verleden, Java is het heden en Sumatra is de toekomst”* (Maluku masa lalu, Jawa masa sekarang dan Sumatera masa yang akan datang). Semboyan ini harus dilihat dari konstruksi pemikiran Belanda yang mengandung tafsir kolonialis ekonomi, bahwa Maluku sudah diperas dan tidak menghasilkan keuntungan besar lagi bagi Belanda, seperti pada masa VOC di abad 17 dengan rempah-rempahnya. Adapun, pulau Jawa sejak abad 19 hingga abad 20 memang sedang mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda dengan hasil perkebunannya, seperti kopi, kina, karet, nila, dan lain-lain dengan tenaga kerja murah dan melimpah. Dengan demikian, Jawa ditafsirkan sebagai “masa kini”. Sedangkan, Sumatera mengandung banyak tambang, seperti minyak tanah, batu bara, gas bumi, timah, dan logam.

Walaupun demikian, anggota-anggota JSB telah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan Indonesia Raya. Pada saat itu, JSB, selain mengenang segala sesuatu yang telah dilakukannya atau dicapainya, lebih utama lagi mencetuskan gagasan-gagasan baru yang akan dihadapinya. Salah satu hal yang sangat dirasakan oleh para anggota JSB ialah tentang bahasa. Sampai saat itu, dalam lingkungan JSB menggunakan bahasa Belanda secara luas. Pada lustrum pertama JSB di Jakarta 1923, Mohammad Yamin mencetuskan gagasan yang disampaikan dalam pidatonya, berjudul *“De Maleische Taal in het Verleden, heden en in de toekomst”* (“Bahasa Melayu Pada Masa Lampau, Masa Sekarang, Dan Masa Yang Akan Datang”). Pidato Mohamad Yamin ini menuai berbagai macam tanggapan. Sebagian besar

menyambut dengan gembira gagasan untuk menjadikan suatu bahasa yang dapat digunakan oleh antar suku bangsa yang sangat beragam bahasa dan kebudayaannya. Namun, sebagian golongan tua mengkhawatirkan bahwa gagasan Yamin tersebut akan dianggap Pemerintah Kolonial Belanda sebagai usaha politik yang akan menyulitkan kedudukan Belanda²⁴. Selain itu, Mohammad Yamin melontarkan gagasan lagi tentang perlunya sebuah Majalah Kebudayaan yang diberi nama “Malaya”. Keberadaan majalah ini ditujukan untuk merangkul dan mengambil hati penduduk Malaya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris.

Pada Lustrum pertama JSB juga telah dibuat medali peringatan dengan gambar nyiur melambai, disampingnya terdapat kembang melati sebagai lambang keindahan Hindia. Pada waktu itu, diresmikan pula panji perhimpunan JSB yang bergambar pelita menyala dengan semboyan “Pelita Bangsa, Senantiasa” yang memaknai pemuda sebagai pelita yang akan selalu menerangi bangsanya. Dalam perkembangannya, JSB semakin menunjukkan perjuangan menuju menguatnya keindonesiaan. Hal ini tercermin ketika JSB dipimpin Mohamad Yamin yang saat itu hampir menamatkan AMS dan hendak memasuki RHS telah mengorientasikan pemikiran dan perjuangan untuk persatuan “Indonesia”. Ia menggunakan faktor-faktor Sejarah, Kebudayaan, dan juga Geo politik untuk menyusun faham kebangsaan. Dalam hal ini, Mohammad yamin menyatakan bahwa istilah “Indonesia” yang mula-mula digunakan dikalangan Ilmu Bahasa, kemudian dipakai oleh sarjana Jerman Adolf Bastian pada 1889 dalam bukunya, berjudul *“Indonesia orde die inseln des Malayischen Archipel”* untuk menunjukkan persatuan kebudayaan bangsa Indonesia²⁵.

Di samping Jong Java dan Jong Sumatranen Bond, pada 1918 lahir pula Jong Ambon yang didirikan oleh pelajar STOVIA, yakni L. Tamaela dan J. Kajadu yang bercita-cita menyatukan para pemuda dan pelajar asal Maluku di Jawa dalam suatu perkumpulan. Inisiatif pendirian Jong Ambon, yang lebih merupakan perkumpulan olah raga terutama sepak bola ini, mendapat sambutan baik di kalangan pelajar dan pemuda dari daerah tersebut. Diantaranya, Johannes Latuharhary ikut serta dalam memperkuat kesebelasan Jong Ambon.

Tampaknya, Jong Ambon mengalami kemunduran, namun pada 1 Juni 1923 dihidupkan kembali dengan nama *Sport en Muziek Vereeniging Jong Ambon* (SVJA). Walaupun demikian, perkumpulan itu tetap dikenal dengan nama Jong Ambon yang diketuai F. Loppies dengan wakilnya L.J. Wattimena. Adapun, inti penggerak organisasi ini ialah para pelajar

dan alumni STOVIA, seperti dr. L. Tamaela, dr. J. Lisapaly, dr. J. Tupamahu, dr. J. Kajadu, G. Rehatta, C.J. Kapitan, J. Malaihollo, D. Tahitu, W. Putiray, J. Leimena.

Setahun kemudian muncul dua aliran dalam perkumpulan ini. *Pertama*, adalah sebagian pelajar yang tidak puas dengan peran Jong Ambon yang hanya bergerak di bidang olah raga. Ditengah-tengah gelombang pergerakan nasional, mereka berpendapat bahwa pendidikan harus diutamakan. Oleh karena itu kelompok ini mendirikan *Vereeniging Ambonsche Studenten* (VAS) yang dipimpin Toule Salahuwey, seorang pelajar *Recht Hoge School* (RHS) dan J. Leimena, seorang pelajar STOVIA. VAS/Jong Ambon ini menyatukan diri dengan pergerakan pemuda Indonesia dan dalam Kongres Pemuda Indonesia Ke I pada 1926, Jong Ambon diwakili Toule Salahuwey, dr. Kajadu bersama isterinya. Pada Kongres Pemuda ke II 1928 yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda, J. Leimena ikut berperan dalam peristiwa tersebut. *Kedua*, Jong Ambon yang aktivitasnya lebih pada sepak bola dipimpin G. Rehatta dan berhasil mengembangkan sayapnya di kota-kota besar di Jawa. Kesadaran nasionalismenya yang terus dikembangkan menjadikan warna kostum klub Jong Ambon ini adalah merah putih. Nasionalismenya ini menjadi “duri” bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui sebagai badan hukum, meskipun pada akhirnya permohonan Jong Ambon dipenuhi pemerintah untuk memperoleh *rechtspersoon* pada 1 November 1930²⁶.

Selanjutnya berdiri pula perkumpulan-perkumpulan para pemuda kedaerahan lainnya yang kebanyakan didirikan oleh para pelajar atau alumni STOVIA, yakni Jong Minahasa yang didirikan pada 1918 dengan tokoh-tokohnya J. pantaouw dan Diena Pantaouw (menjadi istri Mr. Sunario); Jong Celebes dengan tokoh-tokohnya, diantaranya Arnold Mononutu, Waworuntu, Magdalena Mokoginta yang menjabat sekretaris dan anggota delegasi Kongres Indonesia Muda di Solo. Perkumpulan ini menerbitkan majalah bernama “Suara Celebes”; *Jong Timoresche Verbond* dengan tokohnya, antara lain J.W. Amalo; dan Jong Batak.

Munculnya Jong-Jong tersebut yang kemudian melakukan pendekatan satu sama lain, telah mencuatkan pemikiran dari Hatta dan Bahder Djohan, “apakah pergerakan pemuda yang telah ada, yakni JSB, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Timoresche, Jong Batak dapat dipersatukan menjadi Jong Indie. Tampaknya pikiran ini terlintas pula dari Jong Java. Jong Java dalam kongres ke IV di Bandung pada 1921 memutuskan diadakan federasi

dengan JSB. Namun, cita-cita ini tidak mudah diwujudkan, karena rasa kesukuan atau kedaerahan tidak begitu mudah dihilangkan.²⁷

2.4. Solidaritas Keagamaan: Jong Islamiten Bond

Berkembangnya organisasi-organisasi Kaum Pelajar atau pemuda yang terbagi dalam wadah dan perasaan kedaerahan tidak terlepas munculnya masalah, terutama renggangnya organisasi satu dan yang lainnya. Muncul pemikiran sebagian para pemuda pelajar yang menyadari perlu hilangnya sifat kedaerahan, diantaranya Kasman Singodimedjo yang berkeyakinan bahwa kemelut perpecahan antar organisasi pelajar itu dapat diperbaiki melalui agama Islam yang merupakan sebagian besar agama kaum bumiputra. Menurutnya, bahwa organisasi-organisasi, seperti Jong Java harus berani memelopori menggunakan Agama Islam sebagai dasar untuk selanjutnya disuguhkan kepada semua organisasi "Jong" yang lain-lain. Dengan demikian, menurut pemikiran sebagian para pemuda saat itu bahwa persatuan organisasi-organisasi tersebut akan terwujud dengan cara tersebut. Meskipun sejak lama sudah berdiri organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Organisasi-organisasi ini tidak saja mengajarkan agama Islam, melainkan juga menjalankan dakwah. Namun, usaha mereka belum meliputi Kaum Pelajar. Salah satu kendala adalah soal bahasa, karena Kaum Pelajar hanya mungkin dijangkau dengan Bahasa Belanda. Siaran-siaran atau penerbitan organisasi itu dalam bahasa Melayu atau daerah, tidak menjangkau golongan pemuda pelajar yang sebagian besar beragama Islam.²⁸

Dalam suatu Kongres Jong Java ke-VII di Yogyakarta pada 1924, Samsuridjal, seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah dan juga pelajar *Recht Hoge School* yang menjabat ketua umum Jong Java menyampaikan pemikiran mendalam tentang tugas yang hendak ia kerjakan dalam masyarakat bagi kepentingan bangsa. Samsuridjal memiliki gagasan yang waktu itu belum banyak dimengerti, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Terlepas dari agama yang dianut oleh seorang pemimpin, ia patut mengetahui dan memahami agama rakyat yang dipimpin. Agama rakyat sebagaimana adanya, tidak dengan macam-macam salah pengertian sebagai akibat pendidikan Barat.²⁹

Samsuridjal mengajukan usul sederhana dalam kongres tersebut, agar di kalangan Jong Java dibuka kesempatan mempelajari agama Islam. Terhadap gagasan Samsuridjal ini, Mohammad Roem menyampaikan pandangannya:

“Andaikata usul itu ditambah, seharusnya agama-agama lain, saya rasa Samsuridjal tidak keberatan. Ia mengusulkan agama Islam karena agama tersebut agama mayoritas rakyat”.

Usul itu diterima dengan sederhana, tetapi ditolak dengan berbagai macam tuduhan, bahwa Samsuridjal dianggap bermain politik. Sesungguhnya dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam Kongres Jong Java itu terdapat dua pandangan yang setuju Islam dan yang menolaknya memiliki kekuatan sama, sehingga terjadi dua kali pemungutan suara. Sesuai tata tertib organisasi, persoalan itu diserahkan pada keputusan yang diambil ketuanya. Dalam wewenangnyanya, akhirnya Samsuridjal menyatakan usulnya itu tidak diterima kongres. Adapun, kongres yang berlangsung dari 27 hingga 31 Desember 1924 tersebut juga dihadiri para pemuka agama, seorang pastur Katolik, seorang pendeta Protestan, seorang Theosofi; sedang ulama Islam yang hadir adalah Haji Agus Salim. Dimasukkannya usulan supaya Islam dijadikan pelajaran wajib dalam Jong java, disebabkan agama Katolik dan Protestan serta Theosofi telah dimasukkan sebagai pelajaran bagi anggota-anggota Jong Java³⁰.

Selanjutnya, Samsuridjal meminta pertimbangan dan dukungan tentang perlunya mendirikan organisasi pelajar yang beragama Islam dengan maksud untuk mempelajari Islam pada tiga orang, yakni Kiai Ahmad Dahlan, Tjokroaminoto, dan Haji Agus Salim yang kemudian merestui usulan tersebut. Selain itu, sejumlah kawan-kawannya yang pada Kongres ke VII Jong Java mendukung usulannya, menyatakan siap mendukung gagasannya itu dan siap bekerja sama. Akhirnya, Samsuridjal memutuskan bahwa tempat rapat dilaksanakan di sebuah sekolah Muhammadiyah di daerah Kauman, Yogyakarta. Rapat pembahasan yang berlangsung penuh semangat dan banyak masukan, saran, serta dialog yang lama sudah direkam dan diakomodasikan tersebut, terlaksana pada malam hari dengan penerangan lampu tempel.

Dalam rapat itu pula disepakati nama organisasi baru yakni Jong Islamieten Bond (JIB) yang secara resmi dinyatakan berdiri di Weltevreden, Batavia pada 1 Januari 1925. Organisasi baru ini dipimpin oleh Samsuridjal dan H. Agus salim diangkat sebagai penasehat JIB. Adapun, asas dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar tertulis dalam bahasa Belanda, yaitu *pertama*, mempelajari agama Islam dan menganjurkan agar ajarannya diamalkan; *kedua*, menumbuhkan simpati terhadap Islam dan pengikutnya, di samping toleransi yang positif terhadap orang-orang yang berlainan agamanya). Di samping itu,

kegiatan organisasi meliputi: *pertama*, menerbitkan majalah berkala, brosur-brosur, dan lain-lain penerbitan; *kedua*, mengadakan kursus, pertemuan debat, dan lain sebagainya; *ketiga*, mengadakan darmawisata dan lain kunjungan ke tempat-tempat yang berarti³¹.

Sehubungan dengan keanggotaannya, semula JIB didirikan untuk para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, terlepas dari umurnya. Di samping itu, ada pula orang-orang yang masih muda dan tidak lagi bersekolah atau sudah tamat belajarnya dapat menjadi anggota JIB. Oleh karena itu, keanggotaan JIB terbuka bagi para pemuda beragama Islam dari umur 14 tahun hingga 29 tahun, yang dikemudian hari diperluas menjadi 35 tahun. Selain itu, keanggotaan JIB juga tidak membatasi pada kesukuan atau kedaerahan. Di luar dugaan Samsuridjal dan kawan-kawan, sejumlah blanko formulir anggota yang diedarkan pada rapat propaganda itu berhasil menjaring 250 orang pemuda yang siap menjadi anggotanya. Mereka rata-rata berasal dari para pelajar dari *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan *Algemene Middlebare School* (AMS) serta sebagian lainnya adalah tamatan dari sekolah-sekolah itu.

Keberhasilan propaganda pertama semakin menambah keyakinan Saamsuridjal dan kawan-kawan. Dari jumlah anggota yang terjaring tersebut sudah dirasa cukup untuk mengembangkan organisasi yang kemudian membentuk JIB cabang Batavia dan siap menjadi embrio bagi perluasan JIB ke daerah-daerah lainnya. Pada 15 Februari 1925, rapat propaganda dilakukan di Yogyakarta yang dilanjutkan di Solo, dan kemudian di Madiun. Propaganda JIB ini mendapat sambutan para pelajar menengah MULO, AMS serta sebagian lainnya adalah tamatan sekolah-sekolah itu dari ketiga daerah tersebut. Dengan terbentuknya Pengurus Besar JIB yang bertanggung jawab dalam usaha propaganda bagi pengembangan wilayah Jawa, perluasan propaganda JIB semakin lancar. Seperti, Sjahbudin Latief untuk daerah Yogyakarta, Solo dan Madiun, Mohammad Koesban dan Kasman ke Purworejo dan Kutoarjo, serta Samsuridjal dan Agus Salim ke Bandung.

Materi yang biasa dibawakan dalam rapat propaganda berkisar tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pengembangan pergerakan nasional Indonesia, dan perlunya usaha untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dalam rapat itu dibicarakan kedudukan atau derajat bangsa pribumi yang tertindas oleh bangsa penjajah. Mereka melihat bahwa pihak penjajah dengan usaha-usahanya yang sangat halus melalui jalur pendidikan telah menjauhkan para pemuda Indonesia dari akar budayanya. Mereka berkesimpulan bahwa

sangat penting dan sudah merupakan suatu keharusan untuk kembali memahami dan mempelajari ajaran agama Islam³².

Dalam sebuah rapat terbuka di Batavia, Samsuridjal menyampaikan sikap, keyakinan dan cita-cita JIB. Utamanya, sikap JIB terhadap kaum perempuan yang menempatkan mereka pada posisi terhormat. Untuk merealisasikan gagasan itu, dalam tubuh JIB akan dibentuk wadah tersendiri, namun tidak terlepas dari organisasi induknya. Kemudian dikemukakan juga mengenai sikap JIB terhadap perkumpulan pemuda lainnya dan kaum pergerakan nasional pada umumnya. Menurutny, JIB akan menempatkan posisi mereka sama derajat dan JIB siap bekerja sama. Sementara sikap JIB terhadap politik adalah membolehkan anggota-anggotanya untuk terjun dalam bidang politik, namun dalam aksinya tersebut tidak boleh membawa nama organisasi.

Walaupun demikian, kehadiran JIB inipun ada yang menyambutnya dengan perasaan tidak suka, karena JIB membawakan bentuk nasionalisme baru. Seorang pemimpin pemuda yang menentang mengatakan:

"Alles wat ruikt naar Indonesische nationalism, moet worden bestreden met hand en tand" (Apa saja yang berbau nasionalisme Indonesia harus diberantas dengan segala daya upaya).

Pada saat itu memang masih belum menjadi kesadaran umum, baru kesadaran mayoritas. Namun, dalam waktu beberapa bulan saja di kota-kota besar, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bogor, Medan, dan Makasar telah didirikan cabang-cabang JIB. Oleh karena keaggotaannya sebagian besar Kaum Pelajar, maka cabang-cabang JIB hanya dijumpai di kota-kota besar, seperti kota propinsi dan karesidenan. Pada akhir tahun 1925, JIB mengadakan kongres pertama di Yogyakarta yang dipimpin Samsuridjal. Pada kongres ini, Samsuridjal yang telah memimpin JIB selama setahun (1925-1926) meletakkan jabatannya dan diganti oleh Wiwoho Poerbohadidjojo (1926-1930).

Walaupun demikian, keberadaan JIB pun menimbulkan suara-suara yang mempertanyakan masalah kebangsaan di dalam perjuangan JIB. Seperti:

"Bagaimana sikap JIB terhadap rasa kebangsaan yang sedang bangkit di kalangan pemuda pelajar?, "Apakah JIB cukup memberi bimbingan agar para pemuda Islam tetap menjadi nasionalis yang akan memimpin rakyat menuju kemerdekaan tanah air?" Sehubungan dengan Islam bukanlah agama

yang tidak nasional, melainkan internasional, maka muncul lagi pertanyaan, "Dapatkah dalam JIB diberikan pendidikan nasional yang sempurna?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran pendidikan nasionalisme dalam JIB menjadi berkurang, sehingga akan mengendorkan cita-cita bangsa kearah kemerdekaan. Menurut Mohammad Roem, anggota-anggota JIB sendiri merasa tidak sedikitpun cintanya kepada tanah air, dalam hal ini agama Islam mengajarkan cabang Islam berjuang memberantas kebatilan dan menegakkan keadilan dengan segala pengorbanan. Ia mengacu pada hadits yang berbunyi, *"Hubul wathon minal iman"* yang berarti cinta tanah air dan bangsa itu sebagian dari iman. Berdasarkan keyakinan itu, rasanya orang Islam tidak akan kurang nasionalismenya. Suara-suara yang menyiratkan keraguan anggota JIB dan jiwa kebangsaan pun menjadi hilang saat JIB ikut dalam Kongres Pemuda ke II yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928³³.

Pada bulan Maret 1925, JIB berhasil pula menerbitkan majalah, bernama *An-Nur* (*Het Licht* atau Cahaya). Pada halaman depan tercantum Al Qur'an, surat At-Taubat ayat 32:

"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi tidak mengijinkan kemauan mereka, melainkan lebih mencemerlangkan cahayanya, walaupun orang kafir tidak menyukainya".

Di samping menerbitkan majalah yang memuat tentang Agama Islam, cabang-cabang JIB juga mengadakan kursus agama. Baik majalahnya maupun kursusnya menggunakan bahasa Belanda yang masih menjadi ciri komunikasi para pemuda pergerakan pada umumnya saat itu.

Sejak berdiri, JIB memiliki penasihat, yakni Haji Agus Salim yang dikenal sebagai salah satu pemimpin Sarekat Islam (SI), di samping Tjokroaminoto dan dikenal seorang ahli dalam agama Islam dan sangat mahir berbahasa Belanda. Haji Agus Salim mampu menjelaskan persoalan-persoalan terkait Agama Islam, baik melalui kursus-kursus JIB maupun melalui tulisan-tulisannya di "*An-Nur*" terkait serangan-serangan dari luar sehubungan dengan kedudukan Islam di tengah situasi yang diwarnai modernitas yang menurut kesaksian Mohammad Roem, anggota JIB menjadi bangga bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang baik dalam dunia modern yang mengikatkan rasa percaya diri anggotanya.

Pada 1927 JIB membentuk "Lembaga Inti" (*Kern Lichaam*) yang anggotanya telah memiliki banyak pengetahuan tentang

Islam. Mereka inilah yang merencanakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan yang lebih memberikan bantuan dari pengetahuannya bagi para anggota yang lain. “Lembaga Inti” ini didirikan bersifat setempat-setempat, bergantung kepada tenaga yang ada di tempat tersebut. Misalnya, di Bandung lembaga itu dipimpin oleh Mohammad Natsir, dan mempunyai hubungan erat dengan Persatuan Islam (Persis) yang dipimpin oleh ulama A. Hassan. JIB berdasarkan agama Islam, maka di dalam pergerakan dan pergaulan sehari-hari terdapat batas-batas tertentu antara anggota-anggota pria dan wanita. Kemudian didirikanlah bagian wanita dengan nama *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA).

Sebagai organisasi yang mendasarkan pada agama Islam, maka dalam kegiatan dan pergaulan sehari-hari terdapat batas-batas antara pria dan wanita. Kemudian didirikan JIB bagian wanita yang disebut *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA). Salah satu anggotanya yakni Siti Soekaptinah (istri Soenarjo Mangoenpoespito) yang sebelumnya adalah anggota Jong Java dan masuk menjadi anggota JABDA setelah organisasi ini didirikan di Yogyakarta. Siti Soekaptinah memasuki JIBDA, karena ia ingin meyakinkan para pelajar atas ke-Islamannya dengan studi yang kritis dan bertoleransi terhadap orang yang berpendirian lain.

Selain itu, organisasi JIBDA menempatkan kedudukan yang tinggi dan terhormat bagi wanita, sama dalam kedudukan dan dalam hukum dengan laki-laki, sebagai rekan atau partner. Penekanan hal tersebut diperlukan, karena nuansa pemikiran Indonesia saat itu diliputi oleh persoalan-persoalan terkait wanita, terutama dalam hubungannya dengan Islam. Tujuan lain pendirian JIBDA, yakni untuk melatih para anggotanya agar menjadi wanita Islam sejati dan untuk membela serta melindungi hak-hak wanita sesuai dengan jaran Islam. Dalam JIBDA mulai didiskusikan pula tentang kedudukan wanita dalam Islam, kedudukan wanita dalam masyarakat, pergaulan bebas (*vrije omgang*), dan poligami³⁴. Dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 1928, JIBDA ikut serta dengan melibatkan ketua JIBDA Cabang Yogyakarta Siti Soekaptinah menjadi penulis I. Adapun kongres tersebut menghasilkan pendirian Badan Permufakatan yang meliputi semua organisasi-organisasi wanita Indonesia yang disebut “Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI), dalam hal ini JIBDA pun turut aktif di dalamnya.

Di samping itu, JIB dengan pengikut sejumlah 4000 orang dan telah membentuk suatu “Lembaga Inti” (*Kern Lichaam*) dengan anggotanya yang telah dianggap banyak mengetahui tentang

Islam. Adapun tugas lembaga ini yakni merencanakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan bantuan dari pengetahuannya bagi para anggota-anggota lainnya. Lembaga yang telah dibentuk sejak 1927 ini dikukuhkan pada Kongres JIB di Madiun pada 1931. Fungsi dari lembaga tersebut menjadi penghubung antara JIB dengan organisasi-organisasi Islam yang ada waktu itu. Oleh karena keterbatasan tenaga, maka “lembaga Inti” inipun didirikan secara lokal. Misalnya, di Bandung, lembaga ini dipimpin oleh Mohamad Natsir yang memiliki hubungan erat dengan Persatuan Islam (Persis) di bawah pimpinan ulama A. Hassan.

JIB juga menerbitkan majalah organisasi dengan nama “*Het Licht*”, walaupun dicantumkan pula di majalah itu nama lain, yaitu “*An Nur*”, namun nama dalam bahasa Belanda itulah yang terkenal waktu itu. Majalah tersebut dipimpin oleh Yusuf Wibisono dan terbit secara teratur hingga 1932. Diantara penulis, Kasman Singodimedjo paling produktif dalam menulis dengan mengetengahkan topik-topik bernuansa keagamaan. Kemahirannya di bidang agama Islam ini juga tidak terlepas dari hubungannya dengan tokoh-tokoh ulama terkenal seperti Syech Ahmad Syurkati di Weltevreden, Batavia sejak 1926. Ia adalah pendiri “*Al Irsyad*” dengan anggotanya adalah masyarakat Arab dan pendirian organisasi ini didukung oleh H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan K.H. Achmad Dahlan. Adapun Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang memperhatikan dan mengkhawatirkan keadaan keagamaan para pelajar bumiputra yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Para ulama tersebutlah yang menuangkan pemikiran-pemikiran yang mengantarkan hingga lahir JIB dari kalangan para pelajar tersebut³⁵.

Dalam Kongres JIB yang diselenggarakan pada 23-27 Desember 1927 di Yogyakarta, Ketua JIB, Wiwoho mengemukakan perkembangan gagasan persatuan yang tengah menjadi topik yang populer di kalangan intelektual. Ia menyebutkan bahwa organisasi Jong Java dan Jong Sumatera, dan beberapa organisasi kedaerahan lainnya telah sepakat untuk merealisasikan gagasan ‘fusi’ pada waktu yang akan datang. Ia mengungkapkan pula tentang gerakan pemuda saat itu digolongkan menjadi dua kelompok, yakni yang berprinsip Islam dan nasionalisme. Pandangan ini bukan berarti adanya pertentangan kedua prinsip yang terwujud kemudian dengan munculnya Indonesia Muda (IM) dan JIB. Hal ini merupakan jawaban JIB terhadap usulan beberapa perkumpulan pemuda untuk membentuk fusi di antara mereka.

Sikap ini tercermin saat pencetus Sumpah pemuda pada Oktober 1928, meskipun JIB merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) pergerakan pemuda yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini, Mohammad Roem sebagai anggota JIB Cabang Jakarta, menyaksikan Djohan Mohammad Tjai, pelajar senior dari *Recht Hoge School* mewakili pengurus Kongres Pemuda 1928. Namun, JIB tidak ikut fusi oleh karena asas JIB adalah Islam. Hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dalam pengurus, artinya sudah ada saling pengertian yang menjadikan JIB masih dipandang perlu ikut dalam Kongres Pemuda ke II 1928 tersebut³⁶. Walaupun demikian, pada dasarnya pandangan perjuangan kedua kelompok ini terhadap bangsa adalah sama, sehingga antara JIB dan IM merupakan kekuatan gerakan pemuda yang kokoh dan siap bekerja sama.

2.5. Solidaritas Nasional: Perhimpunan Indonesia

Indische Vereeniging yang didirikan, salah satunya oleh R.M. Moto Soeroto- mahasiswa Ilmu Hukum, di Den Haag pada 1908, ditujukan bagi kepengurusan para pelajar Hindia Belanda yang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Adapun keanggotaannya, tidak hanya terbatas dari suku bangsa di Hindia saja, melainkan juga berasal dari keturunan Cina dan Belanda. Perkumpulan yang bersifat sosial budaya ini, berhubungan erat dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Belanda, diantaranya Mr. Abendanon, mantan Kepala Pendidikan di Hindia Belanda, Van Deventer, Prof. Steinmetz, Prof. Dr. Snouck Hurgronje, mantan penasehat Pemerintah Hindia Belanda. Mereka membimbing para anggota *Indische Vereeniging* dalam rangka politik Etis yang berlandaskan *cooperation and association*³⁷. Selain itu, tokoh-tokoh Belanda ini sering diundang pula untuk mengadakan ceramah di kalangan anggota *Indische Vereeniging*, seperti yang dilakukan Sam Ratulangi saat menjabat sebagai ketua organisasi itu pada 1914-1915. Walaupun demikian, *Indische Vereeniging* memiliki arti penting bagi penyediaan bibit-bibit yang dapat mempersatukan para pelajar dari Jawa, Sumatera, Sunda, Madura, Ambon, Minahasa, dan lain-lain yang sedang menuntut pendidikan di Belanda tersebut. Perasaan kesukuan mereka pun semakin hilang secara pelan-pelan yang dalam perkembangannya berganti dengan perasaan kebangsaan.

Pasca Perang Dunia I pada 1918, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke negeri Belanda semakin bertambah besar. Kedatangan angkatan muda untuk belajar di negeri Belanda ini membawa angin segar, karena anggapan-anggapan tentang perbedaan-perbedaan, seperti

kesukuan yang diperbesar oleh pemerintah Kolonial dalam rangka politik “*divide et impera*” (politik ‘memecah belah’). Meskipun muda, mereka telah berpengalaman dalam gerakan pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan sebagainya. Mereka, diantaranya Mohammad Hatta yang tiba di Belanda pada 1921 untuk melanjutkan kuliah di *Handels Hogeschool* di Rotterdam, Iwa Kusuma Sumantri kuliah di Ilmu Hukum di Leiden, Darmawan Mangoenkoesoemo kuliah di *Chemis* di Delft, dan lain-lain. Pada periode 1919 hingga 1921, *Indische Vereeniging* dipimpin oleh Ahmad Soeboardjo Djojoadisurjo yang kemudian dilanjutkan oleh Soetomo yang memimpin organisasi tersebut dari 1921 hingga 1922.

Dalam dinamika antar mahasiswa tersebut terdapat dua aliran, yakni aliran moderat dan aliran progresif. Aliran moderat yang dipimpin Noto Soeroto menghendaki, di samping sebagai anggota *Indische Vereeniging*, golongan moderat ini ingin tetap memelihara hubungan dengan negeri Belanda, meskipun dalam bentuk *rijk eenheid*. Selanjutnya, golongan progresif berhasil merubah *Indische Vereeniging* pada 1922 menjadi *Indonesische Vereeniging* yang dilakukan oleh pengurus organisasi di bawah kepengurusan Herman Kartowisastro (ketua), Soewarno (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), dan Darmawan Mangoenkoesumo (archivaris). Di samping perubahan nama perkumpulan, mereka juga banyak memberi perhatian pada perkembangan pergerakan yang terjadi di tanah air, Hindia Belanda. Mereka mendiskusikan, diantaranya “*November Belofte*” (Janji November) yang disampaikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) pada 18 November 1918. Ketika itu, ia memberikan sambutan pada pembukaan *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Batavia yang menjanjikan bahwa *Volksraad* kelak merupakan wakil seluruh rakyat Hindia Belanda dan akan memberikan perbaikan-perbaikan kepada penduduk bumiputra. Janji ini tidak pernah direalisasi karena dinilai bersikap lunak terhadap penduduk Hindia Belanda. Ia ditarik dan diganti dengan Gubernur Jenderal baru yang bersikap keras, yakni D. Fock (1921-1926) yang dalam pemerintahannya diwarnai oleh arus pemogokan dari Sarekat Islam dan PKI dengan Sarekat Sarekat Buruh di bawah naungan kedua partai politik tersebut. Di masa inilah terjadi pembuangan para pemuda bumiputra ke Digul, ke luar negeri atau terbelenggu dalam penjara kolonial.

Hermawan Kartowisastro dan kawan-kawannya mencela keras sikap kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan gubernur jenderalanya. Keadaan buruk yang melanda tanah air mempengaruhi

jalan pikiran Herman Kartowisastro dan kawan-kawannya. Mereka juga diilhami oleh seruan para pemimpin dunia yang dikumandangkan pada akhir Perang Dunia pertama, yakni *"right of self determination"* bagi bangsa-bangsa di dunia. Sebagai media komunikasi, mereka menerbitkan majalah "Hindia Poetra" yang sebelumnya dikelola oleh *Indonesische Verbond van Studenten*, sebuah organisasi mahasiswa bentuk konfederasi yang di dalamnya bergabung *Indische Vereeniging*, Tjung Hoa Hui (organisasi mahasiswa Cina), dan beberapa organisasi mahasiswa Belanda yang mempunyai perhatian pada Hindia Belanda³⁸.

Pada masa kepemimpinan Herman Kartowisastro diciptakan lambang organisasi dalam warna merah putih dan ditengahnya terdapat gambar "kepala kerbau" yang diharapkan sebagai simbol kesabaran, ketabahan, dan keberanian para pelajar Hindia di negeri Belanda. Lambang yang diusulkan Ahmad Soebardjo Djojoadisoeerjo, seorang mahasiswa Ilmu Hukum di Leiden, digambar di atas kain oleh seorang mahasiswa Seni dan kemudian menjadi kebanggaan yang dipasang di tembok, tepatnya di atas kepala para pengurus PI ketika mereka sedang rapat. Sedangkan Ahmad Subardjo sendiri membuat lambang tersebut dalam bentuk yang lebih kecil dan dipasang di kamarnya di sebuah flat di Noordeinde 32, Leiden. Dalam sendau gurau, ia sampaikan kepada para anggota perhimpunan:

*"siapapun yang hendak menempuh ujian doktoral, sebelum pergi ke tempat ujian, singgah dulu beberapa menit di kamarku untuk bersujud di depan lambang merah putih sambil mengucapkan kata-kata demi kehormatan tanah air"*³⁹.

Kepemimpinan Herman Kartowisastro kemudian diganti oleh pengurus baru periode 1923-1924, yakni Iwa Koesoemasoemantri (ketua), J.B. Sitanala (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), Darmawan Mangoenkoesumo (archivaris), dan Sastro Moeljono (komisaris). Pada masa kepengurusan baru ini lebih maju selangkah lagi dengan keterangan asasnya bercorak nasional radikal yang menghendaki persatuan rakyat Hindia dan pemerintahan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap rakyat Hindia. *Indonesische Vereeniging* di bawah Iwa Koesoemasoemantri berusaha keras untuk menunjukkan warna perjuangan mereka kepada seluruh anggota dan sedapat mungkin diketahui oleh pimpinan pergerakan nasional di Indonesia. Untuk itu, mereka tetap menerbitkan majalah "Hindia Poetra" yang diselundupkan ke Hindia Belanda. Redaksi majalah tersebut adalah Ahmad Soebardjo, Mohammad Hatta, dan Darmawan Mangoenkoesoemo. Redaksi

beralamatkan di tempat tinggal Mohammad Hatta di Schoone Bergerweg 51 B, Rotterdam, berdekatan dengan *Handels Hoge school*. Dalam rangka peringatan ulang tahun *Indonesische Vereeniging* ke-15 pada 1923, Mohammad Hatta dan kawan-kawan diberi tugas menyusun *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923* yang diterbitkan pada April 1924. Buku tersebut berisi 13 (tigabelas) artikel yang menggunakan nama samaran⁴⁰ untuk kepentingan pengamanan pribadi para pengarangnya.

Salah satunya, tulisan Mohammad Hatta yang saat itu berusia 21 tahun, sangat tajam dan meyakinkan tentang posisi ekonomi berjudul "*Indonesia in de Wereldgemeenschap*" (Indonesia Dalam Masyarakat Dunia). Dalam tulisan tersebut, Hatta mengutip uraian J.E. Stokvis (Sosialis) yang menyatakan bahwa:

"Bermilyar-milyar keuntungan mengalir dari Hindia", dan bahwa "harta kekayaan yang ditanam di bumi Hindia mempergunakan tenaga-tenaga kerja kaum pribumi yang dibayar terlalu minim".

Sebagai bukti dikemukakan pula angka-angka yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh dalam tahun-tahun peperangan. Pada akhir Perang Dunia I *Handels Vereneiging Amsterdam* (HVA) mengeluarkan keuntungan sebesar 60% di tahun 1920".

Gedenkboek mendapat kecaman keras dari kaum kolonialis Belanda yang memberi cap bahwa *Indonesische Vereeniging* sudah melangkah ke arah yang membahayakan. Selain artikel-artikelnya, juga gambar sampul bukunya, yakni warna merah putih dan ditengah-tengah terdapat gambar kepala kerbau. Selain itu, di halaman cover dalam terdapat lukisan Pangeran Diponegoro yang menggemparkan kalangan pemerintah Belanda dan pensiunan Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda, seperti gubernur jenderal, residen, dan sebagainya. Pers Belanda juga memberi berbagai komentar tajam tentang isi *Gedenkboek* tersebut. Mereka tidak menduga bahwa para pelajar Hindia memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah penjajahan Belanda, soal-soal aktual mengenai keadaan di Hindia Belanda, dan masalah politik internasional.

Meskipun demikian, sikap radikal organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda ini tidak berkurang, malah bertambah tinggi suhunya di masa kepemimpinan Nazir Pamuncak yang susunan lengkap pengurusnya, yakni Nazir Pamuncak (ketua), A.A. Maramis (sekretaris), R. Soewarno (bendahara), Soekiman (komisaris). Dan Mohammad Nazif (archivaris). Pada rapat anggota 1 Mei 1924, Nazir Pamuncak

menjelaskan tentang keterangan dasar: “Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan”. Tujuannya ialah memerdekakan Indonesia melalui suatu aksi massa nasional yang insaf dan berdasar pada tenaga sendiri. Ia menegaskan dengan adanya dua jenis penjajahan, yakni penjajahan politik dan ekonomi, maka aksi itu harus ditujukan kepada kemerdekaan politik dan sikap menentang kapital asing yang menyedot kekayaan Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa politik non kooperasi adalah sendi perjuangan rakyat Hindia.

Di samping itu, dikatakannya, bahwa kerjasama dengan penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah menipu diri sendiri. Kerjasama hanya bisa terjadi di antara dua golongan yang sama hak dan kewajiban serta kepentingannya. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka kerjasama tersebut berarti mempermainkan “yang lemah” oleh “yang kuat” untuk kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, *Indonesische Vereeniging* menolak kerjasama dan tetap bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Arah perjuangan *Indonesische Vereeniging* telah berubah menjadi organisasi politik tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kehadiran Tiga serangkai (Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R.M. Soewardi Soerjaningrat) yang diasingkan ke Belanda. Begitu pula, nama majalahnya mengalami perubahan dari “Hindia Poetra” yang terbit pada 1915 menjadi “Indonesia Merdeka” pada 1924.

Selanjutnya, tindakan radikal yang diambil pada masa kepemimpinan Nazir Pamuncak ialah pemecatan terhadap Noto Soeroto dan J.B. Sitanala. Noto Soeroto, penganut politik asosiasi adalah bekas mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Leiden. Ia putera Pangeran Notodiningrat dari Pakualaman Yogyakarta. Ia termasuk seorang pendiri *Indische Vereeniging*. Namun, ia kemudian membuka toko buku di Den Haag setelah berhenti kuliah. Ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan dari Hindia di Nederland dan karangannya telah dibaca secara luas. Pada 1924, Arnold Mononutu membaca tajuk rencana majalah “Udaya”. Dalam tajuk tersebut, Noto Soeroto memuji jasa dan budi baik van Heutsz sebagai *pacificator Indonesia*. Van Heutsz dinilai oleh Noto Soeroto sebagai seorang “pahlawan” yang telah berjasa mendatangkan keamanan di Hindia Belanda.

Menurut Arnold Mononutu, pendapat Noto Soeroto dianggap salah dan tidak dapat diampuni. Ia meminta kepada Nazir Pamuncak sebagai ketua *Indonesische Vereeniging* untuk mengadakan rapat anggota. Dalam rapat itu, Arnold Mononutu tampil sebagai jaksa penuntut dan

menegaskan dalam rapat tersebut tentang apa yang didengar langsung dari Noto Soeroto sebagai anggota organisasi tidak dapat dibenarkan. Arnold menyatakan bahwa tidaklah tepat Noto Soeroto memuji Van Heutsz yang tidak berperikemanusiaan dalam menindas perlawanan rakyat Indonesia, yang hendak mencari kebebasan dan kemerdekaan. Sikap yang demikian berlawanan dengan cita-cita perjuangan *Indonesische Vereeniging*. Oleh sebab itu, Arnold menuntut agar Noto Soeroto dikeluarkan dari *Indonesische Vereeniging*. Rapat anggota menyetujui tuntutan Arnold Mononutu sehingga Noto Soeroto diberhentikan dari *Indonesische Vereeniging*, setelah diberi kesempatan kepadanya untuk membela diri.

Tindakan yang sama dilakukan pula terhadap J.B. Sitanala, bekas sekretaris *Indische Vereeniging*. Ketika diadakan rapat untuk memberhentikan Noto Soeroto, ia tidak hadir. Sitanala mengirim surat kepada surat kabar *Het Algemeene Handelsblad* yang dimuat dalam kolom surat pembaca pada terbitan 3 Januari 1925 dengan judul "*Een Booze Geest*" (Suatu Semangat Jahat). Dalam suratnya itu, ia menyerang anggota dan pengurus *Indonesische Vereeniging*, yang telah mengeluarkan Noto Soeroto dari organisasi. Ia mengirim surat dua kali kepada Surat kabar tersebut dengan nada yang sama. Nazir Pamuncak sangat marah terhadap sikap Sitanala itu. Mereka mengadakan rapat anggota dan mengundang Sitanala untuk mempertanggungjawabkan isi suratnya tersebut. Dalam rapat itu, pihak pengurus menjelaskan kepada Sitanala bahwa sebenarnya ia boleh berpendapat lain, namun ia tidak boleh membeberkan kepada pers. Sitanala tidak dapat membela dirinya dan mau menerima resiko yang ditimpakan kepadanya akibat perbuatannya tersebut. Dalam pemungutan suara, ternyata para anggota setuju agar Sitanala diberhentikan dari keanggotaan *Indonesische Vereeniging*. Tindakan *Indonesische Vereeniging* dengan mengeluarkan dua orang anggota berturut-turut hanya dalam jangka waktu sebulan, mendapat sorotan tajam dari pers kolonial Belanda. Mereka memperingatkan pemerintah Belanda agar berhati-hati terhadap *Indonesische Vereeniging* yang semakin radikal dan dapat mengancam kepentingan Belanda di Hindia Belanda.

Pasca rapat pemecatan Sitanala, dilakukan pemilihan pengurus baru yang berhasil memilih Soekiman Wirjosandjojo (ketua), Arnold Mononutu (wakil ketua), Soerono (sekretaris I), Mohammad Hatta (sekretaris II), Amir (komisaris), dan Muhammad Yusuf (komisaris). Pengurus *Indonesische Vereeniging* ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah anggota pengurus sebelumnya yang berkisar 5 (lima) orang saja.

Pengurus baru ini berjumlah 8 (delapan) orang dengan tugas yang lebih berat. Sebulan kemudian, pengurus mengadakan rapat lagi untuk membicarakan program dasar organisasi.

2.6. Solidaritas Indonesia: Sumpah Pemuda

Perkembangan politik yang semakin kondusif bagi kaum pergerakan yang bangga berlabuh dalam suasana ke-Indonesiaan telah mendorong pelbagai gerakan pemuda yang semula masih bersifat kedaerahan, mendambakan persatuan Indonesia, bahkan kemudian berubah menjadi simbol kehidupan yang terus digelorakan dan diperjuangkan. Organisasi pergerakan nasional merupakan wadah bagi kaum intelektual yang disatu pihak telah mengalami alienasi sosio kultural dan di pihak lain memerlukan ceruk sosial baru untuk mewadahi arena bergerak dan forum komunikasi politik. Ide nasionalisme mentransenden etnosentrisme, primordialisme, dan komunalisme diganti dengan solidaritas nasional. Perhimpunan Indonesia dengan manifestasi politiknya pada 1925 telah menegaskan kesatuan sebagai faktor mutlak bagi terbentuknya *nation* Indonesia yang terbebas dari cengkaman kolonialisme.

Kesemuanya itu termanifestasikan dalam penyatuan kehendak organisasi-organisasi pemuda yang berlabelkan kedaerahan dan, juga atas nama perorangan bermusyawah untuk menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda I di gedung *Lux Orientis* di Batavia pada 15 November 1925. Kongres Pertama yang diketuai oleh M. Thabrani dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang lahir pada 1926 karena terinspirasi perjuangan PI, berhasil diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia dengan tujuan “menggugah semangat kerja sama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air guna mewujudkan persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia”.

Dalam Kongres Pertama ini, M. Thabrani sebagai ketua, menyampaikan pidato yang diakhiri dengan kata-kata:

“Supaya kongres ini menyuarakan generasi muda sekarang yang nantinya terpanggil untuk bekerja, berkarya, berjuang, dan meninggal untuk kemerdekaan nusa dan bangsa, rakyat di seluruh Kepulauan Indonesia, bersatulah!”.

Di samping itu, Mohammad Yamin, seorang siswa AMS di Surakarta yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa Kongres Pemuda dalam menggalang persatuan dan termasuk arsitek dari bangunan kesatuan Indonesia, menyampaikan pidato berjudul, *"Kemungkinan-Kemungkinan Untuk Bahasa dan Kesusasteraan di Kemudian Hari"*. Ia menguraikan dalam pidatonya, antara lain:

*"Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah, seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak, dan lain-lain, hanya ada dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mengandung harapan untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu akan berkembang secara perlahan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia"*⁴¹.

Di samping itu, Mohammad Yamin menyampaikan pula bahwa kebudayaan Indonesia di masa depan akan diutarakan dalam bahasa Melayu. Untuk itu, ia menyatakan betapa perlunya suku bangsa di tanah air segera memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa kebangsaan. Menurutnya, hal ini telah diperagai oleh bahasa Melayu. Muhammad Yamin menutup pembicaraannya secara keseluruhannya yang disampaikan dalam bahasa Belanda, antara lain:

*"Sejarah kini ialah menuju nasionalisme yang dalam dan luas, kearah kemerdekaan dan tujuan yang luhur, yaitu kebudayaan yang lebih tinggi nilainya, agar Indonesia dapat mempersembahkan kepada dunia hadiah yang lebih berharga dan lebih indah, selaras dengan kebangsaan kita"*⁴².

Pidato tersebut mendapat komentar Prof. Dr. Hooykaas, yakni:

*"Mohammad Yamin akan menjadi pelopor dari usaha pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dan, bahasa Belanda secara perlahan pasti akan terdesak karenanya"*⁴³.

Menurut M. Thabroni, sebenarnya pada Kongres Pemuda I secara aklamasi sudah dapat disetujui bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pendapat Thabroni ini hanya diketahui oleh Muhammad Yamin dan Djamaluddin (Adi Negoro) bahwa tujuan sebenarnya yang hendak dicapai adalah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dan bahasa itu haruslah bernama bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Namun Yamin dan Djamaluddin belum dapat menerima pendapat

Thabroni, dan oleh karena itu masalah nama bahasa persatuan ditunda pada Kongres ke II, dua tahun kemudian.

Kongres Pemuda I itu bertujuan, yakni: *Pertama*, memajukan faham persatuan kebangsaan. *Kedua*, mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Sementara itu, Kongres ini membicarakan pula “kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan”, diantaranya berisi anjuran agar bangsa Indonesia bersikap toleran terhadap agama lain. Thabroni pun menyatakan:

“Memang benar, tujuan Kongres I belum seluruhnya berhasil, antara lain perihal mengadakan fusi di antara organisasi-organisasi pemuda. Bolehlah, Kongres Pemuda I itu suatu kongres orientasi. Walaupun demikian, hasil kongres yang utama yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan atau de Indonesische Eenheidgedachte, meski masih samar-samar”.

Pasca Kongres Pemuda I, usaha untuk persatuan di kalangan pemuda terus dilaksanakan. Pada 15 Agustus 1926 diadakan kembali pertemuan para perkumpulan, yakni Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Voor Ambonsche Studeerenden, Jong Minahasa, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond dengan Panitia atau Komite Kongres pemuda I. Pertemuan itu diadakan di gedung bioskop “Java” di Jakarta. Acara rapat membahas usul Jong Java untuk mengadakan federasi di antara berbagai organisasi pemuda. Namun demikian, rapat tersebut belum membawa hasil positif. Enam bulan kemudian, tepatnya pada 20 Februari 1927 di Jakarta diadakan lagi pertemuan perkumpulan-perkumpulan pemuda kedaerahan dan PPPI. Rapat tersebut menunjukkan hasil yang lebih maju, karena telah membahas usul fusi dari Jong Java. Fusi lebih maju dari federasi yang hanya sekedar gabungan dari perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah itu, namun belum menunjukkan kesatuan yang bulat. Organisasi-organisasi itu tetap merupakan unit-unit kecil yang hanya tergabung dalam federasi besar, sedangkan, pengertian fusi yakni semua perkumpulan pemuda tersebut mengalami proses peleburan dan akan menjelma menjadi satu organisasi pemuda Indonesia yang baru.

Proses persatuan itu tentu melalui berbagai cara, baik resmi maupun forum-forum rapat seperti yang dilakukan di *Indonesische Clubhuis* di Kramat Raya 106, Batavia menjelang berlangsungnya Kongres Pemuda II dalam dialog-dialog ringan tapi bermakna dalam. Hal ini tercermin dari kelakar Adnan Kapau Gani, seorang pemuda Minangkabau yang mencintai Palembang dengan Jusupadi

Danoehadiningrat, seorang putera bangsawan Yogyakarta, sebagai berikut:⁴⁴.

Adnan Kapau Gani, *"Sementara ini, enakny gini aja dulu, Sup! Kalau situ dahar gudek ame nasi, jangan lupa plus ama empek-empeknnya!"*

Muhammad Yamin menimpali, *".....dan bagusn lagi.....tambah rendang". Kemudian disambut lagi oleh pemuda Bandung, "Yang paling baik gudek met empek-empek met sagu met oncom met lain-lainnya lagi!"*

Dalam perkembangannya, persatuan di kalangan pemuda akhirnya tercapai oleh intensifikasi dialog maupun diskusi-diskusi diantara mereka. Gedung *Indonesische Clubhuis* (I.C) di Kramat Raya 106, Batavia yang juga menjadi tempat tinggal para pemuda, diantaranya Mohammad Yamin yang telah menjadi mahasiswa *Recht Hogeschool*, sering menjadi tempat diskusi mereka dengan cara-cara unik dan lebih bersifat spontan. Biasanya, setelah makan malam mereka lanjutkan dengan diskusi di meja makan dengan topik-topik pembicaraan sekitar masalah politik, kemasyarakatan, kebudayaan, dan lain-lain yang berlangsung hampir setiap malam.

Para pemuda itu juga mendidik diri dan menggariskan tahun 1928 bahwa pemimpin harus pandai mendekati dan menyelami hati rakyat. Pemuda-pemuda pada tahun 1928 sudah menganggap puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai kebudayaannya sendiri, yakni kebudayaan Indonesia. Salah satu contoh, yaitu Abu Hanifah, pemuda asal Sumatera Barat pandai menarikan "Gatotkaca Gandrung", tarian Minahasa, tarian Ambon, di samping tarian Sumatera Barat. Ia juga bisa berbahasa Jawa dan memahami "Epos Mahabarata", walaupun ia lulusan A.M.S bagian B (Ilmu Pasti Alam) dan mahasiswa Kedokteran yang tentu saja tidak mempelajari Sastra. Selain itu ia juga mahir bermain sepak bola. Jadi saat itu, pemuda memiliki kemampuan serba komplit, baik dalam organisasi, seni, maupun sport.

Pemuda-pemuda tahun 1928, termasuk Mohammad Yamin adalah seorang pemuda idealis-utopis pada jaman itu. Mereka memiliki cita-cita sangat tinggi, padahal kondisi dan situasi saat itu sama sekali belum terbayangkan adanya kemungkinan untuk mewujudkannya. Mereka berbicara tentang tanah air, bangsa, bahasa, negara merdeka, padahal politik pemerintah Kolonial Belanda sangat keras terhadap hal-hal yang remeh dan biasa sekalipun. Secara perorangan, para pemuda ini

tidak mau kalah dengan para pemuda Belanda. Meskipun kebanyakan para pemuda tersebut berasal dari keluarga biasa pula, namun semangat belajar untuk menguasai bidang yang ditekuninya dilakukan rata-rata secara maksimal, di samping harus memikirkan keadaan bangsanya.

Secara internal, organisasi-organisasi pemuda itu juga diatur secara cermat dalam menyelenggarakan administrasinya. Semua anggota organisasi juga terdaftar, di samping itu salah satu persyaratan menjadi anggota, yakni memiliki prestasi dalam studinya. Apabila ada pemuda yang “sok pintar” ingin coba-coba tampil ke mimbar untuk berpidato, pemuda tersebut akan mendapat cemooh, kritik, dan teriakan., “*Belajar dulu, Bung!*” Oleh karena, pemuda-pemuda itu telah melakukan seleksi dalam diri mereka sendiri dan hanya pemuda-pemuda yang berbakat, serius dalam cita-citanya akan tampil ke depan sebagai pemimpin bangsanya.

Pada waktu tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamuncak, dan Abdulmadjid ditangkap oleh polisi Belanda pada Desember 1927 karena kegiatan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka PPPI menganggap sudah tiba waktunya untuk lebih dalam merundingkan persatuan organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Pada bulan Juni 1928 dibentuklah Panitia Kongres Pemuda ke-II dengan susunan, sebagai berikut:

Ketua	: Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua	: Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris	: Mohammad Yamin (JSB)
Bendahara	: Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I	: Djohan Mohammad Tjai (JIB)
Pembantu II	: Kontjosoengkono (Pemuda Indonesia)
Pembantu III	: Sendoek (Jong Celebes)
Pembantu IV	: J. Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V	: Rochjani (Pemuda Kaum Betawi)

Tokoh-tokoh pemuda tersebut masing-masing sebagai pimpinan delegasi organisasi pemuda yang diwakilinya. Adapun yang menghadiri kongres adalah semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta kumpulan kaum dewasa dan

partai politik, dengan jumlah yang hadir yakni 750 orang. Seperti yang dikatakan ketuanya, Soegondo Djojopoespito, Kongres pemuda II ini sebetulnya tidak hanya untuk pemuda saja, tetapi merupakan rapat umum dan terbuka bagi semua orang yang suka mengahdirinya. Dari pihak kaum dewasa yang hadir tokohnya adalah Mr Sartono, mewakili PNI cabang Betawi, Kartakoesoema dari PNI cabang Bandung, Abdulrachman dari Boedi Oetomo cabang Betawi, Mr. Soenario dari Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (P.A.P.I), Kartosuwirjo dari Pengurus Besar partai Sarikat Islam, Sigit dari *Indonesische Club*, Moehidin mewakili Pasundan, A. Mononutu dari Persatuan Minahasa. Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh dari perseorangan, seperti S. Mangoensarkoro, Nona Poernomowoelan, Mohammad Nazif, Siti Soendari, Emma Poeradiredja, Koentjoro Poerbopranoto, Kasman Singodimedjo, Soekmono, Soerjadi, Djaksodipoero (Wongsonegoro, SH), Djaksadipoero, Sjahboedin latief, Mohammad Roem, W.R. Soepratman, dan lain-lain. Adapun dari *Volksraad* hadir, diantaranya Soerjono dan Soekowati; dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Dr. Pyper dan Van der Plas; dari Surat kabar Keng Po, yakni Saeroen, sedangkan polisi-polisi dari Hindia Belanda hadir dengan bersenjata lengkap⁴⁵.

Kongres Pemuda II yang diprakarsai PPPI berlangsung di Weltevreden, Batavia pada 27 dan 28 Oktober 1928 dibuka dengan pidato sambutan dari Ketua Kongres, Soegondo yang menguraikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia menggambarkan latar belakang kelahiran Boedi Oetomo, berbagai organisasi kedaerahan hingga terjadinya Kongres Pemuda Pertama yang diprakarsai M. Tabhroni dari PPPI. Soegondo berpendapat bahwa pada kongres tersebut perasaan persatuan Indonesia mulai tertanam dan sebaliknya perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan mulai luntur. Pada Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928 ini diharapkan akan terus memperkuat persatuan yang telah tertanam di hati sanubari para pemuda⁴⁶.

Pidato-pidato yang disampaikan dalam kongres itu, diantaranya Mohammad Yamin dari JSB yang menjabat juga sebagai sekretaris kongres, berjudul "*Persatuan dan Kebangsaan Indonesia*" yang menguraikan arti persatuan dan hubungan antara persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, persatuan bukan hanya diperlukan oleh kalangan pergerakan saja, tetapi juga bagi para pemuda bahwa persatuan itu harus dapat dijadikan "darah daging" mereka. Dalam hal ini, Yamin menyebutkan lima faktor pengikat kekuatan bangsa Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan

kemauan. Tentang bahasa, Yamin mengemukakan bahwa bahasa Melayu dalam Kongres Pemuda itu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Dikatakan selanjutnya, bahwa Bahasa Indonesia memberi pengaruh pada persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa yang menggunakan ratusan bahasa daerah. Atas saran Mohammad Yamin itu pula, pada akhirnya Kongres Pemuda Indonesia ke-II diputuskan dan ditetapkan bahwa bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia⁴⁷.

Selain itu, pada Kongres Pemuda Indonesia II ini, Mohammad Yamin adalah sosok yang memainkan peranan besar. Ia sudah bekerja dari masa persiapan sebelum rapat-rapat dimulai, bahkan dua tahun sebelum kongres ini berlangsung sebagai perancang maupun pemikir. Disamping memberi pidato yang menjadi inti dari Kongres Pemuda II, ia melaksanakan keputusan-keputusan akibat-akibat dari kongres. Mohammad Yamin juga menjadi penerjemah pidato-pidato yang ditulis dalam bahasa Belanda.

Pada hari berikutnya, pidato-pidato yang disampaikan membahas masalah pendidikan dan perempuan dengan para pembicara yakni Djokosarwono, R.M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), Sarmidi Mangoen Sarkoro, dan Nono Poernomowoelan. Di samping itu, pidato juga dilakukan dari tokoh organisasi Pandu, yakni Ramelan, Ketua Sarekat Islam Afdeling Pandu (S.I.A.P) yang merupakan organisasi Pandu milik PSI dan Mr. Sunario, Ketua Gerakan Pandu Indonesia. Dalam pidatonya, Mr Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme Indonesia dan demokrasi, di samping perlunya gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dengan pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini telah mendidik anak-anak muda untuk menjadi disiplin dan mandiri, suatu hal yang dibutuhkan dalam perjuangan⁴⁸.

Selama rapat-rapat PPPI, Muhammad Yamin selalu menentang ide fusi dari perkumpulan pemuda yang ada, tetapi ia memilih untuk mengadakan federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Hal ini disebabkan sebagai ketua Pemuda Sumatera, ia ingin agar perkumpulannya dapat lebih bebas untuk bergerak. Namun ketika kerapatan pemuda dilangsungkan yaitu ketika Mr. Soenario berpidato, pikiran federasi Yamin berubah dan bahkan sebagai sekretaris, ia memberikan resolusi dari kerapatan pemuda yang sangat menjunjung tinggi persatuan dari perkumpulan pemuda yang ada. Dalam rapat ketiga pada Minggu malam 28 Oktober 1928, yang dipimpin oleh ketua Sugondo, Muhammad Yamin yang duduk disebelahnya menyodorkan secarik kertas kepada Sugondo, yang berisi sebuah rumusan fusi dari

organisasi pemuda yang ada⁴⁹. Hasil rumusan tersebut akhirnya disepakati dalam rapat pemuda tersebut dengan sebutan 'Ikrar Kerapatan Pemuda' dan selanjutnya kini disebut sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya antara lain, tersebut dibawah ini.

SUMPAH PEMUDA

Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia, Bangsa Indonesia.

Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Meskipun didahului suasana panas terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mengawasi secara ketat selama sidang dan melarang arak-arakan Pandu pada malam hari dalam memeriahkan penutupan sidang, Kongres Pemuda Indonesia ke-II pada 28 Oktober 1928 memiliki nilai terpenting dan menentukan. Melalui janji pemuda yang dikrarkannya itu, semangat persatuan dalam "solidaritas Indonesia" telah menunjukkan bahwa dalam diri para pemuda tidak ada lagi perbedaan daerah, bangsa, dan bahasa serta perbedaan-perbedaan sempit lainnya.

2.7. Pergerakan Perempuan

Gagasan Kemajuan dari kaum perempuan keluar dari peran tradisional muncul dari sejumlah tokoh yang lahir pada akhir abad IX sampai awal abad XX. Kaum perempuan yang keluar dari peran tradisional antara lain adalah R.A. Kartini (Jepara- Jawa Tengah), Dewi Sartika (Jawa Barat) dan El-Yunusiyah (Sumatera Barat). Ketiga tokoh ini pemikirannya akan dikaitkan dengan wacana pemikiran gerakan perempuan yang bermuara pada perdebatan pelaksanaan kongres perempuan I di Yogyakarta pada tahun 1928

Pelaksana politik etis di Hindia Belanda bidang pendidikan adalah J.H. Abendanon. Pada tahun 1900, ia menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur. Atas bantuan istrinya, sinar pendidikan dipancarkan ke pemuda Indonesia. Abdul Muis yang belakangan diketahui sebagai pemimpin Sarikat Islam adalah salah seorang yang sering berkumpul di Batavia. Suasana ini memberi rangsangan untuk

melakukan surat menyurat antara R.A. Kartini, puteri bupati Jepara dengan Abendanon.⁵⁰ Bermula dari korespondensi inilah cahaya emansipasi wanita Indonesia dimulai dan kemudian berwujud menjadi ide mendirikan sekolah-sekolah keputrian. Sekolah itu kemudian menghasilkan perempuan muda Indonesia yang berpendidikan barat dan bersama-sama dengan para pemuda Indonesia berada dalam suasana kehidupan masyarakat yang berubah. Abendanon dikenal sangat cinta Indonesia, walaupun pada tahun 1904 dikembalikan ke Belanda. Untuk melanjutkan rasa cintanya itu, Abendanon melakukan persahabatan dengan orang-orang Indonesia yang mengikuti pendidikan di negeri Belanda. Abendanon menuntun dan membantu para pelajar Indonesia itu dengan berbagai cara.⁵¹

Kartini adalah perempuan di dalam dua realitas. Realitas pertama, Kartini hidup dalam alam tradisi masyarakat Jawa Tradisional yang senantiasa membatasi sikap dan tindakan perempuan. Pada saat yang sama, Kartini berinteraksi dengan dunia di luar kehidupannya dunia modernitas yang bertolak belakang dengan realitasnya di dalam kesehariannya di rumah Bupati Jepara.⁵²

Selain Kartini, tokoh perempuan emansipatoris adalah Dewi Sartika. Perjuangan Dewi Sartika dalam memajukan kaumnya adalah dengan mendirikan sekolah. “Sakolah Kautamaan Istri” adalah nama sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Sekolah itu pula yang dimaknai oleh banyak kalangan sebagai media perjuangan Dewi Sartika dalam kerangka memajukan kaum perempuan di Hindia Belanda.

Dewi Sartika lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dari pasangan Raden Somanagara dan Nyi Raden Rajapermas, yang merupakan keturunan keluarga priyayi Sunda. Dewi Sartika sejak kecil mendapat pendidikan dasar dari orang tuanya dan disekolahkan di sekolah Belanda. Ketika ayahandanya wafat, maka Dewi Sartika kecilpun ikut pamannya seorang Patih di Cicalengka dan Dewi pun melanjutkan pendidikannya di sekolah Belanda, *Lagere School*. Dewi Sartika kecil yang tumbuh perlahan mulai mengambil peran dalam masyarakat. Bila ada waktu senggang, Dewi Sartika menyempatkan diri mengajari bacatulis pada anak-anak pembantu yang berada lingkungan kepatihan. Dalam proses perjalanan hidupnya, Dewi Sartika mempelajari tentang wawasan kesundaan dari pamannya. Wawasan kebudayaan barat diperoleh dari hasil interaksinya dengan seorang asisten Residen Belanda.

Pada tahun 1904, Dewi mendirikan Sekolah Istri. Sekolah ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat terutama kaum perempuan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, telah menjadikan semangat dan cita-cita untuk terus berupaya agar anak-anak dan kaum perempuan pribumi bisa mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan. Para murid perempuan ini, diajari mulai dari baca-tulis, berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan juga pelajaran agama. Penyelenggaraan sekolah ini tidak berjalan mulus karena adanya budaya yang masih bersemayam di kalangan masyarakat, yakni 'pengekangan' kaum perempuan masih kuat dijalankan. Namun upaya yang tak kenal lelah, cita-cita serta kegigihan Dewi Sartika mendapat dukungan penuh keluarga, sehingga sekolah tersebut dapat diwujudkan. Perkembangan sekolah yang diperjuangkan Dewi Sartika kemudian menuai hasil positif, di antaranya dengan didirikannya sekolah Keutamaan Istri di beberapa daerah. Tercatat 9 sekolah berdiri di beberapa kota dan kabupaten di Pasundan. Satu sekolah Istri didirikan di Bukit Tinggi Sumatera Barat oleh Encik Rama Saleh. Jika mencermati perubahan nama Sekolah yang dipelopori oleh Dewi Sartika, kita akan menemukan urutannya. Pada 16 Juli 1904 Dewi Sartika mendirikan Sekola Istri atau Perempuan. Sekolah ini berubah lagi pada tahun 1914 menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1929, nama sekolah diubah lagi menjadi sekolah Raden Dewi. Perubahan itu tentu saja sejalan dengan adaptasi yang terpaksa dilakukan agar tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Di Sumatera Barat ada tokoh pendidikan perempuan yang sangat gigih yaitu El-Yunusiyah. Ia adalah penggagas berdirinya lembaga pendidikan dan pers di Sumatera Barat. Peran ini merupakan langkah awal kaum perempuan keluar dari kodrat tradisional dan mengambil peran dalam pekerjaan kaum laki-laki.⁵³

Pada masa awal pergerakan Indonesia, pergerakan wanita berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosial. Pergerakan wanita pada awalnya merupakan perlawanan terhadap kekuasaan laki-laki (diantaranya kawin paksa dan poligami). Pergerakan wanita dalam permulaan merupakan gerak orang seorang, tidak dalam susunan perkumpulan. Hal ini diperlihatkan RA. Kartini (meninggal 1904), Dewi Sartika dan lain-lain.

Organisasi formal perempuan yang pertama adalah Putri Mardika didirikan di Jakarta tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang rasa takut dan mengangkat perempuan ke kedudukan yang sama seperti laki-laki. Antara tahun 1913- 1915 berdiri berbagai organisasi perempuan terutama di Jawa dan

Minangkabau, perhatiannya adalah mendobrak penjara rumah tangga yang telah membuat mereka terkurung bagai burung dan memajukan rakyat Jawa dan Minangkabau secara menyeluruh.⁵⁴

Pada tahun 1912, berdiri Keutamaan Isteri (Tasikmalaya, 1913) tujuannya mengadakan rumah-rumah sekolah untuk perempuan, Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917 dan Cicurug (1918). Selain itu juga berdiri sekolah-sekolah Kartini di Jakarta (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan (1917), Indramayu (1918), Surabaya, Rembang dan lain sebagainya. Selain itu juga mulai muncul perkumpulan kaum ibu untuk ketrampilan seperti memasak, menjahit, merenda, pemeliharaan anak, mereka berkumpul dalam perkumpulan Pawiyatan Wanito (Magelang 1915), Wanito Susilo (Pemalang 1918), Wanito Hadi (Jepara 1915).

Corak pergerakan wanita dalam masa awal, pada umumnya bergerak dalam perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan wanita. Gerak maju kaum wanita ini dilakukan dengan tidak menyerang kedudukan kaum pria, dan melawan penjajah.⁵⁵

Meningkatnya pendidikan di kalangan masyarakat, pada tahun 1920-an perkumpulan wanita bertambah. Misalnya di Sarekat Islam terdapat organisasi Perempuan Sosialis Sarekat Rakyat, sayap merah, yang sebagian anggotanya bergabung dengan PKI. Diantara anggotanya yang sangat gigih adalah Raden Sukaesih dan Munapsiah. Dalam Kongres PKI, di Jakarta 7 -10 Juni 1924, kedua tokoh ini berbicara di depan kongres bahwa perempuan yang tidak berjuang untuk hak-hak mereka pasti mereka akan disisihkan oleh laki-laki dan kapitalis. Kongres PKI tersebut menyediakan satu hari khusus membicarakan gerakan wanita komunis. Akibat pemberontakan PKI 1927 -1927, Sukaesih dipenjara dan dikirim ke kamp Digul.

Organisasi berdasarkan keagamaan yang penting adalah Aisyiah. Aisyiah dimulai sejak KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yang menginsafi perlunya bantuan perempuan menyelenggarakan sejumlah kursus mengenai perintah agama. Pada tahun 1914, perempuan yang hadir dihimpun dalam perkumpulan bernama 'Sopo Tresno', dan baru tahun 1917 berubah namanya menjadi Aisyiah dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai ketuanya.⁵⁶ Pada tahun 1929, Aisyiah telah mempunyai 5000 anggota, tersebar dalam 47 cabang dan 50 kring dan mempunyai 32 rumah sekolah perempuan dengan 75 guru puteri.

Disamping perkumpulan dari wanita Muslim, wanita Katholik juga mendirikan perkumpulan dengan nama Wanito Katholik. Sebelumnya pernah ada perkumpulan *De Katholieke Vrouwen Bond* yang sebagian anggota adalah wanita bangsa Belanda yang beragama Katholik. Wanito Katholik terbentuk berkat usaha R Ay. Maria Sulastri Darmoseputro. Ketika itu, ia mengemukakan gagasannya untuk mendirikan perkumpulan wanita Katholik pribumi kepada Pastur HV. Driesche SY. Pastur menyetujui gagasan tersebut sehingga pada 26 Juni 1924 di gedung Zusteren St Franciscus Asisi Yogyakarta diadakan rapat untuk membentuk perkumpulan tersebut. Rapat dihadiri 120 orang, dan berhasil menyusun kepengurusan Wanito Katholik dengan ketua R Ay. Catharina Harjodiningrat.⁵⁷

Selain itu, ada perkumpulan wanita di daerah-daerah seperti Ina Tuni di Ambon yang membantu aksi Sarekat Ambon, Wanito Utomo, Wanito Muljo, berdiri di Yogyakarta, di Surabaya ada Puteri Budi Sejati. Perkumpulan pelajar puteri juga mengadakan organisasi pemuda-pemudi pelajar, diantaranya Puteri Indonesia bagian dari Pemuda Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling (JIBDA), Jong Java Bagian gadis, organisasi Wanita Taman Siswa.

Gagasan-gagasan ke-Indonesiaan yang semakin kuat, telah menghantarkan organisasi perempuan dalam suatu kongres perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Sabtu malam tanggal 22 – 25 Desember 1928 yang diprakarsai 7 organisasi wanita yaitu Wanito Utomo, Wanito Taman Siswo, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Jong Java bagian Gadis (*meisjesking*), Aisyiah, Jong Islamieten Bond Domes Afdeeling bagian wanita (JIBDA). Kongres bertujuan mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia dan mengadakan gabungan antara perkumpulan wanita. Kongres Perempuan pertama yang dihadiri hampir 30 organisasi wanita dari seluruh Jawa dan Sumatera.

Adapun hasil keputusan kongres Perempuan Pertama adalah:

- a. mendirikan badan permufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI)
- b. mendirikan studie fonds untuk anak-anak perempuan yang tidak mampu membayar biaya sekolah dan berusaha memajukan kepanduan putri.
- c. Mencegah perkawinan di bawah umur.⁵⁸

Dalam kongres tersebut Siti Munjiah dari Aisyiah menyampaikan kritik terhadap tingginya perceraian yang diakibatkan kawin paksa. Disamping itu masalah mode pakaian juga tidak luput dari kritiknya. Menurutnya model pakaian yang berganti-ganti terus dan tidak menutup aurat supaya dicegah agar tidak masuk ke dalam puteri-puteri Indonesia. Masuknya budaya barat akan merusak budaya kita, sehingga tidak semua pengetahuan barat dapat diambil tetapi harus disaring.⁵⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, kongres Permusyawaratan Perikatan Perempuan Indonesia (PPPI), 28 – 31 Desember 1929 di Jakarta, dibicarakan tentang kewajiban wanita dalam hidup sosial, ekonomi dalam perkawinan dan keluarga, tentang poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak. Dalam kongres juga disepakati telah terjadi penggabungan beberapa organisasi sehingga nama PPPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII) agar lebih jelas bahwa organisasi bukanlah merupakan fusi tetapi merupakan gabungan perkumpulan (federasi). Tujuan organisasi mengadakan hubungan diantara perkumpulan-perkumpulan wanita untuk memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia dan tidak mencampuri politik dan agama. Selain itu diajukan mosi kepada pemerintah untuk melarang pergundikan. Dalam kongres ini disepakati untuk menerbitkan surat kabar 'Isteri' yang terbit di Jakarta, selain itu juga didirikan Studi Fonds PPII dengan nama Seri Derma.⁶⁰

Karena kecewa dengan hasil kongres perempuan 1928, Sukarno menganjurkan kaum perempuan nasionalis agar mengorganisasi gerakan mereka sendiri di luar gerakan nasionalis yang didominasi laki-laki. Sukarno mencari dukungan di kalangan kaum perempuan nasionalis pada suatu rapat yang diketua Suwarni Djojoseputro kemudian menjadi Suwarni Pringgogidgo di Bandung 1929, Sukarno menyatakan menentang keras poligami dan menyerukan kaum perempuan menyokong perjuangan nasional. Metafora yang digunakan ialah Wara Srikandi, prajurit putri dan salah satu isteri Arjuna, tokoh pahlawan dunia wayang. Atas dukungan Sukarno inilah, Suwarni Djojoseputro mendirikan Isteri Sedar, organisasi perempuan yang paling radikal.⁶¹

Pada tahun 1930-an muncul kesadaran tentang organisasi pemuda yang merasa tidak cocok dengan organisasi pemuda yang sudah ada. Untuk itu pada 22 Maret 1930 di Bandung berdiri Isteri Sedar, dipimpin Suwarni Djojoseputro. Perkumpulan ini bertujuan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia dan derajat hidup Indonesia untuk meletakkan dan menyempurnakan Indonesia merdeka. Meskipun dalam anggarannya dikatakan bahwa Isteri Sedar tidak masuk dalam wilayah politik, Isteri Sedar memberi kesempatan kepada anggotanya

masuk dalam organisasi politik. Yang utama adalah untuk bangsa yang dijajah agar segera mendapat kemajuan bangsa, kaum wanita harus berdiri sejajar dengan kaum lelaki dalam pembangunan bangsa dan kewajibannya yang istimewa adalah mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi insan pembangun yang gagah perkasa. Hal ini dikatakan dalam kongres Isteri Sedar, di Jakarta pada tanggal 4 – 7 Juni 1931. Isteri Sedar mengkritik tidak berhasilnya federasi (PPII) karena terdiri dari bagian-bagian yang sangat beraneka warna ada Islam, Kristen, dan kaum ibu biasa. Pendirian PPII yang mengatakan bahwa rakyat seluruhnya akan hidup senang, jika masing-masing keluarga senang, hal ini diserang Isteri Sedar bahwa hal itu akan terjadi jika bangsa sudah merdeka dan tidak mempunyai massa rakyat marhaen yang miskin sekali ini. Dalam gerakannya Isteri Sedar mendapat dukungan dari bekas anggota PNI.

Dalam kongresnya Isteri Sedar, 1932, Suwarni Pringgodigdo menyerukan agar kaum perempuan Indonesia terjun dalam perjuangan untuk kemerdekaan yang akan membawa kesamaan sepenuhnya. Suwarni Pringgodigdo juga menggunakan kata-kata Sukarno 'perempuan marhaen' untuk menyebut para anggota Isteri Sedar. Pidato Sukarno di depan kongres Isteri Sedar, mengikuti pendiriannya semula, gerakan perempuan berjalan melalui fase feminisme kemudian ke fase emansipasi yang didalamnya fase ini perjuangan melawan dominasi kolonial yang kapitalis akan memperoleh kemenangan dan sesudah itu gerakan perempuan tidak diperlukan lagi karena persatuan marhaenis perempuan dan laki-laki sudah tercapai dan dengan demikian kesamaan akan diperoleh pula. Isteri Sedar memperkuat tujuannya lagi yaitu menuju ke arah penghargaan sama dan peri kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan untuk mempercepat memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dasar kedua ini dilakukan secara radikal sehingga dalam waktu cepat Isteri Sedar telah berhasil mempunyai cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Suabaya, Palembang, Yogyakarta, Tegal, Cimahi, Cibat, Cianjur, Cirebon, Bogor. Akibat aksi keras pemerintah terhadap partai yang berhaluan kiri, maka Isteri Sedar semakin berkurang anggotanya. Namun Isteri Sedar tidak mau membubarkan diri karena berprinsip lebih baik beranggota sedikit daripada anggota banyak tetapi mematikan diri.

Organisasi wanita yang radikal lainnya adalah Mardi Wanita yang berdiri tahun 1933 yang mempunyai kaitan dengan Partindo. Mardi Wanita dilarang mengadakan rapat-rapat, Sri Panggihan ketua Mardi Wanita pernah ditahan 50 hari karena mengadakan rapat di tengah sawah. Pada tahun 1936, pemerintah membubarkan Partindo dan Mardi Wanita.⁶²

Maraknya perdagangan anak dan perempuan, telah menggugah kesadaran para wanita untuk mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1932. Dipilih sebagai ketua adalah Nyi Sunaryati Sukemi. Selanjutnya pada tahun 1937, Nyi S Sukemi mengikuti kongres Internasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Bandung.

Gerakan perempuan yang berada di luar PPII di daerah-daerah semakin berkembang dengan pesat. Pada Juni 1932 berdiri Isteri Indonesia, yang bertujuan menuju demokrasi Indonesia Raya, dalam kongresnya tahun 1938 mewajibkan semua cabang untuk mengadakan kantor penerangan agar memberi penerangan tentang perkawinan dan perceraian. Selain itu Isteri Indonesia juga berusaha dalam setiap dewan kota dapat mendudukkan anggotanya. Isteri Indonesia juga setuju dengan Gapi tentang tuntutan Indonesia berparlemen. Dalam kongres di Pasuruan 24 – 28 Desember 1940, Isteri Indonesia mengangkat Ny. Mr. Maria Ulfah menjadi ketua menggantikan Ny. Sunarjo Mangunpuspito.

Di kota Surabaya, berdiri Putri Budi Sejati (PBS) yang diketuai oleh Ny. Sudirman. Konperensi pertama diadakan Januari 1937 di Surabaya. PBS tidak bergerak dalam lapangan politik, tetapi lebih banyak dalam kerja sosial diantaranya fonds pakaian, pemeliharaan orang miskin, dan lapangan pengajaran. Dalam kongres 1938, PBS mengajukan mosinya tentang pengajaran. Mosi yang pertama menerangkan bahwa lapangan pengajaran partikuler untuk memberantas buta huruf diberi kesempatan luas. Mosi kedua mengingat masa usia 3 sampai 7 tahun dan 14 sampai 21 tahun adalah untuk pendidikan anak, menganjurkan didirikannya taman kanak-kanak nasional dan mengharap bahwa kaum wanita agar mencurahkan perhatiannya kepada pendidikan dan pergerakan pemuda.

Catatan Akhir :

- 1) George Mc Turnan Kahin; *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 84
- 2) Bahder Djohan, *Bahder Djohan: Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1980, hal. 24.
- 3) John Pattikaihattu, *Dr. Jacob Bernadus Sitanala: Hasil Karya Dan Pengabdian*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 63.
- 4) Suratmin. *Dr. Sutomo*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 52.
- 5) *Ibid*, hal. 52.
- 6) *Ibid*.,hal. 85.
- 7) Hans Van Miert, *Dengan Semangat Berkobar; Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918 – 1930*; Jakarta: KITLV-Pustaka Utan Kayu, 2003; hal 40
- 8) A.K. Pringgodigdo; *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*; Jakarta: Dian Rakyat, 1984, hal. 100-101
- 9) Restu Gunawan, dalam *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid V*, Jakarta: Kemendikbud dan IBVH, 2012, hal.....
- 10) Dalam arti politik nama Indonesia sejak tahun 1922 secara konsekuen dipakai oleh Perhimpunan Indonesia untuk mengganti nama Hindia Belanda. Sejak bulan Agustus 1926 nama Indonesia diterima secara resmi oleh Gerakan Perdamaian Internasional Sipil, dibawah pimpinan Marc Sangnier dan secara konsekuan juga dipakai. Bagi orang Indonesia, nama Indonesia mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik, karena mengandung tuntutan kemerdekaan, bukan kemerdekaan Hindia Belanda, melainkan kemerdekaan Indonesia dari Indonesia. sedangkan dari penamaan Indonesia, pertama kali dipakai oleh ahli ilmu bangsa-bangsa Inggris JR. Logan dalam karangannya yang dimuat dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang berjudul *The Ethnology of The India Archipelago* tahun 1850, lihat Mohammad Hatta; *Nama Indonesia (Penemuan Komunis?)*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980, hal. 8 – 9.
- 11) “*Dapur Nasionalisme Indonesia*” adalah istilah yang sukarno karena ide, gagasan, tujuan dan berbagai peikiran tentang nasionalisme Indonesia digagas dan diolah di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya.
- 12) Suhartono; *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908 – 1945*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal. 55

- 13) E.F.E. Douwes Dekker yang dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada 1879 berlatar belakang pendidikan *Indische Art*, seorang Indo Belanda yang berjiwa nasionalis. Ia adalah cucu dari kakak Eduard Douwes Dekker (Multatuli), penulis buku *Maxhavelaar* yang menarik simpati, terutama dari kalangan kelompok pendukung politik Ethis di Belanda terhadap usaha-usaha pembaharuan di Indonesia. Douwes Dekker menerima gelar dan bintang *The Boer's Fighting Man* (Pejuang bangsa Boer) dari Presiden Republik Transvaal, Afrika Selatan Paul Kruger oleh karena jasanya dalam Perang Boer menghadapi penjajah Inggris. Bergabungnya Douwes Dekker dalam Perang Kemerdekaan di Afrika Selatan ini, tanpa persetujuan Ratu Wilhelmina yang mengakibatkan Douwes Dekker dicabut sebagai warga negara Belanda. Namun, ia merasa bangga tidak diakui sebagai orang Belanda, sebab ia merasa bahwa dirinya bukan Belanda. Ia mengaku sebagai orang Hindia (Soewito, Irna H.N. Hadi. *Soewardi Soerjaningrat Dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal. 21).
- 14) Nama kecil: Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia adalah seorang keturunan bangsawan kraton, cucu Paku Alam III, seorang raja di Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1813 kerajaan Yogyakarta oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah pemerintah Raffles, kerajaan tersebut dibagi dua dengan mengangkat raja baru yaitu Paku Alam I di samping Sultan Hamengku Buana di Yogyakarta. Sekalipun ia seorang keturunan bangsawan, namun Soewardi Soerjaningrat tidak menonjolkan gelar kebangsawannya.
- 15) Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983/1984, hal. 38.
- 16) Darsiti Soeratman, *Ibid*, hal. 39.
- 17) Sutrisno Kutoyo, *Prof. H. Muhammad Yamin*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1981/1982, hal. 16.
- 18) Terbentuknya Tri Koro Darmo pada 1915 tidak bisa dilepaskan dari kegiatan Budi Utomo memasuki kancah politik. Budi Utomo berusaha menciptakan kaderisasi yang kuat bagi organisasinya dan terutama difokuskan untuk pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah di lingkungan Jawa. Satiman Wirjo Sandjojo menangkap gejala itu, sehingga atas inisiatifnya terbentuklah organisasi yang mewadahi pelajar-pelajar Jawa yang sedang menuntut ilmu pada sekolah menengah di perantauan. Organisasi Tri Koro Darmo diartikan tiga tujuan mulia yang menekankan aktivitas sosial, yakni: *pertama*, menjalin pertalian antara murid-murid bumi putera dan sekolah menengah dan kursus keguruan; *kedua*, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya; *ketiga*, membangkitkan dan mempertajam perasaan yang berlaku untuk semua

bahasa dan kebudayaan “Hindia”. Namun, organisasi ini ternyata hanya didirikan bagi para pelajar di sekolah menengah yang berasal dari Jawa tengah dan Jawa Timur, sehingga para pelajar di luar kedua daerah itu enggan memasuki organisasi Tri Koro Darmo (Sidi Mawardi. *Bibit Perseteruan Nasionalis Islam Vs nasionalis Sekuler: Pengalaman Jong Islamieten Bond 1925-1942*. Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan, 2000: hal. 43

- 19) Sri Sutjiatiningsih, *Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983, hal. 12.
- 20) Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1978, hal. 78.
- 21) Sidi Mawardi, *Op. Cit.*, hal. 45
- 22) Sidi Mawardi, *Ibid.*, hal. 48
- 23) Sutrisno Kutoyo, *Op. Cit.*, hal 18
- 24) Bahder Djohan, *Op. Cit.*, hal. 39
- 25) Sutrisno Kutoyo, *Op. Cit.*, hal. 21
- 26) I.O. Nanulaita, *Johannes Latuharhary, SH*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 27.
- 27) Bahder Djohan, *Op. Cit.*, hal. 35
- 28) Kasman Singodimedjo, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 27.
- 29) Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT Gramedia, 1989, hal. 127.
- 30) Kasman Singodimedjo, *Op. Cit.*, hal. 27
- 31) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 129
- 32) Sidi Mawardi, *Op. Cit.*, hal. 55
- 33) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 131
- 34) Kasman Singodimedjo, *Op. Cit.*, hal. 31
- 35) Kasman Singodimedjo, *Ibid.* hal. 31
- 36) Mohammad Roem, *Op. Cit.*, hal. 135
- 37) John Pattikaihattu, *Dr. Jacob Bernadus Sitanala: Hasil Karya Dan Pengabdianannya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud, 1982/1983, hal. 56.

- 38) R. Nalenan, *Iskaq Tjokroadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982, hal. 15.
- 39) *Ahmad Subardjo Djojoadisurjo. Op. Cit., hal 119*
- 40) Nama-nama samaran beserta artikel yang ditulisnya dapat diketahui pada peringatan H.U.T. Bung Hatta ke-70, sebagai berikut: "Artikel pertama berjudul '*Terugblik*' (Menengok Kebelakang) ditulis A.A. Maramis, artikel kedua berjudul '*Opgang*' (maju Ke Depan) ditulis Ahmad Subardjo, artikel ketiga berjudul '*Nieuwe Banen*' (Jalan Baru) ditulis dr. Sukiman Wirjosandjojo, artikel keempat berjudul '*Indonesia in de Wereldgemeenschap*' (Indonesia Dalam Masyarakat Dunia) ditulis Mohammad Hatta, artikel kelima berjudul '*Nationale Geschiedenis*' (Sejarah Nasional) ditulis Mohammad Nazif, artikel keenam berjudul '*Indonesia Di tengah-Tengah revolusi Asia*' ditulis Mohammad Hatta, artikel ketujuh berjudul '*Het nationale Recht*' (Hukum Nasional) ditulis Mohammad Nazif, artikel ke delapan berjudul '*De Gang des Tijds*' (Jalannya Waktu) ditulis Suleiman, artikel kesembilan '*Vertaling van ASTABRATA*' (Terjemahan ASTA-BRATA dalam bahasa Belanda) ditulis R. Ng. Purbatjaraka, artikel kesepuluh berjudul '*Kerjakanlah sendiri Pendidikan dan Pengajaran Anak-Anak Kita*' ditulis salah seorang anggota PI, artikel kesebelas '*Driehonderd Jaren Overheersching*' ditulis Darmawan mangunkusumo, artikel kedua belas berjudul '*De Vakbeweging in Indonesia*' (Gerakan Serikat Kerdja) ditulis serorang anggota PI, artikel ketigabelas berjudul '*Communistische invloeden in het Oosten*' (Pengaruh Komunisme di Timur) ditulis Iwa Kusumasumantri. Anonim. *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoengan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70, 1972, hal. 127)
- 41) Restu Gunawan; *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia*; Yogyakarta: Ombak Komuniti, 2005, hal. 137
- 42) *Ibid.*
- 43) *Sutrisno Kutoyo, Op. Cit., hal. 24*
- 44) *Sutrisno Kutoyo, Ibid., hal. 27*
- 45) *Kasman Singodimedjo, Op. Cit., hal. 36*
- 46) *Sidi Mawardi, Op. Cit., hal.86*
- 47) *Bahder Djohan. Op. Cit., hal. 41*
- 48) *Sidi Mawardi, Op. Cit., hal.88*
- 49) Restu Gunawan; *op. cit*, hal. 26

- 50) Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka jaya, 1984), hlm. 60.
- 51) "Een dankbare herinnering aan wijlen Mr. J.H. Abendanon", dalam *Oedaya*, Februari 1926.
- 52) Taufik Abdullah, "Nation Formation and Structural Concern: a Problem in Indonesian Historiography" dalam *Prisma The Indonesian Indicator*, No 29 (September 1983), hlm. 34-35.
- 53) Jajat Burhanuddin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia
- 54) Saskia Eleonora Wieringa; *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*; Jakarta: Garba Budaya; 1999, hal 105.
- 55) A.K. Pringgodigdo; *op. cit*, hal. 21
- 56) Suratmin; *Nyai Ahmad Dahlan*; Jakarta: Depdikbud, 1982, hal 62 - 63
- 57) AK. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 97
- 58) Suratmin, dkk; *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*; Jakarta: Depdikbud, 1991, hal. 10
- 59) *Ibid*; 25
- 60) Restu Gunawan, dalam Taufik Abdullah (ed); *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan (jilid V)*; Jakarta: IBVH, Kemendikbud, tahun 2012, hal. 368
- 61) *Ibid*,.
- 62) *Ibid*; hal. 368.

BAB III

DASAWARSA IDEOLOGI

PERGULATAN PEMIKIRAN BANGSA

1920 – 1930-AN

3.1. “Hasrat Kemajuan” di Hindia Belanda

Kemajuan pemikiran tokoh bangsa untuk mewujudkan Indonesia diawali adanya hasrat kemajuan dengan publikasi pikiran-pikiran tokoh pergerakan melalui surat kabar. Di antara tokohnya adalah Rivai, Marco Kartodikromo, Wahidin Sudirohusodo, dan lain-lainnya. Melalui surat kabar dan majalah yang dicetak, kemudian didistribusikan melalui pengangkutan kereta api ke kota-kota di Hindia Belanda dan juga melalui pos, pemikiran itu menyebar ke berbagai kalangan.

Satu di antara tokoh pemikir tersebut adalah Ahmad Abdul Rivai, ia adalah lulusan dokter dari Belgia. Setelah lulus Rivai tidak langsung menjadi dokter, tetapi malah memilih pekerjaan lain di luar pengetahuan kedokterannya, yakni jurnalistik. Van Heutsz menawarkan Rivai untuk memimpin redaksi *Bintang Hindia* sebagai redaktur dan editor. *Bintang Hindia* adalah dwi mingguan yang dalam tulisannya, Rivai menyebutnya sebagai “soerat tjerita” dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan rakyat hingga bisa mencapai status bangsawan pikiran. Pada terbitan tersebut, Rivai merumuskan sendiri perihal kenengratan yaitu bangsawan usul dan bangsawan pikiran.

Bangsawan usul menurut Rivai ialah golongan ningrat yang memperoleh status priyayinya dari faktor keturunan. Bangsawan pikiran lahir dari hasil perjuangannya, pencapaian intelektualnya, dan kaum yang mau belajar.

“Kekuatan badan, ketinggian bangsa dan kemuliaan usul tiadalah pasal yang pertama lagi, akan menjadi orang yang terbilang. Sekarang bolehlah kepandaian dan ilmu menghaturkan ke dalam bagian manakah kita terhitung. Keadaan inilah yang menimbulkan bangsawan pikiran”.

Dalam pandangan Rivai, kaum terpelajar memiliki posisi penting dalam kebangsaan memajukan bangsanya. Rivai menganalogikan bahwa bangsa Eropa telah “bersenjata”. Oleh karena itu orang pribumi harus mempersenjatai diri khususnya kaum mudanya. Musuh yang bersenjata itu harus dilawan dengan senjata juga, demikian halnya dengan ilmu dan kepandaian itu harus dilawan dengan cara kepandaian pula”.

Kemajuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda ikut menggugah Rivai untuk memajukan bumi putera. Rivai terinspirasi dengan berdirinya Perhimpunan Tionghoa di Hindia Belanda, Tionghoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1900. Rivai memikirkan agar kaum bumi putra membentuk organisasi yang bisa menyatukan seluruh kaum muda atau elemen progresif.

Dalam tulisan Rivai yang bertema ‘Kebangkitan bangsa Tionghoa’ dimuat dalam sejumlah edisi pada *Bintang Hindia* pada tahun 1906. Rivai menegaskan bahwa generasi mudalah yang memimpin gerakan kaum muda Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Rivai menegaskan kembali kekagumannya pada gerakan muda Tionghoa pada 1 April 1907. Dalam beberapa kesempatan, Rivai mendesak teman-temannya untuk menyamai orang-orang Tionghoa yang sudah berpikiran modern atau dalam istilah Rivai sebagai orang-orang Tionghoa yang sudah “terbaratkan”.

Lewat *Bintang Hindia*, Rivai juga mempopulerkan istilah ‘kaum muda’ yang didefinisikan, semua orang Hindia (tua dan muda) yang tidak suka lagi mengambil aturan kuno, adat kuno kebiasaan kuno tetapi yang mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu. Disisi lain istilah ‘kaum tua’ atau ‘kaum kuno’ ia tujukan pada mereka yang terobsesi pada kemuliaan (gila hormat) dan adat Jawa sembah dan jongkok. Alam analisisnya tentang masyarakat Indonesia, Rivai merasa ada tiga kelompok yang sangat berbeda orang awam, bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Dari ketiganya ia yakin hanya kelompok terakhirlah yang bisa memimpin proses modernisasi masyarakat. Pada 1905, Rivai mengusulkan pembentukan sebuah organisasi besar kaum pribumi yang bisa menyatukan seluruh kaum muda atau elemen

progresif. Organisasi itu diusulkan bernama Perhimpunan Kaoem Moeda, harus berusaha mendirikan cabang di berbagai kota dan daerah untuk membaca kebutuhan kaum pribumi¹. Dalam usulannya ini, Rivai memberi contoh kaum Tionghoa yang menurut dia telah berhasil mendirikan perhimpunan kaum muda sendiri, yaitu Tiong Hoa Hwee Koan. Ide untuk membentuk organisasi semacam itu memberi pertanda pembentukan Boedi Oetomo tiga tahun kemudian. Seperti BU organisasi yang dibayangkan Rivai meletakkan pendidikan dan pengajaran sebagai program utama dalam mengejar kemajuan. Tetapi sebenarnya masyarakat Tionghoa dan Tiong Hoa Hwee Koan-lah yang sangat mempengaruhi Abdul Rivai hingga ia mengusulkan agar gerakan serupa diluncurkan oleh para cerdik pandai bangsa Hindia Belanda. Pada 1903 orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda telah diijinkan memotong kuncir mereka dan berpakaian seperti bangsa Eropa. Kekaguman Rivai terhadap kemajuan bangsa Tionghoa mendorong dia mendukung tuntutan mereka agar pemerintah membuka fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka. Pada 1906 pemerintah di negeri Belanda menyambut kedatangan misi Tiongkok. Mengomentari hal itu, Rivai menyebut bahwa orang Tionghoa telah beradab, ia kemudian bertanya, 'akankah kaum pribumi mencapai status serupa?' dalam sebuah tulisan bersambung mengenai kebangkitan bangsa Tionghoa, Rivai menekankan bahwa kaum mudalah yang memimpin Tionghoa peranakan. Kekagumannya pada gerakan modernis bangsa Tionghoa menyebabkan Rivai berulang kali mendesak kawan-kawannya dan bangsa Hindia Belanda untuk menyamai orang-orang Tionghoa yang terbaratkan.

Bagi bangsa Hindia Belanda, *Bintang Hindia* adalah pembuka mata yang mendorong mereka mengubah sikap dan nilai tradisional menjadi lebih modern dan kebaratan. Rivai memang dipandang sebagai penggagas utama ide-ide baru itu dan merupakan penemu istilah 'kaum muda' dan majalahnya juga memuat tulisan para intelektual dan Tionghoa yang berbagi cita-cita yang sama dengan apa yang didengungkan Rivai. Artikel dan ilustrasi dalam majalah ini meliputi subyek yang sangat beragam. Tulisan Rivai yang memberi semangat untuk bangkit dari tidur panjang mendorong kalangan intelektual yang baru muncul untuk membaca *Bintang Hindia*. Kendati punya citra sebagai berkala yang disponsori pemerintah, *Bintang Hindia* berhasil menarik perhatian kaum terpelajar, para guru, pejabat priyayi dan siswa dalam polemik mengenai tradisi dan perubahan dalam masyarakat pribumi. Bagi banyak orang *Bintang Hindia* satu-satunya penerbit intelektual sejati pada masa itu, mengekspresikan sentiment yang telah

mereka rasakan sejak lama. Dalam pidato yang disampaikan ketua BU cabang Bondowoso pada 1909, *Bintang Hindia* dan Abdul Rivai disebut-sebut sebagai pelopor dalam hal menyuarakan perlunya bangsa Hindia Belanda membentuk sebuah organisasi seperti Tiong Hoa Hwee Koan.

Bintang Hindia yang dibiayai barat menurut Rivai justru demi kebaikan kaum rakyat pribumi. *Bintang Timur* digunakan Rivai dalam menyebarkan gagasan tentang kemajuan moral dan sosial bangsanya. Rivai dalam konteks ini berperan ganda, yakni sebagai orang yang bekerja untuk pribumi yang mengemban amanah misi mulia memajukan masyarakat pribumi dan pada saat yang sama juga bekerja untuk kolonial Belanda. Kehadiran Rivai dalam *Bintang Hindia* telah menjadi sinar dalam upaya menata serpihan pencerahan kebangsaan. Keberadaan Rivai dinilai sangat strategis karena sesuai dengan misi politik etis yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda.

Pemikiran Rivai yang modern sengaja ingin ditularkan kepada semua pembaca *Bintang Hindia*. Ilustrasi dan kemasannya yang indah memberi kesan kepada pembaca bahwa *Bintang Hindia* adalah bukan koran sembarangan. Rivai memberi kesan modernitas pada koran itu. Bagi masyarakat Hindia Belanda, *Bintang Hindia* di bawah Rivai ibarat pembuka mata untuk mengubah sikap dan nilai tradisional menjadi lebih modern atau yang oleh Rivai dinamakan dengan istilah “kebaratan”. Rivai tidak pernah risih memanfaatkan apa yang disiapkan Eropa selama dia berpegang teguh pada misi memajukan bangsanya. Satu hal yang menggembirakan dalam *Bintang Hindia* adalah makin populernya istilah “bangsa Hindia dan anak Hindia” yang secara psikologis telah menanamkan rasa kebangsaan di kalangan bumi putra. Proses awal inilah yang kemudian menjadi matang pada tahun 1920-an yang ditandai dengan perubahan istilah dari “bangsa hindia” menjadi “bangsa Indonesia” seperti tercantum dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Redaksi lain teman-teman Rivai adalah J.E. Tuhepeioij, Sostrokartono, Mas Abdullah, dan Koesoemo Joedho serta kemudian disusul nama-nama khas Indonesia lainnya seperti Abdul Muis, Samsudin Rassat, Boesthami, dan Mas Soengkono.

Bintang Hindia menjadi motor Rivai memasukkan gagasan segar guna membuka mata bangsa Hindia untuk secara bersama-sama dengan pers dan organisasi. Pertumbuhan pers milik bangsa Hindia menunjukkan arah yang menggembirakan pada paruh pertama abad XX.

Meskipun begitu, menjelang akhir 1906 kelangsungan hidup *Bintang Hindia* terlihat tak jelas. Pada Agustus 1906, surat edaran 6 November 1905, yang meminta para pejabat pemerintah menyokong majalah ini telah ditarik, begitu pula fasilitas bebas biaya pos. Abdul Rivai, pemimpin redaksi yang melakukan sebagian besar tugasnya di Belanda, sudah makin sibuk dengan studinya. Apalagi timbul perselisihan antara Rivai dan Brousson mengenai orientasi yang harus dipilih *Bintang Hindia*. Rivai ingin isi majalah ini berwatak politis dan menggunakan bahasa yang dekat Melayu Rendah. Keluarnya Rivai dari jajaran dewan redaksi pada Juni 1907, untuk berkonsentrasi pada studi kedokterannya, merupakan akhir dari *Bintang Hindia* yang edisi terakhirnya terbit pada 15 Juni 1907. Karena Brousson belum bisa melunasi pinjaman dari pemerintah, ia pun menerbitkan *Bandera Wolanda* pada 1908 sebagai pelanjut *Bintang Hindia*².

Masih dalam suasana peralihan, di Sumatera Barat terbit majalah bulanan bernama *Insulinde* pada tahun 1901. Nama *Insulinde* diambil dari sebuah organisasi sosial. Majalah bulanan ini dipelopori oleh kaum terpelajar di Sumatera Barat. Isi dari majalah *Insulinde* adalah ide-ide *Kemajuan*.³ Guru-guru kaum terpelajar di kota Padang itu adalah orang-orang Belanda di sekolah Raja (*kweekschool*) di Bukittinggi. Salah satu guru Belanda itu bernama van Ophuysen yang juga fasih berbahasa Melayu. Ketua redaksi majalah *Insulinde* adalah Dja Endar Muda yang lahir pada tahun 1861 merupakan seorang wartawan keturunan Tapanuli yang juga telah menerbitkan surat kabar *Pertja Barat* dan sebuah bulanan yang berbahasa Batak.⁴ Dalam beberapa tahun kehadiran organisasi *Insulinde* menjadi penerus dalam mengawal proses penyadaran kebangsaan. *Insulinde* memiliki majalah dan namanya sama dengan nama organisasinya. Ide-ide kemajuan dimuat dalam majalah tersebut.

Rivai terpilih menjadi anggota Volksraad pada 1918, menjadi wakil dari organisasi *Insulinde*. Masuknya Rivai ke dalam Volksraad tidak lepas dari provokasi koran Belanda yang menyebut bahwa seseorang yang disanjung-sanjung harus menduduki kursi dewan. Rivai sebenarnya sudah nyaman menjadi dokter di Surabaya dan membantu organisasi *Insulinde*. Namun karena ingin membuktikan bahwa *inlander* itu bukan lagi bangsa yang terbelakang dan bukan lagi yang bisa dibodohi, ia aktif di organisasi tersebut.

3.2. Islam dan Kebangsaan

Perkembangan pemikiran para tokoh di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran di Timur Tengah. Para pembaharu di Indonesia, terutama yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perantara untuk menambah pengetahuan memperoleh inspirasi dari pemikiran yang tumbuh di Mesir. Pemikir Mesir yang besar pengaruhnya antara lain Muhammad Abduh. Selain itu, Syaikh Ahmad Khatib juga banyak memberi pengaruh di Indonesia pada masalah agama seperti soal waris (*faraidh*), tarekat dan ajaran Syafi'i. Pemikiran Abduh tentang pembaruan pada dasarnya bersifat agama. Para pembaharu Indonesia tidak berhenti pada Abduh saja, banyak di antara mereka yang menggali lebih dalam dari sumber-sumber yang dipergunakan oleh Abduh yaitu dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu al Qoyyi. Mereka juga berusaha untuk menafsirkan sendiri sumber dasar Islam.⁵

Sejak akhir abad 19 banyak pemikir Belanda termasuk Snouck Hurgronje dan Hazeu melihat Islam bukan saja sebagai agama yang resmi dianut oleh sebagian besar rakyat di Hindia Belanda tetapi juga sebagai simbol dari kebangsaan dalam pengertian suku bangsa dan etnis. Bila saja anak negeri merasa diinjak, pada Islamlah mereka menemukan pemecahannya. Mereka akan bergerak dan berbuat atau berontak di bawah panji-panji Islam. Untuk itulah mengapa Belanda terus melakukan penyebaran pendidikan barat sebagai upaya membendung derasnya pengaruh Islam. Akhir abad ke-19 memang ditandai dengan kecenderungan untuk mempersamakan Islam dengan bangsa. Sebagai contoh Budi Utomo dalam rancangan rumah tangga dan perumusan programnya (1912) mencantumkan memajukan Islam sebagai salah satu tujuannya. Atau kehadiran Sarekat Islam (1911) serta merta mendapat sambutan yang hangat dimana-mana tidak hanya di Pulau Jawa tetapi kemudian ke Sulawesi dan Sumatera. Untuk itulah selama ideologi belum dirumuskan, SI terbuka bagi siapa saja. Tetapi serentak ketika asumsi SI yang telah dipengaruhi ajaran sosialis marxis mewujudkan dirinya dalam perumusan yang lebih tegas maka perpecahan tak bisa dihindarkan. Hasrat SI untuk memperjuangkan 'kemajuan; bagi rakyat kecil 'bangsa Islam' dalam konteks masyarakat kolonial juga membuka kesempatan bagi munculnya Marxisme yang Islamistis. Hal inilah yang tegas disuarakan Haji Mischbah di Surakarta dan Haji Datuk Batuah di Padang Panjang. Dengan peralatan ilmu keagamaan, kedua ulama ini menyuarakan kesejajaran tujuan perjuangan Islam dan komunisme. Mereka tidak hanya sibuk menulis dan berceramah tetapi juga langsung

terlibat dalam pembentukan ikatan-ikatan solidaritas. Penangkapan serta pembuangan para ulama Marxis ini, serta kemampuan tokoh-tokoh SI di Jawa atau para reformis Islam di Sumatera Barat untuk menangkis infiltrasi ideologi ke dalam barisan mereka, sama sekali tidak menyebabkan terhentinya perdebatan ideologis. Tahun 1920-an dan awal 1930-an barangkali dapat disebut sebagai 'dasawarsa ideologi' dalam sejarah modern Indonesia. Ketika itulah berbagai ideologi yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan mulai dirumuskan. Dalam periode ini pula berbagai strategi perjuangan diperdebatkan.

Salah satu perdebatan ideologis yang terpenting dalam sejarah pergerakan adalah masalah dasar perjuangan. Bahwa kekuasaan kolonial adalah sesuatu yang tak diinginkan merupakan konsensus yang relatif umum diterima di kalangan kaum pergerakan. Agus Salim misalnya mempertanyakan apakah penghormatan terhadap 'ibu pertiwi' itu tidak melampaui ketaqwaan terhadap Allah, begitu juga Soekarno yang mengatakan kita tidak chauvinis, karena kebangsaan kita bertolak dari harkat kemanusiaan. Sedangkan A. Hasan pemimpin Persis dari Bandung mengatakan bahwa jika kita berjuang demi bangsa apapun, perumusannya bukannya 'demi Allah' maka sesungguhnya kita telah melibatkan diri dalam dosa tanpa ampun. Bukankah salah satu yang paling ditentang oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w adalah sifat *ashabiyah*, kesukuan, sedangkan Islam bersifat universal. Jadi berjuang demi bangsa adalah hal yang mengingkari ajaran pokok Islam.⁶

Masalahnya bukan anti atau pro kesatuan Indonesia dan juga bukan soal pro atau anti penjajahan tetapi dasar nilai yang melandasi perjuangan. Jadi menyangkut motivasi moral atau niat yang dari sudut pemikiran Islam mestilah religius sifatnya. Berjuang tak bisa didasarkan kepada sesuatu yang bukan berasal dari kesadaran agama. Agama adalah sumber makna dan dengan agama pulalah realitas harus dinilai. Dengan sangat sederhana dan tepat, Agus Salim mengatakan bahwa perjuangan semata-mata *lillahi ta'ala*. Jadi perbedaan antara dasar perjuangan dan strategi dalam perjuangan memperlihatkan beberapa hal yang cukup penting⁷.

Jika kita berbicara tentang Islam dan kebangsaan maka tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Cokroaminoto dan Agus Salim. Pemikiran Cokroaminoto tentang sosialisme pernah ditulisnya dalam buku *Islam dan Sosialisme*. Menurutny sosialisme berasal dari perkataan latin *socius* yang artinya dalam bahasa Belanda *maker* dalam bahasa Indonesia *teman*

sahabat dalam bahasa Jawa *kanca* dan dalam bahasa Arab *sahabat* atau *'asyrat*. Jadi dalam faham sosialisme adalah berakar cita-cita yang nikmat yaitu cita-cita pertemanan-persahabatan, muhasabah atau mu'asyarah⁸. Sosialisme mengutamakan paham pertemanan atau persahabatan sebagai unsur pengikat di dalam pergaulan masyarakat. Jadi paham sosialisme itu bertentangan sama sekali dengan paham individual yang hanya mengutamakan kepentingan individu. Sosialisme menghendaki cara hidup satu buat semua dan semua buat satu, yaitu cara hidup yang memperlihatkan kepada kita, bahwa kita semua memikul tanggung jawab atas perbuatan kita bersama satu sama lain. Sedang individualisme mengutamakan paham: tiap-tiap orang buat dirinya sendiri. Semua kaum sosialis hendak melindungi keperluan masyarakat, hak-hak masyarakat dan kewajiban masyarakat di atas hawa nafsu perseorangan atau golongan kecil manusia. Dalam kaitannya dengan sosialisme dan Islam, Cokroaminoto berpendapat bahwa cita-cita sosialisme sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan asas-asas tersebut lebih banyak dilaksanakan dan lebih mudah daripada pelaksanaannya di Eropa. Ada dua macam sosialisme yaitu *staats-sosialisme* baik bekerja dengan kekuatan satu pusat maupun bekerja dengan kekuasaan *gemeente-gemeente*, kedua, industri-sosialisme. Jika suatu Negara bersifat sosialisme maka hendaklah pekerjaan kerajinan (kepabrikaan dan industri) diatur secara sosialis dengan seluas-luasnya. Maka dalam Negara seperti ini tanah menjadi pokok segala hasil dan pokoknya pekerjaan industri besar, itupun kalau dijalankan seluas-luasnya *landsosialisme* dan *staats-sosialisme*. Menurut Cokroaminoto ada tiga unsur yang tak dapat dihilangkan untuk mencapai tujuan sosialisme yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan.

Untuk mempraktekkan paham sosialisme maka harus dijalankan bersama dengan dasar agama. Karena pada prinsipnya tabiat manusia akan selalu berusaha untuk menguasai dan menjunjung tinggi diri sendiri, sehingga untuk mencegahnya harus didasari pada agama, kalau perbuatan dan pikiran manusia tidak dipimpin atau tidak diamat-amati oleh kepercayaan agama, maka sosialisme akan tersesat membawa kerusakan pada manusia.⁹ Kebaikan sosialisme Islam ialah bahwa ia tidak merusak semangat kerajinan dan kegiatan seseorang dan tidak menjadi penghambat cita-cita seseorang untuk mencari kemajuan, tetapi dicegah dan dipantang seseorang menindas dan merusak orang lain. Untuk itulah bahwa paham sosialisme Islam mudah ditanam dan dilakukannya karena kebangsaan orang Islam tidak terbatas oleh batas-batas kenegaraan, perbedaan warna kulit, bahasa, tanah air dimana-

mana tempat orang Islam berdiam, di tempat itulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri dan rakyatnya. Nasionalisme yang semacam itulah nasionalisme Islam yang menjadi dasar yang kuat bagi sosialisme yang tersiar di seluruh muka bumi.¹⁰

3.3. Nasionalisme Politik

Ketika dokter Tjipto Mangunkusumo, sang 'demokrat sejati' sebagaimana biografinya menjulukinya gagal meyakinkan kongres BU agar terlibat dalam politik, ia keluar dari BU dan bersama-sama dengan Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat ketua cabang SI Bandung, mendirikan *Indische Partij*, pada tahun 1922. Partai tidak berhasil mendapatkan ijin, tetapi gagasan yang ditinggalkannya adalah bagian yang otentik dalam pencarian batas-batas komunitas bangsa. Bangsa Hindia menurut gagasan partai ialah semua mereka yang menetap di kepulauan ini. Adapun latar belakang etnis atau bahkan ras mereka adalah *blijvers* yang sebangsa. Status mereka berbeda dengan mereka yang bolak balik ke negeri induk yaitu kaum *trekkers* yang merupakan kelas penguasa.

Status dalam struktur kekuasaan sebagai landasan pembatasan dalam konteks Negara kolonial memang cukup menarik. Akan tetapi ternyata landasan ideal ini menjadi tak realistis kalau telah dikenakan pada realitas masyarakat kolonial. Ketentuan hukum kolonial telah membagi mereka yang *blijvers* itu atas kelas-kelas rasial. Pribumi berada pada kelas yang terbawah ini bisa berubah jika mendapatkan *geleidgeste* atau persamaan status hukum¹¹.

Seperti Soewardi dan Soetomo, Cipto Mangunkusumo dapat menyatakan pandangan-pandangannya dengan baik dalam tulisannya dan menggunakan surat kabar sebagai salah satu sarana yang paling tepat menyampaikan pandangan-pandangannya kepada bangsa Indonesia setidaknya-tidaknya kepada para cendekiawan Indonesia. Sebelum ia dibuang ke Negeri Belanda tahun 1913 ia adalah wakil redaktur *De Express* dan *De Tijdschrift*, keduanya organ Indische Partij. Ia mengakui bahwa ia belajar jurnalistik dari sahabatnya Douwes Dekker. Ketika di pembuangan di Negeri Belanda, Cipto bergabung dengan *De Indier*. Dalam kesempatan tersebut ia mengemukakan gagasannya bahwa bangsa Belanda melakukan penindasan kepada penduduk jajahan.

Pandangan Cipto bahwa kemerdekaan sangat penting bagi seluruh pribumi di tanah jajahan itu untuk mendapatkan hak-hak dan hak-hak istimewa yang sama seperti Belanda, sebagai manusia yang sama belum dipikirkan. Pada tahap ini Cipto mengusulkan supaya Belanda memberikan persamaan kepada orang-orang pribumi supaya setaraf dengan orang Belanda sendiri dan bahwa mereka harus memberikan kembali hak pribumi memerintah negeri mereka sendiri, dilihat dalam persepsi melanggengkan hubungan antara Negeri Belanda dan tanah jajahan. Hubungan itu harus tetap ada tetapi sifatnya harus diubah dari suatu hubungan antara penjajah kepada jajahan menjadi hubungan antara dua sahabat yang sama derajat dan kepentingan-kepentingannya. Tetapi masalah pembentukan suatu pemerintahan terpisah dengan undang-undang dasar terpisah agar mempunyai persamaan yang diperlukan dalam hubungan ini tidak pernah dipertimbangkan selama masa permulaan pembangunan nasional.¹²

Dalam artikel *Vrees voor Demos* (Takut Kepada Demos), Cipto menyatakan bahwa pemerintah kolonial melakukan kebijaksanaan dualistis karena ia takut kepada penduduk pribumi. Meskipun Cipto menerima bahwa persatuan yang harus dicapai setiap orang supaya hubungan antara Belanda dan rakyat Hindia berlangsung terus merupakan persatuan dan perbedaan, dimana setiap anggota dari persatuan akan mempunyai kesempatan mengembangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri ia menegaskan bahwa sebenarnya praktek dualism itu adalah untuk mencegah rakyat supaya tidak mewujudkan persatuan seperti itu. Kebijakan ini menurut cipto memperkuat dibentuknya golongan dan perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat antara pemerintah dan yang diperintah. Cipto menyebutkan kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial yang diskriminatif merupakan upaya untuk menghidupkan perbedaan itu berlangsung terus menerus.

Cipto mengemukakan, keengganan Belanda menyebarkan pendidikan barat di tengah-tengah penduduk pribumi yang luas, bukan karena alasan berapa banyak peradaban Eropa itu dapat dikunyah masyarakat Jawa sebelum mereka sakit perut tetapi lebih banyak karena rasa takut dengan kemajuan pemikiran bangsa Indonesia. Cipto menegaskan, ketakutan Belanda terhadap pengaruh pendidikan Barat kepada golongan pribumi adalah karena Belanda tidak dapat memastikan berapa berat takaran pendidikan itu yang baik bagi pribumi dan tidak mengganggu kepentingan-kepentingan Belanda.

Dalam *Eenheid* (Persatuan) Cipto memusatkan perhatiannya kepada Belanda dan kepada para pembaca pribumi untuk membujuk mereka supaya mengambil keuntungan dalam memperjuangkan persatuan itu. Ia menerangkan konsepnya mengenai ‘persatuan masyarakat Hindia Timur’ dalam konteks menghubungkan pribumi-pribumi kebudayaan barat. Konsep-konsep seperti itu biasanya dihubungkan dengan gagasan ‘kompromi intelektual’ antara barat dan timur atau dengan gagasan penggabungan politik sebagai faktor-faktor penting untuk menjamin pertumbuhan yang subur bagi negeri dan rakyatnya. Cipto kemudian dengan hati-hati menyatakan bahwa persatuan tidak perlu harus memerlukan suatu keseragaman sebagai prasyarat. Cipto menyatakan sekali lagi bahwa tidak masuk akal bahwa persatuan harus berarti bahwa masyarakat Jawa akan menjadi orang-orang Eropa atau orang Eropa menjadi orang-orang Jawa, tetapi meskipun perubahan-perubahan bentuk seperti itu kiranya mungkin pada tingkat kebudayaan, Cipto menegaskan perubahan Eropa menjadi Jawa dan sebaliknya tidak mungkin.¹³

Lebih lanjut ia menekankan bahwa persatuan terjadi tanpa saling menghormati. Kita minta supaya para penguasa menghormati orientalisme pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya dan supaya mereka menghormati konsep-konsep kita, lembaga-lembaga, sikap perangai dan adat istiadat. Pada waktu yang sama Cipto juga mendesak orang-orang pribumi untuk menghilangkan ketidakpercayaan mereka terhadap Belanda dengan memperbaiki pengetahuan dan pengertian mereka. Menurut Cipto bahwa untuk menciptakan masyarakat baru yang bersatu di masa mendatang yang terdiri dari masyarakat pribumi dan Belanda, hidup bersama dalam keselarasan, menghormati satu sama lain sebagai orang-orang yang sama derajatnya. Juga jelas bahwa menurut Cipto jika masyarakat seperti itu dapat dicapai maka masalah pemisahan antara jajahan dan negeri sendiri atau antara yang diperintah dan pemerintah tidak menjadi persoalan lagi. Berdasarkan tinjauan Cipto terhadap situasi dunia, pada tahap ini sebelum perang dunia Pertama, Cipto melihat bahwa hanya melalui perjuangan dalam menciptakan penyatuan dengan Belanda, keadaan-keadaan di Hindia dapat dimodernisasikan. Inilah yang dipikirkan sehingga ia menganggap ‘penyatuan’ sebagai proses ‘evolusioner’ dengan mana setiap sekutu tersendiri dapat berkembang menjadi suatu Negara yang maju.¹⁴

Di tengah situasi tersebut, pada Juli 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda akan merayakan satu abad (100 tahun) kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis di jaman Napoleon. Menurut rencana, perayaan tersebut hendak diselenggarakan pada 15 Nopember 1913 dalam bentuk pesta besar-besaran orang-orang Belanda dengan dananya berasal dari pungutan uang rakyat secara paksa guna penyelenggaraan perayaan tersebut. Rencana ini mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat pribumi yang berpendapat bahwa tidak pantas jika suatu perayaan kemerdekaan akan diselenggarakan dalam negara yang sedang mengalami penjajahan. Perayaan ini sangat menghina dan melukai perasaan kebangsaan, diantaranya para pemimpin *Indische Partij*.

Douwes Dekker melakukan protes agar pesta ‘100 tahun Kemerdekaan Belanda’ dilakukan di tempat tertutup, seperti *Societeit* (Kamar Bola), tempat orang-orang Belanda bersantai dengan bermain *biljart* (bola sodok), tanpa mengikutsertakan kaum pribumi. Protes ini ditulis dalam bahasa ‘Melayu pasar’ atau ‘bahasa pelabuhan’ dengan banyak anak kalimat dan bernada marah yang dilontarkan pada panitia perayaan tersebut. Tulisan tersebut berjudul, “*Wij Zullen Niet Mee*” (Kami Tidak Akan Turut), antara lain berbunyi:

“.....Mengapa kamoe tidak merayakan pesta itoe di dalam kamar bolah dengan pantes-pantes, di tempat sendirian, dimana kamoe dapat minoem-minoem soepaja moedah akan berminoem atas kehormatan tanah aiermoe? Tentoe kamoe ta’ akan mendengar setjara bentjih daripada kami dalam perajaan itoe, kerna kami tidak haroes toeroet pesta, tentoe kamoe tida akan mendengar setjara salah seorang dari medan kami, jang soeka berpidato, seperti kehendak saja akan nantang pada kamoe orang, jang membuat pesta sematjam itoe. Kalau ada begitoe tiadalah kamoe akan dapat melarang pada saja akan berpidato begitoe. Sjoekoerlah sekarang soedah banjak orang, jang djadi besar di dalam sekolah saja, ja’ni sekolah kemerdekaan.

Ja, Toewan-toewan commisie, mengapakah kamoe tidak bersoeka-soeka di medan kamoe empoenja kaoem sendiri?....¹⁵.

R.M. Soewardi Surjaningrat segera menulis, “*Als Ik eens Nederlander was...*” yang dicetak oleh *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij* (kongsi yang mengelola berita pertama di Bandung di bawah pimpinan J.F. Wesselius, penerbit Surat kabar *De Express*) dalam

bentuk brosur. Tulisan tersebut membuat Soewardi menjadi terkenal, karena diterbitkan oleh Komite Boemi Poetra¹⁶ yang dipimpin dokter Tjipto Mangoenkoesoemo dalam *oplaag* besar (5.000 eksemplar). Brosur dicetak dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Dalam terjemahan Abdoel Moeis dengan bahasa Melayu, tulisan itu diberi judul, “Andaikata Aku Seorang Belanda...”. Dalam terjemahan inilah muncul kalimat yang terkenal dari Soewardi Soerjaningrat:

“Tidak selayaknya bangsa Hindia turut serta merayakan kemerdekaan bangsa lain yang menindas kita... djika sekarang ini akoe seorang Belanda, akoe memprotes akan diadakannya perajaan kemerdekaan itu. Akan koetoelis dalam soerat-soerat kabar, bahwa itoe salah. Akan koeperingatkan teman-temankoe pendjadjah, bahwa pada waktoe sekarang ini sangat berbahaja mengadakan perajaan peringatan kemerdekaan. Bangsa Belanda hendak koeperingatkan, djangan menjinggung perasaan rakjat Indonesia jang kini baroe bangoen dan menjadi pemberani. Dan djangan mengurangadjarinja. Soenggoeh akoe akan memprotes sekeras-kerasnja.

...akoe boekan orang Belanda, akoe hanya anak bangsa berkoelit tjoklat, pendodoek tanah djadjahan Belanda. Sebab itu akoe tidak akan memprotes. Djika akoe protes djuga tentoe akoe akan disesali. Dan karena protes itu rakjat Belanda jang memerintah disini pasti mendjauhkan dirinja dari dirikoe, karena koehina. Jang demikian itu tak koesoekai dan memang tidak boleh. Sebab djika akoe seorang Belanda akoe tidak akan melukai perasaan rakjat Indonesia.

Lagipoela aku akan dianggap kurangadjar terhadap Sri Ratu jang kita hormati. Perbuatankoe itoe pasti tidak dapat diampoeni, sebab akoe hanya seorang pendodoek bawahannya jang seharoesnja selaloe setia kepadanya. Itoelah sebabnja maka akoe tidak protes. Sebaliknya akoe akan ikoet dalam perajaan itu. Djika nanti dilakoekan poengoetan derma, akoe tentoe akan ikoet memberinja, walaoepoen oleh karenanja akoe haroes mengoerangi belandja roemah tanggakoe hingga separonja. Adalah kewadjabankoe sebagai pendodoek tanah djadjahan Belanda oentoek memperingati sepuhinja hari kemerdekaan negeri Belanda, negeri jang kita pertoean. Akan koeminta kepada semoea teman-temankoe sebangsa dan sesame pendodoek tanah djadjahan keradjaan Belanda oentoek ikut merajakannya, karena walaupun perajaan itoe semata-mata kepentingan Belanda, ada djuga disitoe kesempatan bagi kita oentoek menyatakan isi hati dan setia kita kepada negeri Belanda. Dengan demikian kita akan mengadakan demonstrasi kesetiaan. Alangkah besarnya kegembiraankoe. Sjukurlah, bahwa akoe boekan seorang Belanda.....”¹⁷.

Tulisan dengan menggunakan gaya bahasa halus, tepat, dan tandas, merupakan tamparan halus dan sekaligus kritik pedas bagi pemerintah kolonial atau penjajah. Brosur telah tersebar, ketika secara tiba-tiba pihak Kejaksaan memerintahkan untuk menyitanya. Hal itu tidak akan mungkin dilaksanakan secara tuntas, karena brosur yang dicetak besar-besaran dengan menggunakan bahasa Melayu yang dikuasai sebagian besar rakyat pribumi, telah tersiar di seluruh tanah Jawa. Hakim Pengadilan (*officier van Justitie*) Monsanto didatangkan dari Batavia ke Bandung untuk memeriksa ‘perkara Soewardi’ tersebut. Dalam hal ini Soewardi dianggap membakar semangat dan mempengaruhi golongan pribumi untuk melawan kebijakan pemerintah. Ia dituduh pula menyebarluaskan rasa permusuhan antar golongan dan berusaha memecah belah lapisan masyarakat yang ada di Hindia Belanda.

Setelah pemeriksaan Soewardi berakhir, pada 20 Juli 1913 dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menyerang pemerintah dengan tulisan yang dimuat di surat kabar “*De Express*”, berjudul “*Kracht of Vrees?*” (“Kekuatan atau Ketakutan?”), sebuah karangan dengan menggunakan bahasa Belanda. Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah kolonial sesungguhnya telah menyadari, apa yang akan terjadi setelah brosur pertama beredar’, yang semestinya mereka siap untuk menanggung akibatnya. Beberapa petugas datang ke kantor Komite Boemi Poetra untuk menyita semua brosur karangan Soewardi. Apakah tindakan yang berwenang dan sikap polisi tersebut merupakan pameran kekuatan? Selama itu, orang-orang Belanda memandang masyarakat pribumi tidak lebih daripada suatu bangsa budak saja. Selanjutnya, Tjipto menyadarkan bahwa kaumnya adalah pemilik negeri ini. Meskipun tanpa senjata, golongan pribumi akan tetap berjuang. Kita mempunyai kekuatan! serunya. Tjipto meminta bangsanya menyokong Komite yang telah didirikan dan berharap agar mereka memikirkan nasib Soewardi yang harus mempertanggungjawabkan tulisannya.

Selanjutnya, Cipto Mangoenkoesoemo mengatakan, andaikata uang teman-teman berlebih, dia minta agar uang tersebut dikirimkan ke Komite Boemi Poetra dan nanti dengan caranya sendiri, Komite akan memperingati “100 tahun Kemerdekaan Belanda” itu. Jika nanti yang menamakan diri *Nederlander* atau orang Nederland di dalam pesta tersebut minum minuman keras dengan iringan *toast* dan dalam pidato menyatakan manisnya kemerdekaan, maka Tjipto mengingatkan bahwa

manisnya kemerdekaan yang sama yang sedang dinikmati Soewardi, telah dirampas oleh pemerintah.

Dua hari kemudian, pada 28 Juli 1913 Soewardi menulis lagi sebuah artikel di dalam surat kabar *"De Express"*. Artikel itu ditulis di dalam bahasa Belanda, berjudul *"Ook Allen Voor Een"* ("Satu Untuk Semua, Tetapi Juga Semua Untuk Satu"). Dalam karangannya ini, Soewardi menyatakan bahwa tulisannya berjudul *"Als Ik Eens Nederlander Was..."* merupakan gambaran dari perasaan hatinya. Soewardi yakin bahwa bukan ia saja yang mempunyai perasaan demikian. Sebagian besar memang berdiam diri, tetapi di dalam dada masing-masing, pasti juga merasakan seperti apa yang telah dirasakan Soewardi bersama kawan-kawannya. Douwes Dekker pada waktu itu baru saja datang dari negeri Belanda. Dalam akhir tulisan, ia mengajak bangsanya untuk tetap tenang dan selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Soewardi percaya bahwa Komite Boemi Putra akan terus memperjuangkan cita-citanya. Tulisan itu diakhiri dengan pernyataan:

"Kita haroes mempoenjai kekoetaan dan kepribadian dalam menghadapi perdjoengan nasional ini. Djika tidak, maka selamanja saudara-saudara akan tetap mendjadi boedak! Lepaskan diri dari perboedakan ini!"¹⁸.

Setelah membaca tulisan kedua kawannya itu, Douwes Dekker menulis pula di dalam surat kabar *"De Express"*. Dalam tulisannya, yang berjudul "Pahlawan Kita Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo", ia memuji kedua sahabatnya itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang Komite Boemi Poetra mengadakan kegiatan apapun. Semua isi berita dalam surat kabar di seluruh wilayah Hindia Belanda mendapat pengawasan dan dilarang menyiarkan peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan pemerintah dan hanya berita resmi pemerintah sajalah yang boleh disiarkan. Akibatnya, semua berita menjadi 'kabur' dan menyangsikan karena pemerintah menempatkan diri di pihak yang benar. Walaupun demikian, Komite Boemi Poetra yang dilarang tidak berarti patuh pada larangan pemerintah itu. Dengan caranya, Komite tetap melakukan gerakan, meskipun tidak secara terang-terangan untuk membakar semangat bangsanya.

Tulisan "Tiga Serangkai" ternyata benar-benar menggelisahkan pemerintah kolonial Belanda. Bayangan akan meletusnya suatu revolusi menghantui pemerintah kolonial Belanda yang takut akan timbul perlawanan rakyat. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi

Soerjaningrat kemudian ditangkap Belanda, demikian pula Douwes Dekker. Mereka benar-benar dianggap orang-orang yang membahayakan kedudukan pemerintah. Semula Soewardi akan dibuang ke Pulau Bangka, dr. Tjipto ke Banda Neira dan Douwes Dekker ke Timor Kupang. Tetapi keputusan itu diubah menjadi pengusiran dari tanah air ke negeri Belanda. “Tiga Serangkai” ini merupakan korban pertama sejak tanah Hindia diliputi suasana kebangkitan nasionalnya. Hukuman Pemerintah Kolonial terhadap Tiga Serangkai itu mendapat simpati besar dari teman-teman seperjuangan yang lain. Hal ini terbukti dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan, antara lain oleh Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memungkinkan “Tiga Serangkai” itu berangkat ke tempat pembuangan bersama keluarga mereka. Hal ini adalah bukti munculnya rasa setia kawan dan solidaritas di kalangan pergerakan rakyat saat itu.

Meskipun demikian pembuangan ‘tiga serangkai’ partai Hindia ini ke Negeri Belanda membawa dampak yang cukup penting terhadap perkembangan *Indische Vereeniging*, karena mereka memperkenalkan radikalisme politik kepada organisasi ini. Sejak awal abad 20-an mulai ada pemuda Indonesia yang pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi antara lain Leiden, Amsterdam, Rotterdam, dan Wageningen. Timbullah kebutuhan di kalangan mahasiswa untuk mendirikan perkumpulan. Para mahasiswa di Belanda mendirikan organisasi mahasiswa mulai 1908 dengan nama *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia) pendahulu Perhimpunan Indonesia. *Indische Vereeniging* memasuki suatu periode baru dalam perkembangannya setelah pemimpin *Indische Partij* Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda pada tahun 1913, karena Gubernur Jenderal Idenburg takut pada gagasan revolusioner mereka. Bersama dengan kedatangan ketiga pemimpin *Indische Partij* ke negeri Belanda, masuk pula konsep Hindia Bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.

Para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk komunitas kecil yang berhubungan erat dengan seluruh mahasiswa yang ada di Belanda. Para mahasiswa muda itu kebanyakan berusia 20 tahunan. Kesepian serta rasa keterasingan budaya merupakan masalah besar yang harus ditanggulangi. Mereka menjalin persaudaraan satu sama lain serta saling membantu dan hanya sedikit bergaul dengan mahasiswa Belanda.

Mahasiswa yang membawa serta keluarganya ke negeri Belanda sering mengundang mahasiswa ke rumah mereka untuk makan malam dan menjalin persahabatan.

Pada tahun 1920-an datang lagi mahasiswa ke Belanda seperti Darsono, Semaun, Abdul Muis. Kehadiran mereka sangat mempengaruhi sesama teman seperjuangan yang lebih muda. Para pendatang baru itu dengan cepat mendominasi *Indische Vereeniging* dan menyalurkan anggotanya ke dalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah baru di tanah air. Tahun 1923, Perhimpunan Indonesia memperingati usia 15 tahun, pada kesempatan itu menerbitkan buku peringatan. Adapun isi buku itu mencerminkan semangat yang menjiwai anggota Perhimpunan Indonesia. Susunan buku itu adalah artikel pertama berjudul *Tinjauan ke Belakang*, yang menguraikan pembentukan dan perkembangan Perhimpunan Indonesia disusul dengan karangan *Menanjak*, kemudian karangan tentang *Jalan Baru* dan berikutnya *Arah Zaman*. Dalam edisi Maret 1923 dalam majalah Hindia Poetra berdasarkan ide kesatuan, demokrasi maka dibuat pernyataan bahwa:

1. masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam pembentukan struktur pemerintah sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia.
2. untuk mencapai itu setiap orang menurut kemampuan serta menurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun.
3. untuk mencapai tujuan bersama itu semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerja sama seerat-eratnya.¹⁹

Kegiatan mahasiswa yang secara radikal disalurkan ke dalam aktifitas politik tercermin dengan perubahan namanya menjadi Perhimpunan Indonesia tahun 1924. Pada tahun itu muncul jurnalnya 'Indonesia Merdeka' sebagai ganti 'Hindia Poetra'. Dalam kata pengantar edisi pertama majalah dikatakan bahwa:

Dalam kata 'merdeka' terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami dan mulai sekarang dan seterusnya, 'Indonesia Merdeka' akan menjadi semboyan perjuangan Pemuda Indonesia. 'merdeka' adalah cita-cita umum semua umat manusia, setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia

dan bukan cita-cita barat, seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan.²⁰

Indische Vereeniging, resmi menjadi sebuah organisasi politik yang radikal pada bulan Januari 1925. Dalam rapat yang diselenggarakan pada 3 Pebruari 1925, nama baru Perhimpunan Indonesia resmi dipakai. Penggunaan nama “Indonesia” adalah suatu identifikasi terhadap watak nasional organisasi yang semakin ditingkatkan dalam perjuangan. Istilah “Indonesia” untuk mengganti “Hindia Belanda” semakin didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia dalam setiap kesempatan, seperti pada pertemuan-pertemuan internasional. Mereka menggunakan topi “*fil*” yang sudah digunting ujungnya sebagai peci yang menunjukkan ciri nasional Indonesia. Dalam perjumpaan dengan para mahasiswa dari Asia ataupun Afrika, para mahasiswa Indonesia berusaha menjelaskan tentang adanya suatu kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dengan Australia, antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik yang masih dijajah Belanda. Inilah Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda.²¹

Para pemimpin Perhimpunan Indonesia mengembangkan suatu ideologi nasionalis yang baru yang khas Indonesia bebas dari batasan Islam atau komunisme yang bisa memecah bangsa Indonesia. Ada empat pikiran pokok dalam ideologi yang dikembangkan Perhimpunan Indonesia yang menjadi dasar dari arus utama gerakan nasionalis. Dengan memperhatikan masalah sosial ekonomi, ideologi itu menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang utama. Untuk mewujudkan kesatuan nasional, perlu mengesampingkan perbedaan yang bersifat kedaerahan serta membentuk *front* kesatuan melawan Belanda. Kedua solidaritas, menghindarkan perbedaan antar orang Indonesia sendiri. Ketiga non kooperasi, yaitu perlunya menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda tapi harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri. Keempat adalah swadaya yaitu menolong diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.²²

Selanjutnya, pada 1926 Mohammad Hatta yang menjabat sebagai bendahara di organisasi, dikenal sebagai sosok yang teliti, giat, tekun, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar, terpilih sebagai ketua baru PI dengan suara bulat untuk menggantikan Soekiman Wirjosandjojo yang telah lulus dan akan kembali ke tanah air.²³ Di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta, PI berkembang menjadi suatu organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Hindia

Belanda dan mendapat pengakuan dari PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) bahwa PI adalah *voorpost* (pos depan) dari gerakan nasional di Eropa.²⁴ Perhatian PI terhadap perkembangan pergerakan nasional di Hindia Belanda ditunjukkan dengan memberikan ulasan, saran, dan kritik yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di berbagai koran dan majalah yang terbit di tanah air. Pada saat pidato terpilihnya sebagai ketua PI, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa:

“...penjajahan merupakan cermin dari sifat serakah pihak Barat untuk menguasai negeri lain dan memanfaatkan hasil negeri jajahan untuk mendatangkan hasil sangat besar bagi Belanda. Oleh karena itu, Hatta mendorong bangsa Hindia, terutama kalangan PI untuk meningkatkan kemampuan berekonomi, di samping menyadari soal kedudukan penjajahan. Ia pun melihat PI sebagai organisasi yang non kooperatif, di samping percaya pada diri sendiri dan membina persatuan. Ia menganjurkan untuk bersikap tegas dan kuat sebagai modal untuk menghidupkan organisasi PI. Selain itu, ia melihat kemerdekaan bukan sebagai kemegahan, tetapi untuk kemanusiaan dan peradaban. Hatta pun mengemukakan pula kemungkinan pecahnya perang Pasifik dapat menginspirasi bangsa Hindia untuk merdeka. Gagasan-gagasan Hatta inipun disebarkan bebas di Belanda, namun diberangus di tanah air”.

Untuk mencegah menyebarnya ideologi dan perjuangan Perhimpunan Indonesia, majalah PI, yang bernama “Indonesia Merdeka” dilaporkan banyak yang tidak sampai ke alamat di Hindia Belanda karena disita oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan terhadap orang-orang pergerakan yang dicurigai. Untuk itu majalah dikirim ke Hindia Belanda melalui jalur penyelundupan.²⁵

Sementara itu, PI meneruskan propaganda ke luar negeri dalam bidang politik. Anggota-anggotanya tersebar ke luar Belanda, seperti Arnold Mononutu dijadikan wakil PI di Paris untuk mempropagandakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Penyebaran cita-cita kemerdekaan juga dilakukan setiap anggota PI di saat libur musim panas, musim dingin di luar Belanda. Seperti yang dilakukan Muhammad Nazif, Iwa Koesoema Soemantri, Gatot Taroenamihardja, Aboetari, Soepomo, Sastromoeljono, Soediono, Boentaran, Boedhjarto Martoatmodjo, Darmawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Ichsan, Djoenaedi, Dahlan Abdullah, Bahder Djohan, Mohammad Hatta, Samsi Sastrowidagdo, dan lain-lain.²⁶

Pada Agustus 1926, gerakan demokrasi internasional di bawah pimpinan bekas anggota parlemen Perancis Marc Sangnier sedang menyiapkan kongres untuk perdamaian yang diadakan di Bierville, Perancis. Dalam kongres tersebut, Hatta hadir sebagai ketua mewakili PI ingin menunjukkan kepada kaum demokrat Barat bahwa antara dasar kemanusiaan dengan perjuangan revolusioner bagi kemerdekaan bangsa tidak dapat diputuskan. Pada pidato pembukaan Hatta memperkenalkan kata “Indonesia” dan bukan “Hindia Belanda” untuk merujuk tanah airnya. Sejak itu, peserta kongres menyebut “Indonesia”, termasuk orang-orang Belanda yang diawal pidato masih menyebut “Hindia Belanda” dan tidak mengulang istilah itu lagi, baik dalam perdebatan, pembicaraan lainnya dan tulisan-tulisan.²⁷

Kongres tersebut juga membuat kesepakatan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai bila penjajahan masih terus menindas bangsa-bangsa, antara lain di Asia. Selain mempropagandakan tujuannya, PI berusaha untuk mendapat kontak dengan organisasi-organisasi di luar negeri Belanda untuk membangun hubungan internasional. Pada Februari 1927, PI mengirimkan utusannya untuk hadir dalam Kongres Liga Anti Kolonial di Brussel. Delegasi PI yang dipimpin Mohammad Hatta berhasil meyakinkan kongres untuk membuat resolusi yang menyatakan bahwa kongres bersimpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dan bersedia mendukungnya. Resolusi kedua menuntut penghapusan hukuman pengasingan yang terjadi di Indonesia dengan tujuan agar para pemimpin Indonesia yang saat itu diasingkan dimerdekakan. Dalam kongres itu Hatta menguraikan tujuan PI, hal ini membuat pemerintah Belanda tidak senang melihat apa yang dilakukan Hatta. Ia dianggap berbahaya, terlebih tulisan-tulisannya yang sangat tajam mengecam pemerintah kolonial serta dapat membangkitkan semangat rakyat untuk memberontak.

Selain itu, pada 1927 pengurus PI di bawah Mohammad Hatta juga menghadiri Kongres Wanita di Gland, Swiss dan Konferensi Liga Wanita Internasional untuk perdamaian dan kemerdekaan yang diadakan di negara tersebut. Di depan kongres Hatta berbicara tentang “*L’Indonesie et son problem d’independance*”. Eksploitasi ekonomi terhadap Indonesia dari kapital asing merupakan tema pokok dalam uraiannya. Pada 1929 Hatta hadir kembali sebagai utusan PI dalam Gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin yang membawanya bertemu dengan tokoh-tokoh dunia untuk memperkenalkan Indonesia di Eropa.

Propaganda PI yang semakin gencar mengakibatkan pemerintah Belanda mengadakan pengeledahan di beberapa rumah kediaman pengurus PI pada 1927. Setelah penggedahan pada 26 September 1927 Pemerintah Belanda menangkap empat anggota pengurus PI, yakni Mohammad Hatta, Abdoel Kadir Djojoningrat, Ali Sastroamidjojo, dan Natsir Datuk Pamuntjak yang kemudian dimasukkan ke penjara di Rotterdam. Penangkapan ini menimbulkan protes, terutama di Indonesia sendiri, di antaranya PNI (Partai Nasional Indonesia) secara khusus mengadakan rapat di Bandung untuk memprotes penangkapan tersebut²⁸.

Mohammad Hatta dan kawan-kawannya diadili pada tanggal 8 Maret 1928. Mereka mendapat hak pembelaan dari tiga orang ahli hukum Belanda. Jaksa menuntut agar mereka dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Dalam sidang pertama hakim belum memberikan putusannya, namun Hatta dan kawan-kawan sudah boleh meninggalkan penjara. Dalam sidang kedua yang diadakan pada 22 Maret 1928, Hatta membacakan pembelaannya, berjudul *"Indonesia Vrij"* (Indonesia Merdeka) yang diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Ia mempelajari tentang Hukum Konstitusional sewaktu di penjara untuk membuat pembelaannya. Pembelaannya dibaca dalam waktu tiga jam, yang isinya menguraikan nasib bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Adapun, sebagian kutipan dari permulaan dan akhir pembelaan Hatta yang disalin dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut:

...tatkala dalam tahun 1924 redaksi Indonesia Merdeka menulis kata pendahuluan untuk tahun baru, kata-kata berikut yang keluar dari penanya: "Indonesia Merdeka" menjadi suara mahasiswa muda Indonesia, suara yang barangkali belum diperhatikan oleh yang berkuasa, tetapi suatu kali akan didengarnya. Tidak dengan tidak ada kesalahan suara itu diabaikan saja, sebab di belakang suara itu ada kemauan yang tegas untuk terus mencapai hak-hak yang cepat atau lambat akan menegakkan dalam dunia ini suatu Indonesia Merdeka....

Kutipan dari pada akhir pembelaan Hatta selanjutnya:

...cepat atau lambat pada suatu ketika bangsa yang terjajah mengambil kembali kemerdekaannya, itu adalah suatu hukum besi sejarah dunia. Cuma suasana dan keadaan betapa gerakan kemerdekaan itu terjadi, ikut ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Sebagian besar tergantung pada mereka, apakah lahirnya kemerdekaan itu sejalan dengan penumpahan darah dan air mata atau berjalan dengan proses perdamaian.

*Negeri Belanda yang menguasai sepenuhnya, bagaimana Indonesia akan merdeka, dengan jalan kekerasan atau dengan jalan damai. Tetapi dengan memperhatikan sikap sebagian besar rakyat Belanda, seperti yang ternyata pada debat dalam Tweede Kamer pada tahun 1925 tentang undang-undang yang akan mengatur susunan Pemerintah Hindia Belanda, aku kuatir bahwa jalan yang pertama akan ditempuh. Bahwa penjajahan Belanda akan berakhir, bagiku itu pasti. Itu hanya soal waktu dan tidak soal ya atau tidak. Janganlah Nederland mensugesti dirinya sendiri, bahwa penjajahannya akan tetap sampai akhir jaman...*²⁹

Salah seorang pembela, berasal dari *Social Democratische Arbeiders Partij* (SDAP), berhasil membuktikan ketidakbenaran tuduhan terhadap keempat pengurus PI itu. Akhirnya, pada 22 Maret 1928 pengadilan memutuskan pembebasan bagi keempat pengurus PI tersebut. Proses pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa mereka menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pasca peristiwa ini, perjuangan PI semakin keras untuk kemerdekaan bangsanya dengan menganjurkan gerakan non-kooperatif secara total.³⁰

PI menjadi tombak terdepan di luar negeri bagi perjuangan kaum pergerakan di tanah air. Di samping itu, momentum pembebasan ini juga merupakan babak baru “pertemuan” Hatta dan Soekarno, walaupun hanya sebatas hubungan melalui tulisan di media massa. Seperti, artikel Sukarno di *Soeloeh Indonesia Moeda* pada 1928 dengan judul “Pemandangan dan Pengajaran” yang berisi pembelaannya terhadap Hatta dan kawan-kawan sekaligus dimaksudkan untuk mengurangi simpati berlebihan yang diterima para hakim-hakim Belanda. Terhadap pembebasan para tokoh-tokoh PI tersebut, Soekarno berpendapat:

*“Kita tidak perlu berterima kasih kepada hakim-hakimnya, karena pertentangan kepentingan yang lebih besar tetap ada, yakni antara pemerintah yang menjajah dan yang dijajah. Karena, perkara semacam itu bakal terjadi lagi”.*³¹

“Pertemuan” Hatta dan Soekarno terjadi lagi, ketika Hatta berpolemik dengan J.E. Stokvis, seorang sosial demokrat dan pemimpin *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV). Polemik ini terkait dengan keputusan Kongres II kaum sosialis internasional di Brussel, Swiss pada Agustus 1928, yang mengusulkan untuk membagi-bagi daerah jajahan yang boleh merdeka ke dalam empat kelompok, yaitu: pertama, negara yang harus segera diberi kemerdekaan; kedua, negara

yang harus mendapat hak menentukan nasib sendiri; *ketiga*, negara yang berhak atas pemerintahan sendiri; *keempat*, negara yang masih harus tetap berada di bawah kekuasaan orang-orang kulit putih. Dalam hal ini, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok keempat.

Mohammad Hatta sebagai ketua PI sangat geram dengan penggolongan Indonesia ke dalam klasifikasi tersebut. Melalui artikel berjudul “Socialist Internasional dan Kemerdekaan” yang dimuat di *Soeloeh Indonesia Merdeka* pada Oktober 1928 yang mengkritik secara pedas keputusan itu menyebutkan, antara lain:

*“.....Munafik! Sebab orang sosialis yang menamakan dirinya pembela kaum tertindas nyatanya masih melihat pertimbangan-pertimbangan ekonomi, karena kaum terjajah seperti Indonesia telah menghasilkan jutaan gulden tiap tahun bagi Belanda. Jika Indonesia merdeka, tentu saja kaum buruh Belanda akan merugi.....”*³²

Dalam polemik “Hatta dan Stokvis” ini, Soekarno ikut terusik dan membela Hatta melalui tulisannya berjudul “Mohammad Hatta-Stokvis” dalam *Soeloeh Merdeka*, 1928. Tulisan Soekarno ini lebih dari sekadar membela Hatta, karena jiwa nasionalisnya pun ikut terusik. Hatta menyerang Stokvis dan kaum sosialisnya dengan pendekatan ekonomi, sedangkan Soekarno menyerangnya dengan menyebut kaum sosialis melakukan penyimpangan yang ditetapkannya sendiri, yakni “hak *self determination*” yang sepenuh-penuhnya bagi semua bangsa dan mencela penjajahan kapitalis-imperialis yang menyebabkan penduduk asli negeri-negeri jajahan itu menjadi terjerumus ke dalam perbudakan, kerja paksa atau pembinasaaan sama sekali.

Selama berdiri Perhimpunan Indonesia memegang posisi penting dalam gerakan kebangsaan Indonesia dan kedudukan ini sangat sulit dibayangkan jika melihat jumlah anggotanya. Pada tahun 1926, misalnya jumlah anggotanya baru 38 orang. Perhimpunan Indonesia adalah katalisator yang mengarahkan putra-putra golongan elit Indonesia agar membuang rasa rendah diri yang dipaksakan oleh penguasa kolonial dan untuk pertama kalinya menuntut kemerdekaan. Sumbangan Perhimpunan Indonesia terbesar adalah usahanya mengembangkan ideologi sekulernya yang menjadi dasar dari arus utama gerakan kebangsaan setelah tahun 1927. Perhimpunan Indonesia tidak hanya mengembangkan ideologi, anggota-anggotanya jadi terpicat oleh ide dan semangat nasionalisme baru tersebut dan ketika para anggotanya pulang ke tanah air, mereka tetap menjalankan aktifitas politik. PNI hampir seluruhnya adalah ciptaan Perhimpunan Indonesia demikian juga Partindo dan PNI baru. Disamping itu, ada juga yang

masuk Budi Utomo, Partai Sarekat Islam dan masuk kelompok studi di Surabaya.³³

Peristiwa sederhana ini sekaligus mengatakan tiga hal yang fundamental adanya sebuah bangsa yang bernama Indonesia, dan sebuah negeri yang bernama Indonesia menuntut kemerdekaan bagi negerinya. Begitulah kalau sejarah pergerakan kebangsaan dikaji lebih teliti maka kelihatanlah bahwa mahasiswa yang tergabung dalam PI di negeri Belanda itulah yang sesungguhnya bisa dianggap pelopor pergerakan nasionalisme antikolonial yang radikal. Muda terpelajar dan kosmopolitan para mahasiswa itu dengan jelas merumuskan kemana pergerakan kebangsaan mestinya harus diarahkan³⁴.

Begitulah akhirnya sebuah paradigma telah ditemukan dan didalam kesadaran politik sebuah bangsa telah berdiri. Sejak wacana politik bahkan juga kebudayaan, semakin bertolak dari sudut pandang paradigma baru ini. Dalam suasana inilah perdebatan kolonial antara pendekatan ko-operasi dan non-ko-operasi dilanjutkan atau seperti yang dilakukan Soekarno dijadikan tidak relevan dan lebih penting lagi dalam konteks paradigmatis ini pula berbagai pendekatan dan perbenturan ideologis diadakan. Satu golongan bisa meniadakan keabsyahan ideologi golongan lain, tetapi kesemuanya semakin bertolak dari kesadaran kebangsaan. Dalam paradigma baru ini berbagai kecenderungan ideologis diperdebatkan dan dipertentangkan mulai corak yang internasionalisme sampai dengan yang bersandarkan pada kepribadian asli, mulai yang merelatifkan arti agama dalam kehidupan sampai dengan menjadikan agama sebagai landasan segalanya. Tahun 1920-an 1930-an boleh dikatakan sebagai dasarwarsa ideologi dalam sejarah perjuangan kebangsaan. Dalam proses perdebatan ini cita-cita demokrasi atau kedaulatan rakyat dan keadilan sosial disamping nasionalisme Indonesia Raya yang mengalahkan nasionalisme lokal semakin tampil sebagai konsensus ideologis³⁵.

3.4. Politik Ko dan Nonkoperasi

Hubungan antara Hatta dan Sukarno mengalami pasang surut bahkan dalam meletakkan dasar perjuangan pun mereka sering berbeda pendapat. Misalnya bagaimana posisi kerjasama antara pemerintah kolonial dengan para pejuang di Indonesia. Hal itu akan dipaparkan pada pembahasan di bawah ini.

Ketika Sukarno aktif menggalang PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang didirikan pada 1927; Hatta tidak menyetujuinya, karena PPPKI, seperti

sebelumnya tidak banyak berarti dalam perjuangan. Hatta menilai bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno belum berhasil mencetak kader, karena lebih mengutamakan penggalangan massa. Di sini, salah satu perbedaan keduanya. Sukarno lebih menyukai massa dan Hatta lebih suka mendidik kader. Menurutnya, pendidikan politik harus dilakukan melalui surat kabar dan pertemuan yang bersifat kursus untuk menciptakan kaderisasi, agar tidak terjadi kekosongan pemimpin, bila Belanda melakukan penangkapan para pemimpin lapisan pertama.

Selain PPPKI, PNI pun tidak lepas dari kritik Hatta melalui artikelnya berjudul “Buah Pikiran Politik” yang ditulis pada 1 Februari 1929. Ia menyebut PNI lemah organisasinya dan belum memiliki anggota secara terorganisir, meskipun dalam rapat-rapat umum selalu dibanjiri massa. Oleh karena itu, PNI perlu melakukan pendidikan politik yang terencana. Bung Hatta menulis, diantaranya (ejaan menyesuaikan):

*“Tidak cukup, kalau rakyat bertepuk tangan riuh kalau misalnya Ir Soekarno berbicara; tidak cukup manakala rakyat menjadi Soekarno saja. Yang perlu yaitu supaya dalam hati tiap-tiap lid PNI hidup seorang Soekarno, pendeknya tidak cukup kalau hanya satu saja Soekarno, melainkan beribu-ribu, kemudian berjuta-juta. Pendeknya di seluruh PNI ada Soekarno. Dan kalau rakyat PNI terus berusaha begini, barulah besar partai kita; bolehlah kita memaksa pemerintah melakukan permintaan kita”.*³⁶

Dalam hal ini, Sukarno menyampaikan pemikirannya terhadap pentingnya massa aksi:

*“Partai Nasional Indonesia dengan tegas mengatakan satu-satunya daya yang dapat menggugurkan imperialisme Belanda di Indonesia ini adalah satu massa aksi yang revolusioner. Satu massa aksi dari pada seluruh Marhaen Indonesia yang berpuluh-puluh juta”.*³⁷

Di samping itu, dalam pandangannya tentang pentingnya pendidikan rakyat, Sukarno berpendapat:

“Mereka mencoba menerangkan pandangan mereka yang mengerikan. Pertama kita harus mendidik rakyat kita yang jutaan jumlahnya. Mereka harus dipersiapkan untuk memerintah mereka sendiri. Kedua, kita harus memperbaiki kesehatan mereka agar tahan berdiri tegak.

Bukankah lebih baik kalau segalanya sudah lengkap dan beres terlebih dahulu?

Satu-satunya waktu agar segalanya sudah lengkap dan beres ialah bila kita sudah mati! Untuk mendidik mereka secara pelan-pelan akan memakan waktu beberapa generasi. Kita tidak perlu menulis tesis atau membasmi malaria sebelum kita memperoleh kemerdekaan! Indonesia merdeka SEKARANG! Setelah itu baru kita mendidik dan memperbaiki kesehatan rakyat dan negeri kita. Hayo, bangkitlah sekarang!”³⁸

Dalam kenyataannya, PNI yang mengandalkan pada massa inipun harus mengalami kehancuran, saat Sukarno sebagai pimpinan organisasi tersebut beserta beberapa kawannya ditangkap Polisi Kolonial Belanda pada 29 Desember 1929, setelah menghadiri dan berpidato pada acara musyawarah PPPKI di Solo. Pemerintah Kolonial geram atas kiprah Sukarno yang dianggap semakin agitatif. Pada 1931, PNI terpaksa dibubarkan, oleh Sartono diganti dengan Partindo (Partai Indonesia). Saat itu, Hatta menyarankan agar PNI tidak dibubarkan, meskipun tanpa Sukarno. Selain itu, menurut Hatta, pembubaran PNI dianggap memalukan dan melemahkan pergerakan rakyat. Para pemimpin PNI yang membubarkan partainya itu menunjukkan kelemahan mereka yang dinilai oleh Hatta, sebagai tidak bersedia berkorban. Dalam hal ini, Hatta menyatakan bahwa kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.

Penggantian PNI dengan Partindo ini memperoleh tentangan dan protes sebagian besar cabang-cabang PNI yang kemudian membentuk “Golongan Merdeka” di daerahnya masing-masing. Perhimpunan Indonesia di Belanda pun tergerak untuk membantu persoalan kemelut di tubuh PNI ini. Dalam hal ini, Mohammad Hatta membantu Golongan Merdeka tersebut dengan menyatakan:

“Baru empat orang pemimpin dihoekoem, partai diboebarkan” katanja. “Di India berpoeloeh-poeloeh riboe anggota Indian National Congress ditangkapi, karena bergerak atas andjoeran Gandhi pergi ke pantai oentoek memboeat garam, partai dan gerakan djalan teroes. Gerakan itu baroe berhenti sesoedah Pemerintah Kolonial di India mentjabut kembali berbagai peratoeran dan larangan”³⁹.

Antara beberapa pemimpin “Golongan Merdeka” dan Mohammad Hatta tercapai persetujuan melalui surat menyurat untuk

mendirikan “**Pendidikan** Nasional Indonesia” (lebih dikenal sebagai **PNI Baru**). Pendirian ini mendorong Hatta, yang waktu itu masih di Belanda, membuat perjanjian dengan Soedjadi, salah seorang terkemuka dalam “Golongan Merdeka”, untuk menerbitkan sebuah majalah bernama “Daulat Ra’jat”. Dalam suratnya kepada Soedjadi, Hatta mengartikan pemilihan nama majalah itu mencerminkan:

*“Bagaimana sikap kita terhadap rakyat. Daulat Ra’jat akan mempertahankan azas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaulan sosial. Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (sovereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan tenggelam. Hidup atau mati rakyat Indonesia bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau dibelakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Dalam penutup suratnya itu Hatta mengatakan: “Yang aku menulis itu dalam beberapa baris saja dijadikan inti didikan kita kepada kader partai. Aku dalam waktu yang dekat akan menulis ‘Kata pendahuluan’ untuk Daulat Ra’jat dan mungkin sebuah karangan tentang Koloniale Politiek, yang isinya akan menguraikan Dari Politiestaat ke Rechtsstaat dan kembali lagi ke Politiestaat”.*⁴⁰

Sedangkan, dasar “**Pendidikan** Nasional Indonesia” (PNI Baru) ini terjelaskan dalam tulisan Hatta di “Daulat Ra’jat” nomor 37, 20 September 1932, setelah ia pulang ke tanah air dan memimpin organisasi ini. Adapun cuplikan tulisan yang menyesuaikan dengan ejaan baru, antara lain:

“....Pendidikan nama perkumpulan kita, karena kita butuh akan didikan yang benar! Dengan jalan pendidikan rakyat jelata akan mendapat keyakinan bahwa tidak saja pemimpin harus tahu akan kewajibannya, tetapi juga rakyat semuanya. Bukan saja pemimpin yang harus berjuang, malahan rakyat juga turut berjuang. Ada suatu kebenaran yang sering dilupakan, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai oleh pemimpin-pemimpin saja, melainkan oleh usahanya dan keyakinan rakyat yang banyak. Nasib rakyat Indonesia tenggelam di dalam tangan rakyat sendiri....

*Mendidik rakyat, supaya timbul semangat merdeka itulah pekerjaan kita yang utama. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dan lekas tercapai, akan tetapi suatu pekerjaan yang berkehendak kepada iman, yakin, sabar dan kemauan yang keras. Dengan jalan mendidik diri kita itu, kita akan mencapai suatu organisasi yang teguh. Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan!*⁴¹

Sementara itu, Mr Sartono, Ketua Partindo dengan perantaraan para pelajar yang baru tiba di negara Belanda berusaha untuk mempengaruhi para pemuda yang masih berada di negara tersebut untuk memihaknya. Begitu pula, Partai Komunis Nederland berusaha pula melakukan pengaruhnya dengan bekerja sama dengan para pelajar yang pro Partindo. Dalam susunan pengurus PI baru pada 1931 terpilih Rustam Effendi menjadi ketua dan, selanjutnya ia dikenal sebagai anggota dari Partai Komunis Nederland yang kemudian menjadi anggota parlemen Belanda sebagai wakil partai tersebut⁴². Pengaruh Komunis yang berpengaruh terhadap kemerosotan PI menjadikan organisasi ini tidak lagi memiliki peran dan, kemudian berakhir sebagai pos terdepan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Eropa.

Pada tahun 1932, polemik tentang perlu dan tidaknya melakukan kerjasama dengan Belanda merupakan polemik yang sangat keras di antara para pejuang masa itu. Bahkan antara Soekarno dan Hatta terlibat polemik terbuka dalam surat kabar. Pada tanggal 21 Desember 1932, Ir. Sukarno membuka polemik baru tentang non-kooperasi. Karangan itu dikirimkan kepada pers di Indonesia dan Tionghoa. Polemik itu menjadi pertentangan paham antara Partai Indonesia (Parindra) di bawah pengaruh Soekarno dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baroe) dipimpin Moh. Hatta. Polemik itu berawal ketika Hatta pada bulan November 1932 diundang untuk menerima penunjukkan sebagai seorang calon Parlemen Belanda. Hatta tidak memproses pencalonannya tersebut, tetapi karena Hatta sudah mempertimbangkan serius tentang hal ini, membuka peluang bagi Sukarno untuk menyerang terhadap dirinya atas kesediaannya meninggalkan prinsip oposisi tanpa kompromi terhadap Belanda. Menurut paham Partindo, seorang non-cooperation melanggar asas apabila mau masuk ke dalam Tweede Kamer. Serangan Soekarno itu dibalas oleh Moh Hatta dengan 'Daulat Ra'jat No. 47, tanggal 30 Desember 1932 dengan judul Non-Cooperation. Menurutnyanya bagi PNI, non-kooperasi adalah suatu senjata perjuangan, yang berarti

tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, tegasnya kaum sana. Selanjutnya ia bukan non-aksi, melainkan berkehendak akan aksi. Sebab itu non kooperasi pada dasarnya tidak menolak parlementaire aksi. Sehingga masuk ke dalam Tweede Kamer dengan maksud berjuang menentang imperialisme kolonial tidak berarti kerja sama dengan pemerintah, sebab itu tidak bertentangan dengan nonkooperasi⁴³. Menurut keyakinan PNI, duduk bersidang dalam Tweede Kamer tidak bertentangan dengan dasar non-kooperasi, karena Tweede Kamer adalah suatu parlemen, bukan dewan jajahan. Dalam parlemen, pemerintah dan oposisi sama derajatnya. Dan oposisi jikalau sampai kuat, dapat menjatuhkan pemerintah dan dapat pula bertukar peranan dengan dia. Di tanah jajahan, kedudukan pemerintah tidak dapat diusik.

Menurut Sukarno, bahwa seorang nasionalis non-kooperasi yang duduk dalam Tweede Kamer menjalankan politik yang tidak prinsipil lagi. Ia melupakan dasarnya yang disendikan kepada keyakinan atas adanya pertentangan kebutuhan antara kaum pertuanan dan kaumnya sendiri. Sehingga duduk dalam Tweede Kamer, sekalipun dengan maksud hendak berjuang menentang kaum imperialis, bagi Sukarno sudah berarti bahwa orang lupa akan adanya pertentangan kebutuhan antara kaum pertuanan dan kaumnya sendiri. Sukarno menyatakan bahwa kaum Partindo, menjalankan politik non-kooperasi yang menolak duduk di kursi Volksraad. Non-kooperasi Partindo adalah tertuju kepada semua dewan-dewan kaum pertuanan.⁴⁴

Menanggapi pendirian Sukarno tersebut, Bung Hatta berpendapat bahwa co dan non kooperasi tidak bisa diukur berdasarkan duduknya perwakilan di kursi Tweede Kamer. Non kooperasi adalah senjata perjuangan dan boleh saja duduk di Tweede Kamer asalkan mempunyai pendirian yang jelas. Perdebatan mengenai non kooperasi ini terus berlanjut, bahkan semakin luas cakupannya. Menurut Hatta, terdapat perbedaan antara PNI dan Partindo. PNI sebagai partai pendidikan menganjurkan kepada anggotanya supaya membaca karangan yang mengkritik partainya, dan memperdalam pengetahuan tentang politik dan pendirian PNI. Polemik semakin gencar, bahkan Partindo melarang anggotanya membaca 'Daulat Rakyat', 'Menyala dan Api Ra'jat'. Selain kedua tokoh tersebut, ternyata setiap tokoh juga mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Menurut Amir Sjarifuudin, non kooperasi Partindo tidak dilakukan di atas segala lapangan tetapi terhadap *raad-raad* politik saja, terhadap kekuasaan imperialis dalam pemerintahan dan pandangan hidup kolonial. Dalam polemik itu, PNI

menitikberatkan aktifitasnya pada kursus-kursus untuk mempersiapkan pemimpin masa mendatang. Apabila pemimpin-pemimpin menjadi korban, sehingga pemimpin baru akan menggantikannya.⁴⁵

Pola acuan Mohammad Hatta relatif lebih kering, lebih analitis, lebih kurang goyah dan lebih kurang berapi-api daripada Sukarno. Sebagai pribadi Hatta tidak berwarna apabila dibandingkan secara kontras dengan Sukarno yang bertingkah laku sugestif bagaikan air raksa. Hatta tidak mampu mengguncang hadirin dan bahkan barangkali merasa bahwa memainkan emosi massa melalui tipudaya-tipudaya retorik adalah agak tidak jujur. Kehidupan pribadinya amat terkendali dan sederhana. Dan kualitas-kualitas pribadinya sedemikian diperbaiki oleh pendidikan akademisnya di Rotterdam. Baginya gagasan-gagasan dan perkataan-perkataan harus dikendalikan dalam bentuk yang berdisiplin dan tidak dipergunakan dengan perhitungan mencapai tujuan-tujuan yang bersifat menggelorakan emosi semata-mata. Sebaliknya bagi Sukarno, gagasan-gagasan dan kata-kata adalah alat bagi hasrat-hasrat tertentu dan hasratlah yang akan membawa aksi. Perbedaan kepribadian yang sangat mendasar ini secara alamiah menghambat usaha-usaha Sukarno untuk mencapai persetujuan dengan pengikut-pengikut Hatta dalam upaya menggabungkan kembali pergerakan nasional.⁴⁶ Partindo dengan beberapa sukses yang pantas dicatat telah berusaha menjadi partai massa dan telah berjumlah 7.000 orang pada Oktober 1932. Partindo dalam langkah dan cirinya lebih mirip sebagai PNI lama. Ketika akhirnya menjadi nyata bagi Sukarno bahwa Partindo dan PNI Baru tidak dapat bergabung, maka sejak itu arah tindakan Sukarno sedikit banyak ditentukan oleh dirinya sendiri.

Dalam periode 1928 – 1930 Thamrin di Volksraad adalah menantang pemerintah untuk memindahkan nasionalis veteran Cipto Mangunkusumo dari pembuangannya di Banda ke Batavia untuk menduduki kursinya di dewan. Dalam sidang-sidang pertama ia selalu berbicara dan menekankan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat hidup penduduk miskin daerah pedalaman Jawa. Ia juga berbicara tentang bagaimana mengatasi kekurangan pangan yang merajalela di daerah perkebunan tebu. Untuk itu ia mengusulkan agar luas area untuk tanaman tebu dikurangi 25% agar kaum tani dapat bebas menentukan luas tanaman pada musim gadu. Cramer cs mengajukan mosi untuk mendukung usul Cipto tetapi dikalahkan dengan suara 10 lawan 20. Di mata Thamrin, Cipto tetaplah seorang pembela kepentingan penduduk pedesaan sebagai reka pengimbang baginya dalam upayanya yang

panjang untuk kepentingan anti feodal Cipto juga menunjukkan titik tolak yang berbeda dengan pandangan masyarakat Jawa yang diwakili oleh Soetomo dan Soewardi di masa itu. Kemudian tindakan kasar polisi terhadap rapat-rapat yang dilakukan oleh PNI di Surabaya dan Semarang serta reaksi pers pihak sana. Hal ini mendorong Thamrin untuk menguji lebih teliti lagi maksud sebenarnya pihak pemerintah terhadap nasionalisme evolusioner Indonesia sebagai yang baru saja disampaikan oleh Gubernur Jenderal De Graeff. Selanjutnya menurut Thamrin, Cipto sepenuhnya tepat untuk mewakili nasionalisme emansipatoris di Volksraad. Dengan duduknya Cipto di dewan maka biasanya pendapat yang mewakili golongan konservatif pedalaman yakni para pangreh praja dan pejabat BB dapat ditandingi secara kuat.

Stokvis dan Thamrin yang telah melakukan hubungan dengan sang buangan di Banda melakukan kerja sama agar Cipto dapat dibebaskan dan duduk kembali di dewan guna memperkuat barisan progresif kelompok tengah kiri⁴⁷. Dewan sangat terkesan dengan pembelaan Thamrin yang penuh semangat untuk menerima kembali Cipto sebagai anggota dewan. Akhirnya dewan membentuk komisi terdiri dari tiga orang untuk melakukan penyelidikan serta melaporkan hasilnya terhadap keabsahan permintaan Cipto untuk masuk kembali sebagai anggota dewan. Akhirnya dengan mendengarkan saran minoritas, ketua komisi Mr. AS Oppenheim, mengalahkan mosi Thamrin cs dengan suara 35 lawan 6. Meskipun komisi dengan suara bulat menyarankan kepada Volksraad untuk menerima Cipto kembali dengan alasan tidak ada dasar hukum bagi buangan untuk dihalangi masuk kembali. Akan tetapi terjadi perpecahan dalam cara memberitahu kepada pemerintah. Thamrin dan Jongkman sadar bahwa dewan tidak dapat menentukan ukuran yang disebut membahayakan ketenangan dan ketertiban umum dengan kembalinya Cipto. Tetapi mereka tahu bahwa dewan haruslah melakukan kerja sama penuh untuk mewujudkannya. Namun akhirnya Cipto tetap ditolak oleh dewan dengan voting 29 menolak lawan 13 orang⁴⁸.

Peran Muh Husni Thamrin di *Volksraad* adalah ketika berjuang untuk pembebasan Soekarno dalam penjara. Setelah ditahannya Sukarno, nyawa gerakan nasional emansipatoris mereda. Sebagaimana ditulis oleh Jan Pluvier satu generasi kemudian dalam keadaan diam merenung setelah tahun-tahun bergelora dengan agitasi anti kolonial Sukarno yang memberikan ilham. Para pejabat kolonial sama sekali menyadari bahwa semangat menggebu kampanye anti kolonial tersebut

kelas tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Hal ini harus dihadapi dengan cara menyingkirkan sang tokoh secara permanen atau setidaknya untuk jangka panjang dari pentas politik. Thamrin sendiri setuju akan diktum 'diam merenung dengan tegas mendesak' selanjutnya adalah mempertahankan sosok Sukarno dan kawan-kawan yang dipisahkan dengan jalinan politik pergerakan yang tengah berada dalam ketidakpastian dan bahkan perpecahan. Thamrin segera mengambil langkah setelah dipenjarakannya Sukarno. Ia segera tampil di *Volksraad* untuk memimpin 10 anggota orang Indonesia di bawah satu bendera nasionalis. Langkah ini menurut Gobee merupakan nasionalisme yang diorganisasi berdasarkan landasan radikal dengan bekerjasama dengan pemerintah. Thamrin sendiri menulis kepada Stokvis yang berada di Holland tentang akan diumumkannya pembentukan apa yang disebut Fraksi Nasional. Ada yang melihatnya sebagai nasionalis praktis. Karena banyaknya varian nasionalisme yang ada, Thamrin tidak melihat di dewan terdapat kemungkinan mengembangkan satu gaya kuat dan tegas tetapi berharga untuk dicoba. Thamrin merupakan sedikit di antara tokoh pergerakan yang mempunyai harapan besar dan menghubungkan dirinya sendiri dengan Sukarno mengunjunginya di penjara setiap ia mempunyai waktu. Ia juga terus menerus meminta perhatian di dalam dan luar negeri mengenai nasib Sukarno. Ia melanjutkan gagasan nasionalisme emansipatoris supaya tetap hidup dengan mempertahankan tujuan yang dekat dengan hatinya. Partai yang didirikannya sendiri Kaoem Betawi bersifat lokal dengan berorientasi terbatas, tetap kecil, elitis terutama memperhatikan isu tipikal Betawi meskipun Thamrin sendiri berusaha untuk meningkatkannya. Terobosan mental dalam pengertian politik, masih akan mendominasi langkah-langkahnya dalam seluruh dekade mendatang. Sikap tepat ini menempatkan dirinya pada posisi kunci yang membanggakan dalam pencarian kebanggaan Indonesia.⁴⁹

Thamrin memimpin di dalam dan luar *Volksraad* ketika PPPKI melakukan rapat protes pada 12 Januari 1930. Dalam rapat PPPKI di Gedong Permoefakatan Indonesia yang difasilitasi olehnya, dicanangkan kembali persatuan organisasi tersebut. Dr Soetomo menyimpulkan bahwa banyaknya yang hadir dalam pertemuan ini menunjukkan perasaan ingin tahu yang berkembang. Sejumlah pembicara menyatakan bahwa sikap pemerintah pada 10 Januari 1930 tentang hukuman terhadap PNI merupakan tindakan meragukan yang berlebihan dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam acara tertutup diputuskan diadakannya dana nasional untuk memberikan bantuan kepada para

anggota dan keluarganya yang menjadi korban tindakan polisi. Di samping itu, dana tersebut juga akan dipergunakan untuk melakukan aksi-aksi perjuangan selanjutnya bagi kemerdekaan nasional. Keputusan yang lain berkaitan dengan tindakan pemerintah yang salah. Akan tetapi segera setelah diambilnya keputusan tentang pembaruan Persatuan PPKI, maka tak lama kemudian hal itu menguap. Thamrin merasakan benar bahwa kepemimpinan PNI yang imajinatif dan kohesif itu tidak lagi hadir, mesin propagandanya pun tersumbat dan terpecah dalam berbagai kekuatan PPPKI. Selanjutnya muncul berbagai upaya untuk menangguk kekosongan politik yang ada. Sejumlah pakar memandang Fraksi Nasional yang dibentuk Thamrin hanya sebagai langkah reaktif.

Terlepas dari komentar Thamrin di *Volksraad* dalam suratnya kepada Stokvis, pada sidang 8 Februari 1930, Thamrin mengajukan mosi digantinya pasal 153 bis dan ter dan 161 dalam hukum pidana untuk mengendalikan kerusuhan revolusioner agar dapat didiskusikan. Dalam pembukaan pidatonya Thamrin mengulang kembali argumen yang telah disampaikannya pada 18 Juli 1929 dimana ia menyesalkan pasal-pasal tersebut jelas dan terbuka terhadap interpretasi menurut kehendak dan kegunaannya. Dalam pidatonya ia memperkuat dengan mengutip studi yang belum lama dilakukan pendiri PNI Mr. Soenarjo dan oleh seorang orientalis ahli adat C Snouck Hurgronje yang mendukung argumen-argumennya. Selanjutnya Thamrin bersama Mochtar dan Idih masih mengajukan mosi tentang apakah hak istimewa gubernur jenderal perlu dipertahankan. Mosi ini akhirnya dikalahkan melalui voting.

Selain itu Thamrin juga berjuang tentang pertahanan Hindia. Dalam sidang 18 – 19 Maret 1930 dibicarakan tentang anggaran pertahanan yang menyangkut kekuatan laut, tentara laut setempat dan pertahanan darat Tarakan, Balikpapan yang terkenal dengan deposit minyaknya serta Surabaya. Hal-hal itu dibicarakan termasuk kemungkinan dibangunnya milisi pribumi. Dalam pidatonya Thamrin menjelaskan tentang akan terlibatnya Indonesia dalam perang Pasifik mendatang dan perlunya mobilisasi penduduk secara total. Untuk mempersiapkan rakyat ikut serta dalam pertahanan yang berguna bagi tanah air, Thamrin bekerja sama dengan Dwidjosewojo dan Ratu Langie mengajukan mosi untuk memperkenalkan wajib milisi pribumi. Misi ini dengan telak ditolak oleh 36 suara lawan 13. Mereka yang mendukung ialah Jahja, Thamrin, Ratu Langie, Soejono, Soeroso, Hadiwdjojo, Soangkoepon, Dwidjosewojo, Koesoemo Oetojo, Laoh, Mochtar, Idih dan Soetadi. Dalam hubungannya dengan aspirasi Indonesia merdeka,

baik jangkauan ideologi maupun legislatif dengan pertahanan tanah air sekali waktu akan muncul dalam berbagai pidatonya kemudian.

Sementara pada 24 Maret 1930, Thamrin menyampaikan pertanyaan tertulis kepada pemerintah dengan keluhan tentang kecilnya ukuran sel tempat Soekarno ditahan di penjara yakni 1,5 m x 2,5 m. Disebutkan olehnya bahwa tahanan politik seperti Sukarno tidak bisa diperlakukan seperti tahanan kriminal⁵⁰.

Pada akhir diadakan persidangan terhadap Sukarno, Maskun, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepradja di Bandung. Thamrin dengan teratur menghadiri persidangan tersebut. Ia duduk di deretan depan bersama Gobee dan Stokvis untuk memberikan dukungan moril kepada mereka. Dalam keterangannya di depan Volksraad pada 16 Juni 1930 Gubernur Jenderal mengindikasikan bahwa Sukarno diperkirakan telah melanggar terhadap pasal 169 dan 153 bis. Oleh karena itu, perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Thamrin dan Dwidjosewojo dari Fraksi Nasional memberikan reaksinya. Dwidjo menyebutkan tentang sel kecil tempat Sukarno diurung bagai kstaria sejati ia akan menjalani perlakuan buruk itu. Thamrin mengatakan bahwa penangkapan 29 Desember didasarkan pada tuduhan yang kini ditinggalkan dan diganti dengan pasal-pasal seperti 153 bis dan 169. Ia berpendapat bahwa dengan demikian langkah itu jelas keliru, dan segalanya menjadi salah. Apalagi menganggap PNI sebagai partai terlarang. Selain itu Thamrin juga mengkritik terhadap penangkapan dan pembuangan Iwa Kusuma Sumantri ke Banda yang tidak didasarkan bukti yang kuat, dan bukti-bukti yang diajukan adalah sekedar buatan pemerintah. Thamrin menyesalkan karena Iwa Kusuma Sumantri tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Sambil menunggu keputusan hakim terhadap kasus PNI, maka Fraksi Nasional menyampaikan masalah-masalah sosial ekonomi. Thamrin, Soeroso, Mochtar dan de Dreu merupakan orang-orang pertama yang memperingatkan di Volksraad tentang kondisi dan pembatasan bagi kaum pribumi oleh pemerintah⁵¹.

Sementara itu di pengadilan Bandung setelah beberapa bulan pemeriksaan dan persidangan, diberikan kesempatan kepada Soekarno untuk melakukan pembelaan. Sebanyak 60.000 kata-kata orasi pembelaannya disampaikan dengan data-data resmi maupun tidak resmi yang menunjukkan bahwa Soekarno merupakan korban sasaran yang dikelilingi oleh apa yang disebutnya *open door imperialism*. Atas nama nasionalisme populis yang berakar pada kesadaran nasional yang sedang tumbuh yang tak dapat dibasmi, pimpinan PNI bangkit

dengan massa aksi damai. Mereka bergerak dalam tataran nonkooperatif dari front sawo matang dengan menghadapi kekuatan kolonial secara damai. Pidato pembelaan Soekarno berlangsung selama dua hari secara keseluruhan merupakan penampilan yang mempesona dan hebat menyampaikan propaganda sedikit banyak dan berpengaruh secara mengagumkan. Sekalipun demikian hal ini tidaklah mempengaruhi para hakim bahkan pers. Emosi memuncak ketika pejabat RGZ Kiewiet de Jonge merasa sah untuk memberikan salamnya kepada Sukarno yang duduk sebagai tertuduh ketika ia sendiri hendak memberikan kesaksiannya. Reaksi kemudian timbul dari Menteri Jajahan, Simon de Graaf dengan menekan pemerintah Hindia Belanda agar Kiewiet de Jonge segera diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu pada 22 Desember 1930 para pemimpin PNI itu dijatuhi hukuman Sukarno 4 tahun penjara, Gatot 2 tahun, Maskoen 20 bulan, Soeridinata 15 bulan. Keputusan pengadilan itu diumumkan dengan resmi pada 17 April 1931 oleh Dewan Peradilan. Hukuman dijalani di Sukamiskin.

Di *Volksraad* Thamrin menunjukkan tentangannya terhadap keputusan pengadilan itu dan akan melakukan rapat-rapat protes di seluruh Jawa yang digerakkan bersama dengan PPPKI. Salah satu rapat diadakan di Gedong Permoefakatan Indonesia di Gang Kenari pada 3 Mei 1931. Ia menjadi pembicara utama dan menyatakan bahwa pihaknya merasa sangat dilanggar kehormatannya dengan keputusan pengadilan yang tidak adil terhadap Sukarno dan kawan-kawan. PPPKI secara bulat menolak keputusan pengadilan tersebut. Thamrin menekankan bahwa tidak satu pun organisasi rakyat yang dapat ditindas dalam waktu jangka panjang oleh kekuatan yang menyimpang. Gobee melaporkan bahwa rapat yang dihadiri banyak orang itu menurut hematnya karena Thamrin hendak melakukan ajakan kuat kepada mereka agar gerakan bersatu kembali karena adanya perpecahan.

Ajakan Thamrin ini disebabkan, karena kondisi perjuangan di Indonesia sedang dipecah-pecah dan perlu konsolidasi lebih erat lagi. Bulan Desember 1930 PSII keluar dari PPPKI selanjutnya diperlemah dengan pembubaran PNI. Sementara itu di luar negeri Belanda, Hatta melakukan kritik terhadap postur PPPKI yang lemah serta pembubaran PNI yang tidak demokratis. Mengikuti konsep Hatta beberapa golongan merdeka dan klub Pendidikan Nasional Indonesia bersatu mengeluarkan suatu manifesto pada 1 Nopember 1931 dan menyatakan maksud mereka untuk membangkitkan kesadaran nasional massa melalui program menolong diri sendiri dan pendidikan sosial. Hatta bersama teman dekatnya Sutan Syahrir menjalankan konsep pendidikan sosial dan nonkooperasi ketika di Belanda. Dalam bulan Desember 1931

Syahrir yang baru datang dari Belanda mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang disingkat PNI Baroe.

Pada akhir bulan tersebut Thamrin menjemput Soekarno di pintu gerbang Sukamiskin. De Graeff memberikan pengampunan seminggu sebelum kembali ke negaranya sebagai Gubernur Jenderal. Agaknya keputusan ini diambil atas pendapat seorang pakar hukum Prof. Schepper dan Direktur Kehakiman Schrieke. Resepsi di Balai Pertemuan di Bandung pada 31 Desember 1931 dipersiapkan oleh Thamrin. Selanjutnya di kongres Indonesia Raya di Surabaya pada 1 Januari 1932 ia diperkenalkan oleh Dr. Soetomo telah menjadi korban hukuman yang tidak adil. Ketika memberikan sambutannya, seperti biasanya Soekarno menyengat pendengarannya. Ia membandingkan dirinya dengan pahlawan wayang Kokrosono yang kembali dari penjara menemui saudaranya Banowati dan Irowati yang terpisah karena pertempuran, merujuk pada perpecahan Partindo dan PNI Baru. Sukarno meminta mereka bersatu dalam front sawo matang. Akan tetapi karena berbagai sebab upaya ini tidak berhasil. Mungkin sekali alasan utama yang menyebabkan perpecahan dalam pergerakan ialah adanya perbedaan pendekatan dalam menghadapi kemerdekaan oleh pimpinan PNI Baru.

Segera setelah bebas dari penjara Sukamiskin, Sukarno melakukan pendekatan pada Syahrir pada 4 Januari 1932. Dengan pengertian yang bijak ia memintanya masuk ke dalam Partindo/PNI Baroe untuk membentuk *front* melawan Belanda. Langkah Sukarno tersebut benar-benar merupakan cara dia dengan gaya mencari konsensus, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Syahrir dan kawan-kawannya. Hatta sendiri sebelumnya ketika berdirinya Partindo telah menyatakan tidak hendak bergabung. Ia berencana bergiat dalam program pendidikan sosial pada saat kembali ke Indonesia sebagai tercantum dalam suratnya. Seorang dari Sumatera Dr. Abdoel Rivai menilai Hatta tidaklah tepat memasuki politik kaum nasionalis di Jawa karena baik secara kultural maupun etis tidak menguntungkan. Sebaiknya ia menjadi seorang saudagar. Hatta kembali ke tanah air pada pertengahan Agustus 1932, ia bertemu sejenak dengan Sukarno akan tetapi tidak membicarakan politik. Sukarno yang berpegang pada janjinya untuk persatuan pergerakan segera menemui Syahrir dan Hatta guna membicarakan kemungkinan fusi Partindo/PNI Baroe. Syahrir dan Maskoen kemudian menolak bertemu Sukarno dengan demikian Hatta seorang diri menemuinya pada 25 September 1932 yang gagal menghasilkan sesuatu. Akhirnya Sukarno belajar bahwa tujuan yang dikejarinya untuk mempersatukan partai-partai merupakan sesuatu yang ada di luar kekuatan kharismaniknya. Dengan demikian ia mencurahkan tenaganya untuk Partindo sementara Thamrin berusaha membawa Partindo ke dalam PPPKI sesegara mungkin. Sebelum Sukarno bergabung dengan Partindo dalam makloemat dari Bung Karno kepada

kaum Marhaen ia menyatakan Partindo dan PNI Baroe merupakan dua partai kaum Marhaen. Usaha pintu terbuka di pihak Sukarno demi persatuan bagi kompromi hari depan Indonesia ditolak dengan keras oleh grup Hatta. Menurut Hatta kepercayaan politik Sukarno serta cara-cara propaganda yang dilakukannya sangat berbahaya bagi obat mengandung candu bagi kaum marhaen. Para pemimpin PNI Baroe juga menolak kharisma Sukarno yang mereka pandang sebagai eksklusif bertalian dengan mistik Jawa dan khayalan wayang. Sukarno dengan dasar pandangan dan keyakinannya terus mencoba mempersatukan kelompok sekuler dengan mereka yang berorientasi pada yang sakral dalam pergerakan nasional dianggap sebagai dangkal sama sekali bikinan dan buang-buang waktu. Apa yang dilakukan Sukarno itu merupakan per-sate-an (bukan persatuan) sedangkan hal ini harus dilakukan dengan cara rasional dengan pendidikan politik yang baik menuju *front* persatuan yang stabil dengan sekelompok kecil kader. PNI Baroe berharap dapat mencapainya lewat latihan keras dan pendidikan jika perlu masuk ke dalam parlemen Belanda. Mereka hanya percaya sebagian saja pada kehendak Sukarno dan Partindo mengenai persatuan yang dihimpun dalam bentuk PPPKI. Menurut Hatta dalam kenyataannya hal itu melanggar prinsip marhaenisme.⁵²

Keputusan Sukarno masuk dalam barisan Partindo menyebabkan perpecahan yang berlarut-larut menjadi nyata dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Perpecahan ini yang sudah lama membara tetapi tidak pernah diselesaikan, sesungguhnya dimulai sejak pertemuan PI dan pimpinan pemuda nasionalis Bandung untuk membentuk PNI pada tahun 1927. Dalam pertemuan yang dipimpin Sukarno itu ketegangan antara kedua kelompok dapat dicegah. Tetapi setelah ia ditangkap, terbuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk lebih nyata mengemukakan perbedaan-perbedaan pendirian dan sikap politiknya. Persaingan antara Partindo dan PNI Baru sering dilihat sebagai persaingan antara kaum radikal dan kaum moderat atau antara barisan kiri dan barisan kanan. Pada awal tahun 1930-an antitesis seperti ini sebenarnya tidak berlaku. Partindo yang menekankan nonkooperasi, swadaya dan aksi massa sesungguhnya serupa dengan PNI Lama. Tetapi PNI Baru sama sekali tidak dapat dikatakan moderat karena penekanannya untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang mantap secara bertahap, ia berhak menyatakan dirinya lebih radikal dari Partindo yang mencoba memobilisasi massa.

Bagi Soekarno pertimbangan PNI Baroe tersebut sama sekali bertentangan dengan pandangannya. Pribadinya sendiri sebagai bentukan sikritisme serta prinsip rukun dan harmoni yang menjadi bagian pandangan hidup Jawa Bali, sehingga ia memandang upayanya untuk mempersatukan semua faksi dalam PPPKI merupakan langkah politik utama. Sudah pada 1926 dalam tulisannya ia mengumumkan

dirinya sebagai seorang nasionalis, Islam sekaligus Marxis. Ia berpikir bahwa dirinya mampu mempersatukan semua aliran yang berjuang untuk menyatakan dirinya secara politis. Dari sini kelihatan adanya perbedaan ideologis di antara dua pandangan tersebut. Di satu pihak terdapat satu kelompok kecil tetapi terorganisir dengan baik dan merupakan partai kader. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan sosialisme rasional menuju perbaikan masyarakat dan bersifat utilitarian humanis seperti kelompok-kelompok sayap kiri di barat. Dengan demikian mereka ini siap menyaksikan pelaksanaan pembangunan konsep ini bagi masyarakat demokratis Indonesia mendatang berapa lama pun itu. Dipihak lain terdapat seorang pemimpin yang gandrung dengan visi penentuan nasib sendiri bagi Indonesia, dengan cara jauh lebih terpusat dan bersifat kejawaan yang didasarkan pada pendekatan dan pelaksanaannya bagi kepentingan rakyat. Dalam kedudukan tersebut ia nampak lebih bersifat Jawa atau lebih tepat Indonesia dan pasti lebih patriotik/nasionalis daripada sosialis/internasionalis. Sukarno menggunakan satu kata untuk menggugah emosi orang Jawa yakni 'manunggal' dengan rakyat yang dipimpinnya. Terlebih ia juga sembeda, memiliki kemampuan untuk menggambarkan bahwa kemerdekaan memang dapat direnggut. Ia pun mampu mengembalikan kepercayaan diri yang sempat hilang karena kekuatan kolonial Belanda yang bersifat merusak dan memecah-belah⁵³.

Thamrin dalam pidatonya mengatakan bahwa nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia Merdeka! Jika kami kaum kooperator merasa bahwa pendekatan kami tidak efektif, maka kami akan menjadi yang pertama mengambil arah kebijakan politik yang diperlukan. Jurang antara pemerintah kolonial dan gerakan nasional bertambah lebar dari sebelumnya. Bahkan jika pihak sana lebih bersikap bersahabat pengalaman telah memperlemah kehendak bekerja sama di antara mereka dan golongan pribumi. Gerakan sarekat buruh pribumi seperti mati. Keadaan patah semangat daya amuk yang terkendali serta impotensi kini merupakan keadaan sehari-hari dari gerakan pribumi. Demikian kesimpulan Stokvis. Keadaan putus asa dalam pergerakan begitu jelas digambarkan oleh Thamrin dan Stokvis dalam korespondensi mereka, bahkan menjadi lebih jelas ketika rumor 'minta ampun' Sukarno beredar di kalangan politik Indonesia. Mula-mula laporan tentang tanda-tanda lemahnya Sukarno selama dalam interogasi dan kemungkinan dirinya berubah muncul dalam editorial pers pihak sana. Hal ini ditolak dengan cepat oleh pihak pers Indonesia yang menyebut hal itu sebagai upaya mengejek para pemimpin nasionalis dan memerosotkan moral pergerakan. Beberapa waktu kemudian laporan tentang perubahan yang dramatis yang dibuat Sukarno muncul terus menerus. Dua arus pendapat muncul dalam koran Indonesia. Satu pihak

minoritas mati-matian membela Sukarno, sedang (Kampret) Saeroen di *Pemandangan* dan Hatta di *Daulat Ra'jat* mengecam Sukarno karena pendiriannya tidak tetap. Dalam dua artikel Hatta, Tragedi Sukarno dan 'Sikap Pemimpin' menurutnya pemimpin Partindo itu telah mati secara politik dan dengan begitu tak lagi ada gunanya bagi pergerakan. Untuk memberikan jalan bagi frustasinya sendiri yang tertekan pandangan Hatta sangatlah kasar dan mendekati pembunuhan karakter. Ia kembali dengan tema yang sama pada *Daulat Ra'jat*, No. 71, 30 Agustus dalam tulisannya *Oedara Politik*, lalu Pergerakan dalam rentangan 20 September selanjutnya tentang tindakan pemerintah dan polisi setempat yang bertindak sepihak dan sewenang-wenang dalam pertemuan organisasi pergerakan pada 10 Oktober. Dalam 'tragedi Soekarno' ia mengutip artikel sebelumnya dalam koran yang sama 10 Agustus 1933. Dikatakan olehnya bahwa karena Soekarno telah tampil sebagai seorang pemimpin, pertama pemimpin PNI kemudian Partindo, hidupnya diberikan untuk memenuhi tugas dan membawa pengabdian.

Dalam tulisannya Hatta melanjutkan Sukarno bukanlah menjadi korban tindakan atau kekejaman pemerintah tetapi ia menjadi korban dirinya sendiri karena moralnya yang rendah dan karakternya yang merosot dengan jelas. Hatta kemudian bertanya apakah tepat seorang yang mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab secara moral kini menolak konsekuensi kegiatannya sendiri. Ia menjawabnya 'perilaku Sukarno menodai pergerakan, dan untuk itu dia harus dikecam dengan keras'⁵⁴. Dalam artikel 'sikap pemimpin' Hatta menolak pendapat pers bahwa Sukarno tidak boleh dinilai terlalu kasar dengan bertahan pada pandangan sebelumnya. Pandangan lebih elastis disampaikan Tjipto Mangunkusumo dan Sanoesi Pane. Cipto mengatakan bahwa pers terlalu cepat menjatuhkan tuduhan pada perilaku Sukarno menuduh dan menghukum sekaligus. Soal Sukarno minta ampun menjadi analisis psikologi Cipto. Sejak ia dibebaskan dari Sukamiskin karena adanya pengampunan yang diberikan oleh De Graeff, sejak itu ia menjadi pasien psikis. Waktu itu Thamrin mengusulkan agar Sukarno melakukan perjalanan ke luar negeri. Tetapi kalangan dalam partai tidak menyukai saran itu dengan alasan 'pergerakan membutuhkan dirinya siang malam. Perjalanan keluar negeri merupakan contoh pengecut. Sanusi Pane dalam *Soeara Oemoem* mengulangi lagi Cipto yang lebih terang-terangan mengenai pers. Menurut observasinya pers telah gagal dalam mengabdikan dirinya pada orang yang bernama Sukarno, pada otaknya yang brilliant, dan semangatnya, integritas dan hidupnya yang mendalam.⁵⁵

Setelah keluar dari Sukamiskin, Sukarno segera tampil baik didepan podium maupun melalui surat kabar. Dalam majalah *Fikiran Ra'jat* memuat karangan-karangan-diskusi-diskusi dalam gaya Marxist

tentang khayalan demokrasi politik borjuis tanpa adanya demokrasi ekonomi, pelajaran-pelajaran tentang nonkooperasi dan aksi massa, pertukaran pikiran yang bersifat polemik dengan Hatta, pendapatnya yang klasik tentang perbedaan marhaen dan proletar dan tulisan lain yang bersifat mendidik. Karya tulis terpenting Sukarno dalam periode ini adalah tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka” dari hasil istirahatnya di Pengalengan pada bulan Maret 1933. Karangan ini banyak kesamaannya dengan pidato *Indonesia Menggugat*. Lembaran-lembaran pertama berisi tentang perbedaan antara imperialisme kuno dan baru dan pandangan yang sama bahwa surplus mengakibatkan penjajahan dan penghisapan kekayaan tanah jajahan⁵⁶.

Menurut Sukarno, Indonesia dulu pernah merdeka tetapi rakyatnya tidak merdeka, karena sebelum ditundukkan oleh imperialis Belanda mereka telah ditundukkan oleh feodalisme kerajaan-kerajaan Hindu. Untuk itu kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur, dan kemerdekaan adalah suatu syarat bukan tujuan akhir. Menjelang akhir karangan itu ia kembali pada pembedaannya antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi:

Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya yaitu pemerintahan rakyat. Bukan demokrasi ala Eropa dan Amerika yang hanya suatu potret dari partai-partai, demokrasi politik bukan pun demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada rakyat di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi 100% kecakrawartian pada rakyat jelata di dalam urusan politik dan ekonomi.⁵⁷

Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa ketika kemenangan sudah didapat, maka kendalinya harus berada di tangan kaum marhaen, ‘di seberang jembatan itu jalan pecah jadi dua, satu ke dunia keselamatan marhaen, satu ke dunia kesengsaraan marhaen, satu ke dunia sama-rata-sama-rasa, satu ke dunia sama-ratap-sama-tangis’. Untuk itulah marhaen yang mengendalikan kereta itu harus menjaga agar kereta tidak membelok ke jalan yang kedua, menuju masyarakat kapitalis dan borjuis Indonesia. Memang kejahatan kapitalisme merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari pikiran Sukarno tetapi gagasan bahwa rakyat kecil Indonesia harus melawan kapitalis Indonesia adalah pemikiran barunya.

Dengan dekrit pemerintah No. 2 z, 28 Desember 1933 maka kota Ende di Pulau Flores ditetapkan sebagai tempat pembuangan Sukarno. Pemerintah kolonial bergeming dengan perubahan Sukarno.

Menghadapi hukuman itu mungkin ia merujuk pada filsafat Jawa *wani ngalah duwur wekasane*. Pada awalnya tidak ada komentar mengenai hukuman ukarno ini, tetapi setelah tulisan Cipto dan Sanusi Pane dimuat diberbagai pers barulah orang berkomentar bahwa Sukarno merupakan kampuan kemerdekaan, ia berharap segera dikembalikan dan dimurnikan⁵⁸.

Pada bulan November 1933 Sukarno mengundurkan diri dari Partindo. Dalam surat pengunduran itu dinyatakan bahwa ia tidak lagi sepenuhnya sependapat dengan kebijaksanaan politik partai. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pendukungnya, apakah Sukarno akan mengubah jalan politiknya menjadi kooperatif, akibat ditangkap untuk kedua kalinya dan diasingkan ke Ende, Flores, suatu yang tidak pernah terjadi dalam diri Sukarno. Sementara itu setelah penangkapan Sukarno, tokoh-tokoh lain seperti Syahrir, Moh. Hatta juga ditangkap dan diasingkan ke Boven Digul tahun 1936 mereka dipindahkan ke Banda. Hatta dan Syahrir ditangkap selagi belum berhasil berbuat banyak terhadap PNI Baru, meskipun anggotanya masih dapat mempertahankan hidup partai sampai tahun 1930-an. Kini kedua partai tersebut kehilangan pemimpin-pemimpinnya. Sesudah itu pergerakan mengambil jalan moderat dan koperasi menyampingkan jalan *machtsvorming* dan pendidikan suatu elite yang tidak kenal kompromi. Bukan Partindo melainkan suatu partai baru yaitu Parindra yang mewakili gaya politik dalam suasana kelonggaran baru yang diberikan oleh pemerintah.

Suasana politik yang represif pada tahun 1930-an, bagi kalangan kaum nasionalis yang masih bebas pilihannya hanya sikap moderat atau tidak bekerja sama sekali. Pokoknya perubahan pola politik Eropa memaksa kaum intelektual Indonesia menempuh jalan yang sedikit lain dalam melaksanakan perjuangan. Kebangkitan fasisme di Eropa telah mendorong yang radikal di kalangan mereka Amir Syarifuddin, Wikana, Muhammad Yamin dan lain-lain untuk sementara menempatkan perjuangan kemerdekaan sebagai tujuan kedua. Mereka memperlihatkan perjuangan dalam perlawanan yang lebih luas yakni terhadap fasisme di Eropa dan Asia. Pokok pandangan ini tertuang dalam bentuk satu partai baru 1937 Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) partai ini lebih radikal dari Parindra. Meskipun menekankan perjuangan kemerdekaan sebagai sesuatu yang penting, mereka menempatkan pekerjaan utama pada kerja sama Indonesia dan Belanda dalam melawan fasisme Jerman di Eropa dan Jepang di Pasifik⁵⁹.

Catatan Akhir :

- 1) Ahmad Adam hal 179
- 2) Ahmad Adam 181
- 3) Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933* (Ithaca, New York: Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program Cornell University, 1971), hlm. 9.
- 4) Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah*, jilid 5.
- 5) Deliar Noer; *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*; Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 322
- 6) Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*; Jakarta: LP3ES, 1987, hal.15
- 7) *ibid.*, hal. 17
- 8) H.O.S. Tjokroaminoto; *Islam dan Sosialisme*, Djakarta: Bulan Bintang; 1950 (Cet ke IV); hal. 37.
- 9) Anhar Gonggong; *HOS Cokroaminoto*; Jakarta; Depdikbud, 1985, hal 86
- 10) *ibid*, hal 90
- 11) Taufik Abdullah; *Nasionalisme dan Sejarah*; Bandung: Satya Historika, 2001, hal. 32
- 12) Savitri Prastiti Scherer; *Keselarasn dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*; Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hal. 146
- 13) *ibid.* hal 149
- 14) *ibid*, hal. 152
- 15) Soewito, Irna H.N. Hadi. *Soewardi Soerjaningrat Dalam Pengasingan*; Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal. 24
- 16) Komite Boemi Poetra didirikan pada Juli 1913 sebagai Panitia Peringatan 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda di bawah pimpinan dr Tjipto Mangunkusumo, R.M. Soewardi Surjaningrat sebagai bendahara dan penulis, dan Abdoel Moeis, sebagai salah satu komisar. Komite ini juga memprotes adanya pungutan derma secara paksa kepada rakyat pribumi yang terjajah guna kepentingan perayaan ini. Komite ini juga mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina di Belanda, selain memberi ucapan selamat atas perayaan kemerdekaan Belanda, juga menuntut pencabutan Peraturan pemerintah Pasal 111 tentang larangan adanya perkumpulan dan rapat yang berbau politik

serta menuntut adanya Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda.
Ibid., hal. 25

- 17) Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara: Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Djakarta: Balai Pustaka, 1959, hal. 43
- 18) *Ibid.*, hal. 33
- 19) Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische Sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas Gramedia, 2005, hal. 9
- 20) John Ingleson; *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*; Jakarta: Grafiti Pers, 1993, hal. 9
- 21) R. Nalenan, *Iskaq Tjokroasidurjo: Aluni Desa Bersemangat Banteng*; Jakarta: PT Gunung Agung, 1982, hal. 19
- 22) *Ibid*; hal 16
- 23) Ahmad Subardjo. *Op. Cit.*, hal. 128
- 24) Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70; *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoengan Bangsa*; Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-7-, 1972, , hal. 13
- 25) Deliar Noer, *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*, Jakarta : KOMPAS, 2012, hal. 23.
- 26) *Ibid.*, 1972, hal.129
- 27) Mohammad Hatta. *Memoir*, Jakarta: Tintamas, hal. 201
- 28) Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70; *op.cit*, hal. 15.
- 29) Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978, hal . 218-223.
- 30) Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70, *Op. Cit.*, 1972, hal 16
- 31) Wawan Tunggul Alam, *Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 40
- 32) *Ibid.*, hal. 40
- 33) *Ibid*, hal. 103
- 34) Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas, 2005, hal. xii
- 35) Taufik Abdullah, *op. cit*, hal. 40
- 36) *Ibid*, 2003, hal. 45
- 37) Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (editor), *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 132

- 38) Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah rakyat Indonesia*, edisi revisi (terjemahan), Jakarta: Yayasan bung Karno dan Media Pressindo, 2007, hal. 96
- 39) Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70, *op.cit*, hal. 17
- 40) Mohammad Hatta, *Op. Cit.*, 1978, hal. 242
- 41) *Ibid.*, hal. 260
- 42) Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70, *op.cit*, hal. 17
- 43) Mohammad Hatta; *Berjuang dan Dibuang, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi* (Buku II); Jakarta: Kompas; (Cet. Ke III), 2013, hal. 55.
- 44) *Ibid*, hal. 57
- 45) *Ibid*, hal. 66
- 46) John Legge; *Biografi Politik Sukarno*; Jakarta: Sinar Harapan; 1996, hal. 156-157
- 47) Bob Hering; *Mohammad Hoesni Thamrin*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal. 110
- 48) *Ibid*, hal. 111
- 49) *Ibid*, hal. 149
- 50) *Ibid.*, hal 154
- 51) *Ibid*, hal. 158
- 52) *Ibid.*, hal 174
- 53) Bob Hering, *op. cit*, hal.176
- 54) Mohammad Hatta; 1978, *op.cit*, hal. 284
- 55) Bob Hering, *op. cit*, hal. 224
- 56) John Legge, *op. cit*, hal 160-161
- 57) John Legge; *op. cit*, hal 161
- 58) Bob Hering, *op. cit*, hal 226
- 59) John D Legge; *op. cit*, hal 172

BAB IV

NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN

4.1. Kenasionalan dan Kemodernan

Terbitnya *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* pada tahun 1856 di Surabaya oleh Penerbit E. Fuhri,¹ tidak hanya menandai bermulanya penerbitan surat kabar berbahasa Melayu di Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu, melainkan secara tidak langsung juga menjadi semacam tonggak munculnya suatu bentuk komunikasi intelektual bagi orang-orang yang telah mampu membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Adanya media yang mampu berperan sebagai wahana berdialog secara timbal-balik—sesederhana apa pun bentuknya—setidak-tidaknya menjadi penanda telah munculnya suatu wacana kemodernan di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 tersebut. Dinyatakan di sini bahwa “wacana kemodernan” telah muncul, berlandas akan suatu kenyataan bahwa komunikasi yang ada tidak lagi sebatas tuturan atau hanya berlangsung secara lisan dan tidak jelas sumber atau rujukannya, namun sudah terjadi secara tertulis, meskipun tentu saja bentuknya masih sangat sederhana dan dengan pola yang masih belum bersistem atau ketat secara kaidah kebahasaan.

Surat kabar yang disebutkan di awal tulisan ini bukan yang pertama terbit di Hindia Belanda. Sebelumnya sudah tercatat adanya sejumlah media yang terbit, namun kesemuanya itu belum ada yang memakai Bahasa Melayu sebagai media penyampainya. Seperti telah didata oleh peneliti dari Malaysia, yaitu Ahmat Adam,² tidak sedikit sesungguhnya koran atau majalah yang terbit di Hindia Belanda sebelum tahun 1856 tetapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda atau bahasa daerah, dalam hal ini adalah Bahasa Jawa. Koran dan majalah tersebut antara lain adalah *Batavia Nouvelles* (1744), *Bataviasche Koloniale*

Courant (1810), *Soerabaja-Courant* (1837), *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* (1838), *Indisch Magazijn* (1844), *Samarangsch Advertentieblad* (1845), *Soejabaiasch Handelsblad* (1852), *Java-Bode* (1852), *De Locomotief* (1852), *Bromartani* (1855), dan *Poespitamantjawarna* (1855).

Dengan telah adanya surat kabar atau majalah tersebut, kenyataan atau perkembangan serta dinamika zaman jelas mulai dapat terabadikan kendati tanpa suatu landasan kesadaran akan sisi dokumentatif ini, bahkan oleh pengelola media massa tercetak itu sendiri. Sudah barang tentu, yang termuat dalam media-media tersebut belum dan tidak akan mampu menggambarkan realitas zaman secara menyeluruh, namun paling tidak hal-hal yang dianggap penting pada suatu masa atau periode, telah terdata dan tercatat secara tetap sehingga pembaca atau siapa saja di kemudian hari akan mampu menelusuri peristiwa atau catatan kejadian dengan lebih mudah dan lebih mendekati kenyataan yang ada. Dibandingkan dengan kisah atau cerita yang diturunkan atau disampaikan secara lisan, khususnya pada waktu itu, hal-hal yang tertulis mempunyai kejelasan yang jauh lebih terjaga. Oleh kenyataan yang sedemikian ini, menjadi jelas kiranya bahwa terbit dan berkembangnya media massa tercetak pada pertengahan abad ke-19 tersebut tidak dapat dimungkiri sebagai mempunyai sumbangan yang penting dan signifikan bagi pendokumentasian gerak dan arus zaman.

Dalam kaitan dengan dunia cetak-mencetak atau tulis-menulis, ada prasyarat yang tentu harus dipenuhi oleh para pelaku itu, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Untuk memperoleh kemampuan ini, hal yang lazim harus ditempuh adalah mengikuti pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Sementara itu, di masa kolonial atau penjajahan itu, masa ketika diskriminasi dalam segala bidang dengan nyata diberlakukan, hanya sedikit penduduk asli atau pribumi yang berpeluang atau diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan formal. Bahkan ketika Politik Etis yang pertama diberlakukan, yaitu pada kurun 1900-1905, hanya orang pribumi dari golongan elite dan dari keluarga kaya saja yang berkemungkinan atau dapat menempuh pendidikan, baik melalui OSVIA (*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren* atau Sekolah Latihan untuk para Pejabat Pribumi) atau STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* atau Sekolah Latihan untuk Dokter Pribumi).³ Padahal, seperti telah disebutkan, surat kabar atau majalah berbahasa Melayu telah terbit pada tahun 1856, yang artinya telah terbit ketika pendidikan yang terstruktur seperti baru saja disebutkan, belum didirikan di Indonesia. Kalaupun sudah ada, pendidikan formal yang

sudah diselenggarakan adalah *Kweekscholen* atau Sekolah Latihan bagi Guru Pribumi yang dibuka pertama kali pada tahun 1852.⁴ Dari kenyataan ini, tentu dapat dipahami bahwa kemampuan membaca dan menulis pada penduduk pribumi serta penguasaan Bahasa Melayu mereka masih sangat rendah dan terbatas. Dengan pengertian lain, tentu tidak mungkin dibayangkan bahwa media massa cetak yang mula-mula terbit ini, pada dekade 1850-an tersebut, sudah menampilkan suatu bentuk komunikasi yang formal, teratur, maupun penuh dengan hal-hal yang bersifat nasionalistis. Namun demikian, bagaimanapun kondisinya, jelas kiranya bahwa situasi intelektualistis sudah mulai terbangun, terlebih lagi pada awal abad ke-20 ketika Politik Etis mulai diterapkan, atau bahkan semenjak sistem sekolah dasar yang diperuntukkan bagi penduduk asli atau pribumi mengalami perbaikan pada tahun 1892-1893.⁵

Melalui pendidikan atau mulai makin banyaknya orang Indonesia di masa Hindia Belanda yang mampu membaca dan menulis inilah gagasan atau ide-ide yang berkenaan dengan pencarian identitas maupun kehendak untuk maju mulai mewujud lewat tulisan-tulisan di sejumlah media. Melalui majalah *Insulinde* yang terbit di Padang pada awal abad ke-20 misalnya, seperti pernah disebutkan oleh Taufik Abdullah,⁶ seruan untuk memasuki kemajuan telah nyaring dikumandangkan meskipun menurut Dr. M. Amir hal tersebut hanya merupakan suatu sikap mem-*beo* saja, atau hanya meniru kemajuan negeri lain.⁷ Dalam catatan Ahmat Adam, *Insulinde* yang dieditori oleh seseorang yang berasal dari suku Batak yang sudah terjun ke dalam dunia penerbitan sejak tahun 1895, yaitu Dja Endar Moeda, mempunyai tujuan untuk “memajukan minat akan pendidikan di kalangan para guru dan bangsawan pada umumnya”.⁸ Namun, masih menurut Ahmat Adam, orientasi dan isi *Insulinde* sesungguhnya serupa dengan apa yang telah dicanangkan oleh sebuah jurnal pendidikan yang terbit di Probolinggo pada tahun 1895 yang bernama *Matahari Terbit*.⁹ Terlepas dari manakah media yang mula-mula mencanangkan ihwal kemajuan bagi penduduk pribumi, dalam konteks ini jelas kiranya bahwa di masa itu telah tumbuh adanya suatu kesadaran akan pentingnya kemajuan, melalui pendidikan khususnya, bagi lahirnya suatu identitas kebangsaan atau kenasionalan.

Bagaimanapun, secara khusus *Insulinde* tercatat memang lebih jelas arahnya. Seperti disebutkan oleh Ahmat Adam, pada awal abad ke-20 itu memang telah terjadi kekosongan berkenaan dengan bahan

bacaan bagi para priayi sehingga *Insulinde*—pada nomor perdananya—secara sadar menyatakan diri sebagai panduan bagi semua priayi dan kalangan terhormat yang hendak mengejar pengetahuan.¹⁰ Tulisan-tulisan dalam *Insulinde* pada umumnya mengandung aspek atau nilai pendidikan yang teoretis maupun khususnya yang praktis. Dan “di atas segalanya, editor dan para koresponden jurnal ini menekankan pentingnya orang Indonesia mengejar kemajuan; di sinilah peran para guru dan bangsawan yang, sebagai pemimpin, harus bergiat untuk kemajuan bangsa mereka”.¹¹

Fakta bahwa hadirnya suatu kesadaran akan kemajuan ini difasilitasi oleh dunia pers atau penerbitan, sekaligus menggambarkan atau menunjukkan bahwa kemodernan sesungguhnya sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses perjalanan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri. Berdasarkan pemahaman ini menjadi jelas bahwa suatu kesadaran kebangsaan atau kenasionalitasan bukan merupakan augerah yang jatuh begitu saja dari langit atau hadiah dari penjajah melainkan telah melalui proses atau perjalanan panjang dan bersangkut-paut dengan berbagai dimensi dalam kehidupan yang intinya bertumpu pada dimensi atau aspek “pendidikan”. Dalam kaitan ini, tidak mengherankan pula jadinya ketika pihak Belanda dengan Politik Etis-nya menekankan pentingnya pendidikan (*educatie*) sebagai prinsip pertamanya. Bahwa “pendidikan” dalam kaitannya dengan Politik Etis ini lebih ditujukan untuk ketersediaan para pegawai pemerintah dalam rangka membantu kelancaran sistem administrasi Pemerintah Hindia Belanda, tentu saja merupakan hal yang lain lagi.

Gambaran mengenai mulai tumbuhnya suatu kesadaran akan identitas diri maupun arah kehidupan bangsa Indonesia, baik secara parsial maupun menyeluruh, setidak-tidaknya dapat ditelusuri melalui sikap, gagasan, pendapat, pandangan, dan semacamnya, yang telah diterbitkan atau terekam dalam dunia penerbitan. Dalam kaitan mengenai penerbitan yang dipublikasikan secara mekanis dan massal ini—dalam pengertian tidak ditulis secara manual dan satu per satu; yang artinya pula sudah memasuki wilayah laku “modern”—fakta menunjukkan bahwa penerbitan pers yang berupa surat kabar dan majalah, adalah yang mula-mula muncul sebelum kemudian lahir penerbitan-penerbitan buku atau karya sastra pada umumnya. Sebagaimana penerbitan surat kabar dan majalah, yang tidak selamanya bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi suatu kemajuan atau orientasi tertentu kepada pembacanya seperti telah ditunjukkan oleh

Insulinde dan *Matahari Terbit*, demikian pula halnya dengan karya seni pada umumnya—sastra dan film, misalnya—tidak selalu membawa pesan-pesan kemajuan atau ajakan untuk memperoleh kesadaran akan jati diri sebagai bangsa. Mengingat bahwa sesuatu ide dapat datang dari apa dan mana saja, maka karya sastra atau film, sebagai contoh, yang telah muncul di masa kolonial, juga tidak selalu menawarkan atau mengajak pembaca atau penonton untuk memasuki suatu ruang kesadaran yang berkenaan dengan kenasionalan dan kebangsaan.

4.2. Kemodernan dalam Sastra dan Film

Sejalan dengan telah mulai didirikannya sejumlah sekolah di Hindia Belanda bagi penduduk tempatan atau pribumi, meski secara persentase tentu masih rendah jumlahnya, perlahan-lahan cara berpikir penduduk pribumi yang telah berkesempatan duduk di bangku sekolah tersebut pada umumnya tentu juga mulai berubah dan terbuka berkenaan dengan hal atau persoalan baru. Dengan kata lain, bukan hanya kemampuan membaca dan menulis yang kemudian dikuasai, melainkan juga keterbukaan wawasan, daya kritis, kemampuan membandingkan dalam segala aspek kehidupan, dan lain sebagainya, yang mulai memperoleh tempat dan mengendap dalam benak para pelajar itu. Mengingat bahwa aspek atau dimensi dalam kehidupan itu sangat beragam dan mempunyai dimensi atau spektrum yang begitu bervariasi, asupan pengetahuan atau bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai semacam ideologi, secara tidak langsung maupun langsung tentu juga mampu mempengaruhi alam pikiran orang-orang pribumi yang telah mengenyam bangku pendidikan tersebut, dengan catatan tentu dalam bentuk atau wujud yang sangat sederhana. Hal ini sejalan dengan masih sederhananya pula kehidupan maupun pengetahuan yang diterima pada saat itu, selain karena juga faktor perkembangan zaman yang masih belum terlalu kompleks atau rumit permasalahannya.

Kendati demikian, sesederhananya apa yang kemudian menjadi wawasan atau juga dasar-dasar pemikiran para pelajar tersebut, jelas bahwa intelektualitas maupun modernitas telah mereka cerap dan serap yang sangat mungkin juga telah mempengaruhi pandangan maupun pendapat mereka. Kenyataan seperti ini sudah barang tentu sangat wajar dan alami sekaitan dengan kemampuan manusia yang memang secara dasariah sudah dibekali kemampuan mencerna, menganalisis, dan

sebagainya, selaras dengan sejumlah indera yang pada hakikatnya memang dimiliki oleh setiap manusia dengan kadar yang berbeda-beda.

Dalam hubungannya dengan kebudayaan, dan utamanya berkenaan dengan bentuk kesenian yang secara khusus mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis, yaitu kesusastraan, telah pula terjadi sejumlah penerimaan, penyerapan, penerjemahan, dan semacamnya yang kemudian menggerakkan adanya suatu penciptaan, telah melahirkan sejumlah karya yang tidak lagi disampaikan secara lisan atau dengan cara bertutur, melainkan dengan dituliskan. Tidak hanya sekadar dituliskan; yang kemudian berkembang adalah penulisan dengan suatu kehendak yang tidak hanya mengulang apa yang selama itu sudah didengar atau biasa dikisahkan secara turun-menurun, melainkan suatu keinginan untuk menghasilkan karya sendiri dengan pencantuman nama secara jelas—hal yang di masa sebelumnya tidak atau sangat jarang dilakukan sebab alam atau atmosfer penciptaan di kala itu lebih bersifat kolektif.

Adanya persona atau nama yang dicantumkan sebagai pengarang atau pencipta, jelas menunjukkan suatu tanggung jawab dalam penciptaan di satu sisi dan kemudahan bagi pembaca menjadi begitu bermakna untuk mengetahui buah karya atau pikiran pengarang tersebut. Dengan demikian, meski bisa saja pengarang bersangkutan hanya melakukan semacam penceritaan kembali atas karya-karya yang sudah ada sebelumnya, pembaca dapat menengarai akan orientasi atau pilihan bentuk karya yang telah menggerakkan kreativitasnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang telah dicipta oleh penulis ini, setidaknya-tidaknya telah memberikan gambaran akan pengaruh dari karya-karya sebelumnya yang telah dipelajari. Sebagai contoh, sejumlah novel yang memperlihatkan cerita berbingkai, pada dasarnya masih memanfaatkan pola hikayat yang memang biasa menampilkan cerita dengan sejumlah bingkai cerita, atau juga banyaknya bentuk soneta yang muncul pada masa Pujangga Baru, jelas memperlihatkan adanya pengaruh Angkatan 1880 di Belanda pada sejumlah pengarang Indonesia.

Berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan kesusastraan Indonesia yang, seperti telah disebutkan, mampu memberikan gambaran akan pemikiran atau pandangan pengarang atas dinamika zaman, perlu diketahui terlebih dahulu akan khazanah sastra yang pada abad ke-19 itu telah mulai berkembang di Indonesia dan

sebagainya, selaras dengan sejumlah indera yang pada hakikatnya memang dimiliki oleh setiap manusia dengan kadar yang berbeda-beda.

Dalam hubungannya dengan kebudayaan, dan utamanya berkenaan dengan bentuk kesenian yang secara khusus mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis, yaitu kesusastraan, telah pula terjadi sejumlah penerimaan, penyerapan, penerjemahan, dan semacamnya yang kemudian menggerakkan adanya suatu penciptaan, telah melahirkan sejumlah karya yang tidak lagi disampaikan secara lisan atau dengan cara bertutur, melainkan dengan dituliskan. Tidak hanya sekadar dituliskan; yang kemudian berkembang adalah penulisan dengan suatu kehendak yang tidak hanya mengulang apa yang selama itu sudah didengar atau biasa dikisahkan secara turun-menurun, melainkan suatu keinginan untuk menghasilkan karya sendiri dengan pencantuman nama secara jelas—hal yang di masa sebelumnya tidak atau sangat jarang dilakukan sebab alam atau atmosfer penciptaan di kala itu lebih bersifat kolektif.

Adanya persona atau nama yang dicantumkan sebagai pengarang atau pencipta, jelas menunjukkan suatu tanggung jawab dalam penciptaan di satu sisi dan kemudahan bagi pembaca menjadi begitu bermakna untuk mengetahui buah karya atau pikiran pengarang tersebut. Dengan demikian, meski bisa saja pengarang bersangkutan hanya melakukan semacam penceritaan kembali atas karya-karya yang sudah ada sebelumnya, pembaca dapat menengarai akan orientasi atau pilihan bentuk karya yang telah menggerakkan kreativitasnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang telah dicipta oleh penulis ini, setidaknya-tidaknya telah memberikan gambaran akan pengaruh dari karya-karya sebelumnya yang telah dipelajari. Sebagai contoh, sejumlah novel yang memperlihatkan cerita berbingkai, pada dasarnya masih memanfaatkan pola hikayat yang memang biasa menampilkan cerita dengan sejumlah bingkai cerita, atau juga banyaknya bentuk soneta yang muncul pada masa Pujangga Baru, jelas memperlihatkan adanya pengaruh Angkatan 1880 di Belanda pada sejumlah pengarang Indonesia.

Berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan kesusastraan Indonesia yang, seperti telah disebutkan, mampu memberikan gambaran akan pemikiran atau pandangan pengarang atas dinamika zaman, perlu diketahui terlebih dahulu akan khazanah sastra yang pada abad ke-19 itu telah mulai berkembang di Indonesia dan

dikenal secara luas oleh pembaca. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk kesenian baru—dan “modern”—yang telah muncul sejalan dengan perkembangan kebudayaan, pendidikan, dan situasi sosial-politik di Indonesia pada masa kolonial tersebut, yaitu puisi, prosa, dan drama. Selain ketiga bentuk sastra ini, film juga akan dibicarakan di sini mengingat bahwa film telah menjadi semacam representasi akan kemajuan teknologi berkisah.

4.2.1. Puisi

Dalam kaitannya dengan kesenian, sastra pada khususnya, bentuk sastra modern yang paling awal muncul adalah pantun dan syair yang ditulis oleh Sa-Orang jang Bangsawan pada tahun 1857 dengan judul *Boek Saier Oetawa Terseboet Pantoen*. Lengkapnya, buku ini mempunyai judul *Boek Saier Oetawa Terseboet Pantoen, aken Anak-anak Ampoenja Perbatja-an dan Pengadjaran Soepaija Dija Boleh Mengatahwie aken Ampoenja Perdjalan an ijang Baek dan ijang Tida Adanja* dan diterbitkan oleh Penerbit Lange & Co di Batavia. Ditilik dari bentuk, tentu saja “syair” tidak dapat dikatakan sebagai sungguh-sungguh baru sebab syair adalah bentuk yang sudah lama ada dengan pelbagai aksara yang digunakan. Dengan demikian, dilihat dari segi bentuk, bukan “syair” atau “pantun” yang tentu merupakan bentuk kesenian baru melainkan bentuk puisi lain, baik yang berpola seperti “soneta”¹² maupun yang tidak berpola atau bebas.

Yang patut dicatat, meskipun sampai memasuki abad ke-20 bentuk pantun dan syair masih banyak dimanfaatkan orang untuk menuangkan ide atau gagasan, percobaan atau upaya menghasilkan puisi yang tidak terikat pola sesungguhnya sudah muncul pada tahun 1870. Sejauh data yang dapat diperoleh, pernah ada sastrawan yang memakai inisial A.D. yang telah memublikasi karyanya di *Bianglala* pada tanggal 19 Agustus 1870, dengan bentuk yang berbeda dari syair atau pantun. Tentu, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, hal tersebut bukan sesuatu yang layak diherankan; namun jika disadari bahwa hal semacam ini terjadi pada masa ketika tradisi menulis puisi masih sangat terbatas, jelas kenyataan tersebut merupakan suatu realitas yang layak diperhatikan. Di bawah ini adalah contoh karyanya.

Keuntungan Anak¹³

1

Meski saya muda,
Dicinta Tuhan Allah,
Diperanakan selamat,
Murah Tuhan ya amat,
Sudah kasih saya,
Ma bapa yang percaya!

2

Makan saya sampai,
Bermain boleh capai,
Diajari sekolah,
Yang kasih Tuhan Allah,
Biar juga saya,
Berbudi dan percaya!

3

Habis siang saya kantuk,
Boleh tidur sampai enak!
Matahari keluar pagi,
Saya buka mata lagi!
Lantas bangun dapat lihat,
Sanak saya masih selamat.

4

Dari itu saya suka,
Hati saya lantas buka!
Suka puji maha Tuhan,
Dengan unjuk kehormatan,
Saya minta rendah hati,
Tuntun saya sampai mati.

Selain itu, ada pula karya yang sepiantas lalu berbentuk seperti syair atau pantun, namun jika diperiksa dengan seksama, ternyata tulisan tersebut bukanlah pantun atau syair. Karya yang dimaksudkan ini, telah terbit pada tahun 1873. Dinyatakan di sini sebagai bukan syair sebab pada setiap bait bervariasi rimanya; ada yang //a-b-a-b//, //a-a-a-a//, atau //a-a-b-b//, sementara pola syair yang lazim dipahami

khalayak mempunyai rima //a-a-a-a//. Demikian pula untuk dikatakan sebagai pantun, pun meragukan sebab di dalam sebuah baitnya tidak terdapat larik atau baris yang menunjukkan adanya sampiran dan isi, serta tidak mempunyai rima //a-b-a-b//. Bentuk yang sedemikian ini, tentu juga dapat dicatat sebagai upaya melakukan pembaruan atau kreasi yang tidak terkungkung oleh kelaziman, entah disengaja atau hanya muncul secara kebetulan. Sajak yang baru saja disebutkan ini, ditampilkan setelah penjelasan ini dan seperti pada contoh sebelumnya, karya ini juga ditulis oleh penulis yang lebih memilih menggunakan inisial, yaitu M.J.

Musim Derep, Musim Melajo¹⁴

Musim motong sudat datang,
Apa kita dengar itu?
Padi di sawah sudah matang,
Kita orang ramai pergi di situ.

Pada waktu siang hari,
Teranglah cahyanya matahari,
Dengar di kanan dan di kiri,
Segala burung pada menyanyi.

Pada tengah malam yang sepi,
Burung kucipet menyanyilah,
Memberi tahu pada kami,
Musim motong sudah datanglah!

Ini musim penuaian,
Kita dapat badan segar,
Potong dengan kesukaan,
Janganlah sayang suar (keringat).

Petik! Kumpul, dengan baik,
Janganlah ingat sungut,
Potong padi itu bai,
Buah-buah kelak dipungut.

Syukurlah bulan Maulud,
Memberi kita isi perut,
Engkau kasih perasaan,
Allah punya kecintaan.

Ini bulan memang waktunya,
Hasil tanah dikumpulkan,
Tetapi biar semuanya,
Tuhan jangan dilupakan.

Tuhan ada pohon selamat,
Yang kasih segala berkat,
Biarlah kita jangan lambat,
Dari dosa lekas tobat.

Padi yang jeli selamanya,
Tunduk dirinya pada temannya,
Tapi padi yang tiada isinya,
Tinggi hati itu adanya.

Biarlah kita semuanya,
Seperti padi yang berisi,
Tunduk diri selamanya,
Pada Allah yang Mahasuci.

Sementara itu, bentuk pengucapan yang memang tidak terlalu terikat oleh bentuk pantun dan syair tercatat mulai banyak dihasilkan oleh sastrawan pada abad ke-20 dan sesudahnya. Para sastrawan ini melakukan cara yang sedemikian itu tentu sebagai akibat dari perkembangan intelektualitas atau pendidikan yang telah mereka tempuh atau mereka dapatkan yang dengan sendirinya memberi mereka wawasan akan khazanah sastra dunia yang memang tidak lagi selalu mengikuti atau terikat pada pola-pola tertentu. Salah seorang pesastra Indonesia, sebagai contoh, yang banyak menuangkan gagasan kebangsaannya melalui sajak, adalah Muhammad Yamin, yang salah sebuah sajaknya dikutip di sini.

BAHASA, BANGSA

Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es um es zu besitzen.

Selagi kecil berusia muda,
Tidur si anak di pangkuan bunda
Ibu bernyanyi, lagu dan dandang
Memuji si anak banyaknya sedang;
Berbuai sayang malam dan siang
Buaian tergantung di tanah moyang.

Terlahir di bangsa, berbahasa sendiri
Diapit keluarga kanan dan kiri
Besar budiman di tanah Melayu
Berduka suka, sertakan rayu;
Perasaan serikat menjadi padu
Dalam bahasanya, permai merdu

Meratap menangis bersuka raya
Dalam bahagia bala dan baya
Bernafas kita pemanjangkan nyawa
Dalam bahasa sambungan jiwa
Di mana Sumatra, di situ bangsa,
Di mana Perca, di sana bahasa.

Andalasku sayang, jana bejana
Sejakkan kecil muda teruna
Sampai mati berkalang tanah
Lupa ke bahasa, tiadakan pernah
Ingat pemuda, Sumatera malang
Tiada bahasa, bangsa pun hilang.

Sedangkan bentuk soneta, seperti telah disebutkan, adalah puisi berpola yang mendapat tempat cukup baik pada pesastra yang berkarya pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Dikenal dan digemarinya soneta ini, sangat boleh jadi, merupakan akibat logis dari dunia pendidikan yang ketika itu masih sangat berorientasi kepada pendidikan Eropa, sementara di sisi lain, soneta memang bentuk yang populer di Eropa pada beberapa tahun sebelumnya. Hampir semua penulis yang menghasilkan dan memublikasikan karya mereka pada tahun 1920-an maupun di masa Pujangga Baru, menggemari bentuk soneta ini sebagai

wadah ekspresi diri mereka. Untuk memberikan gambaran akan dikenal luasnya bentuk soneta, berikut ditampilkan sebuah contoh soneta yang ditulis oleh Muhammad Hatta, berjudul “Beranta Indera”.¹⁵

BERANTA INDERA

Lihatlah timur indah berwarna,
Fajar menyingsing hari pun siang;
Syamsyu memancarkan sinar yang terang,
Khayal tersenyum berpanca indera.

Angin sepoi bertiup dari angkasa,
Merembus ke tanah ranting diguncang;
Margasatwa melompat keluar sarang,
Melihat beranta indera indah semata.

Langit lazuardi teranglah sudah,
Bintang pun hilang berganti-ganti;
Cahaya zuhari mulai muram.

Haiwan menerima selawat alam,
Hati pun girang tiada terperi;
Melihat kekayaan subhan Allah.

Dengan menampilkan karya Hatta—yang di kemudian hari sangat dikenal sebagai satu dari “dwitunggal” yang populer dengan “Soekarno-Hatta” dan kemudian menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama—dimaksudkan sebagai semacam gambaran bahwa kesusastraan sangat erat berjalanan dengan kaum intelektual dan pergerakan, tidak terkecuali di masa Hindia Belanda. Bahkan Soekarno pun, selain sebagai aktivis dan pejuang kemerdekaan, adalah juga sastrawan sebab beberapa karya sastra telah dihasilkannya. Demikian pula dengan para pejuang yang lain, dunia kesusastraan adalah dunia yang dapat dikatakan sangat dekat dengan mereka.

4.2.2. Prosa

Di masa ketika kelisanan masih begitu kuat melingkupi kehidupan masyarakat di Indonesia, bentuk-bentuk dongeng, cerita rakyat, atau pun hikayat yang penuh berisi kisah antah-berantah atau cerita kerajaan-kerajaan di masa lalu, dapat dikatakan mendominasi narasi yang beredar. Kehidupan sehari-hari yang menyangkut manusia biasa dalam interaksinya dengan manusia atau tokoh lain, hampir tidak

memperoleh tempat dalam ruang berkisah itu. Baru pada akhir abad ke-19, bentuk prosa yang dapat saja berupa novelet, *feuilleton* atau cerita bersambung, maupun novel—yang pada masa itu lebih populer dengan sebutan “roman”—mulai ditulis orang dengan pengungkapan peristiwa biasa dan sehari-hari dengan penyelesaian yang biasa pula.

Berkaitan dengan genre prosa ini, baik yang berujud cerpen, novelet, atau novel, data yang ada menunjukkan bahwa karya terawal yang dapat disebutkan di sini adalah karya G. Francis yang berjudul *Tjerita Njai Dasima* dengan anak judul *Soewatoe korban dari pada pemboedjoek. Tjerita bagoes sekali, jang belon berapa lama soedah djadi di Betawi, akan mendjadi peladjaran bagei sekalian prempoean jang soeka menoeroet boedjoekan laki-laki. Satoe nasehat kepada anak-anak moeda* dan bukan karya Adi Negoro yang berjudul *Melawat ke Barat*, misalnya, seperti disebutkan oleh Hooykaas.¹⁶ Novel G. Francis ini terbit pertama kali pada tahun 1896 di Jakarta, diterbitkan oleh Kho Tjeng Bie & Co.¹⁷

Secara alami, terutama juga dengan mengindahkan kecenderungan dunia penulisan pada umumnya serta situasi sosiologis yang melingkupi masa itu, sejujurnya harus diakui bahwa semestinya bukan karya sastra berbentuk novel yang mengawalinya tetapi cerpen sebab energi yang dipakai untuk merangkai kisah dengan kompleksitas masalah, bukan hal yang sederhana dan mudah dilakukan oleh banyak orang. Akan tetapi, dari pendataan yang telah dilakukan, novel inilah yang dapat diketemukan dan akhirnya untuk sementara ini harus ditetapkan pula sebagai novel paling awal dalam lintasan sejarah sastra Indonesia modern. Bahwa pengarangnya bukan orang “Indonesia asli” melainkan seorang Indo, tidak perlu dipertentangkan sebab di masa ketika identitas keindonesiaan belum jelas benar, merupakan hal yang naif dan mengada-ada sekiranya orang “Indonesia asli” yang harus dipakai sebagai penanda. Perihal “keaslian” atau “kepribumian” ini merupakan suatu wacana yang akan sulit diketemukan titik-temunya mengingat masyarakat atau bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang memang sangat heterogen atau beragam.

4.2.3. Drama

Populasi drama—dalam pengertian sebagai bentuk yang ketat dalam hal dialog dan petunjuk pemanggungannya—kapan dan di mana pun, senantiasa menunjukkan tingkat yang selalu tertinggal dibandingkan dengan populasi prosa maupun puisi. Di Indonesia, keadaan dan situasi penulisan drama juga seperti itu. Namun demikian, karya drama modern Indonesia yang pertama ternyata tidak terlalu

ketinggalan keberadaan atau eksistensinya, khususnya jika dibandingkan dengan novel, karena drama yang berusia paling awal ini bertanda tahun pembuatan dan penerbitan pada 1901 yang artinya hanya tertinggal lima tahun. Drama yang ditulis oleh F. Wiggers—yang lagi-lagi barangkali akan diragukan “keindonesiaannya” sebab ia adalah seorang Indo—dan berjudul *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* ini dilihat dari struktur dramaturginya dapat dikatakan sudah sangat modern, bahkan jauh lebih modern dibandingkan drama-drama Indonesia sesudahnya.

Namun demikian, kandungan yang tersirat dalam *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* belum menunjukkan suatu kesadaran nasional sebagaimana ditunjukkan oleh drama Indonesia yang selama ini telah disebut sebagai drama yang pertama, yaitu *Bebasari* karya Roestam Effendi yang terbit pertama kali tahun 1927. Secara struktur dan gaya ucapannya, drama karya F. Wiggers ini dapat dikatakan memang lebih memadai dibandingkan karya Roestam Effendi itu namun, sekali lagi, jiwa keindonesiaan atau kenasionalannya hampir tidak ada. Dan karena terlalu “modern”nya drama karya F. Wiggers ini untuk ukuran masa itu, ada kecurigaan yang timbul bahwa drama ini jangan-jangan merupakan karya saduran dari karya Eropa¹⁸ yang artinya, keorisinalan drama ini masih banyak yang meragukan. Namun demikian, selama belum dapat dibuktikan bahwa karya ini merupakan sebuah saduran atau bahkan mungkin sebuah plagiat, ia tetap harus disebut sebagai bagian dari khazanah Sastra Indonesia Modern dan termasuk drama yang mula-mula di Indonesia.

4.2.4. Film

Sebagai bentuk kesenian baru yang tidak lagi berdimensi satu namun berwujud multidimensi, film sudah mulai diperkenalkan kepada publik Indonesia tidak berselang lama dari awal diperkenalkannya film kepada khalayak di luar negeri. Dalam buku *Film Indonesia: Bagian I (1900-1950)* disebutkan bahwa film mulai dipertunjukkan pada awal Desember tahun 1900 di Batavia, di tahun pertama politik etis diberlakukan.¹⁹ Akan tetapi, film cerita—yang masih bisu—baru diproduksi di Hindia Belanda pada tahun 1926, “ketika bioskop telah makin memperlihatkan diri sebagai gejala kultural baru dari kehidupan kota.”²⁰ Baru pada tahun 1936, atau sepuluh tahun kemudian, produksi film cerita mulai diproduksi secara teratur namun tentu tetap masih dengan keterbatasan sarana dan prasarana sinematografinya. Kendati demikian, meski masih serba sederhana, film sungguh sudah berperan

sebagai pemroduksi budaya baru bagi para konsumen atau penontonnya dengan secara diam-diam menanamkan “nilai-nilai” baru yang serba identik dengan apa yang disebut sebagai “kemoderenan”. Segala penampilan, cara berdandan, logat bicara, dan segenap atribut yang beroperasi di dalam film melalui tokoh-tokoh dalam film itu, secara terselubung telah mengkonstruksi suatu budaya baru yang kemudian identik dengan kekotaan dan tentu juga kemoderenan.

Kehadiran film yang mampu menampilkan gambar serta cerita yang lebih memikat karena banyak adegan atau aksi yang dianggap lebih menawan, secara perlahan-lahan menggeser atau meminggirkan seni pertunjukan lain seperti sandiwaya dan komedi stambul yang sebelumnya merupakan primadona dalam dunia hiburan. Akan tetapi, hal yang paling lekat dengan berkembangnya budaya baru ini adalah berkembangnya budaya kota, sebab, khususnya di masa kolonial itu, bioskop hanya ada di kota besar yang artinya hanya masyarakat kota saja sebagai konsumen film.

4.3. Kenasionalan atau Keindonesiaan yang Terefleksikan

Dalam menghasilkan suatu karya, siapa pun tentu memiliki kebebasan untuk memilih tema yang akan ditampilkan. Bisa saja seorang pengarang menulis mengenai persoalan yang muncul antara tokoh dengan tokoh lain, tokoh dengan lingkungan sosial, tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan lingkungan alam, maupun tokoh dengan Sang Pencipta. Persoalan yang muncul dari relasi antara tokoh dengan entitas lain itu, dapat bermuara pada masalah percintaan, kedengkiian, keiri-hatian, kesetiaan, perselingkuhan, atau persoalan kemanusiaan pada umumnya; baik yang bersifat sendiri-sendiri maupun yang mencakup satu komunitas atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan karya-karya sastra yang terbit pada masa kolonial di Hindia Belanda, berbagai tema seperti telah disebutkan tentu juga dapat dijumpai, baik yang masih bernuansa tradisional maupun yang sudah menggambarkan kehidupan orang per orang secara personal, namun tentu dengan cara ungkap maupun wawasan yang berbeda dengan ketika Indonesia sudah merdeka atau dengan situasi Indonesia di masa kini. Sekaitan dengan aspek tematik ini, pembatasan difokuskan pada hadirnya kesadaran akan identitas Indonesia maupun keindonesiaan, di masa ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau ketika masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Bagi pembaca

sekarang, jika mau masuk ke ruang kesadaran kontekstual di kala penjajahan itu, niscaya tidak akan dengan mudah menjumpai ekspresi seperti “merdeka” yang dengan ringan dan tanpa konsekuensi diucapkan di masa sekarang, atau bahkan dengan sekadar menyebut identitas kebangsaan yang dibayangkan atau yang diharapkan. Konteks zaman yang sedemikian itu, penting diingat agar ruang pemahaman kita tidak penuh dengan cibiran atau kesinisan yang bersumber dari perbedaan keadaan zaman.

Dengan meletakkan kesadaran secara proporsional seperti itulah, niscaya pembaca akan lebih memahami ungkapan atau pilihan kata yang secara kualitas barangkali tidak ada apa-apanya dipandang dari kacamata sekarang, namun sangat boleh jadi merupakan hal yang istimewa di kala itu. Agar pemahaman kita menjadi lebih lengkap, kita harus langsung membaca karya-karya sastra yang pernah terbit di masa penjajahan itu. Dalam kaitan ini yang lebih banyak dipakai sebagai contoh adalah karya yang berupa puisi mengingat bahwa ekspresi akan kehendak untuk menjadi bangsa merdeka atau terbebas dari belenggu penjajahan, banyak muncul dalam ragam sastra ini.

Puisi pertama yang dimanfaatkan sebagai contoh adalah karya Djoemantan yang diterbitkan dalam *Poetri Hindia*, pada tahun 1909. Dalam puisi ini dengan mudah dapat kita rasakan adanya pemahaman akan makna “kemajuan” dengan menampilkan kontras antara “kaum kuno” dengan “kaum muda” yang identik dengan pikiran maju. Hal “kemajuan” ini, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru sebab jika kita ingat lagi majalah *Insulinde* seperti telah dijelaskan di depan, sedari awal sudah menyadarkan pembaca akan pentingnya pikiran yang maju, yang mampu mengatasi dinamika zaman. Sayang sekali, sampai saat ini belum diperoleh adanya sajak atau karya lain yang dimuat *Insulinde* yang menggambarkan suatu kehendak untuk maju itu.

Yang juga menarik dari puisi Djoemantan adalah adanya persoalan yang ditinjau dari dimensi kesetaraan gender, yang ternyata sudah diperdengarkan sejak lama, yaitu suara untuk mengedepankan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan di masa ketika laki-laki sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, hingga sekarang, tidak dapat dilacak, siapakah sesungguhnya Djoemantan itu. Adakah ia nama asli atau samaran? Atau, mungkinkah ia seorang wanita? Jika Djoemantan adalah seorang wanita, perlu kiranya ada penelitian lanjutan berkenaan dengan keberadaan wanita pengarang dalam perjalanan sastra modern di Indonesia mengingat bahwa sejauh ini, wanita

pengarang yang dianggap awal menuliskan idenya melalui karya sastra adalah Selasih,²¹ yang menghasilkan karya pada tahun 1930-an.

Agar pemahaman kita mengenai hal-hal yang telah disinggung tersebut menjadi konkret, puisi karya Djoemantan yang secara tersirat dapat dikatakan mempunyai tujuan yang jelas dalam menanggapi situasi zaman di masa itu, sangat layak disimak. Berikut adalah cuplikan puisi karyanya yang berjudul “Seruan yang Singkat”.

Seruan yang Singkat²²

...

Ya inilah sekarang zaman kemajuan
masanya bergerak pihak perempuan;
maju ke medan pengetahuan,
hilangkan segala adat kekunoan.

Asyiklah sekarang orang berkata,
hulu dan hilir semuanya rata;
zaman berubah sekarang nyata,
kaum kuno lenyap di mata.

Marilah saudaraku muda yang syahda,
tuntut pengetahuan jangan tiada;
laki-laki perempuan tiada berbeda,
di Taman ini bergurau senda.

...

Nyatalah di pikir di dalam hati
serta ditimbang diperamat;
kaum kuno hilanglah pasti,
kaum muda pasti berganti.

...

Jika isi dari beberapa bait puisi ini dikaitkan dengan situasi zaman pada masa awal abad ke-20 itu, dapat dikatakan bahwa puisi ini menjadi semacam penegas atau penggaris bawah akan semangat zaman yang ada, yaitu adanya kesadaran akan suatu kemajuan. “Kemajuan” di sini, seperti juga yang melandasi penerbitan *Insulinde*, bukan hanya impian di siang bolong melainkan telah menjadi gambaran umum akan kehendak umumnya orang-orang terdidik di masa itu untuk turut berkiprah dan menentukan sendiri perjalanan hidup mereka. Untuk

mencapai kemajuan tersebut, syarat yang diperlukan adalah menghilangkan kekunoan, yang tentu maksudnya adalah 'hal-hal lama yang membelenggu'.

Akan tetapi yang cukup istimewa dari sajak ini, dan oleh karena itu pantas untuk dicatat, adalah adanya "seruan"—seperti tersurat dalam judul—bagi kaum wanita untuk turut menimba ilmu dan memperkaya diri dengan pengetahuan. Tema yang berupa ajakan atau seruan ini dapat dikatakan jelas dan cukup istimewa untuk zamannya mengingat bahwa kesetaraan gender sudah memasuki ruang kesadaran sejumlah orang—sekurang-kurangnya adalah si penulis puisi—pada zaman itu.

Memang bukan hanya Djoemantan seorang yang mempunyai gagasan untuk menyinggung posisi wanita dalam kehidupan; pejuang yang juga aktif dalam dunia intelektual, bernama Sutomo, pun telah menempatkan wanita dalam kesetaraannya dengan pria. Sajaknya yang berjudul "Teringat Tanah Air"²³ secara tersurat telah memperlakukan wanita secara sejajar dengan pria, dan secara tersirat diajak serta untuk turut ambil bagian dalam menjaga tanah air. Sutomo yang adalah "Dr. Sutomo" yang ikut mendirikan Budi Utomo, adalah penulis sajak ini yang besar kemungkinan menuliskan sajak ini sepulangnya kembali dari menempuh pendidikan di Amsterdam.

Latar belakang pendidikan tinggi dan keterlibatannya yang intensif dalam olah nalar secara formal di dunia akademis serta pergerakan itulah yang agaknya telah menggerakkannya untuk mempunyai sikap yang intelektualistis dan mendahului zamannya. Pikiran-pikiran yang dipergunakan untuk menanggapi perkembangan zaman, yang dapat berupa renungan atau refleksi atas keadaan, tersirat dalam sajak berikut. Kandungan dari sajak ini juga dapat dikatakan sebagai sudah moderen dibandingkan dengan alam pikiran yang biasanya ada pada zaman itu yang lebih banyak berkutat pada kecenderungan pengagungan masa silam atau puja-puji terhadap kegemilangan yang pernah ada. Sajak karya Sutomo tersebut adalah sebagai berikut.

Teringat Tanah Air

Nyanyian, suara pencari yang Nyata
Mengetuk pintu alam yang baka,
Tetapi, ... tetapi,
Jangan lalui kemasyhuran dan kemewahan,
Hiduplah di hadapan Tuhan dan kemanusiaan.

Kebaikan dan kejahatan,
 Yang timbul dari napsu durhaka,
 Kebaikan serupa itu, jahat.
 Kejahatan selalu jahat,
 Kesucian yang di dalam hati,
 Hamburkan di segenap sanubari.

Wahai, anak kita, putri putra
 Putra ibu Pertiwi Ayah Akasa,
 Berbuat dan siarkan kemauan Tuhan,
 Jadikan dia sinar negeri kita,
 Jadilah mata air sinar dunia.

Persoalan pria-wanita atau kesetaraan gender memang adalah hal yang tak boleh diabaikan atau dikesampingkan, namun persoalan penjajahan adalah hal yang lebih penting lagi untuk diekspresikan. Tentu, pengertian “penjajah” di sini bukan dalam kaitan dengan rasa hormat atau pemujaan terhadap praktik penjajahan melainkan pada kenyataan yang telah melecehkan bangsa lain. Di masa ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau masih di bawah kolonialisme Belanda, jelas tidak mudah bagi intelektual pribumi untuk menyuarakan perlawanan atau rasa anti kepada pihak penjajah. Sebab, jika ada perlawanan dalam bentuk apa pun pasti akan langsung ditindas sebab hal itu tentu langsung akan dianggap sebagai telah merongrong kewibawaan penjajah. Oleh kenyataan yang seperti ini maka banyak cara atau siasat yang harus dilakukan, termasuk dengan menyamarkan identitas penjajah dengan nama lain. Kalau hal ini tidak dilakukan, nasib penulis yang berani menyuarakan ketidaksubaan atau penentangan terhadap praktik kolonialisme itu akan mengalami penangkapan atau penahanan—yang sangat mungkin dan boleh jadi berkali-kali—seperti dialami oleh Mas Marco Kartodikromo.²⁴

Dalam salah sebuah sajaknya yang dimuat di *Sinar Hindia* pada tanggal 23 Desember 1918, Mas Marco memakai kata “kafir” yang sangat mungkin memang ditujukan kepada pihak penjajah, dan celaknya kata ini dibaca oleh oknum dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga akibatnya Mas Marco harus menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Asisten Residen Polisi Semarang.²⁵ Dalam menjawab penyelidikan oleh pihak kolonial itu, Mas Marco mengaku bahwa ada salah penulisan; yang seharusnya “fakir” telah salah ditulis sebagai “kafir”. Akan tetapi, kalau sajaknya dibaca dengan lebih seksama, secara

tersirat Mas Marco agaknya telah memanfaatkan metafora pula, yang memang mengacu kepada pihak penjajah, yang artinya bahwa kata “fakir” yang dipakai sebagai pembelaannya adalah suatu pembelaan diri yang penuh siasat sebab agaknya penulisan “kafir” itu adalah suatu kesengajaan; bukan karena adanya salah ketik.

Potongan sajak Mas Marco yang memuat kata “kafir” tersebut dengan sejumlah metafora yang “mengarah” kepada suatu pemaknaan yang lebih dari sekadar yang tersurat dari kata-kata yang dipakai, dapat dibaca di bawah ini.

Bajak Laut

...

Si bajak laut menjadi gemuk
Uangnya banyak bertumpuk-tumpuk
Hasilnya banyak tinggal menggaruk
Saban hari musti main mabuk

Apa kabar orang bumi situ?
Banyak yang menguli mikul batu
Badannya rusak hatinya pilu
Pikiran bingung menjadi denggu

Sehari-hari bertambah-tambah
Bangsa bajak yang datang mitnah
Di tanah itu yang amat murah
Mencari makan tak dengan susah

Jangan tanya lagi orang bumi
Bertambah susah mencari nasi
Sebab tanahnya yang keluar padi
Banyak yang sama dijual

Untung sekali si bajak laut
Pinter menipu bisa memikul
Supaya dia suka menurut
Perintahnya yang tiada patut

Si Bajak laut semangkin kuat
Penjagaannya pun sudah rapat
Bertambah pinter pat-pat gulipat
Sampai mereka itu bersambat

Dia sambat-sambat minta makan
Kerna dia sudah kelaparan
Dan dihinakan seperti hewan
Oleh bangsa orang pemabukan

Bajak laut tak mempedulikan
Sambatnya orang yang kelaparan
Si bajak selalu meneruskan
Menghisap mereka sampai pingsan

Maka hal ini harus dipikir
Akan gunanya mengubah takdir
Supaya kita bisa mengusir
Manusia bangsa orang kafir

Dari sajak ini, sesungguhnya bukan hanya kata “kafir” saja yang sesungguhnya menimbulkan masalah. Frase “bajak laut” yang dipakai sebagai judul sajak ini pun sudah mengarahkan pemahaman pembaca kepada suatu sosok yang sangat culas dan tamak serta hanya menang sendiri. Sementara “orang bumi” yang tentu adalah ‘penduduk setempat’ atau “pribumi” mengalami nasib yang sangat menyedihkan sebab meskipun telah bersusah payah menghasilkan panen namun kesemuanya dirampas dengan kejam oleh Bajak Laut. Kemelaratan, kemiskinan, atau penderitaan yang diakibatkan oleh tiadanya hasil panen yang dapat dimakan, tidak dipedulikan oleh para penjajah yang “saban hari musti main mabuk” sebab mereka “mencari makan tak dengan susah”, tapi semua itu karena mereka “pinter menipu”.

Dari sajaknya ini saja, tampak jelas bahwa Mas Marco ingin meniupkan kesadaran kepada sesamanya yang adalah orang-orang jajahan dan tertindas, bahwa mereka selama ini telah dibuat bodoh dan dieksploitasi. Akan tetapi, karena ada kata-kata “kafir” di ujung salah sebuag bait puisinya, Mas Marco harus menghadapi interrogasi seperti telah disebutkan.

Apabila Mas Marco terkesan berani langsung berhadapan dengan pihak kolonial, penulis yang lain sangat mungkin juga mempunyai keberanian yang sama, namun berbeda dalam cara menyampaikan atau mengekspresikannya. Atau sangat mungkin juga, bukan pihak kolonial atau penjajah yang langsung menjadi sasaran tembak, melainkan pada kehendak untuk mempunyai tanah air sendiri

yang terbebas dari penjajahan, baik oleh penjajah dari luar maupun penjajah yang dianggap sebagai satu bangsa pada waktu itu. Dari sejumlah sajak yang mengungkapkan mengenai “tanah air”, konsep atau pemahaman mengenai entitas ini tidak semuanya sama dengan konsep tanah air sebagaimana kita pahami sekarang, baik secara ideologis maupun geografis. Pesastra yang bernama Sanoesi Pane, misalnya, membayangkan “tanah air” itu sebatas meliputi atau berkenaan dengan “nasib” Pulau Sumatra yang adalah asal dari dirinya, seperti tampak pada sajaknya yang diterakan berikut ini.

Tanah Airku²⁶

Laksana mahkota intan permata,
Kujunjung tinggi, muda juwita;
Emas kencana permainan kata,
Kujunjung tinggi tandanya cinta.

Biar dicencang sampai mati,
Tiada ‘kan musnah cinta di hati;
Biarpun uang beribu keti,
Tiada kan kujual perasaan di hati.

Pulau Perca, Pula Andalas,
Hatiku selamanya suci dan ikhlas;
Menolong engkau tiadalah malas,
Senantiasa hari tiadalah tewas.

Walau di pasir, ditanami sari
Di kebun bunga, hutan baiduri;
Wajahmu di hati berseri-seri,
Kuingat-ingati setiap hari.

Ayuhai Sumatera permata ratna,
Meninggalkan engkau badanku lena;
Rasakan hati sudahlah fana,
Sakitnya tak dapat dituliskan pena.

Apa yang telah disuratkan oleh Sanoesi Pane dalam karyanya, yang membayangkan “tanah air”-nya hanya sebatas Sumatra, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sastrawan lain, semisal oleh Muhammad Yamin, yang dalam sajaknya tidak lagi sekadar berkutat atau berkenaan dengan semata-mata hanya Sumatra. Penyebabnya

barangkali pada dinamika zaman kala itu yang secara cepat mengalami suatu pergerakan pemahaman akan konsep “tanah air” yang tentu saja bermuara pada wawasan serta gagasan yang melandasi atau yang berkembang pada masing-masing orang. Konsepsi kenasionalan yang bertumpu dari pemahaman akan “tanah air” bagaimanapun adalah konsepsi yang abstrak yang—tidak seperti sekarang—semuanya bertolak dari sebuah rekonstruksi meraba-raba yang tentu saja berbeda-beda pada setiap orang. Kebelumjelasan akan wilayah “indonesia” misalnya, sangat mendampingi pemahaman mereka akan apa yang disebut dengan “tanah air” itu.

Kembali kepada pemahaman Sanoesi Pane mengenai “tanah air” ini, pada dasarnya cukup dapat dipahami sebab ia mengemukakan gagasannya itu jauh sebelum ada peristiwa Kongres Pemuda. Seperti sudah diungkapkan, sajak Sanoesi Pane ditulis pada tahun 1921 sedangkan sajak Muhammad Yamin ditulis dua hari menjelang peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928, yang secara nalar tentu dapat dimengerti adanya pemahaman dan penghayatan yang berbeda akan identitas “tanah air” itu. Bahwa tahun 1921, tahun ketika Sanoesi Pane melahirkan sajak tersebut hanya beberapa tahun dari tahun 1928, hal itu tidak dapat disangkal. Namun bahwa pergerakan dan perubahan pemahaman di masa ketika Indonesia belum terbentuk dan masih di bawah kolonialisme, juga merupakan faktor yang harus dipergunakan untuk memahami suatu entitas besar yang bernama Indonesia. Sekaitan dengan pemahaman akan dimensi wilayah dalam tautannya dengan kenasionalan ini, silakan simak sajak Muhammad Yamin yang dikutip secara lengkap berikut ini.

Indonesia, Tumpah Darahku²⁷

Bersatu kita teguh
Bercerai kita jatuh

Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir berderai,
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung gemunung bagus rupanya,
Dilingkar air mulia tampaknya:
Tumpah darahku Indonesia namanya.

Lihatlah kelapa melambai-lambai
Berdesir bunyinya sesayup sampai
Tumbuh di pantai bercerai berai
Memagar daratan aman kelihatan;
Dengarlah ombak datang berlagu
Mengejari bumi ayah dan ibu,
Indonesia namanya, tanah airku.

Tanahku bercerai seberang menyeberang
Merapung di air malam dan siang
Sebagai telaga dihiasi kiambang,
Sejak malam di hari kelam
Sampai purnama terang benderang;
Di sanalah bangsaku gerangan menompang
Selama berteduh di 'alam nan lapang.

Tumpah darah nusa India
Dalam hatiku selalu mulia
Dijunjung tinggi atas kepala
Semenjak diri lahir ke bumi
Sampai bercerai badan dan nyawa
Karena kita sedarah sebangsa
Bertanah air di Indonesia

Bangsa Indonesia bagiku mulia
Terjunjung tinggi pagi dan senja,
Sejak syamsiar di langit nirmala
Sampaikan malam di hari kelam
Penuh berbintang cahaya bulan;
Mengapalah mulia, handai dan taulan,
Badan dan nyawa a pancarkan.

Selama matari di alam beredar
Bulan dan bintang di langit berkisar
Kepada bangsaku berani berikrar;
Selama awan putih gemawan
Memayungi telaga ombak-ombakan,
Sela itu bangsaku muliawan
Kepada jiwanya kami setiawan.

Ke Indonesia kami setia
 Di manakah ia di hatiku lupa,
 Jikalau darah di badan dan muka
 Berasal gerangan di tanah awal;
 Sekiranya selasih batang kemboja
 Banyak kulihat ditentang mata
 Menutupi ayah dan bunda?

Di batasan lautan penuh gelombang,
 Mendekati pantai buih berjuang,
 Terberai tanahku gewang-gemewang,
 Sebagai intan jatuh terberai
 Dilingkari kerambil lambai melambai
 Menyanyikan lagu nan indah permai
 Di sela ombak memecah ke pantai.

Duduk di pantai tanah yang permai
 Tempat gelombang pecah berderai
 Berbuih putih di pasar berderai
 Tampaklah pula di lautan hijau
 Gunung gemunung bagus rupanya,
 Dilingkari air mulia tampaknya;
 Tumpah darahku Indonesia namanya.

Memandang 'alam demikian indahnya
 Ditutupi langit dengan awannya
 Berbilaikan buih putih rupanya,
 Rindulah badan ingin dan rewana,
 Terkenangkan negeri dengan bangsanya
 Berumah tangga selama-lamanya
 Penuh peruntungan berbagai sejarahnya

Pasundan, 26 Oktober 1928

Dari sajak ini sudah sangat terasa kuat adanya pemahaman mengenai “tanah air” yang sudah seperti pemahaman umumnya kita pada masa sekarang, yang artinya, apa yang pernah dipikirkan atau dibayangkan oleh Muhammad Yamin ini merupakan suatu gambaran pemikiran yang dapat dikatakan sebagai telah mampu melampaui masa atau zamannya. Inilah kelebihan para sastrawan kita di masa itu, yang

dengan penanya secara tidak langsung mampu melakukan semacam prediksi akan “nasib” bangsa ini ketika peristiwa “proklamasi” pun masih jauh dari kenyataan. Sudah barang tentu, kemampuan yang bersifat prediktif ini bukan karena mereka adalah cenayang melainkan karena mereka adalah para cerdik pandai di masanya yang jumlahnya memang belum seberapa. Dengan pengertian lain, wawasan atau pengetahuan yang telah mereka peroleh yang telah menyebabkan mereka mempunyai kesadaran kenasionalan maupun kewilayahan yang sedemikian itu.

Sejumlah sajak lain sesungguhnya masih ada yang secara langsung maupun tidak menggambarkan adanya kesadaran kenasionalan yang seperti ini, namun kali ini tidak akan dibicarakan. Sementara itu pada prosa, tidak terlalu mudah untuk melacak jejak sikap kenasionalan yang selangsiung atau sejelas pada sajak atau puisi ini, mengingat bahwa di dalam prosa, aspek cerita atau kisah lebih mendominasi daripada aspek “suara” sang pengarang. Namun demikian, tidak berarti pula bahwa tidak ada suara kenasionalan yang terrefleksi dalam prosa, hanya kali ini hal itu belum dibicarakan. Sementara itu pada drama, dapat disebutkan bahwa *Bebasari* karya Roestam Effendi sesungguhnya juga membicarakan permasalahan keindonesiaan atau kenasionalan, namun dikemas dengan perlambang atau simbol yang cukup tersamarkan. Meskipun begitu, judul “bebasari” sesungguhnya sudah menuntun pemahaman kita akan adanya kehendak untuk menuju alam kebebasan atau keinginan untuk terbebas dari belenggu yang selama ini ada. Sebagai gambaran, berikut ini adalah cuplikan dari drama bersajak yang berjudul *Bebasari* tersebut.

Di dalam taman, sebelah di belakang kebun bunga, sebelah ke muka batu-batu dan pohon-pohon, yang besar-besar. Diterangi achtergrond dengan cahaya hijau. Voorground kelam; voetlight tiada dipasang. Seorang tua duduk bersela, bersidekap tangan, diam menunggu. Suara dari belakang meratap, orangnya tiada kelihatan.

BEBASARI: O Kanda, kekasih hatiku.
Sampai sungguh hati tuanku,
Membiarkan beta menahan rajam,
Tidak tertahan bagi badanku.
O Kakanda, kalbuku rindu,
Menangisi tilam setiap malam.

Di mana gerangan Kakanda sekarang,
Di mana Kakanda diragu orang,
Membiarkan beta berduka cita.
Lamalah sudah beta seorang,
Menantikan Rawana diusir orang,
Menantikan kakanda menggantikan tahta.

Aduhai kakanda pembela diri,
Dengarkan ratapan beta yang ngeri,
Harapan tak lain pada kakanda
Beta bak tidur di atas duri,
Inilah penyakit setiap hari,
O kakanda bilakah tuan membela adinda.

Tiada sakit sesakit ini, kakandaku,
Jikalau badan dalam terungku,
Tiada sedikit boleh berkata.
Apakah salahnya beta dahulu,
Maka selalu berduka kalbu,
Maka selalu mencucuri mata.

Setiap saat menaruh dendam,
Setiap detik menahan kasam,
Kepada Rawanan raja yang keji,
Raja lalim bangsa yang kejam,
O, ilahi Junjungan Alam,
Berilah bujang perebut Panji.

Wahai kakanda kekasih beta,
Mari lepaskan badan adinda,
Dari kungkungan nafsu yang ganas,
Tiada dapat beta derita.

RAWANA: (*Kasar dan terbahak*) Ha, ha, ha, mainan kakanda.

BEBASARI: O, bujangga, bila beta akan terlepas.

(*Hening kembali.* ORANG TUA,
ALZAMANUR, *bergerak dari duduknya menunggu.*)

ALZAMANUR: (*Perlahan*) Kudengar angin menderu,
Kulihat dahan melambai,
Kudengar ombak mengadu,

Kulihat air bersorai,
Kurasa bumi menggegap,
Kupandang bunga berbisik,
Kupandang tanah meratap,
Kupandang awa berbisik.

Inilah tanda kan sampai,
Bujangga dalam berjalan,
Inilah makna yang permai,
Inilah janji zaman,
Inilah tandanya dekat,
Tetapan nujum dahulu,
Inilah satu alamat,
Bujangga merebut judu.

Berderak dahan berkata,
Menderum laut berseru,
Menggigir tanah meminta
Melulung angin menyeru,
Terjingap pelang yang merah,
Terbayang zaman yang datang,
Terbentang panji berdarah,
Kedatang bujang menyerang.

Kesampai Bujang di sini,
Keramai perang di bumi,
Kebebas adinda Sari
Kealah raja Pencuri.
Kesenang bangsa berkota,
Lah sampai orang bertkhta.

*(Terdengar suara dari belakang, suara
Bangsawan BUJANGGA)*

BUJANGGA: Adinda sedang di mana?
Kembalikan Lela O, Rawana
(Bangsawan BUJANGGA datang, berdiri
sebelah di tooneel)

BUJANGGA: Inilah tempat Raja Rawana
Menawan Lela dalam penjara.
Di mana tuan Cinta Kencana
Mengeluh sebab dera angkara
O, Bebasari jantung hatiku.

ALZAMANUR: Siapa tuan yang datang itu?

BUJANGGA: Beta Bujangga anak piatu,
Tidak bertanah tidak beribu²⁸

Seperti “bajak laut” yang dipergunakan oleh Mas Marco Kartodiromo untuk menggambarkan perangai atau perilaku penjajah, dalam drama ini ditampilkan tokoh Rawana yang secara umum dipahami sebagai sosok atau tokoh yang sangat kurang ajar atau tidak baik. Citra Rawana adalah citra yang sangat negatif yang dalam kaitan ini identik dengan citra penjajah atau kolonialis. Sedangkan yang diharapkan oleh Bebasari tentu adalah tokoh seperti Rama yang mampu memberantas keangkaramurkaan dan mampu membebaskan siapa saja dari penindasan. Inilah gambaran kenasionalan yang terwujud dalam karya sastra berbentuk drama yang dikemas dengan simbolisme yang memang tidak secara mudah langsung dapat ditangkap maknanya. Drama yang lain tentu ada pula yang menampilkan tema seperti ini namun dapat dinyatakan di sini sebagai sangat sedikit jumlahnya, terlebih jika dibandingkan dengan karya sastra yang berbentuk puisi. Hal ini tidak mengherankan sebab puisi, ditilik dari segi bentuk dan isi, memang lebih memungkinkan membawa suara-suara pemberontakan, kritik sosial, atau hal-hal yang senada dengan itu, dibandingkan dengan prosa atau drama.

4.4. Polemik Kebudayaan

4.4.1 Polemik sebagai Representasi Dialektika Pemikiran

Dalam konteks atau kaitan dengan kegairahan “menjadi” suatu bangsa, utamanya hal ini dipicu salah satunya oleh semacam euforia dari peristiwa yang sangat bersejarah, yakni Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang melahirkan “Sumpah Pemuda”, merupakan hal yang sangat wajar apabila penentuan akan kedirian atau identitas kemudian mewujud menjadi semacam orientasi atau obsesi bagi sebagian orang, khususnya adalah mereka yang dengan sangat sadar perlu turut memikirkan persoalan ini. Sudah barang tentu, dari sekian banyak pemikiran yang sangat mungkin ada dan barangkali saja juga sering diperdebatkan, yang pada gilirannya dikenal luas dan menjadi ramai sebagai polemik, adalah pikiran-pikiran yang dinyatakan atau

dipublikasikan. Dengan memanfaatkan surat kabar atau majalah sebagai media yang terbit pada pertengahan tahun 1930-an, pikiran-pikiran itu secara nyata telah mampu mengajak siapa saja—khususnya para pembaca—untuk sama-sama memasuki wilayah dialektika yang bersifat intelektualistis. Lontaran-lontaran pikiran Sutan Takdir Alisjahbana yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah seniman dan pemikir terkemuka di masa itu seperti Sanoesi Pane, Poerbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hadjar Dewantoro, telah menunjukkan kepada kita akan kualitas perdebatan mereka yang sepertinya tidak lekang oleh waktu. Sampai kini pun, setelah lebih dari tiga perempat abad berlalu, perdebatan mereka masih terasa gaung dan maknanya, dan senantiasa tetap memberi inspirasi serta menyediakan ruang untuk berkaca dan mengintrospeksi diri, istimewanya dalam permasalahan identitas dan rasa berbangsa.

Perdebatan atau polemik di antara mereka, yang sesungguhnya berupa polemik antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan para tokoh yang lain itu, dapat dikatakan sebagai fenomenal karena dimensi lintas-zamannya. Beruntunglah generasi sekarang karena masih dapat menyimak perdebatan itu dan rasa terima kasih pantas diberikan kepada Achdiat K. Mihadja yang telah menghimpun perdebatan itu ke dalam buku “Polemik Kebudayaan”. Namun dalam perjalanan sejarah kebudayaan bangsa ini, sesungguhnya bukan hanya perdebatan ini saja yang pernah terjadi, sebab memang ada beberapa peristiwa serupa, hanya secara cakupan permasalahan dan publikasinya tidak seintensif polemik di tahun 1930-an tersebut. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1960-an, sempat terjadi perdebatan atas metode analisis sastra yang dikenal dengan “Aliran Rawamangun” yang kemudian melahirkan buku *Kritik Atas Kritik Atas Kritik* (1975) atau *Pengadilan Puisi* yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1974.

Perdebatan yang kemudian sangat dikenal dengan “Polemik Kebudayaan” inilah yang hingga kini masih tetap relevan sebab inti perdebatannya adalah permasalahan yang penting dan mendasar, yaitu mengenai identitas sebagai bangsa atau dalam hal ini adalah “keindonesiaan”. Dari perdebatan yang terjadi, yang sangat menarik, adalah pada wujud perdebatan tersebut ketika Indonesia masih di bawah Pemerintah Hindia Belanda, yang bahkan dari sudut pandang sekarang pun, jalannya perdebatan itu dapat dinyatakan sebagai sudah sangat bertanggung jawab. Dapat dikatakan sebagai “bertanggung jawab” mengingat bahwa perdebatan yang terjadi bukan sekadar

perdebatan tanpa dasar melainkan perdebatan yang jelas landasan logika atau nalarnya. Oleh kenyataan seperti ini, tidak salah kiranya jika apa yang telah ditunjukkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan “kawan-lawannya” itu dapat disebut sebagai representasi dari suatu dialektika pemikiran, yang dalam hal ini adalah pemikiran mengenai nasib atau kondisi bangsa yang tengah “menjadi” serta mengenai Indonesia di masa hadapan, yang sudah memperlihatkan taraf kedewasaan dan kematangan dalam bertukar pendapat.

Akan tetapi, ada prakondisi atau pemicu lain yang sesungguhnya tidak boleh diabaikan berkenaan dengan kelantangan polemik ini, yaitu suatu pidato pembelaan yang pernah disusun dan dibacakan oleh Mohammad Hatta di depan Mahkamah Belanda di Den Haag pada tanggal 8 Maret 1928, yang diberi judul “Indonesia Vrij” atau dalam bahasa Indonesia adalah “Indonesia Merdeka”. Bukan hanya karena pada tahun 1928 itu Hatta sudah berani menyatakan ihwal “kemerdekaan” Indonesia, melainkan suaranya yang lantang-menentang kolonialisme di hadapan para penegak hukum di pusat kolonialisme atas Indonesia, yaitu di Belanda. Hatta yang pada waktu itu baru berumur 26 tahun dengan tegas pernah menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia, misalnya, tinggal menunggu waktu dan semuanya itu adalah hasil perjuangan pemuda-pemuda Indonesia sendiri. Perhatikan pernyataan Hatta yang sedemikian bertenaga dan jelas arahnya.

Kami percaya kepada masa depan rakyat kami dan kami menaruh kepercayaan pada kekuatan batinnya. Kami tahu bahwa perimbangan kekuasaan di Indonesia selalu berubah bagi keuntungan kami. Pemuda ialah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia yang menderita dan yang berharap. Rakyat adalah hati nuraninya yang berbicara, rohnya yang menyala-nyala yang merobek masa depan. Cahaya merah masa depan sudah mulai bersinar dalam kekinian. Kami menyambutnya sebagai fajar yang menyingsing. Pemuda Indonesia harus ikut mengemudikan dalam jurusan yang dikehendaki. Pemuda mempunyai tugas mempercepat tibanya hari baru. Dia harus mengajarkan kepada rakyat kami kegembiraan kehidupan; tidak hanya kesengsaraan boleh menjadi bagiannya. Bahwa bangsa Indonesia boleh merasa diri bebas di bawah langit birunya dan bahwa dia merasa tuan

dan merdeka dalam negerinya yang diberikan oleh Tuhan.²⁹

Keberanian, kelantangan, serta kecerdasan yang tercermin dari pidato pembelaan Hatta seperti contohnya terlihat dari cuplikan di atas,³⁰ tampaknya telah pula memberi inspirasi bagi para pemuda di Indonesia untuk juga menyuarakan pendapat mereka mengenai nasib bangsa Indonesia dan Indonesia itu sendiri secara lebih berani. Dan “Polemik Kebudayaan” sangat mungkin adalah efek atau “akibat” dari nada pidato Hatta yang telah menunjukkan suatu keterampilan berdialektika.

4.4.2 Polemik Mengenai Indonesia dan Keindonesiaan

Satu hal yang mampu menyebabkan perdebatan di antara para tokoh tersebut tetap terasa selalu aktual, relevan, dan penting, adalah karena apa yang diperdebatkan menyangkut persoalan yang amat mendasar, yaitu mengenai jati diri atau identitas sebagai sebuah bangsa, serta orientasi yang sepatutnya dituju. Dalam kaitan dengan identitas sebagai bangsa “Indonesia”, Sutan Takdir Alisjahbana melontarkan pikiran-pikiran tajamnya yang memang bagi siapa saja, kiranya, akan terpicu untuk memberikan tanggapan atau pandangan yang berseberangan, terlepas dari benar atau tidaknya. Mengenai identitas “Indonesia” yang pada tahun-tahun itu masih merupakan suatu impian atau baru sebatas “bayang-bayang” belaka, Sutan Takdir Alisjahbana pernah mengemukakan gagasan yang dapat dinyatakan di sini sebagai telah melampaui umumnya kesadaran kolektif bangsa Indonesia di masa itu.

Apa yang dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana sangat esensial dan mendasar sebagai pondasi bagi suatu kesadaran eksistensialistik yang sangat diperlukan. Berikut ini adalah pandangan kritisnya yang berkenaan dengan permasalahan “Indonesia” dan “keindonesiaan” yang dalam tulisan Sutan Takdir Alisjahbana ini langsung terdapat di awal tulisannya—sebuah awal yang sudah langsung mampu menarik perhatian dan mengundang perdebatan karena dengan terang benderang mampu menegaskan atau menggarisbawahi akan telah kacaunya pemahaman mengenai “Indonesia”.

Berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan baru, yang dimaksud tentu adalah masyarakat dan kebudayaan Indonesia Raya, yakni masyarakat dan

kebudayaan yang tergambar dalam hati semua penduduk kepulauan ini, terutama yang mengharapkan tempat yang layak bagi negeri dan bangsanya, berdampingan dengan bangsa lain di muka bumi ini. Untuk membicarakan masyarakat dan kebudayaan Indonesia Raya, pertama sekali kita harus memahami arti Indonesia sejelas-jelasnya, terlepas dari segala bungkus dan tambahan yang mengaburkannya.

Sesungguhnya, arti kata “Indonesia” sekarang ini sudah sangat kacau. Menurut para ahli bangsa, kata “Indonesia” dipakai untuk melingkupi seluruh penduduk di daerah yang membentang dari Pulau Formosa sampai ke Pantai Samudra Hindia, dari Madagaskar sampai ke Nieuw Guinea. Dalam pergaulan sehari-hari di negeri kita kata itu telah sangat populer.

Bagaimanapun menggembirakannya kepopuleran—menjadi lazimnya—kata “Indonesia” itu, tetapi satu hal tidak boleh kita lupakan: lantaran kepopuleran atau kelaziman itu artinya menjadi amat meluas sehingga menjadi kabur.

Segala yang ada dan yang terjadi, segala yang pernah ada dan pernah terjadi di lingkungan kepulauan kita ini, diberi nama “Indonesia”.³¹

Melalui kutipan di atas, jelas bahwa ada kekhawatiran pada diri Sutan Takdir Alisjahbana akan telah disederhanakannya makna “Indonesia” oleh orang Indonesia sendiri di masa itu. Gugatan pun ia lontarkan dengan menyatakan bahwa telah terjadi ketidaktepatan ketika tokoh-tokoh yang hidup di masa lalu, seperti Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro, Gajah Mada, dan yang lainnya, dianggap sebagai telah berjuang untuk Indonesia. Dalam pandangannya, para tokoh itu belum tentu berjuang untuk Indonesia sebagaimana Indonesia yang dicita-citakan maupun yang kita pahami sekarang ini. Ia menegaskan bahwa Diponegoro misalnya, memang telah menunjukkan perjuangannya, tetapi hanya untuk Tanah Jawa, dan bukan untuk Jawa secara keseluruhan. Demikian pula dengan Tuanku Imam Bonjol, menurutnya, berjuang hanya untuk Minangkabau dan Teuku Umar hanya untuk Aceh. Baginya, tidak ada fakta atau indikator yang menjamin bahwa masing-masing “pejuang” itu dapat bekerja sama dan tidak saling menyerang sebab jika ada kesempatan, mungkin saja mereka akan saling menginvasi atau menaklukkan.

Demikian pula dengan pembangunan Borobudur atau keindahan musik gamelan, menurut Sutan Takdir Alisjahbana, belum terbukti berkenaan atau merepresentasi ihwal keindonesiaan. Bahkan, ditulisnya, “buku *Hang Tuah* menurut ukuran sekarang jelas dapat dikatakan *anti-Indonesia*, sebab di dalamnya terdapat bagian-bagian yang menghina suku bangsa dalam wilayah kepulauan ini.” Dalam pandangannya lebih lanjut, disebutkan bahwa telah banyak orang yang secara gegabah mengaitkan setiap eksistensi atau peristiwa sebagai bersemangat keindonesiaan. Ke dalam pengertian “Indonesia” itu, menurutnya, “diam-diam orang memasukkan beberapa hal yang sama sekali tak ada kaitannya dengan *perasaan* keindonesiaan. Hal itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan”. Dalam pandangan atau penilaiannya, “pengertian Indonesia yang sejati telah kabur, menjadi cerai-berai”.

Tentu saja, dalam kaitan ini, orang menjadi penasaran dan ingin tahu, “keindonesiaan” atau Indonesia seperti apa yang dicita-citakan Sutan Takdir Alisjahbana, jika pengertian “Indonesia” atau “keindonesiaan” yang telah ada ia ragukan atau bahkan ia tolak. Menjawab kemungkinan adanya rasa kepenasaran seperti ini, ia menjawab dengan pernyataan bahwa “semangat keindonesiaan itu merupakan ciptaan generasi abad kedua puluh, sebagai penjelmaan kebangkitan jiwa dan tenaga”.

Semangat Indonesia itu sesuatu yang baru, menurut isi dan menurut bangunnya. Ia tidak bertopang pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kebesarannya dulu menguasai sebagian besar dari kepulauan ini, bukan *pelopor* keindonesiaan. Sebab waktu itu, suatu wilayah sama sekali tidak suka dikuasai oleh wilayah lain. Baik di dalam bangunan Sriwijaya maupun dalam bangunan Majapahit tidak ada sedikit pun hakikat semangat Indonesia, yaitu kemauan untuk bersatu yang didesak oleh kesadaran akan kepentingan dan cita-cita bersama.

Semangat Indonesia juga bukan berdasarkan asal bangsa atau ras yang satu, sebagaimana menurut hasil penelitian para ahli Barat. Meskipun penelitian di kemudian hari membuktikan bahwa yang mendiami kepulauan ini bukan hanya satu jenis bangsa, semangat Indonesia akan tetap hidup. Sebab ia lahir dari dasar *semangat membaja suatu generasi muda* yang lebih kukuh dari segala teori *keturunan*. Setinggi-tingginya teori keturunan

yang mati itu hanya dapat memberi kekuatan dan kepercayaan kepada mereka yang lemah, yang perlu dorongan dari belakang. Namun bagi mereka yang kuat tulang belakangnya, adalah mengatasi segala dorongan kemauan, cita-cita, dan keyakinan yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar di dalam hatinya.

Sangat perlu dinyatakan dengan tegas, bahwa sejarah Indonesia dimulai pada abad kedua puluh, ketika lahir generasi baru di wilayah Nusantara ini, yang dengan sadar ingin menempuh jalan baru untuk bangsa dan negerinya. Zaman sebelum itu, zaman hingga akhir abad kesembilan belas, ialah zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah keindonesiaan, yang hanya mengenal sejarah Hindia Belanda atau *Oost Indische Compagnie*, sejarah Mataram, sejarah Aceh, sejarah Banjarmasin, dan lain-lain.³²

Pendapat Sutan Takdir Alisjahbana yang sepertinya hendak menafikan dimensi kesejarahan pada bangsa ini atau memotong keterjalinannya dengan masa lalu, dapat diduga akan memperoleh tanggapan atau kritikan dari banyak pemikir atau pihak. Dan memang, tanggapan muncul, sehingga lahirlah apa yang dalam konteks ini disebut sebagai “Polemik Kebudayaan”. Namun sebelum menyimak tanggapan yang diberikan oleh beberapa tokoh kala itu, ada baiknya pula jika dipahami terlebih dahulu secara menyeluruh pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, khususnya dalam kaitan ini yang berkenaan dengan Indonesia atau keindonesiaan, yang ditegaskan sebagai bukan kelanjutan atau penerusan dari zaman sebelumnya. Pendapat Sutan Takdir Alisjahbana yang sedemikian itu terkutip di bawah ini.

Zaman pra-Indonesia, zaman jahiliyah Indonesia, itu setinggi-tingginya hanya dapat menegaskan pandangan dan pengertian tentang lahirnya zaman Indonesia. Namun, zaman Indonesia sama sekali bukan kelanjutan atau terusan dari zaman sebelumnya. Sebab dalam isi dan bentuknya, keduanya berbeda: Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru bukan kelanjutan Mataram, bukan kelanjutan kerajaan Banten, bukan kerajaan Minangkabau, atau Banjarmasin.

Menurut susunan pikiran ini, kebudayaan Indonesia pun tidak mungkin merupakan kelanjutan kebudayaan Jawa, kelanjutan kebudayaan Melayu, kelanjutan kebudayaan Sunda, atau kebudayaan yang lain.

Pekerjaan Indonesia Muda bukanlah merestorasi Borobudur dan Prambanan, bukan pula mendirikan bangunan lain yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang pertama dapat kita serahkan kepada para ahli purbakala, yang akan mencari batu yang telah dimakan zaman, yang akan membalik buku-buku tua untuk mengetahui bagaimana bentuk asli bangunan-bangunan itu. Sementara pekerjaan yang kedua ialah pekerjaan mereka yang kepandaiannya hanya mengulang dan meniru. Indonesia muda yang kuat degup jantungnya, yang darah mudanya deras mengalir, hanya akan membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran untuk segala hal yang diterimanya. Dengan jalan demikian, informasi dari seluruh dunia kemudian dicerna di dalam jiwanya.

Dan ia akan menciptakan sesuatu yang dimiliki sendiri, cap Indonesia.

Sebab dalam hati kecilnya ia yakin semakin yakinnya bahwa tinggi rendahnya vonis sejarah atas dirinya bukan bergantung pada berapa banyak puja-puji, menghormati, dan meniru yang lama. Namun, pada apa yang dapat dibangunnya, yang lahir dari dasar jiwanya sendiri, yang setara bahkan melebihi zaman lampau.³³

Pernyataan Sutan Takdir Alisjahbana mengenai “Cap Indonesia” yang mandiri dan tidak bertalian dengan zaman lampau, niscaya akan sulit diterima oleh banyak orang. Demikian pula dengan pengabaian atas upaya melestarikan peninggalan masa lalu yang banyak dianggap orang sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap warisan nenek-moyang, tak pelak akan menimbulkan suatu tanggapan, sebab pandangan yang sedemikian ini jelas berselisihan dengan keumuman pandangan, bukan hanya bagi masa itu namun sangat mungkin juga bagi masa kini. Akan tetapi, sebelum menampilkan tanggapan-tanggapan berkenaan dengan hal ini, ada baiknya pandangan Sutan Takdir Alisjahbana kita biarkan mengemuka dulu secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut ini lanjutan pandangannya.

Pada pikiran saya, pandu-pandu kebudayaan Indonesia harus *bebas* benar dari warisan kebudayaan zaman pra-Indonesia. Bebas bukan berarti *tidak tahu seluk-beluknya*; *bebas* hanya berarti *tidak terikat*. Sebab siapa pun yang belum dapat melepaskan dirinya dari kebudayaan Jawa akan berusaha memasukkan semangat kejawaan ke

dalam kebudayaan Indonesia. Yang belum terlepas dari kebudayaan Melayu akan berupaya memasukkan semangat kemelayuan ke dalam kebudayaan Indonesia dan demikian seterusnya. Bagi mereka yang berpikir demikian, kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan Jawa atau kebudayaan Melayu yang sedikit baru.

Hal itu berarti menimbulkan perselisihan dalam lingkungan Indonesia Muda sendiri. Suku Jawa tak akan senang jika yang disebut kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan Melayu yang diubah sedikit. Sebaliknya, suku yang lain pun tidak akan senang jika kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan Jawa yang diubah sedikit.

Sesungguhnya, mengaitkan ke masa yang sudah lampau berarti membangkitkan perselisihan. Sebab pada zaman pra-Indonesia bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini tak pernah mempunyai kemauan, cita-cita, dan pikiran bersatu dan berhubungan sehingga tak pernah melahirkan kebudayaan dengan semangat demikian.

Berarti kemauan bersatu yang mengandung semangat Indonesia tidak sedikit pun berurat akar ke masa yang silam, tetapi sebaliknya bertumpu ke masa yang akan datang dengan harapan agar mampu berdampingan sejajar bersama bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Dengan meyakini bahwa yang diharapkan dan dicita-citakan itu hanya mungkin tercapai dengan bersatu melakukan pekerjaan bersama-sama.³⁴

Mengenai pandangan Sutan Takdir Alisjahbana sebagaimana telah dikemukakan pada halaman-halaman di depan, baik mengenai permasalahan identitas Indonesia atau juga soal keindonesiaan, seperti dapat diduga, tentu menimbulkan tanggapan yang beragam. Dalam kaitan dengan tanggapan yang berupa komentar lisan atau berupa tanggapan melalui radio, jika ada, tidak dapat ditampilkan di sini, sebab selain pada masa itu teknologi komunikasi masih amat sederhana, penelusuran atas hal yang seperti itu sulit dilakukan saat ini. Yang dapat diperoleh dan dibaca tentu adalah tanggapan yang berupa tulisan dan sudah dipublikasikan.

Tanggapan pertama yang dapat dikemukakan di sini adalah pendapat Sanusi Pane melalui artikelnya yang berjudul "Persatuan

Indonesia” dan dimuat di *Suara Umum*, edisi 4 September 1935.³⁵ Dalam tulisannya ini, dalam kaitan dengan identitas Indonesia dan keindonesiaan, Sanusi Pane menyatakan ketidaksetujuannya apabila dikatakan bahwa keindonesiaan belum ada di masa lalu. Pada zaman dulu, yaitu zaman Majapahit, atau zaman ketika Pangeran Diponegoro hidup, maupun zamannya Teuku Umar, menurut Sanusi Pane, sudah ada yang namanya keindonesiaan itu sehingga ia menyatakan bahwa tesis Sutan Takdir Alisjahbana tidak benar. Menurutnya, “keindonesiaan pada waktu itu pun sudah ada, keindonesiaan dalam adat, dalam seni. Hanya bangsa Indonesia belum muncul, orang Indonesia belum sadar bahwa mereka sebangsa”. Lebih lanjut Sanusi Pane mengemukakan pendapatnya seperti berikut ini.

Sungguh boleh disebut ada imperialisme Sriwijaya, Majapahit, Mataram, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan keindonesiaan. Di Belanda pun ada pertentangan, ada hegemoni daerah (lebih) dulu, tetapi siapa dapat menyangkal bahwa kebangsaan Belanda yang sekarang pada waktu itu sudah ada dan hanya menanti pengakuan dan wujud?

Kebangsaan Indonesia sudah ada semenjak dahulu kala. Sekarang dirasakan dan diwujudkan.

Dengan demikian, nyata kesalahan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana dalam caranya mengemukakan masalah.

Sebaliknya, ia seharusnya berkata: Bagaimanakah kita harus memperbarui kebudayaan kita sehingga sesuai dengan perasaan kebangsaan sekarang?³⁶

Selain Sanusi Pane, tokoh lain yang memberi tanggapan adalah filolog Purbatjaraka melalui tulisannya yang berjudul “Sambungan Zaman”.³⁷ Tanggapan Purbatjaraka ringkas saja dan lebih menyoroti pada identitas Indonesia yang bagaimanapun merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Purbatjaraka menegaskan bahwa “kelanjutan itu ada, dan tidak boleh dihilangkan”. Bertolak dari kesadaran yang sedemikian ini Purbatjarakan menegaskan bahwa perjalanan sejarah harus senantiasa dianggap ada. Ini sebabnya, menurutnya, orang sesekali perlu menengok ke masa lalu untuk lebih memberi arti pada masa yang sedang dialami dan untuk menyiapkan masa yang akan datang.

Menurut perasaan saya, yang berguna buat tanah air dan bangsa kita ini ialah mengetahui jalannya sejarah dari dulu sampai sekarang. Dengan pengetahuan ini kita sekuat tenaga berusaha mengatur hari yang akan datang. Sebab hanya dengan pengetahuan inilah orang dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik buat tanah air dan bangsa kita kelak.

Adapun pendapat Tuan Sutan Takdir Alisjahbana bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak harus berakar pada zaman silam, tetapi pada zaman yang akan datang, itulah sepanjang pikiran saya, terbalik belaka. Ada juga yang menyebutnya *waringin sungsang*, yakni pohon yang akarnya tumbuh di tempat pupusnya mesti keluar. Namun, istilah ini biasanya dipakai orang di dunia mistik: di sana keadaannya memang serba terbalik dengan keadaan hidup di dunia.

Pendek kata: janganlah mabuk kebudayaan kuno, tetapi jangan mabuk kebaratan juga. Ketahuilah keduanya, pilihlah mana yang baik dari keduanya itu, supaya kita bisa memakainya dengan selamat di hari yang akan datang kelak. Inilah tugas berat untuk penganjur kita yang mau memperhatikan nasib bangsa kita, bangsa Indonesia kelak.³⁸

Atas tanggapan-tanggapan tersebut, Sutan Takdir Alisjahbana tidak hanya berdiam diri sebab tampaknya ia menengarai adanya kesalahmengertian terhadap pendapatnya yang mula-mula. Dalam koreksinya yang pertama, ia menjelaskan bahwa ia sadar penuh bahwa sejarah itu merupakan suatu yang berkelanjutan dan tidak berhenti. Tiap-tiap masa dalam sejarah, menurutnya, bersambungan dengan masa sebelumnya. Dinyatakannya bahwa “pembagian sejarah Nusantara ini dalam bagian pra-Indonesia dengan bagian Indonesia, bukan sekali-kali berarti bahwa zaman Indonesia itu tiba-tiba jatuh dari langit, tiba-tiba terjadi dari ketiadaan”.³⁹

Sedangkan mengenai “semangat Indonesia”, ia menjelaskan seperti di bawah ini.

Semangat Indonesia ialah kemauan yang timbul pada abad kedua puluh di kalangan rakyat yang berjuta-juta ini untuk bersatu. Dengan jalan demikian hendak berusaha bersama-sama menduduki tempat yang layak di

sisi bangsa-bangsa lain. Kemauan dan cita-cita yang dijunjung dengan kesadaran semacam ini tidak pernah terjadi di lingkungan kepulauan ini sebelum abad kedua puluh.

Kehendak bersatu dan cita-cita mulia bersama yang dijunjung dengan sadar inilah ciri khas zaman Indonesia abad kedua puluh. Zaman sebelum itu yang belum mempunyai kemauan dan cita-cita secara sadar saya sebut dengan nama pra-Indonesia.

Kemudian mengenai “keindonesiaan”, Sutan Takdir Alisjahbana juga secara langsung menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan pada diri Sanusi Pane. Bahkan menurutnya, Sanusi Pane tidak mengerti arti semangat keindonesiaan sehingga arti “Indonesia” itu dicampuradukkan begitu saja. Komentar Sutan Takdir Alisjahbana atas tanggapan Sanusi Pane adalah sebagai berikut.

Keindonesiaan yang dimaksud oleh Tuan Sanusi Pane yang ada pada zaman Majapahit, Diponegoro, dan Teungku Umar itu ialah keindonesiaan menurut ahli bangsa-bangsa. Keindonesiaan yang dimaksudnya itu adalah keindonesiaan yang tidak disadari, keindonesiaan yang terdapat juga di Filipina, Malaka, dan lain-lain.

Sedangkan keindonesiaan yang saya pisahkan dari pra-Indonesia itu ialah keindonesiaan yang disadari, yang lahir dalam abad kedua puluh ini. Keindonesiaan seperti yang saya maksud sampai sekarang belum terdapat di Malaka, dan lain-lain.⁴⁰

Sementara atas komentar Purbatjaraka, Sutan Takdir Alisjahbana juga memberikan tanggapannya, utamanya pada kata “kadang-kadang” yang dipakai untuk menyatakan bahwa Sutan Takdir Alisjahbana “kadang-kadang meniadakan, kadang-kadang mengakui adanya kelanjutan zaman silam dengan zaman sekarang”. Ditegaskannya bahwa pemakaian “kadang-kadang” menunjukkan sesuatu yang sesukanya atau semaunya saja padahal menurutnya yang ia pakai adalah “kadang-kala” dengan contoh “kadang-kala ada hubungan antara masa yang silam dengan masa yang sekarang, dan kadang-kala tidak”. Dan agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap atas tanggapannya tersebut, berikut ini adalah pernyataannya.

Dalam arti mutlak masa yang sekarang selalu berhubungan dengan masa yang silam. Sejarah berlanjut terus. Tidak ada satu kekosongan antara dua bagian sejarah, sebab hakikat sejarah ialah perjalanan waktu yang tak ada hentinya.

Namun, sejarah selalu dibagi-bagi orang menurut ciri khas yang terdapat dalam penggalan sejarah. Revolusi Prancis, misalnya, dianggap orang sebagai suatu batas dalam sejarah. Bentuk pemerintahan kuno telah tertutup, lenyap, tidak berlanjut lagi. Sejarah baru pun dimulai. Dalam arti ini pulalah saya berkata, bahwa zaman pra-Indonesia tidak berlanjut dengan zaman Indonesia. Zaman pra-Indonesia sudah tertutup dan sekarang mulai zaman Indonesia. Antara kedua zaman itu ada perbedaan yang satu mengandung semangat Indonesia yang insaf dan sadar, yang lain tidak. Dalam perbedaan ini pun saya menyadari bahwa perbedaan tentang kebudayaan dan sejarah bukanlah seperti perbedaan dalam matematika: lingkaran dengan segi tiga selalu jelas perbedaannya. Sebaliknya, zaman pra-Indonesia dengan zaman Indonesia ada bentuk peralihannya meskipun batas keduanya menjadi kabur.⁴¹

Demikian tanggapan Sutan Takdir Alisjahbana atas komentar Sanusi Pane dan Purbatjaraka berkenaan dengan masalah Indonesia dan keindonesiaan yang pada intinya bertolak dari suatu keyakinan bahwa persoalan kebudayaan jelas tidak sama dengan persoalan ilmu eksakta yang serba pasti.

4.4.3 Polemik Mengenai Orientasi Kebudayaan

Dalam hubungannya dengan kebudayaan apa atau mana yang pantas menjadi rujukan atau orientasi, Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara yang sudah terbukti maju, yang kedinamisannya sudah mampu membawa kemajuan bagi bangsa itu, yang layak menjadi acuan. Selain itu, masa yang telah silam yang tidak mungkin dapat dipakai sebagai landasan konstruksi untuk mewujudkan semacam persatuan, dalam pandangan Sutan Takdir Alisjahbana, harus ditinggalkan. Kebutuhan akan kehidupan yang ada di hadapan dan harus dihadapi dan dijalani yang seharusnya menjadi sumber pemikiran bersama. Kebersamaan yang diikat oleh suatu kepentingan inilah yang dibayangkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana akan mampu menginspirasi hadir atau lahirnya semacam alat yang dapat dipakai untuk menciptakan suatu masyarakat yang dinamis. Dalam kaitan ini, kedinamisan menjadi semacam kata kunci sebagai prasyarat

untuk maju dan kedinamisan itu bukan milik masa silam atau kepunyaan bangsa ini, melainkan adalah milik bangsa maju yang telah berkuasa di dunia seperti Eropa, Jepang, dan Amerika.

Oleh keyakinan yang sedemikian ini, dalam perjalanan untuk menjadi bangsa maju, Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa tidak-mungkin-tidak kebudayaan Indonesia akan diperkaya oleh anasir kebudayaan luar, terutama dan seharusnya dari Barat sebab sudah terbukti bahwa Barat dewasa ini yang menjadi pemicu kemajuan. Dikatakan pula olehnya bahwa kebudayaan Indonesia semenjak dulu sudah mengalami akulturasi atau menyerap kebudayaan dari luar, yaitu setidak-tidaknya dari kebudayaan Hindu dan Arab. Namun, “sekarang, tiba waktunya mengarahkan pandangan kita ke Barat,” tulisnya.⁴²

Pendapatnya mengenai perlu dan pentingnya Barat sebagai sumber atau acuan, dibandingkannya dengan masa silam ketika Indonesia lebih dipengaruhi atau berorientasi kepada tradisi Hindu dan Arab. Menurutnyanya, jika untuk sekian lama pengaruh Hindu dan Arab itu telah mewarnai kebudayaan Indonesia sementara kemajuan sebagai bangsa hanya biasa-biasa saja, maka tiba saatnya untuk menengok Barat yang lebih dinamis, sebagai sumber acuan. Kendati demikian, ia pun menyadari bahwa ajakan untuk berkiblat ke Barat, tentu akan penuh tantangan sebab anasir budaya dari Timur selama itu memang sudah mampu memberi warna dan bahkan banyak yang memosisikannya sebagai orientasi utama. Uraian berkenaan dengan mengapa Barat pantas sebagai kiblat dapat disimak dari kutipan berikut ini.

Bayangkanlah jarak antara Hindustan dengan negeri kita sepuluh abad yang lalu, sekurang-kurangnya harus ditempuh dengan waktu sebulan pelayaran. Sedang jarak antara negeri kita dengan Eropa sekarang ini (tahun 1935, *cat. peny.*) hanya butuh waktu tiga hari penerbangan. Hubungan dan pergaulan antara bangsa kita dengan bangsa Barat sekarang ini jauh lebih erat ketimbang dengan guru-guru bangsa saat membangun Borobudur seribu tahun silam.

Ucapan yang secara gamblang mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan bangsa kita harus tumbuh mengarah ke Barat, boleh jadi akan membangkitkan amarah beberapa golongan di negeri kita sekarang ini. Sebab ada di antaranya yang dengan tidak sengaja dan tidak sadar meninabobokan rakyat banyak dengan ucapan-ucapan kosong dan tidak berarti: Timur halus budinya, sedang Barat egoistis, materialistis, dan intelektualistis. Mereka yang mempunyai anggapan seolah-olah semua orang Timur wali yang suci dan semua orang Barat

penjahat yang tidak berhati demikian pasti akan kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang Timur harus berguru kepada orang Barat.

Sekalipun tidak enak didengar, semboyan bahwa kita *harus belajar pada Barat*, meskipun menyedihkan, dalam hal ini rasanya kita tidak dapat memilih.⁴³

Kutipan di atas ini sudah sangat terang menegaskan sikap Sutan Takdir Alisjahbana akan budaya mana yang seharusnya diacu dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Atas keterusterangan dan ajakannya menetapkan Barat sebagai kiblat, ia pun sangat menyadari bahwa hal ini niscaya akan memicu kontroversi mengingat masih banyaknya yang beranggapan bahwa Timur adalah sumber kebajikan sementara Barat hanya menawarkan kebatilan. Padahal, dalam pemahamannya, kemajuan yang telah dicapai hingga saat itu, yaitu sampai pertengahan dekade 1930-an, andil Barat sungguh sangat signifikan.

Bangkitnya semangat keindonesian yang dimulai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, menurutnya adalah akibat pandangan dan gairah yang dipacu oleh merasuknya peradaban Barat ke dalam nalar dan mentalitas para tokoh pergerakan di awal abad ke-20 itu. Pendidikan Barat serta pola pergaulan sosial yang diadopsi dari Barat, tambahanya, jelas-jelas telah membangkitkan semangat keindonesiaan melalui organisasi modern yang tumbuh di awal abad ini. Pemimpin sejumlah organisasi yang pada kenyataannya memang mampu memicu pergerakan dan menjadi embrio kebangkitan kebangsaan, disebutkannya sebagai cara Barat yang telah membumi di Hindia Belanda. Demikian pun dengan kata “Indonesia”, tulis Sutan Takdir Alisjahbana, adalah juga dari Barat.

Apabila nyata kepada kita bahwa semangat kesadaran, semangat kebangkitan, semangat kebangsaan yang kita namakan semangat keindonesiaan itu sebagian besar berasal dari Barat atau sekurang-kurangnya dengan perantaraan Barat, wajarlah bila masyarakat dan kebudayaan yang dilahirkan banyak mengandung unsur kebaratan. Jika tidak demikian, tidaklah sesuai jiwa dengan bentuk, semangat dengan kerangkanya.⁴⁴

Apa yang telah diduga oleh Sutan Takdir Alisjahbana bahwa akan banyak yang “kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang Timur harus berguru kepada orang Barat”, memang menjadi

kenyataan. Paling tidak memang Sanusi Pane, masih dari tulisan yang sama seperti telah disebutkan, yang memberi tanggapan atas pernyataan Sutan Takdir Alisjahbana tersebut. Di dalam menanggapi pendapat Sutan Takdir Alisjahbana itu, Sanusi Pane menguraikan lumayan panjang mengenai sejumlah terminologi yang bersinggungan dengan kebudayaan Barat yang pada intinya belum mampu mengalahkan Timur. Disebutkan oleh Sanusi Pane bahwa karena di Barat itu alamnya kurang bersahabat maka penghuni daerah itu harus mencari sejumlah siasat untuk mempertahankan diri yang pada gilirannya kemudian melahirkan “materialisme” serta “intelektualisme” yang berdampak pada hadirnya “individualisme”.

Kesemua istilah yang sangat berkaitan dengan cara untuk mempertahankan hidup akibat ganasnya alam ini, memang melahirkan kemajuan di satu sisi, namun di sisi lain kesempurnaan belum juga diperoleh. Sanusi Pane mengibaratkan hal tersebut dengan orang yang mencari makanan yang sesungguhnya sudah tercukupi namun belum adil dalam membagikannya sehingga masih saja ada yang kekurangan di samping yang berlebihan. Kondisi seperti ini, menurut Sanusi Pane, belum mampu mengalahkan keadaan di Timur yang masih lebih baik sebab alam lebih bersahabat.

Keperluan dan paksaan mempertahankan diri serta menentang alam memang ada. Karena itulah mungkin kemajuan dalam kebudayaan di Timur perbedaannya bertingkat-tingkat. Namun, meskipun ada tingkatan itu, semua bangsa di Timur mampu mencapai tingkat yang setinggi-tingginya, kalau seandainya mengikuti jalannya sendiri. Tingkat tertinggi itu ada di lapisan teratas dalam kebudayaan di India dan di Indonesia, yaitu lapisan yang berpusatkan kesunyatan, mistik, manusia bersatu dengan alam harus meniadakan keinginan jasmaninya dan membersihkan jiwanya.

...

Barat, sebagaimana kita lihat, mengutamakan jasmani, akibatnya lupa pada jiwa. Akalnya dipakai untuk menaklukkan kekuatan alam. Ia bersifat Faust, ahli pengetahuan yang mengorbankan jiwa asalkan menguasai jasmani.

Timur lebih mementingkan rohani sehingga lupa pada jasmani. Akal dipakainya untuk mencari jalan menyatukan diri dengan alam. Ia bersifat Arjuna yang bertapa di Indrakila.⁴⁵

Komentar Sanusi Pane ini memperoleh tanggapan pula dari Sutan Takdir Alisjahbana yang pada intinya menyatakan ketidaksetujuannya jika dikatakan bahwa Barat lebih mementingkan jasmani sedangkan Timur lebih mementingkan rohani. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, orang yang tinggal di Timur maupun di Barat sesungguhnya sama-sama mementingkan jasmani dan rohani. "Namun, dalam hal jasmani orang Barat dapat mengalahkan orang Timur. Hal itu disebabkan oleh perbedaan cara berpikir antara Barat dengan Timur," tambahnya sekaitan dengan komentar Sanusi Pane.

4.4.4 Polemik Mengenai Sistem Pendidikan

Polemik terakhir yang terjadi adalah polemik yang berkenaan dengan pendidikan, suatu ranah dalam kehidupan yang sangat penting dan sentral. Barang siapa menimbang pentingnya "pendidikan" niscaya akan diingatkan bahwa pihak Belanda pun, melalui Politik Etis-nya juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu kebijakan yang paling pertama dan utama. Bukan saja kebijakan dalam Politik Etis, pendidikan memang adalah kunci suatu kemajuan. Tidak ada bangsa yang akan maju sekiranya bidang pendidikan tidak memperoleh porsi yang utama atau penting.

Kongres pertama Permusyawaratan Perguruan Indonesia berlangsung di Solo pada tanggal 8, 9, dan 10 juni 1935. Dari jalannya kongres, Sutan Takdir Alisjahbana mencatat bahwa kongres ini dapat dikatakan berhasil namun beberapa catatan telah dibuatnya. Yang pertama adalah mengenai terlalu "berhati-hatinya" para penyaji kertas kerja dalam menguraikan pikiran-pikiran mereka. Bagi Sutan Takdir Alisjahbana, kehati-hatian itu perlu namun orang yang sangat berhati-hati lebih banyak akan mengalami kekalahan dibandingkan dengan orang yang berani mengambil risiko.

Kehati-hatian dalam pengertian Sutan Takdir Alisjahbana lebih dikaitkan dengan kecenderungan yang serba "anti", yaitu "anti-intelektualisme", "anti-individualisme", "anti-egoisme", dan "anti-materialisme" yang mendominasi isi makalah para pemrasaran. Dalam penilaiannya, Drs. Sigit menunjukkan anggapan bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan berbahaya yang mempunyai daya anarkis yang diakibatkan oleh pikiran liberal, bahaya pendidikan yang individualistis, dan bahaya yang terlalu mengedepankan hak individu.

Sementara penilaiannya atas Ki Hadjar Dewantara adalah pada penekanan mengenai lamanya belajar di sekolah yang sebanyak 8 jam yang akan melahirkan intelektualisme, namun juga akan menyebabkan terpisahnya sekolah dari kehidupan keluarga, sehingga menjadi sia-sia upaya untuk mendidik anak dengan budi pekerti. Demikian pula

komentarnya atas prasaran Dr. Sutomo, Sutopo Adisaputra, dan Dr. Wediodingrat, cenderung negatif sebab para pembicara ini dalam penilaiannya telah memojokkan kecerdasan atau intelektualisme. Lalu apa yang sesungguhnya hendak dikemukakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana?

Yang hendak saya nyatakan sekarang hanyalah bahwa prasaran itu kebanyakan mengandung semangat anti-intelektualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme. Di samping yang negatif, yang anti itu ternyata kebanyakan menghendaki kembali kepada yang lama, lari ke pesantren. Bukan suatu kebetulan Tuan Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Sutopo Adisaputra sama-sama mempropagandakan pesantren dalam prasarannya, meskipun misalnya pesantren yang dikemukakan Dr. Sutomo tidak sama dengan pesantren yang yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau saya tak keliru, Dr. Sutomo mengemukakan pesantren terutama sekali untuk menekan biaya menyebarkan kecerdasan. Bagi Ki Hajar Dewantara, pesantren ialah pusat pendidikan budi pekerti sebagai lawan sistem sekolah Barat.

Maka menurut pikiran saya, dalam pendirian anti-intelektualisme, anti-materialisme, dan pro-pesantren ini, ada terselip kesalahan berpikir, kesalahan analisis, kesalahan mengemukakan persoalan.⁴⁶

Sutan Takdir Alisjahbana dalam tulisannya menegaskan bahwa pada umumnya orang-orang terpelajar di masa itu adalah hasil didikan Barat namun sayangnya tanpa mereka sadari masalah di Barat lalu juga menjadi persoalan bangsa Indonesia. Padahal, menurutnya, persoalan bangsa ini sejatinya bukan persoalan seperti yang ada di Barat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan masalah intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme, namun adalah persoalan kurang dimanfaatkannya otak atau kecerdasan. Bangsa Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana, telah hidup berabad-abad hanya sebagai parasit atau seperti benalu yang selalu menempel ke masa silam.

Berkat didikan Barat itu bangsa kita mulai memakai otaknya, mulai mempertimbangkan sendiri semua masalah, mulai berontak sebagai manusia yang ikut arus kebiasaan. Terhadap semua masalah, masyarakat di kalangan bangsa kita mulai timbul pikiran baru, orientasi baru: dalam hal politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

Dengan menerima didikan Barat, di kalangan bangsa kita mulai hidup individu, mulai lahir kepentingan pribadi. Bangsa kita mulai tahu hak-haknya sebagai manusia yang dianugerahi perasaan dan pikiran sendiri. Ia mulai berani melepaskan dan memutuskan semua ikatan adat, ikatan takhayul, ikatan kebiasaan, dan lain-lain. Ia mulai merasa dirinya sebagai manusia bebas.

Melalui didikan Barat ia mulai memikirkan dirinya sendiri. Tidak takut mengemukakan pendapat pribadi. Mulai sadar haknya sebagai manusia dan sebagai anggota bangsa. Ia mulai berjuang bagi kepentingan dirinya dan kepingan bangsanya.

Berkat didikan Barat bangsa kita mulai tidak mau hanya asal sekadar hidup. Kaum yang mendapatkan didikan Barat yang materialistis itu tidak dapat dan tidak sudi hidup dengan uang segobang sehari. Pakainnya tidak cukup lagi hanya sehelai saja dan ia mulai berminat tinggal di rumah yang layak. Ia mulai menghargai uang dan harta, dan mulai bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan harta, yang sebenarnya menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap orang.⁴⁷

Sutan Takdir Alisjahbana juga menegaskan bahwa jika dia melontarkan kritik-kritik di atas, tidak berarti bahwa dia berpihak kepada intelektualisme, atau menyukai individualisme, atau setuju dengan egoisme, maupun memuja materialisme, namun yang dia khawatirkan adalah munculnya ketakutan yang berlebihan atas paham-paham tadi. Bagi Sutan Takdir Alisjahbana, kekhawatiran atau ketakutan itu tidak perlu terlalu dikedepankan sebab bahaya itu adanya adalah di dunia Barat, tempat tumbuh dan berkembangnya sejumlah paham tersebut. Dalam pandangannya, kepentingan yang pertama dan yang terutama adalah membangun kecerdasan, menghidupkan individu, membangkitkan kesadaran akan kepentingan sendiri, dan mendorong orang untuk bekerja keras serta berjuang untuk memperoleh kehidupan yang memadai. Dalam hubungan ini, Sutan Takdir Alisjahbana sekali lagi menegaskan bahwa adanya kecemasan atau ketakutan risiko yang bakal dihadapi, merupakan penghalang seseorang atau suatu bangsa untuk maju. Ia menegaskan hal itu seperti di bawah ini.

Dan Indonesia Muda yang ingin mendudukkan bangsanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, tak boleh terlalu khawatir memikirkan risiko. Ia harus menguatkan tekad apa yang dikehendakinya, apa yang

dicita-citakannya, dan kapalnya terus dilayarkan menuju ke arah cita-cita itu.

Indonesia sekarang perlu putra-putra yang tajam pikirannya, individu yang mempunyai pikiran, pandangan, dan perasaan sendiri, yang tahu mengemukakan dan mempertahankan kepentingan dan haknya, yang senantiasa berjuang keras memperbaiki kehidupan dan penhidupannya lahir batin. Untuk mencapai semua itu, maka suara negatif yang terdengar pada kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia di Solo itu:

anti-intelektualisme

anti-individualisme

anti-egoisme

anti-materialisme

harus diganti dengan semboyan positif yang gembira berapi-api:

Otak Indonesia harus diasah menyamai otak Barat!

Individu harus dihidupkan kehidup-hidupnya!

Kesadaran akan kepentingan diri harus disadarkan sesadar-sadarnya!

Bangsa Indonesia harus dianjurkan mengumpulkan harta dunia sebanyak mungkin!

Ke segala penjuru bangsa Indonesia harus berkembang.⁴⁸

Pendapat atau pandangan Sutan Takdir Alisjahbana yang dapat dikatakan sebagai lantang tersebut, tentu saja mendapat reaksi atau tanggapan dari banyak tokoh dan pendidik atau guru, utamanya yang namanya langsung disinggung dan pendapatnya langsung pula dicuplik dengan sejumlah catatan kritis. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila kemudian dapat kita baca tanggapan, pandangan, atau komentar dari sejumlah tokoh seperti R. Sutomo,⁴⁹ Tjindarbumi,⁵⁰ Adinegoro,⁵¹ M. Amir,⁵² dan Ki Hajar Dewantara⁵³ dalam kaitan menanggapi kritik Sutan Takdir Alisjahbana. Terlepas dari nada saling-kritik yang begitu tajam, tidak mungkin dimungkiri bahwa polemik seputar pendidikan ini memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, utamanya pembaca yang ingin selalu mengaktualkan diri dengan kemajuan zaman.

Catatan Akhir :

- 1) Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesian*, terj. Amarzan Loebis dan Mien Joebhaar, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan Perwakilan KITLV Jakarta, 2003, h. 32.
- 2) *Ibid.*, h. 307-308.
- 3) M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, h. 236-237.
- 4) *Ibid*, h. 238.
- 5) *Ibid.*
- 6) Taufik Abdullah, "Otentisitas dan Saling Penetrasi dalam Lintasan Sejarah," *Nabil Forum*, Edisi IV, Januari-Juni 2012, h. 13. Tulisan ini semula merupakan makalah pada seminar "Cross Cultural Fertilization: Sebuah Strategi Kebudayaan," yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Nabil Society, dan harian *Kompas* pada tanggal 28 Februari 2012.
- 7) *Ibid.*
- 8) Adam, *op.cit.*, h. 216.
- 9) *Ibid.*
- 10) *Ibid.*
- 11) *Ibid.*
- 12) Istilah "sonnet" dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia, *sonnetto*, yang dalam ungkapan kita kira-kira bermakna 'suatu suara atau nada yang lirih atau lembut'. Lihat Michael Alexander, *A History of English Literature*, Hampshire dan New York: Palgrave Macmillan, 2000, h. 82.
- 13) Sajak ini dimuat di *Bianglala*, No. 31, 19 Agustus 1870. Sumber pengutipan sajak ini adalah Suyono Suyatno, Juhriah, Joko Adi Sasmito, *Antologi Puisi Indonesia Periode Awal*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, h. 17-18.
- 14) Sajak ini dimuat dalam *Bintang Djohar*, Nomor 17, 3 Mei 1873. Sumber pengutipan sajak ini adalah Suyono Suyatno, Juhriah, Joko Adi Sasmito, *Antologi Puisi Indonesia Periode Awal*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, h. 18-19.
- 15) M. Hatta, "Beranta Indah," *Jong Sumatra*, Tahun IV (9), September 1921.
- 16) C. Hooykaas, *Perintis Sastra*, terj. Raihoel Amar Gelar Datoek Besar, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981, h. 105.

- 17) Informasi yang cukup lengkap mengenai G. Francis ini dapat dibaca pada buku karya Parmoedya Ananta Toer yang berjudul *Tempo Doeloe: Antologi Sastra Pra-Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, 1982, h. 29-32.
- 18) Sinyalemen ini dapat dibaca dalam tulisan C.W. Watson, "Some Preliminary Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian Literature," *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, CXXVII (4e), 1971..
- 19) Taufik Abdullah, H. Misbach Yusa Biran, S.M. Ardan, *Film Indonesia: Bagian I (1900-1950)*, Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993, h. 3.
- 20) *Ibid.*
- 21) Selasih, sebagaimana pernah disebut oleh Jakob Sumardjo dalam *Segi Sosiologis Novel Indonesia*, Bandung: Pustaka Prima, 1981, h. 75, dapat disebut sebagai wanita pengarang pertama di Indonesia. Layaknya pengarang pada tahun-tahun itu, ia pun gemar memakai nama pena atau nama samaran, seperti Sariamin, Seleguri, Sri Gunung, Sri Tanjung, Ibu Sejati, Bundo Kandung, dan Mande Rubiah. Lihat penjelasan dalam Maman S. Mahayana, Oyon Sofyan, dan Achmad Dian dalam *Ringkasan dan Ulasan Novel Indonesia Modern*, Jakarta: Grasindo, 1992, h. 36.
- 22) Djoemantan, "Seruan yang Singkat," *Poetri Hindia*, II (5), 15 Maret 1909.
- 23) ¹ Sajak ini tidak diketahui waktu publikasinya. Namun mengingat bahwa Sutomo meninggal pada tahun 1938, besar kemungkinan bahwa puisi ini ditulis pada tahun 1930-an, kemungkinan di majalah *Poedjangga Baroe*. Sajak ini diperoleh dari buku S. Takdir Alisjahbana, *Kebangkitan Puisi Baru Indonesia*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1978, h. 85.
- 24) Mas Marco Kartodikromo adalah aktivis pergerakan yang terjun ke dunia politik dengan bergabung di Sarekat Islam ketika organisasi ini didirikan pada tahun 1911. Ia menjadi sekretaris SI cabang Solo. Selain terjun ke dunia politik praktis, Mas Marco juga mempunyai minat besar dalam dunia tulis-menulis sebagai jurnalis. Maka, tidak mengherankan, jika pada tahun 1914, ia mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB) di Surakarta dan menerbitkan surat kabar *Doenia Bergerak*. Dalam dunia pers, Mas Marco termasuk sering melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Hindia Belanda sehingga pernah dikenai tuduhan *persdelichten*. Mas Marco juga beberapa kali masuk penjara dan bahkan meninggal di penjara.
- 25) Lihat *Sinar Hindia* edisi 4 Januari 1919.
- 26) Sajak ini dimuat dalam *Jong Sumatra*, IV (9), 1921, h. 134.

- 27) Sajak ini dikutip dari buku yang disunting oleh Oyon Sofyan, *Sajak-sajak Perjuangan dan Nyanyian Tanah Air*, Jakarta: Penerbit Obor, 1995, h. 153-155.
- 28) Roestam Effendi, "Bebasari," *Antologi Drama Indonesia, Jilid I: 1895-1930*, Jakarta: Amanah Lontar, 2006, h. 219-221.
- 29) Kutipan ini dicuplik dari Rosihan Anwar, *In Memoriam, Mengenang yang Wafat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002 h. 33.
- 30) Pidato pembelaan Hatta tidak disertakan di sini secara utuh dan lengkap sebab yang ingin ditampilkan di sini hanya pada "tenaga" atau "roh" Hatta yang diyakini banyak orang mempunyai kekuatan mempengaruhi cara berpikir para pemuda Indonesia setelah Sumpah Pemuda atau setelah tahun 1928.
- 31) Sutan Takdir Alisjahbana, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-PraeIndonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 3-4. Tulisan ini pertama kali dipublikasikan melalui majalah *Pujangga Baru*, edisi 2 Agustus 1935.
- 32) *Ibid.*, h. 6-7.
- 33) *Ibid.*, h. 7-8.
- 34) *Ibid.*, h. 9-10.
- 35) Sanusi Pane, "Persatuan Indonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 18-25.
- 36) *Ibid.*, h. 20.
- 37) Purbatjaraka, "Sambungan Zaman," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008, h. 33-35.
- 38) *Ibid.*, h.34-35.
- 39) *Ibid.*, h. 26-27.
- 40) *Ibid.*, h. 28-29.
- 41) *Ibid.*, h. 36-37.
- 42) Alisjahbana, *loc.cit.*, h. 11.
- 43) *Ibid.*, h. 11.
- 44) *Ibid.*, h. 42.
- 45) *Ibid.*, h.23.

- 46) Sutan Takdir Alisjahbana, "Semboyan yang Tegas: Kritik Terhadap Beberapa Prasaran Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 42-45.
- 47) *Ibid.*, h. 48.
- 48) *Ibid.*, h. 49-50.
- 49) R. Sutomo, "Kongres Pendidikan Nasional: Menyambut Pandangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 51-65.
- 50) Tjindarbumi, "Mencari Perbandingan (*Verhouding*)," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 71-75.
- 51) Adinegoro, "Kritik Atas Kritik," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 111-121.
- 52) M. Amir, "Pertukaran dan Pertikaian Pikiran: Antara Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Adinegoro, dan Dr. Sutomo tentang Peradaban dan Kemajuan Bangsa Kita untuk Masa Depan," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 139-168.
- 53) Ki Hajar Dewantara, "Pembaruan Adab: Pesan Kepada Tuan-Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, dan Sanusi Pane," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 169-173.

BAB V

PEMIKIRAN TENTANG DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

Nasionalisme Indonesia dalam perkembangannya mencapai titik puncak setelah perang dunia II yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Artinya bahwa pembentukan nasion Indonesia berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. Indonesia dan negara-negara lain di Asia mengalami penjajahan dan secara serempak membangkitkan nasionalismenya sendiri-sendiri sehingga menciptakan negara merdeka. Ada tiga macam teori tentang pembentukan *nation*. Pertama yaitu teori kebudayaan (*cultuur*) yang menyebut suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Kedua, teori negara (*state*) yang menentukan terbentuknya suatu negara adalah penduduk yang ada didalamnya yang disebut bangsa dan teori ketiga adalah kemauan (*wills*) yang mengatakan bahwa syarat mutlak adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku dan agama.¹

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang memandang seluruh rakyat yang menginginkan membangun masa depannya bersama sebagai sebuah nasion. Menurut Sukarno, yang mengutip pendapat Ernest Renan bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama, rakyat itu dulunya menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu, bukannya jenis ras, bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan kebutuhan, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadi bangsa itu. Jadi nasionalisme ialah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat dan golongan itu, satu bangsa.²

Untuk mewujudkan adanya nasionalisme Indonesia maka persatuan yang sangat menentukan. Karena persatuan akan membawa ke arah kemerdekaan Indonesia. Tentang persatuan ini Sukarno menyatakan:

...bahwa persatuanlah yang kelak membawa kita ke arah terkabulnya impian kita: Indonesia Merdeka! Entah bagaimana tertjapainja persatuan itu, entah pula bagaimana rupanja persatuan itu, akan tetapi tetaplah, bahwa kapal jang membawa kita ke-Indonesia-Merdeka itu, jalah Kapal-Persatuan adanja! Mahatma juru mudi jang akan membuat dan mengemudikan kapal persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi jakinlah kita pula, bahwa kelak kemudian hari mustilah datang saatnja, jang sang mahatma itu berdiri ditengah kita... itulah sebabnja kita dengan besar hati mempeladjar dan ikut meratakan djalan jang menuju persatuan itu...³

Menurut Sukarno untuk mencapai persatuan itu maka harus diusahakan adanya persatuan antara golongan nasionalis, marxis dan Islam. Ketiga golongan besar ini harus diusahakan agar pada akhirnya kemerdekaan akan segera terwujud.

5.1. Janji Kemerdekaan

Perdana Menteri Jepang Jenderal Koiso, Kokiaki, di depan sidang istimewa Parlemen Jepang (Diet), pada 7 September 1944 mengumumkan di wilayah Kemaharajaan Jepang di Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan “merdeka dikelak kemudian hari”. Hal ini disebabkan karena situasi peperangan semakin memburuk, kekalahan Jepang dalam pelbagai pertempuran semakin meluas. Kekalahan Jepang dalam pertempuran laut di Teluk Leyte (Philipina Tengah) pada 29 Oktober 1944, bisa dianggap sebagai peristiwa penentu kekalahan Jepang. Pada 11 Mei 1945 tentara Sekutu (Australia) berhasil merebut Tarakan dan pulau-pulau sekitarnya, berikutnya merebut Balikpapan, pangkalan logistik militer yang strategis. Kekalahan militer Jepang dipelbagai medan di Indonesia, rupanya berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah pendudukan Jepang.

Setengah tahun setelah janji Koiso akibat sulitnya hubungan dengan Tokyo, pemerintah militer Jepang di Jawa mulai merealisasi janji Koiso. Pada 1 Maret 1945, Saiko Sikikan (pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang di Jawa), Jenderal Harada, Kumakici, mengumumkan pembentukan suatu badan yang ditugasi untuk menyelidiki hal-hal yang penting yang berkenaan dengan negara Indonesia yang merdeka.

Badan diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Jumbi Cosakai*, disingkat Badan Penyelidik.

Nama-nama para anggota Badan Penyelidik ini diumumkan pada 29 April 1945, hari *Tenno Setsu*, yaitu lahir Tenno Heika, Kaisar Hirohito. Dokter Radjiman Wediodiningrat seorang pensiunan dokter Kesunanan Surakarta dan tokoh Partai Indonesia Raya (Parindra) anggota Syu Sangi Ki (Dewan Pertimbangan Daerah) Madiun, diangkat sebagai Ketua Badan Penyelidik (Kaico) dan Ichibangase, (Cirebon Syucokan, Residen Cirebon) diangkat sebagai Wakil Ketua bersama R.P. Soeroso.

Pada hari Senin tanggal 28 Mei 1945, Saiko Sikikan, Letnan Jenderal Harada Kumakici melantik anggota Badan Penyelidik di gedung *Cuo Sangi In* (Dewan Pertimbangan Pusat) di Pejambon (sekarang gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri). Sekali pun tidak hadir dalam pelantikan tersebut Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah Ketujuh atasan Panglima Tentara XVI yang bermarkas di Singapura menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya Badan Penyelidik ini. Ia menyatakan “Negara Indonesia yang akan dibangun adalah satu mata rantai yang kokoh kuat dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya dan kewajibannya dalam usaha pembelaan Asia Timur Raya adalah sangat penting”.

Sidang BPUPKI dibuka dengan upacara, diawali oleh pengibaran dua bendera, yaitu Jepang (Hinomaru) disusul dengan bendera merah putih disisi kirinya. Acara pelantikan dimulai pada pukul 15.30 waktu Jawa atau pukul 14.30 WIB. Amanat *Saiko Sikikan* Letnan Jenderal Harada, Kumakici sebagai pembuka acara, dilanjutkan oleh *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer) Mayor Jenderal Yamamoto, Moichiro. Dalam pidatonya ia menyatakan:

“Pembentukan badan ini bermaksud menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang baru. Dengan jalan demikian akan dapat disampaikan bahan-bahan perundingan yang banyak dan saksama kepada Badan Penetapan Putusan Yang Terakhir. Kalau kita meninjau bermacam-macam hal di daerah yang dinamakan Indonesia, serta memikirkan kedudukan pulau Jawa ini, maka kewajiban badan ini di Tanah Jawa dan cara untuk menjalankan usaha-usahanya akan jelaslah dengan sendirinya”⁴.

Maknanya tugas BPUPKI hanyalah badan penyusun rancangan usul, sehingga diterima atau ditolak sangat bergantung pemerintah Jepang di Tokyo. Selanjutnya Gunseikan menyatakan:

“Jika suatu bangsa hendak meneguhkan dasar kemerdekaannya, maka ia harus mempunyai keyakinan diri untuk sanggup membela negara sendiri dan juga mempunyai kekuatan yang nyata sebagai bangsa. Oleh karena itu pada tingkatan yang sekarang ini, bangsa Indonesia harus terlebih dahulu insaf akan keyakinan dirinya dan kegiatan hatinya untuk memelihara tenaga bagi melangsungkan peperangan ini. Berhubungan dengan syarat-syarat dasar untuk negara merdeka yang baru, maka tuan-tuan harus memajukan diri dalam usaha penyelidikan dan pemeriksaan tentang soal-soal tadi dan demikian juga tentang soal-soal agama. Saya berharap supaya tenaga pembelaan dan tenaga rakyat diperkuat dan dimajukan tidak buat sekarang saja, tapi juga seterusnya”... oleh karena itu janganlah bangsa Indonesia sempit pemandangannya dan jangan memikirkan kepentingan bangsa Indonesia saja”.⁵

5.2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Badan Penyelidik terdiri atas dua bagian yaitu *Badan Perundingan* yang dipimpin oleh seorang ketua (*Kaico*) dan dua orang wakil ketua (*Fuku Kaico*) dengan 60 orang anggota (*Iin*) terdiri atas tokoh-tokoh Pergerakan Nasional, birokrat, intelektual, polisi, tentara PETA, wartawan, pengusaha dan empat orang keturunan asing (Cina, Arab, Belanda) dan tujuh orang Jepang sebagai anggota tanpa hak suara⁶. Kedua; Kantor Tata Usaha (Sekretariat), bagian ini ditugasi menyusun agenda persidangan dan penyusunan pelaporan. Bagian sekretariat dipimpin oleh R.P. Soeroso (*Fuku Syucokan*, Wakil Residen Kedu) dibantu oleh Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo dan seorang Jepang Masuda, Toyohiko. Bagian Sekretariat mengerahkan beberapa orang stenographer (penulis cepat/steno) untuk mencatat jalannya debat dalam sidang-sidang. Para penulis cepat dipimpin oleh Karundeng.

Anggota BPUPKI dipilih oleh badan-badan atau organisasi pada tiap-tiap *Syu* (Keresidenan) atau ditunjuk oleh *Syucokan* (Residen)⁷ dan badan-badan tingkat *Syu*, yang mencalonkan tokoh-tokoh masyarakat daerah. KRT Radjiman Wediodiningrat adalah ketua *Syu Sangi Kai* Madiun, ia seorang tokoh daerah yang moderat. Beberapa orang yang ditunjuk berasal dari Dewan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi In*) yang dipimpin oleh Ir. Sukarno⁸.

5.3. Pemikiran Tentang Dasar Negara

BPUPKI menyelenggarakan dua kali sidang pleno, pada 28 Mei – 2 Juni dan 10 – 17 Juli 1945 dan mencapai persetujuan dasar mengenai masalah perundang-undangan dan masalah ekonomi.⁹ Dalam sidang pertama BPUPKI, tanggal 28 Mei – 2 Juni 1945, dibahas mengenai persoalan ‘dasar negara’ bagi Indonesia merdeka kelak. Dalam pembukaan sidang, ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Atas tawaran ketua tersebut, ada anggota yang mengetengahkan pandangannya. Pertama, Mr. Muh. Yamin berpidato tanggal 29 Mei 1945, Mr. Soepomo berpidato tanggal 30 Mei 1945 dan Ir. Sukarno berpidato tanggal 1 Juni 1945.

Dalam pandangannya Muh. Yamin mengatakan bahwa prinsip pertama yang menggarisbawahi dasar filsafat suatu Indonesia merdeka adalah nasionalisme. Nasionalisme yang mengikat kita dalam satu kehidupan bersama dalam satu keluarga dan sekuturunan. Untuk itulah negara yang akan didirikan nantinya haruslah merupakan persatuan yang menyatukan ikatan sejarah yang melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di dalamnya, dan yang berbeda dengan sistem persatuan yang terjadi pada negara Majapahit dan Sriwijaya. Pandangan Yamin tersebut menjadi dasar bagi pengembangan peri kebangsaan dan ketuhanan, yang merupakan dasar pembentukan dasar negara Indonesia. Dengan semangat ini ia mengatakan:

Negara baru yang akan kita bentuk, adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu *nationale staat* atau suatu *Etat Nationale* yang sewadjar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga diatas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ini ialah sebahagian mendjadi pelaksanaan keinginan rakjat Indonesia sekarang dan sebahagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan ini sumbernja dalam nasionalisme atau dalam dasar kebangsaan yang mengikat kita seturunan dan sesama kemauan, bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru, yang berisi faham hendak mempersatukan rakjat dalam ikatan sedjarah yang dilindungi mereka. Inilah lain dan bedanja nasionalisme Indonesia djaman sekarang daripada usaha rakjat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonesia waktu terbentuk dalam negara sjailendra Sriwidjaja (600 – 1400) yang beratus-ratus tahun lamanya, disanalah bedanja usaha kita sekarang dari pada rakjat Indonesia waktu mendirikan Negara Indonesia kedua, seperti terbentuk dalam Keradjaan Madjapahit (1293 – 1525). Negara

Indonesia pertama dibentuk dan didjundjung oleh rakjat keturunan jang memakai dasar kedatuan jang selaras dengan kepertjaan purbakala (kesaktian-magie) dan agama Budha Mahajana. Negara Indonesia kedua disusun atas faham keperabuan, dan bersandar kepada paduan agama Sjiwa dan Budha, mendjadi agama Tanterajana. Negara Indonesia ketiga jang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan berketuhanan¹⁰.

Dalam hal ini Yamin memberi peringatan bahwa dalam menyusun negara haruslah disusun menurut watak dan peradaban bangsa Indonesia dan tidak meniru konstitusi negara lain. Hukum dasar yang berasal dari negara luar hanyalah dapat digunakan sebagai cermin saja, karena dalam pembentukan negara ini yang hendak dicapai adalah kemauan jiwa dan cita-cita rakyat seluruhnya.

Kehendak untuk merdeka dan berdaulat dan bebas dalam berhubungan dengan negara lain di dunia, menjadi dasar Yamin dalam menuangkan pemikirannya tentang peri kemanusiaan:

Maka dengan sendirinja dasar kemerdekaan itu dalam negara akan datang terus berupa kedaulatan menudju kedalam dan kedaulatan menudju keluar, perhubungan dengan keluarga negara-negara lain. Kemerdekaan pertama memberi perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur kepada putera negara dengan hak milik dan harta bendanja di dalam lingkaran batasan daerah negara. Kemerdekaan atau kedaulatan keluar akan memberi kesempatan luas kepada negara Indonesia mengatur perhubungannja dengan negara lain. Menurut timbangan saja, maka disinilah pemandangan kita mesti meyakinkan, bahwa tudjuan kemerdekaan telah naik beberapa tingkat, sehingga hampir sampai kepada langkah jang paling achir. Pada langkah paling achir ini maka dasar kemerdekaan mendjadi dasar kedaulatan negara, baik tertudju kedalam ataupun keluar.¹¹

Peri kemanusiaan yang akan dibangun dalam negara Indonesia adalah negara merdeka yang universal, berisi humanisme dan internationalisme bagi segala bangsa. Hal ini tentu erat kaitannya dengan hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka.

Dasar ketiga yang ditawarkan oleh Yamin adalah peri ketuhanan. Bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa.¹² Dasar keempat yang disampaikan Muhammad Yamin

adalah Peri Kerakyatan. Peri kerakyatan ini meliputi musyawarah, perwakilan dan kebijaksanaan. Mengenai musyawarah ini, Yamin mengatakan sebagai berikut:

Musjawarah mendjadi kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang jang berkepentingan, membesarkan tanggung djawab warga-negara dan menimbulkan kewadajiban jang tidak mengikat mengikat hati. Lagi pula dalam tiga hal dasar permusjawaratan itu memberi kemadjuan kepada ummat jang hidup dalam negara jang dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhan-an.

Pertama: karena dengan dasar musjawarat itu manusia memperhalus perjuangannja dan bekerdja diatas djalan ke-Tuhan-an dengan membuka fikiran dalam permusjawaratan sesama manusia

Kedua: oleh permusjawaratan, maka negara tidaklah dipikul oleh seorang manusia atau pikiran jang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga negara tidak berpuing disekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, jang satu-satu cel mengerdjakan kewajiban atas permufakatan jang menimbulkan perlainan atau perbedaan kerdja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan.

Ketiga: permusjawaratan menetjilkan atau menghilangkan kechilafan pendirian atau kelakuan orang seorang, permusjawaratan membawa negara kepada tindakan jang betul dan menghilangkan segala kesesatan¹³.

Tentang dasar musyawarah ini, Yamin menyandarkan pemikirannya pada Al Quran khususnya surat Asysyura ayat 38 yang mengatakan bahwa segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Negara Indonesia yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musyawarah dan di dalamnya selalu mewujudkan permusyawaratan itu. Menurut Yamin, negara yang dibentuk dan negara yang tidak bersandar kepada permusyawaratan adalah negara yang menjauhkan ke-Tuhan-an dan melanggar aturan peradaban Indonesia.

Mengingat begitu banyaknya dan luasnya negara Indonesia, maka untuk dapat menjalankan sistem musyawarah yang efektif, perlu disusun suatu sistem perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan. Sistem perwakilan inilah yang memberi jaminan kepada sifat perwakilan dan di atas sifat perwakilan inilah menjadi dasar dalam menentukan terpilihnya orang yang akan memegang kekuasaan dari tingkat desa,

dusun, negeri sampai ke tingkat yang paling atas. Sistem perwakilan ini akhirnya akan menghilangkan sistem feodalisme yang telah dipakai oleh bangsa Indonesia sejak lama. Mengenai sistem perwakilan ini, Yamin mengatakan:

Dasar perwakilan itu ialah tenaga yang kuat dan yang memberi warna dan aliran istimewa kepada keinginan orang Indonesia kepada susunan tata-negara. Perwakilan tidaklah sadja menguatkan persekutuan hukum adat dalam tata-negara bagian bawah, tetapi djuga mendjadi pedoman dalam keinginan bangsa sekarang dalam menjusun tata-negara bagian tengah dan atas. Suatu negara Indonesia yang dibentuk tentulah tidak mendjadi sambungan djiwa tata-negara rakjat, apabila sifat perwakilan tidak dipakai. Sebaliknya apabila dasar perwakilan setjara Indonesia dilandjutkan sampai kepada segala bagian tata-negara dengan mementingkan dasar permusjawaratan dan rationalisme, maka dengan ringkas kita akan mendapat suatu susunan negara yang sewadjar dengan peradaban kita. Lagi pula masuklah dalam tatanegara suatu sifat ketata-negaraan Indonesia, yang ternjata kuat dan terbukti sedjak dari zaman prae-historia sampai sekarang ini. dasar perwakilan adalah dasar abadi menurut kebudayaan Indonesia.¹⁴

Berdasarkan sistem perwakilan ini, maka permusyawaratan dan perwakilan itu harus di bawah pimpinan hikmah kebijaksanaan yang bermusyawarah atau berkumpul dalam persidangan itu. Hikmah kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia, ialah rationalisme yang sehat, karena telah melepaskan dari anarki, liberalisme dan semangat penjajahan.

Dalam pikiran keempat ini, Yamin mengobsesikan suatu negara yang akan dibentuk ialah: suatu negara rakyat Indonesia yang tersusun dalam suatu Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan dan dijalankan sebagai pusat oleh Kementrian yang bertanggung jawab kepada majelis musyawarah dan semuanya dilindungi oleh suatu pemerintahan yang mewujudkan permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan, bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia yang tidak mengenal perpecahan atau terbagi-bagi.¹⁵

Dasar pemikiran tentang musyawarah inilah yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Menurut Yamin, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin terasa gairahnya. Dalam setiap kesempatan selalu

muncul keinginan untuk mengadakan kerapatan untuk memecahkan berbagai permasalahan dengan badan – badan perwakilan yang sempurna yaitu parlemen. Itulah yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia nantinya. Perubahan-perubahan besar dan segala aliran baik politik, sosial, ekonomi selalu dipengaruhi oleh asas kerakyatan. Di Indonesia demokrasi itu menjadi satu dengan cita-cita, yang bernama badan perwakilan yang dipilih oleh dan untuk rakyat, sehingga parlemen merupakan puncak dari susunan negara menuju ke arah demokrasi parlemen. Terkait dengan hal itu Muhammad Yamin menegaskan bahwa:

“Democratie Indonesia mendapat kekoeatan dari kalangan national dan dari lingkoengan international, dan democratie-Indonesia itoe pada waktoe ini mengalirkan rakyat menoeojoe kepada soeatoe badan kerakjatan jang bernama Parlement”.¹⁶

Parlemen inilah yang menjadi satu-satunya perwakilan yang dapat menyalurkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Untuk itu perlu dibangun satu parlemen yang kuat. Selain parlemen sebagai lembaga yang akan memperkuat kontrol maka perlu dibangun suatu Kongres Rakyat Indonesia (*All Indonesia Congress*) yang berisi dua tujuan yaitu sebagai badan tetap yang menjadi kekuasaan tertinggi bagi pergerakan rakyat Indonesia dan kedua, sebagai rapat besar yang melibatkan seluruh rakyat, partai dan organisasi rakyat. Persatuan antara parlemen dan kongres rakyat ini akan mampu mewujudkan persatuan Indonesia yang kuat. Seperti yang diutarakan Muhammad Yamin berikut ini:

...oesaha rakjat baroelah besar dan loehoer, kalau dioekoer fikiran jang besar dan loehoer, sedangkan fikiran dan tjita-tjita eomoem itoe tentoelah mengikat segala oesaha organisatie partij, perkoempoelan dan orang lepas, inilah persatoean jang boekan memboengkam rakjat mendjadi tidak berdaja, melainkan persatoean jang bertambah berisi dan bernjawa oleh perdjoeangan. Persatoean jang hidoep atas medan perdjoeangan dan dapat dipakai seperti perkakas persatoean¹⁷.

Dari dasar-dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin jauh sebelum BPUPKI terbentuk nyatalah bahwa Muhammad Yamin sebenarnya telah memikirkan suatu lembaga perwakilan yang kuat, yang dapat mewadahi aspirasi pergerakan rakyat.

Dalam kenyataannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 1945 terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan wakil-wakil daerah dan kelompok sosial yang ditetapkan undang-undang. Penyebutan berturut-turut ini memberi kesan bahwa parlemen akan menjadi perwakilan kelompok-kelompok politik. Pikiran itu tidak diungkapkan oleh undang-undang dasar, hanya dikatakan bahwa susunan parlemen akan diatur dengan undang-undang. Muhammad Yamin menegaskan bahwa undang-undang dasar tidak menuntut adanya sebuah undang-undang pemilihan, sehingga parlemen dapat pula disusun dengan jalan pengangkatan, penunjukkan atau cara lain.¹⁸

Dasar kelima, yang diajukan Yamin adalah Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Kesejahteraan yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Sehubungan dengan itu, sebelum Indonesia merdeka supaya dipikirkan pula tentang pembagian penduduk dengan segala akibatnya yang tertuju pada perekonomian dan hak tanah dari penduduknya. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat maka dalam hukum dasar perlu disusun suatu pasal yang memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Untuk ini Yamin mengatakan:

...kita hendaklah mendjamin dalam konstitusi kita perbaikan-perbaikan untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu hendaklah didalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal, jaitu yang berhubungan dengan kesedjahteraan, kesedjahteraan rohani, kesedjahteraan kebendaan dan ekonomi.¹⁹

Itulah pandangan Yamin tentang dasar negara Indonesia. Jika dibandingkan dengan pidato Sukarno, tidaklah terdapat perbedaan yang fundamental antara lima asas Yamin dan lima sila Sukarno itu.

Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menguraikan pemikirannya bahwa dasar negara yang merdeka ada tiga syarat mutlak. *Pertama*, tentang daerah (wilayah). Indonesia merdeka pada dasarnya harus meliputi batas Hindia Belanda. *Kedua*, rakyat sebagai warganegara yang berkebangsaan Indonesia dan peranakan yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia harus diterima sebagai warganegara dengan diberi kebangsaan Indonesia. Soepomo menolak dwi kewarganegaraan (*dubbele onderdaanschap*) dan tanpa kewarganegaraan (*staatloosheid, stateless*). *Ketiga*, pemerintah yang berdaulat bukan internasionalisme. Soepomo menegaskan menurut dasar apa negara Indonesia yang akan didirikan.

Ada tiga teori tentang negara:

1. Negara berdasar teori *individualis* (Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert spencer).
2. Negara berdasar teori *golongan* (Marx, Engels, dan Lenin).
3. Negara berdasar teori *integralistik* (Spinoza, Adam Muller, Hegel).

Soepomo mengajukan pertanyaan soal negara yang akan dibangun Republik atau monarki. Negara Republik atau monakhi tidak mengenal dasar susunan pemerintahan, tetapi hendaknya Kepala Negara dan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya (negarawan). Kepala Negara memimpin rakyat seluruhnya, mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan. Apakah Kepala Negara itu diberi kedudukan raja atau presiden, atau adipati seperti di Birma, atau sebagai *fuhrer* itu semua tidak mengenai dasar susunan pemerintahan.

Cara mengangkat pemimpin negara, kata Soepomo “menekankan” jangan diturut dengan cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, yang berdasar atas paham perorangan. Konsekuensi dari menolak dasar perorangan (individualisme) ini berarti juga menolak sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem menyamakan semuanya sama harganya. Untuk menjamin pimpinan negara, terutama Kepala Negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus ada badan permusyawaratan supaya mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat.

Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme negara” (*staatssocialisme*) perusahaan-perusahaan yang penting diurus oleh negara. Dasar kekeluargaan dari negara kebangsaan yang bersatu, mempunyai akibat-akibat di lapangan lain.

Selanjutnya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan pidatonya yang membahas secara komprehensif tentang Indonesia merdeka kelak, yaitu pidato *Weltanschauung* bangsa. Sesudah mengucapkan pidato pengantarnya Sukarno menyampaikan eksplanasi mengenai makna dan maksud Ketua BPUPKI. Sukarno menyampaikan bahwa yang diminta untuk dibahas oleh Ketua BPUPKI adalah bukan dasarnya Indonesia Merdeka, tetapi “*Philosophische grondslag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah pondasi, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Dalam pidato tersebut bahkan Sukarno membuat analogi yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa:

"Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata: Ah saya belum berani kawin tunggu dulu gaji Rp. 500,-. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai meja-kursi yang selengkap-lengkapnyanya, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzer, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu meja makan, lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar satu gubug: kawin. Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur: kawin.

Sang Ndro yang mempunyai rumah gedung, *electriche kookplaat*, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih *gelukkig*, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Ndro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (*Tepuk tangan, dan tertawa*). Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai *gerozilver* satu kaset plus *kinder-uitzet*, - buat 3 tahun lamanya.

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: - kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan Ketua yang mulia ukuran saya terlebih dulu saja kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyon ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai *political independence*, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka!²⁰

Dalam pidatonya tentang dasar Negara, Sukarno menekankan bahwa Negara yang akan didirikan adalah semua untuk semua, bukan untuk perseorangan atau golongan tertentu saja. Untuk itulah dalam pidato selanjutnya Sukarno mengatakan:

Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saya memakai perkataan, “*kebangsaan*” ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *nationale staat*, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu *Nationale Staat* Indonesia bukan berarti *staat* yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia...²¹

Menurut Renan syarat sebuah bangsa ialah “*kehendak akan bersatu*”. Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: “*le desir d’être ensemble*”, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya “*Die Nationalitätenfrage*”, di situ ditanyakan: “*Was ist eine Nation?*” dan jawabnya ialah: “*Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*”. Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tat kala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata: “*verouderd*”, “sudah tua”. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah “*verouderd*” sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tat kala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tat kala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tat kala itu

belum timbul satu *wetenschap* baru, satu ilmu baru, yang dinamakan *Geopolitik*.

....maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt, menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah-air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "*le desir d'être ensemble*", tidak cukup definisi Otto Bauer, "*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*" itu. Maaf saudara-saudara saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa di Indonesia, yang paling ada "*desir d'être ensemble*", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan! Penduduk Yogyakarta adalah merasa "*le desir d'être ensemble*", tetapi Yogyakarta hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "*le desir d'être ensemble*", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "*le desir d'être ensemble*", di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000,- ini sudah ada "*le desir d'être ensemble*", sudah terjadi "*character gemeinschaft*"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000,000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya....

....karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: *Kebangsaan Indonesia*. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat....

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland über Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia²².

Prinsip kedua yang diusulkan oleh Sukarno adalah internasionalisme. Dalam kaitannya dengan internasionalisme, Sukarno berkata bahwa:

...*filosofisch principle* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan “*internasionalisme*”. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.²³

Prinsip ketiga yang diusulkan Sukarno adalah mufakat.

...dasar itu ialah dasar *mufakat*, dasar *perwakilan*, dasar *permusyawaratan*. Negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita

mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang sebagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengarahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini.... oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan....²⁴

Selanjutnya untuk prinsip keempat Sukarno mengusulkan prinsip kesejahteraan. Adapun maksud dari prinsip ini dikatakan sebagai berikut:

....prinsip nomer empat sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip *kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka*. ...maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara?... Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat,

tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh Karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya... saya seorang Islam, saya democrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap Kepala Negarapun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa Kepala-kepala Negara, baik *kalif*, maupun *Amirul mu'minin*, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan Kepala Negara, kita pilih.... oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu...²⁵

Prinsip kelima Sukarno mengusulkan prinsip ketuhanan. Adapun maksud ketuhanan dalam prinsip Sukarno adalah:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "*egoisme-agama*". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan²⁶.

Setelah mengusulkan lima prinsip Negara Indonesia, Sukarno juga mengusulkan nama dari lima prinsip tersebut yang diberi nama Pancasila. Adapun proses penamaan kata Pancasila. Menurut pengakuan Sukarno, sebelum menyampaikan pidatonya yang monumental pada malam 1 Juni 1945, waktu itu KH. Wachid Hasjim, Kahar Muzakir, KH. Masjkur menginap di rumah Muhammad Yamin,

pada waktu itu datang Sukarno yang meminta persetujuan atas pidato yang akan diucapkan pada 1 Juni 1945 yang merupakan kompromi antara pihak Islam dan nasionalis. Penamaan Pancasila menurut Sukarno berasal dari seorang temannya ahli bahasa. Pada tahun 1966, Sukarno mengatakan bahwa ahli bahasa tersebut adalah Muhammad Yamin. Yamin menyumbangkan kata 'sila' untuk rumusan Sukarno tersebut, sedangkan kata 'panca' berasal dari Sukarno sendiri.²⁷

....Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima pula jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa lima). Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi... atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara Tanya kepada saya, apakah "perasan" yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-nationalisme*.... Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan *socio-democratie*...

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu...maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong – Royong! "Gotong-royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara!

Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: *satu karyo, satu gawe...*²⁸

Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Sukarno menyampaikan bahwa setelah BPUPKI mengalami reses 40 hari, sebagian anggotanya tetap menjalankan tugas melakukan *kondankai* ke daerah-daerah, sepulang dari daerah, atas prakarsa Ir. Soekarno (Ketua *Cuo Sangi-in*) dalam rapat anggota Cuo Sangi-in yang dihadiri oleh 38 anggota akan melakukan pembahasan mengenai dasar negara. Selain itu juga akan dibentuk panitia yang terdiri atas sembilan orang yang kemudian disebut Panitia Kecil yang terdiri atas: Moh. Hatta, Muhd Yamin, Subardjo Maramis, Sukarno, Kiai Abdul Kahar Muzakar, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyono, H. Agus Salim. Panitia ini, kemudian disebut Panitia Sembilan. Panitia akan menyelesaikan tugasnya pada 22 Juni 1945. Hasil kerja Panitia Sembilan, dilaporkan kepada Ketua BPUPKI pada sidang kedua, pada rapat pertama tanggal 10 Juli 1945.²⁹ Dengan demikian sidang pertama BPUPKI selesai.

Pada 10 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kembali untuk membahas bentuk Negara. Sukarno mewakili Panitia Kecil melaporkan bahwa telah memeriksa usul-usul tertulis dan lisan yang masuk sebanyak 32 soal, tetapi jika digolong-golongkan usulan tersebut meliputi:

1. Golongan usul yang minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya.
2. Golongan usul mengenai dasar.
3. Golongan usul mengenai soal unificatie atau federatie.
4. Golongan usul mengenai bentuk negara dan Kepala Negara.
5. Golongan usul mengenai warga-negara.
6. Golongan usul mengenai daerah.
7. Golongan usul mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul mengenai pembelaan.
9. Golongan usul mengenai soal keuangan.

Mengenai usulan merdeka, dari usul tertulis sebanyak 26 anggota mengusulkan supaya Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Adapun alasan meminta Indonesia merdeka diselenggarakan selekas-lekasnya itu di antaranya adalah soal penghormatan bangsa. Seluruh dunia telah mengetahui bahwa *Dokuritsu Junbi Cosakai*, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia merdeka telah bersidang. Para pengusul menganggap bahwa seluruh dunia ingin lekas mendengar,

bagaimanakah sikap rakyat Indonesia terhadap soal kemerdekaan. Pengusul lain itu mengatakan, bahwa jika Indonesia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerjaan menyelenggarakan Negara Indonesia merdeka menurut kehendak kita, mungkin ada lain pihak yang akan menyatakan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara yang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan yang dia kehendaki. Untuk itu perlu segera selekas-lekasnya menyelenggarakan Indonesia Merdeka.

Dalam kaitannya untuk menetapkan Pembukaan UUD, Panitia Sembilan, setelah mengadakan pembicaraan mencapai satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar sebagai usulan panitia kecil.

“Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹³⁰.

Pada tanggal tersebut juga dilanjutkan dengan pembahasan bentuk Negara dan dasar Negara. Mengenai bentuk Negara Ki Bagoes Hadikoesoemo berpendapat bahwa:

...semua orang mufakat juga, bahwa republik yang akan dibangun akan memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya katakan, agar republik yang bersifat begitulah yang dibangun, orang akan menolaknya pula, karena dalam dua buah perkataan itu pada waktu sekarang ini menurut pendapat saya, terkandung setan dan iblis. Tentang maksudnya saya mufakat, apalagi untuk mempercepat datangnya kemerdekaan, yang Pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta, supaya kita segera bersatu. Hendaklah tujuannya saja diambil, dan jangan ditambah dengan “republik” yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun-temurun dan dimufakati oleh rakyat, dengan pemerintahan yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama “republik” itu, dapat juga disebutkan dalam bahasa Indonesiannya dengan singkat, ialah “kedaulatan rakyat”. Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita mencari yang lain. Pendeknya maksudnya sajalah yang diperlukan. Biar pun perbantahan disini tidak akan menimbulkan apa-apa, karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan itu tidaklah baik, sungguhpun di dalamnya ada sifat yang baik dan tidak menyebabkan sesuatu apa, tetapi memberi kesan keluar yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya. Saya mufakat dengan isinya dan dengan lekas datangnya Indonesia Merdeka. Dahulu saya tidak mufakat, tetapi karena kemudian tujuan itu yang saya rasa benar, saya sekarang mufakat sekali...³¹

Sementara itu Mr. Susanto Tirtoprodjo mengemukakan pendapatnya mengenai bentuk Negara. Susanto memberikan penjelasan tentang beda uni dan federasi. Dalam Negara uni: yang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanya dan melalui pemerintah pusat. Sedangkan dalam Federasi yang bercorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Pemerintah pusat berhak mengadakan aturan langsung untuk semua penduduk. Dalam *Statenbond*, pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan hanya dengan perantaraan pemerintah daerah.

...dengan mengingat itu saya memilih bentuk Uni, seperti juga yang dirancang di dalam rancangan Undang-undang Dasar yang telah saya usulkan. Tentang republik atau kerajaan, seperti saya alami di desa-desa, memang rakyat jelata hanya mengenal bentuk negara sebagai kerajaan mengenai pekerjaannya... maka

untuk menjamin persatuan, kami merancangkan adanya Kepala Negara yang dipilih untuk waktu yang tertentu tetapi tidak disebut presiden, dan bentuk negara yang tidak disebut republik, malahan dalam Undang-Undang Dasar dimuat kemungkinan, bahwa Kepala Negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat, dapat *dinobatkan jadi raja* kemudian hari...³²

Anggota BPUPKI Dahler menyampaikan pendapatnya bahwa yang paling penting adalah Indonesia merdeka selekas-lekasnya.

...pada sidang yang pertama pendirian saya tentang bentuk negara, dan saya minta bentuk negara itu hendaknya kerajaan. Sebab pendirian saya tentang politik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah puluhan tahun saya menguraikan pendirian saya tentang hal itu. Boleh dikatakan bahwa saya republikein 100%. Akan tetapi kalau orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta monarchie, jawab saya: karena waktu itu saya memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang, sayang sekali, saya lupa namanya, maka saya mengatakan kerajaanlah yang memang merupakan suatu corak kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya di dunia ini, sebab raja itulah yang selalu menjadi wakil Allah di dunia ini... Pikiran saya sekarang belum sampai kepada pertanyaan republik atau kerajaan, bagaimanapun juga, yang terutama dewasa ini ialah sudah tentu soal kemerdekaan. Bagaimanapun juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akal nya, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saya, lain daripada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada yang dapat menyatakan kita merdeka...³³

Dalam tanggapannya Mr. Muh. Yamin memberikan pandangannya tentang bentuk negara:

Keberatan, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat ringan, karena di antara segala perkataan yang sangat gemuruh, yang sangat lazim, ada banyak pula yang asing. Oleh sebab itu jangan kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan harus berhubungan juga dengan kemauan kita...

saya tetap berpendirian menolak federalism dan menyetujui unitarisme; kalau mendapat kesempatan dalam penyusunan aturan negara nanti, akan saya bicarakan dasar unitarisme, yaitu kesatuan Indonesia, tidak pecah-pecah, baik mengenai

pemerintahnya, maupun mengenai bangsanya, maupun daerahnya.

Oleh sebab itu alasan-alasan ini saya ringkas saja dengan permintaan, supaya dalam rapat ini juga tuan Ketua memungut suara tentang monarchisme atau republik, supaya kita sesudah itu dapat bekerja terus atas suatu dasar yang sudah tentu: dasar republik atau dasar monarchie.³⁴

Perdebatan mengenai bentuk negara ini memang menimbulkan diskusi agak panjang di antara anggota BPUPKI. Mr. Singgih dalam pendapatnya menyerahkan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih republik atau monarki, yang penting saat ini adalah merdeka yang diperjuangkan segera terwujud. Sementara itu bagi Dr. Sukiman mengenai bentuk negara republik atau kerajaan, Islam tidaklah memilih karena itu adalah hal yang sudah bersifat umum. Senada dengan Muzakkir, bentuk negara Islam mirip dengan republik. Maka ia mengusulkan bentuk negara persatuan. Anggota Sanusi dalam pendapatnya yang lebih menekankan pada pandangan Islam mengenai bentuk negara. Menurut pendapatnya ia cenderung memilih republik, karena kalau negara dipimpin seorang raja, maka tugasnya sangat berat, ia menjadi wakil mutlak dari Tuhan, tidak boleh dipotong-potong atau dibelah-belah, oleh karena itu yang menjadi raja harus orang yang sangat suci.

...seorang yang diangkat menjadi raja ia tidak boleh masih memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi yang dipikirkan harus umum saja. Jikalau raja masih terpengaruh oleh hawa nafsunya, oleh keduniaan, tentu baginya berlaku ayat yang mengatakan bahwa raja yang belum suci, yang tidak suci atau masih terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh keduniaan, bila ia datang ke suatu tempat ia akan menyebabkan kerusakan, kebinasan segala harta-benda rakyat; bahkan jiwa rakyat diambilnya, dimakan olehnya.

Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ajas ada firman Tuhan begini: Bila suatu bangsa akan membentuk suatu negara, memang asalnya ialah pengetahuan nyaman, kesucian, maka harus negara itu dibangkitkan, dibangun dengan *memilih raja* sebagai Kepala Negara. Jika negara memilih raja akan bahagian negara, belum sempurna, belum tinggi, kalau dijadikan negara, kerajaan harus mengangkat *seorang Imam*...³⁵

Mengenai bentuk negara, akhirnya dilakukan pemungutan suara. Dari 64 anggota yang hadir, pemungutan suara diselenggarakan dua kali. Hasil pemungutan suara pertama adalah: Republik 55 suara, Kerajaan 6 suara, tidak memilih 2 suara, blanko 1 suara. Hasil pemungutan suara kedua adalah: Republik 55 suara, Kerajaan 6 suara, blanko 1 suara, tidak memilih 2 suara.

BPUPKI juga membahas tentang wilayah Negara setelah merdeka. Untuk mencapai kesejahteraan negara ini menurut Yamin, ada empat hal yang berhubungan langsung dengan keinginan rakyat Indonesia. Pertama adalah daerah negara. Pembentukan negara Indonesia harus meliputi daerah negara yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, apa lagi dengan keinginan angkatan muda Indonesia. Mengenai daerah Indonesia ini Yamin mengatakan:

Selainnya dari pada itu garuda negara Indonesia tidak mau mengenal enclaves atau tanah kepunjaan dalam ruangan hidup bangsa Indonesia, yang telah ditentukan sedjak 4 ribu tahun oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi menjadi tumpah darah Indonesia yang tentu batas dan luasnya. Garuda negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi dengan gagahnja, meliputi daerah yang terhampar dari gentingan Kera ditengah Semenanjung Melaju dan pulau Weh dipuntjak Utara Sumatera sampai kekandung Sampanmangio di kaki gunung Kinibalu dan pulau Palma Sangihe disebelah Utara Sulawesi meliputi daerah yang delapan (Sumatera, Djawa, Borneo, Malaja, Selebes, Sunda-Ketjil, Maluku dan Papua) dengan segala pulau-pulau sekelilingnja³⁶.

Mengenai wilayah antara Sukarno dan Muhammad Yamin memajukan tuntutan atas kemerdekaan Indonesia dalam batas-batas tanah tumpah darah Indonesia dan tanah darah dapat pula dikatakan wilayah kediaman rumpun bangsa Indonesia meliputi disamping Hindia Belanda juga Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara Inggris, Timor Portugis, Philipina, bahkan Irian. Namun Hatta berpendapat bahwa Malaya tidak menginginkan bahwa ia tidak keberatan asal masuknya penduduk memang menghendaknya.³⁷

Tentang tuntutan Muhammad Yamin atas Irian Barat ini, ditolak oleh Muh. Hatta, menurut Hatta, wilayah kita tidaklah lebih daripada Indonesia atau dari Hindia Belanda dulu, bahkan wilayah itu mau dikurangi. Menurut Hatta tidak ada dasar bagi kita untuk mengambil Papua, karena bangsa Papua adalah bangsa Melanesia. Maka jika akan dicari persatuan asal, maka Melanesia tidak masuk tetapi Polinesia, yang

letaknya di tengah-tengah kepulauan Pasifik. Untuk itu Muh. Hatta menyarankan bangsa yang dimerdekakan ialah yang disebut 'To Indo', yaitu Indonesia yang dulu dijajah oleh pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Hatta menyarankan agar masalah Papua diserahkan kepada orang Papua sendiri untuk mengurusnya dan bangsa Papua kalau perlu diberi hak untuk merdeka. Karena untuk waktu beberapa puluh tahun, bangsa Indonesia merdeka belum sanggup untuk mendidik bangsa Papua sehingga menjadi merdeka.³⁸ Bahkan untuk wilayah Papua, Hatta lebih setuju untuk ditukar dengan wilayah Borneo Utara. Adapun pernyataan Muh. Hatta tersebut adalah:

Tuntutan kita dulu tidak lebih daripada Indonesia atau dari pada Hindia Belanda dulu, malahan dari dulu, ketika duduk dalam himpunan Indonesia saja sendiri mau mengurangi daerah itu. Bagian Papua saja serahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau pemerintah Nippon memberikan Papua jang dulu dibawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, saja tidak berkeberatan, hanja saja tidak menuntutja dan kalau sekiranya bagian Papua itu ditukar-tukar dengan Borneo Utara, saja tidak berkeberatan, malah bersjukur, karena seperti saja katakan dahulu, saja tidak minta lebih daripada tanah air Indonesia jang dulu didjajah oleh Belanda, tetapi kalau ditukar memang merupakan satu kebulatan.³⁹

Pendapat Muh. Hatta ini akhirnya juga ditolak oleh Sukarno, yang menyatakan bahwa ia mendukung 100% pendapat Muhammad Yamin. Sukarno mendasarkan pendirian bahwa dari sejak jaman Majapahit, wilayah Papua merupakan wilayah Majapahit, sehingga negara Indonesia merdeka nantinya harus termasuk Papua, dan juga Malaya, karena sebagian besar rakyat Malaya, menghendaki bergabung dengan Indonesia. Bahkan setelah rapat BPUPKI, pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika rombongan Sukarno Hatta kembali dari Saigon ke Taiping disambut oleh Intjek Ibrahim Yaacob di rumah kediaman panglima Besar Tentara Nippon untuk Malaya. Sesudah makan siang, berangkatlah rombongan itu ke lapangan terbang Taiping. Disanalah disatu kamar tamu di lapangan, Sukarno Hatta dan Intjek Ibrahim Yaacob mengatakan bahwa kemerdekaan Malaya turut bersatu dengan Indonesia, proklamasi kemerdekaan akan diumumkan antara minggu penghabisan bulan itu, dan dari Malaya direncanakan akan mengirimkan delapan orang delegasi ke Jakarta, guna turut

memproklamkan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan sementara negara Republik Indonesia termasuk Malaya.⁴⁰

Sutardjo Kartohadikusumo mengingatkan bahwa sebelum pergi ketika utusan 19 orang dari Jawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto, di situ berkali-kali, berulang-ulang diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil rakyat di Malaya, tidak saja putera-putera Indonesia yang bertempat tinggal di situ, tetapi juga wakil-wakil dari penduduk Malaya asli.

“Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa Indonesia dimerdekakan, janganlah hendak memperoleh keenakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonesia. Hendaknya, saudara-saudara jangan lupakan hal itu”. Pesan mereka, supaya kalau Indonesia Merdeka, Malaya dimasukkan dalam daerah Indonesia itu. Malah waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada P.T. Ir. Soekarno, supaya dari Jawa dikirimkan pemimpin-pemimpin yang cakap buat memimpin rakyat di Malaya untuk mencapai persatuan dengan bagian daerah Indonesia yang lain...

Dan kedua, tentang Papua. Saya hendak mengeluarkan pendapat saya bahwa pada hari yang lain kita boleh membicarakan soal Papua, tetapi soal sekarang, untuk sementara waktu, kita tunda saja soal Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari tangan kita, nanti Papua itu menjadi benda pertikaian, menjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saya harap, mudah-mudahan rapat ini menyelesaikan hal itu⁴¹.

Agus Salim dalam pandangannya tentang wilayah Negara mengatakan bahwa:

Oleh karena itu untuk menghubungkan perjalanan riwayat kita dengan masa sebelum perang ini, nyatalah bahwa *yang terlebih tepat, yang boleh menjadi pokok permusyawaratan kita adalah “To Indo” dan “To Indo” itu dalam perkataan internasional memang menjadi salinan daripada Nederlans Oost Indie; tidak lain daripada itu bukanlah daerah Selatan yang berlainan batasnya dengan To Indo itu menurut paham Dai Nippon...* Daerah Indonesia Merdeka pertama-tama ialah segala daerah Hindia Belanda Timur yang telah dibebaskan oleh Dai Nippon daripada kekuasaan Belanda dan kita bangsa Indonesia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan kepada Belanda, kemudian termasuk pula di dalamnya segala bagian daerah dalam kepulauan Indonesia dan daerah tanah Melayu seperti yang menjadi kehendak satu pihak itu dengan menyangkutkan masuknya itu kepada satu syarat, yaitu apabila suara rakyat daerah-daerah itu menyatakan kehendaknya masuk ke dalam

Indonesia, dengan memajukan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar memberi jalan cara bagaimana rakyat-rakyat di tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sandakan, Papua itu menyatakan kehendaknya itu dalam masa segala kita membicarakan hal ini...⁴²

Selanjutnya Maramis berpendapat bahwa, ia sependapat dengan Muh. Yamin dan Ir. Sukarno yaitu bahwa kita harus menilik soal itu juga dari sudut hukum internasional. Untuk itu kita menunggu, bagaimana sikap penduduk Malaya, Borneo Utara, Timor dan Papua yang di bawah kekuasaan negara Inggris, apakah mau bergabung atau Negara sendiri. Karena begitu banyak pendapat yang dikemukakan maka dibentuk Panitia Kecil untuk menentukan batas wilayah ini. Dari 66 anggota yang mengeluarkan suara maka diadakan pemungutan suara, yang disampaikan oleh Otto Iskandardinata.

Paduka tuan Ketua, suara yang dikeluarkan oleh anggota-anggota yang terhormat, ialah 66. Daripada 66 ini, yang jatuh kepada No. 2 ialah 39, kepada No. 1 ada 19, kepada No. 3 ada 6, yang blangko 1 dan kosong lain-lain 1, jumlahnya 66. Jadi dengan pilihan yang baru dilakukan ini yang dipilih, ialah No. 2. Sekianlah. (No. 2 ialah: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnya).⁴³

Berdasarkan hasil tersebut maka Ketua Radjiman menetapkan bahwa daerah yang masuk Indonesia Merdeka Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.⁴⁴

5.4. Pemikiran Tentang Undang-Undang Dasar

Mengenai UUD dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua 11 Juli 1945. Pada saat sidang dibuka oleh ketua Radjiman ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat di antaranya: Parada Harahap, Kolopaking, Wongsonegoro, Muh. Yamin dan Wiranatakusumah.

Parada Harahap menyatakan pendapatnya supaya komisi yang akan mengatur UUD dapat memperhatikan perasaan rakyat Indonesia dan dapat memungkinkan adanya pasal atau kalimat yang menyatakan perasaan itu. Dengan maksud supaya dari sekarang dan untuk selanjutnya dapat di peringati oleh turunan kita dan turunan bangsa Nippon. Tentang susunan kata-kata di serahkan saja kepada pertimbangan komisi.

Parada Harahap juga mengatakan bahwa:

Negara Indonesia yang hendak kita dirikan itu adalah salah satu anggota keluarga Asia Timur Raya. Kita tidak boleh melupakan negara kita sebagai matarantai dari pada Asia Timur Raya. Keadaan ini dalam kenyataan tentu kita akui dan saya percaya tidak ada bangsa Indonesia memungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dalam kedudukan internasional, baik di pandang dari sudut geo-politik maupun dari sudut-sudut lainnya, tentu adalah satu bagian dari pada Dai Toa. Tapi alangkah baiknya, bilamana kita sebagai bangsa yang seturunan dengan Dai Nippon, bangsa yang tahu berterima kasih, dapat meninggalkan suatu riwayat dari pada pendirian negara baru ini, sehingga tidak untuk sekarang saja, tetapi untuk turunan Dai Nippon dan untuk cucu kita, tercatat suatu hal yang tidak boleh dilupakan seperti yaitu janji yang telah kita berikan untuk sehidup-semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah negara kita merdeka.⁴⁵

Selain itu Parada juga menambahkan supaya dalam kata-kata itu yang mengatakan:

gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang bahagia, selamat dan sentausa, ada kirannya nanti dicantumkan sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan memperingati bahwa tercapainya kemerdekaan negara kita adalah juga dengan bantuan saudara kita Balatentara Dai Nippon. Keterangan yang mengatakan bahwa atas berkat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pun adalah suatu keterangan kepada dunia. Alangkah mulianya kalau bangsa Indonesia mengaku, bahwa disini terletak dorongan yang besar dari pada pemerintah bangsa Nippon. Bagaimana cara menyusun kata-kata itu dan di mana letaknya bagi saya pada tempat ini, saya hendak menyatakan, bahwa sebaik-baiknya jika komisi merancangannya.⁴⁶

Sementara itu anggota Kolopaking mengusulkan agar UUD yang dibuat lebih mudah dirubah, dia menyarankan jumlah pasalnya lebih kurang 15 atau 16 pasal. Liem Koen Hian yang mewakili Tionghoa minta agar seluruh orang Tionghoa dimasukkan sebagai warganegara Indonesia kelak. Dalam kaitannya dengan UUD ini, Muh. Yamin mengemukakan pemikirannya tentang perlunya segera ditetapkan UUD, mukadimmah UUD, persatuan Indonesia, sistem pemerintahan. Hal ini penting segera ditetapkan karena akan menjadi dasar dalam bekerja selanjutnya.

Menurut pandangan Pemerintah Pusat hendaklah berputar di antara enam kekuasaan, yaitu *"The six powers of Republic of Indonesia"*,

yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan (seluruh anggota dewan perwakilan adalah anggota MPR), Majelis Pertimbangan, Balai Agung dan Mahkamah Tinggi dan Kementerian.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam proses penyusunan UUD maka anggota BPUPKI dibagi dalam beberapa kelompok yaitu Bagian Undang-undang Dasar: Sukarno sebagai Ketua, Bagian urusan keuangan dan perekonomian: Hatta sebagai Ketua, dan Bagian pembelaan: Ketua Abikusno. Pada 14 Juli 1945 sidang membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Dalam masa sidang ini Sukarno menyampaikan laporan hasil kerjanya.

Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-undang Dasar. Dan kemudian lagi Undang-undang Dasarnya sendiri yang tersusun di atas 42 pasal.

Dalam pernyataan Indonesia Merdeka ini panitia menganggap perlu sekali memasukkan alasan-alasan apa sebabnya kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, sehingga Pernyataan Indonesia Merdeka ini berupa pula satu dakwaan, satu *aanklacht* di hadapan muka dunia atas penjajahan Belanda yang telah berlaku di atas tanah air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanya.

Bunyiya rencana pernyataan Indonesia merdeka ialah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Bangsa Indonesia di zaman dahulu telah mempunyai riwayat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui ke daratan Asia sampai ke batas-batas tanah Siam; negara merdeka, yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia, menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" beroleh kemenangan atas bangsa Indonesia yang memperlakukan bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan sangka baik, seperti dalam perniagaan. Memang dari mulanya bangsa Barat mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan senjata.

Maka jatuhlah lama-kelamaan kepulauan Indonesia itu ke bawah pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu; diputuskanlah olehnya perhubungan Indonesia ke luar dengan negara-negara merdeka yang lain-lain; direbut, dirampaslah dengan senyata-nyatanya segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang bernegara merdeka.

Kerajaan Belanda yang mewarisi hak-hak rampasan "*Verenigde Oost Indische Compagnie*" itu, dalam satu setengah abad pemerintahan atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnya melanjutkan semata-mata haluan politik yang lama itu, yaitu politik memecah-mecah persatuan kita, menghina, menginjak-injak rasa kehormatan kita, menghisap, memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa belanda sendiri.

Kejahatan niat dan tujuan itu tak dapat disembunyikan seterusnya di dalam dunia, yang di dalamnya bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekayaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sekuat-hebatnya semangat perlawanan bangsa Indonesia, yang memang tak pernah padam dan tak pernah dipadamkan, dalam lebih tiga abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia adalah sejarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi di dalam kalbu bangsa Indonesia tekad yang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa yang merdeka dalam satu negara yang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnya dengan Rusia dalam tahun 1905 M, mencurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan tak terpatahkannya kekuatan Barat, gugurlah angka kelebihan Barat, yang telah membelenggu bangsa-bangsa Timur itu beratus-ratus tahun.

Contoh Dai Nippon Teikoku yang beroleh kejayaan itu, melahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, yang didasarkan atas cita-cita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tercegah, tidak tertahan tumbuhnya, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapun kerasnya, betapapun buasnya betapapun ganasnya kekuasaan pemerintahan Belanda berikhtiar mencegah dan menindasnya.

Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang

Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih/memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembinaan kelahiran itu. Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tujuan-tujuan imperialisme barat, yaitu tuntutan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik yang dengan tegas dan tepat dijalankan olehnya, menuju pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, akhirnya telah menyebabkan Dai Nippon Teikoku menyatakan perang kepada Amerika dan Inggris. Perang Asia Timur Raya ini, yang berkebetulan dengan memuncaknya perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia yang lain, menjadilah sebagai puncak pertemuan perjuangan kemerdekaan segala bangsa Asia di daratan dan di kepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargai tinggi keutamaan niat dan tujuan Dai Nippon Teikoku dengan perang Asia Timur Raya itu, maka tiap-tiap bangsa dalam Asia Timur Raya atas dasar pembelaan bersama, wajiblah menyumbangkan sepenuh tenaganya dengan tekad yang sebulat-bulatnya, kepada perjuangan bersama itu, sebagai jaminan yang seteguh-teguhnya untuk keselamatan kemerdekaannya masing-masing.

Maka sekarang, telah sampailah perjuangan pergerakan Indonesia kepada saat yang berbahagia, dengan selamat-sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan yang hidup sebagai anggota sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Di depan pintu gerbang Negara Indonesia itulah rakyat Indonesia menyatakan hormat dan terimakasih kepada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaannya yang telah mangkat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan yang tersebut diatas itu, dan didorong dengan keinginan luhur supaya bertanggung-jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia dengan ini:

MENYATAKAN KEMERDEKAAN

Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang!

Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari konsep tersebut banyak masukan yang diterima baik secara redaksional maupun substansional. Abikusno Tjokrosujoso misalnya mengusulkan perubahan kalimat pertama alinea ketiga, diganti dengan satu kalimat berbunyi:

“Lebih dari tiga abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekusaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita “. Jadi kalimat menjadi, alinea ketiga: Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari tiga abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita, menghina, menginjak-injak rasa kehormatan....

Selain itu ada beberapa perubahan yang diusulkan lebih lanjut. Sanusi minta perkataan “bagi pemeluk-pemeluknya” di coret, sekarang ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikusumo minta juga di coretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan. Sudahlah hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Selain itu Anggota Yamin, menerangkan bahwa dalam pernyataan Indonesia Merdeka ini, hendaklah yang berkata bukan orang lain, melainkan rakyat Indonesia sendiri sehingga di ganti dengan “kami rakyat indonesia”, tidak menurut orang yang ketiga.

Rapat dilanjutkan pada rapat 15 Juli 1945. Dalam kesempatan ini Sukarno menekankan bahwa UUD yang dibuat haruslah membuang sifat-sifat individualisme sehingga persatuan dan kesatuan yang diutamakan. Hal ini didukung Moh. Hatta yang mengatakan:

...hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah

membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.... Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-Undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden, ialah Presiden jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan.⁴⁷

Dalam sidang ini pula Soepomo menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang mengatakan mengapa digunakan istilah 'Undang-Undang Dasar' bukan 'hukum dasar'.

...bahwa dalam agenda disebut "*hukum dasar*", akan tetapi saya dengan sengaja memakai perkataan "*Undang-Undang Dasar*". Apa sebabnya? Kita dalam membicarakan atau merancang peraturan yang resmi, yang akan mempunyai kekuatan undang-undang, harus berdisiplin dalam memakainya kata-kata undang-undang. Kita harus memakai istilah-istilah hukum juga untuk mengembangkan bahasa Indonesia... istilah: "*hukum*" itu dipakai sebagai salinan dari istilah: *recht* dalam bahasa Belanda. Artinya hukum itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Jadi segala *recht* yang tertulis dan yang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan "*hukum*" akan tetapi Undang-undang itu justru hukum yang tertulis. Oleh karena kami merancang *hukum dasar yang tertulis* maka saya memakai perkataan "*Undang-Undang Dasar*", jadi belum *hukum dasar*.⁴⁸

Selain itu Soepomo juga mengajukan beberapa perubahan pada pasal 23 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 36. Mengenai pasal Negara kesatuan. Hal-hal lain yang dibahas adalah masalah sistem pemerintahan Negara, presiden dan wakil presiden, warganegara, dan sistem pemerintahan. Uraian Soepomo tentang bentuk Negara kesatuan adalah sebagai berikut:

Bentuk *negara kesatuan (eenheidsstaat, unie)* telah ditetapkan dalam ayat 1 dari pasal 1 bab 1: Bentuk dan kedaulatan negara "Negara

Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Ayat 2 dari pasal tersebut mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kedaulatan adalah ditangan rakyat, yang menjelma dalam *Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Dengan lain perkataan: Majelis Permusyawaratan rakyat, ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat seluruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil disitu...⁴⁹

Susunan dan bentuknya Majelis itu diatur dengan undang-undang. Pasal 17 ayat 1 rancangan Undang-undang Dasar menetapkan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan. Dengan ayat ini, diharapkan seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan negara. Majelis menurut ayat 2 dari pasal 17 akan bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sedikit-dikitnya jadi kalau perlu dalam lima tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali. Pekerjaan Majelis ditegaskan dalam pasal 18: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara". Mengenai batas Negara, merujuk UUD berbagai Negara, batas Negara tidak dicantumkan dalam UU sehingga dalam usulan Panitia Perancang UUD tidak perlu mencantumkannya. Menanggapi usulan Hatta tentang hak berserikat dan berkumpul, berikut adalah kutipannya:

Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan di dalam Undang-undang Dasar agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu⁵⁰.

Undang-Undang Dasar yang kami rancang, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-Undang Dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam Undang-undang Dasar kita akan menantang sistimatik paham kekeluargaan. Hatta melanjutkan lagi pertanyaan yang mengatakan bagaimana haknya orang seseorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh Pemerintah. Dijawab oleh Soepomo yang mengatakan bahwa hal itu berdasar atas kecurigaan terhadap kepada Pemerintah yang dalam menyelenggarakan

kepentingan negara dianggap selalu menantang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pertanyaan Tuan Hatta ini timbul dari sikap individualisme, yang kami tolak.

Dr. Sukiman dalam kaitannya dengan MPR ini mengusulkan supaya majelis dipilih langsung oleh rakyat, karena merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia. Menanggapi usulan Sukiman, bahwa cara pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, Soepomo berpendapat bahwa bahwa cara itu lebih baik diatur dalam undang-undang, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, karena dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar disebut harus sesupel-supelnya, memuat aturan yang pokok. Tentang usulan pemilihan. Hal-hal yang tidak begitu istimewa tidak perlu masuk Undang-Undang Dasar. Selain itu Kolopaking juga mengajukan pendapatnya tentang kekhawatirannya bahwa UUD yang dibuat tidak bisa mencakup seluruh kebutuhan Indonesia merdeka kelak, sehingga banyak hal harus dimuat di UUD. Begitu juga anggota Buntaran mengusulkan supaya dalam pasal 32 tentang fakir miskin di pelihara Negara, dia menambahkan *"kesehatan rakyat seluruhnya dipelihara oleh negara"*. Itu akan menjamin kesehatan rakyat, yang menjadi sendi kekuatan rakyat dan kekuatan negara. Namun usulan Buntaran tersebut ditolak oleh Soepomo.

Anggota Yamin mengajukan usulan panjang lebar tentang perlindungan kemerdekaan, Daerah Republik, Badan Kekuasaan yang Enam yaitu: Presiden dan Wakil Presiden; Kementerian; Mahkamah Agung; Dewan Pertimbangan Agung; Dewan Perwakilan Rakyat; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kedaulatan Rakyat; Wakil Rakyat Negara, kementerian Negara; Kesejahteraan dan Ibukota; Warga Negara; Balai Agung dan Mahkamah Islam Tinggi. Hal-hal tersebut supaya dicantumkan supaya jelas dalam UUD. Namun sebagian besar usulannya ditolak oleh Soepomo.

Pada rapat tanggal 16 Juli 1945, ada anggota yang mengusulkan adanya pasal:

...*"Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam"*. Dasar usulan tersebut karena rakyat Indonesia terdiri daripada 90 atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimana pun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. Apa boleh buat, saya minta kepada saudara-saudara... agar supaya bisa lekas tersusun Undang-Undang Dasar; agar supaya bisa lekas pula tercapai Indonesia Merdeka. Inilah permintaan saya kepada saudara-saudara yang berdiri di atas paham kebangsaan. ...

Selain itu Sukarno juga mengusulkan dalam pasal 28 tentang syarat seorang Presiden.

...artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke 1 berbunyi: *"Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya"*. Ayat ke-2: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing."*

Saya minta, supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan yang hebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya suka-lah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya Indonesia Merdeka bisa lekas damai...⁵¹

Pada sidang kali ini Soepomo mengumumkan beberapa perubahan dan perbaikan dari pasal-pasal yang sudah dibahas, di antaranya Bab VI : "Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat", dibagi dua. Bab I tetap, Bab II berbunyi : "Majelis Permusyawaratan Rakyat". Pasal 17 dan pasal 18 menjadi pasal 2 dan 3 dari Bab II. Bab II menjadi Bab III, Bab III menjadi Bab IV, Bab IV menjadi Bab V, Bab V menjadi Bab VI, dan seterusnya. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 menjadi pasal-pasal bab "Dewan Perwakilan Rakyat". Dengan adanya perubahan tersebut maka draft UUD disetujui semua oleh anggota.

Setelah masa sidang tersebut, maka kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan cepat dari hari-ke hari. Ditambah lagi situasi Jepang banyak mengalami kekalahan di berbagai front. Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia semakin hari mengalami pematangan dan tinggal menunggu hari kejatuhan Jepang. Dan akhirnya saat itu pun tiba dengan diproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10.00 pagi. Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56, menyatakan kemerdekaan Indonesia.

...Saudara-saudara ! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno / Hatta

Setelah pernyataan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang lanjutan. Adapun anggota PPKI berjumlah 27 orang dengan ketua Sukarno⁵². Rapat diawali dengan laporan Moh Hatta tentang perubahan-perubahan terhadap draft UUD yang sudah disepakati pada bulan Juli 1945. Khusus mengenai Pembukaan UUD 1945 karena usulan yang dibuat terlalu panjang maka kembali kepada konsep yang dibuat Panitia Kecil dengan beberapa perubahan.

Selain itu pasal 6 alinea 1 menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Kata “Yang beragama Islam”, dicoret, oleh karena penetapan yang kedua, Presiden Republik orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini : “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat yang di belakang itu yang berbunyi : “dengan kewajiban” dan lain-lain dicoret saja. Pertama pasal 4: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan” ditambah dengan kata-kata: “menurut Undang-Undang Dasar”. Ayat 2 pasal 4: ini berhubung dengan usul, supaya, agar bisa lebih efisien jangan ada dua orang Wakil Presiden, tetapi seorang saja. Ayat 2 menjadi: “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. Berhubung dengan itu alinea 3 dicoret sama sekali.

Pada pasal 5 ada usul untuk menambah satu kalimat, supaya kedudukannya lebih jelas. Bunyinya: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Berhubung dengan perubahan menghilangkan Wakil Presiden yang kedua, maka pasal 6 ayat 2 menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden” dan lain-lain. Bukan “wakil-wakil”. Demikian juga pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 8 ayat 1, pada bagian kedua dari kalimat: “Ia diganti oleh Wakil Presiden”, “kesatunya” dihilangkan, dan seterusnya sampai habis waktunya dihilangkan. Ayat 2 dihilangkan. Demikian juga pasal 9: “Presiden dan Wakil Presiden”. Pada pasal 23 ayat 3 ditambah

satu kalimat: “Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Sekarang pasal 24 pada ayat pertama ditambahkan: “menurut undang-undang”. Pasal 25: “syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang” itu bunyi yang lama. Itu ditambah sedikit sehingga menjadi: “syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 26 berubah sama sekali⁵³. Selanjutnya Sukarno mengusulkan agar kata “mukadimah” diubah menjadi “Pembukaan” jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang bunyinya adalah sebagai berikut:

PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Konsep tersebut mendapat tanggapan dari beberapa anggota. Anggota Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan “menurut dasar kemanusiaan” lebih baik diganti dengan “ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang adil” dan seterusnya. Dan usulan ini akhirnya disetujui. Selain itu Ki Bagus juga mengusulkan perubahan terhadap kata: “maka disusunlah kemerdekaan itu” diganti maka disusunlah pemerintahan” hal ini mendapat tanggapan dari Sukarno sebagai berikut:

Anggota Ki Bagus Hadikusumo:

Di atas tuan Ketua: “maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu”, apa tidak “maka disusunlah pemerintahan”?

Ketua Soekarno:

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar. Kita lalu membuat Undang-Undang Dasar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo:

Yang disusun di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan, “maka disusunlah pemerintahan”.

Ketua Soekarno:

Tidak, kemerdekaan; pemerintahan kita susun dengan Undang-Undang Dasar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo:

Apa tidak bisa dirubah menjadi: “maka disusunlah pemerintahan itu”.

Ketua Soekarno:

Tidak, pemerintahan itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Sudah? Tuan-tuan lain? ⁵⁴

Hal yang didiskusikan secara serius adalah penggunaan kata ‘pintu gerbang’. Adapun diskusinya adalah sebagai berikut:

Anggota Oto Iskandardinata:

Kalimat kedua: “Pintu gerbang”. Itu tidak ada. Jadi baiklah diganti dengan kata-kata: “ke-Negara Indonesia”.

Ketua Soekarno:

“Mengantarkan rakyat Indonesia ke-Negara Indonesia”, tidak “ke depan pintu gerbang”? Saya kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan “pintu gerbang”, sebab Negara Indonesia belum ada.

Wakil Ketua Moh Hatta:

Rakyat kita, kita antarkan ke muka pintu gerbang saja. Kalau disebut ke-Negara Indonesia kita melangkah kepada grondwet. Itu bedanya. Sekarang kita bawa rakyat ke muka “pintu gerbang” saja⁵⁵.

Setelah diadakan perubahan terhadap kata ‘atas berkat rahmat Allah’ diganti dengan ‘atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa’ akhirnya Pembukaan UUD disetujui oleh seluruh anggota PPKI.

PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Disetujuinya Pembukaan dan UUD 1945 maka lengkaplah sudah Indonesia sebagai Negara beserta aturan. Melacak perkembangan ide atau ideologi nasionalisme Indonesia sangatlah menarik. Nasionalisme di Indonesia dan di dunia ketiga pada umumnya tidak terlepas dari perkembangan kolonialisme di daerah jajahan dengan eksploitasi kolonialisme, diskriminasi ras, dominasi politik dengan otorianisme, paternalisme, otokrasi sentralisasi yang mau tak mau menimbulkan reaksi dalam pelbagai bentuk mulai dari emansipasi, progresivisme, demokrasi, otonomi hingga revolusionisme. Nasionalisme adalah tingkat perkembangan cakrawala mental yang dicapai setelah melampaui parokhialisme dan etnosentrisme. Ideologi itu diperoleh sebagai dampak modernisasi pada umumnya dan integrasi politik golongan intelegensia khususnya. Pertumbuhan nasionalisme sebagai ideologi di Indonesia secara mencolok menunjukkan betapa pentingnya peranan ide dan kesadaran sebagai pangkal transformasi masyarakat, menuju masyarakat Indonesia yang cerdas dan sejahtera.

Catatan Akhir :

- 1) Dr. Suhartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.
- 2) Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, 1964, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, hlm.3.
- 3) Ir. Sukarno, *ibid*, hlm. 2
- 4) Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*; Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995, hlm 367 – 369.
- 5) *Ibid.*,
- 6) Pandji Poestaka, 15 September 1944.
- 7) Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta; Tinta Mas, 1978, hlm 932.
- 8) Anggota-anggota BPUPKI yang berasal dari *Cuo Sangi In* berjumlah 13 orang: Sukarno, (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat/Cuo Sangi In, Kaico), Jakarta; Buntaran Martoatmodjo, Wakil ketua (Fuku Kaico Cuo Sangi In), Jakarta; Samsi Sastrowidagdo, akuntan, Surabaya; Roosseno Sumohadikusumo R, Ir, pengajar pada Sekolah Teknik Tinggi, Bandung; K.H. Abdul Halim, ulama, Ciamis, Jawa Barat; Mas Aris, Dewan Pertimbangan Keresidenan (Syu Sangi Kai) , Pati, Jawa Tengah; Wachid Hasyim, Jombang, Jawa Timur; Purboyo, Pangeran Haryo, Surakarta; Oei Tiong Hauw, peranakan, Jakarta; Tan Eng Hoa, peranakan, Jakarta; Sartono, Raden Mas Mr, Jakarta; Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta; Baswedan, Abdurachman, peranakan Arab, Yogyakarta; Liem Koen Hian, peranakan, Jakarta; Dahler, P.F, peranakan Belanda, Yogyakarta.

Dari unsur pegawai (birokrat) berjumlah 22 orang: RMTA Suryo, Residen(Syucokan) Bojonegoro.; Kolopaking Purbonegoro, Bupati Banjarnegara; Soedirman R, Residen (Syucokan) Surabaya; Abdurrachman Pratalykruma, Wakil Residen (Fuku Syucokan) Kediri; Andi Pangeran Pattarani, kepala *Onderafdeling (Bunkenco)*, Bone, Sulawesi Selatan; Sutardjo Kartohadikusumo, Residen (Syucokan) Jakarta; Munandar Azhar Soetejo, Jawatan Listrik Bogor; Bupati Tegal (Tegal Kenco), Tegal; Kusumaatmaja Sulaiman Effendi, Mr, Hakim, Semarang; Wongsonagoro, KRT, Wakil Residen (Fuku Syucokan) Semarang; Latuharhary, Johanes, Staf ahli pemerintahan umum (Somu buzuki) Jakarta; Hindromartono, Mr, Staf Ahli Keresidenan (Bogor Syu Zuki), Bogor; A. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr, Kepala Urusan Agama (Sumuba), Jakarta; Sukiman Wiryosanjoyo, Dr, Yogyakarta; Sastrodiningrat, Dr K.R.M, Surakarta ; I Gusti Ketut Pudja, Penasehat (Sanyo) pada Pemerintah Militer Angkatan Laut (Minseibu), Sunda Kecil/Bali; Maria Ulfah Santosa, pegawai

Departemen Kehakiman (Shihobu Gunseikanbu), Jakarta; Sastromulyono, R, Mr. Hakim, Jakarta; Singgih, R.P. Mr. kepala Bagian Perencanaan Umum (Naimubu Koseikaco) Gunseikanbu, Jakarta; Soebardjo, Mr. Ahmad, Bagian Penerangan (Sendenbu) Gunseikanbu, Jakarta; Muhammad Hasan, Teuku, Staf Gunseikanbu tentara XXV, Sumatra, Medan; Djenal Asikin Widjajakusuma, guru besar Ika Dai Gakku (Sekolah Tinggi Kedokteran), Jakarta; Supomo, Prof, Mr R, Pengadilan Tinggi Jakarta; Abdul Kadir, Komandan Batalyon (Daidanco Peta), Cirebon; Samsudin, Mr, Walikota (*Syico*) Sukabumi; Muh. Yamin, Penasehat Departemen Penerangan (Sanyu Senden bu), Jakarta.

Anggota dari unsur ulama berjumlah lima orang: Sanusi, Achmad A.H, Sukabumi, anggota Badan Pertimbangan Keresidenan (Syu Sangi Kai), Bogor; Abdul Kahar Mudzakkir, Pegawai Bagian Agama Kesultanan Yogyakarta (Yogyakarta Koci); Masykur, K.H, Pesantren Singosari, Malang; Ki Bagus Hadikusumo, Ki Pengurus Besar Muhammadiyah, Yogyakarta; Mas Mansur, K.H, Surabaya; Abikusno Tjokrosuyono Anggota-anggota dari wartawan, ada enam orang: Rooslan Wongsokusumo, Sumenep, Madura; Sayuti Melik, Semarang; Oto Iskandar Dinata, Bandung; Parada Harahap, Semarang; Oey Tiang Tjoei, Surabaya; Hamidhan Abdul Anang, Banjarmasin, Borneo; Soekardjo Wirjopranoto, Jakarta¹

Anggota BPUPKI dari unsur organisasi resmi, berjumlah empat orang: Ratulangie G.S.S.J, Jakarta; Mohammad Hatta, Drs, (Wakil Pemimpin Tertinggi – Jawa Hokokai), Jakarta; Agus Salim, Pertimbangan Jawa Hokokai, Jakarta; Margono Djojohadikusumo, *Koperasi Tabungan (Syomin Kumiai)*, Jakarta

Anggota BPUPKI dari unsur pengusaha dan swasta, tiga orang: Dasaad, A.M, pengusaha swasta, Bangil, Jawa Timur; Iwa Kusuma Sumantri, R Mr, pengacara, swasta, Bandung; Maramis, Mr, swasta, pengacara, Jakarta

Dalam perjalanan waktu jumlah anggota BPUPKI ditambah enam orang, yaitu: K.H. Abdul Fatah Hasan, Banten; R Asikin Natanegara, Bandung; BKPA Soeryohamidjojo, Surakarta; Ir. Pangeran M. Noor, Bondowoso; Mr. M. Besar Mertokusumo, Jakarta; Abdul Kaffar, Sumenep, Madura

- 9) Restu Gunawan; *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia*; Yogyakarta: Ombak Community; 2005, hal. 45.
- 10) Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*; Jakarta: tanpa penerbit, 1960, hal 90.
- 11) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal 93

- 12) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal 94.
- 13) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal. 95
- 14) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal. 97.
- 15) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal 101
- 16) Muhammad Yamin, Perjoangan Democratie Diseloeroeh Doenia, *Majalah Partai Persatoean Indonesia*, No. 1, Desember 1939.
- 17) Muhammad Yamin, Perdjoengan Menoedjoe Parlement, *Majalah Partai Persatoean Indonesia*, No. 1, Desember 1939.
- 18) Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Tanpa Penerbit, tahun 1959, hal 513.
- 19) Muhammad Yamin, *op. cit*, hal. 239.
- 20) Lihat Sekretariat Negara RI, *op.cit*, lihat juga Muh. Yamin, *op.cit*
- 21) *ibid.*,
- 22) *Ibid.*,
- 23) *Ibid.*,
- 24) *Ibid.*,
- 25) *Ibid.*,
- 26) *Ibid.*,
- 27) Lembaga Soekarno Hatta, *ibid*, hal. 96.
- 28) Pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945, dimuat dalam Muh. Yamin Pembahasan UUD 1945, lihat juga Sekretariat Negara, *op. cit*
- 29) Sekretariat Negara, *op, cit*, halaman 94, lihat juga Ahmad SubardjoDjoyodisuryo. *Kesadaran Nasional*, Jakarta: 1978 hal: 279-280
- 30) Sekretariat Negara, *op.cit*
- 31) Sekretariat Negara, *op. cit*; Muh. Yamin, *op.cit*
- 32) Sekretariat Negara, *op.cit*, Muh. Yamin, *op.cit*
- 33) Sekretariat Negara, *op.cit*, Muh. Yamin, *op. cit*
- 34) *Ibid.*,
- 35) *ibid.*,
- 36) Daerah delapan yang merupakan tumpah darah nusantara (Indonesia) yaitu:
 - Daerah I Seluruh Djawa meliputi: Djawa, Madura, Galiyao (Kangean)
 - Daerah II Seluruh pulau Sumatera (Melaju) meliputi:
Lampung, Palembang, Djambi, Karitang (Indragiri), Muara Tebo, Dharmmacraya (Sidjunjung), Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rekan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandailing, Tamiang, Perlak, Barat (Atjeh), Lawas, (Padang, Lawas, Gajo Luas), Samudera (Atjeh) Lamuri (Atjeh Tiga Segi), Batam, Barus,
 - Daerah III Seluruh pulau Kalimantan (Tandjungnegara) meliputi:
Kapuas, Katingan, Sampit, Kuta Lingga (Serawak) Sedu (Sedang di Serawak) Kota Waringin, Sambas, Lawai (Muara Labai) Kadangdangan (kendangwangan) Landak,

Samedang (Simpang), Tirem (Peniraman), Sedu (Serawak), Berunai, kalka Saludung, Solot (Solok, Sulu), Pasir, Baritu, Sebuku, Tabalong (Amuntai) Tandjung Kutai, Malanau, Tandungpuri,

Daerah IV Seluruh Semenandjung Melaju (Malaka) meliputi:
Pahang, Hundjungmedini (Djohor), Lengkaksuka (Kedah), Saimwang (Semang), Kelantan, Terangganu, Nagor (Ligor), Pakamuar (Pekan Muar) Dungun (di Terangganu), Tumasik (Singapura, Shonan), Sanghyang Hudjung, Kelang (Keda, Negeri Sembilan), Keda, Djere (Djering, Petani) Kandjap (Singkep), Niran (Karimun)

Daerah V Disebelah Timur Djawa, seluruh Nusa Tenggara, meliputi:
Bali, Bedulu, Lwagadjah (Lilowan, Negara), Gurun, (Nusa Penida), Taliwang (Sumbawa), Sapi (Sumbawa), Dampo (Sumbawa) Sanghyang Api (Gunung Api, Sengeang), Bhima, Geram, Hutan (Sumbawa), Kadali (Buru), Gurun (Gorong), Lombok Mirah (Lombok Barat), Saksak (Lombok Timur), Sumba, Timor

Daerah VI Seluruh Sulawesi meliputi:
Bantajan (Bonthain), Luwuk (Luwu) Udamakatraja (Talaud), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (P. Kunjit), Selaja (Saleier), Solot (Solor)

Daerah VII seluruh Maluku meliputi:
Muar (Kei), Wandan (Banda), Ambon, Maluku (Ternate)

Daerah VIII Seluruh Papua (Irian Barat) meliputi:
Onin (Papua Utara), Seran (Papua Selatan)

Negara Teman:
Muang thai (Syanka), Dharmanagara, Martaban (Birma), Kalingga (Radjapura) Singghanagari, Tjampa, Kembodja, Anam (Yawana) lihat Muhammad Yamin, Jilid I, *op. cit.*, hal 141

37) Pada waktu itu ada dua aliran besar tentang kesadaran nasional di Malaya yaitu:

kesadaran nasional atas dasar menuntut Malaya untuk orang Melayu (Malaya for Malays) dasar ini diikuti oleh kaum burdjuis-feodalis yang memandang dari segi kepentingan golongan kaum radja dan kaum terpeladjar sudah mulai merasa terdesak hidupnja oleh pendjadjah dan kaum-kaum burdjuis asing.

Kesadaran nasional atas dasar menuntut hak hidup bagi seluruh rakjat yang tertindas supaya mendapat kemerdekaan, kesadaran inilah yang melahirkan idee kesatuan nasional Indonesia Raya, jaitu menurut pandangannja, seluruh darah keturunan suku bangsa Melayu (Malay-Archipelago) wadjib bersatu mendjadi satu bangsa besar, yang berdasar pada ikatan persatuan, darah keturunan, sedjarah,

- peradaban/kebudajaan, bahasa, kedudukan alam dan kepentingan hidup bersama, lihat Intjek Ibrahim Yaacob; *Sekitar Malaya Merdeka*, Djakarta: Kesatuan Malaya Merdeka Bhg. Penerangan, 1957, hal. 21.
- 38) Sekretariat Negara, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 168
- 39) Muhammad Yamin, Naskah jilid I, *op. cit*, hal. 205.
- 40) Intjek Ibrahim Yaacob, *op. cit*, hal 29, lihat juga Restu Gunawan, *op.cit*
- 41) Sekretariat Negara, *op.cit*, Muh. Yamin, *op.cit*
- 42) *ibid.*,
- 43) *Ibid.*,
- 44) J.H.A Logeman, *Keterangan-keterangan Baru tentang Terjadinya Undang-undang Dasar Indonesia 1945*, Jakarta: Aries lima, 1982.
- 45) Sekretariat Negara, *op.cit*
- 46) *Ibid.*,
- 47) Sekretariat Negara, *op.cit*
- 48) *Ibid*
- 49) *Ibid.*,
- 50) *Ibid.*,
- 51) Sekretariat Negara, *op.cit*
- 52) Anggota PPKI: Sukarno; Hatta; Supomo; Abd. Abbas; Radjiman; Moh. Hassan; Suroso; Hamdhani; Sutardjo; Ratulangi; W. Hasjim; Andipangeran; Ki Bagus Hadikusumo; I Gusti Ketut Pudja; Oto Iskandardinata; Wiranatakusuma; Abdul Kadir ; Ki Hadjar Dewantara; Surjohamidjojo; Mr. Kasman; Purubojo; Sajuti ; Yap Tjwan Bing; Kusuma Sumantri; Latuharhary; Subardjo; Dr. Amir
- 53) Sekretariat Negara, *op.cit*, Muh. Yamin; *op cit.*,
- 54) Sekretariat Negara, *op.cit.*,
- 55) Sekretariat Negara, *op.cit*

BAB VI

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN ORDE BARU

6.1. Pendahuluan

Di penghujung masa pemerintahan militernya di Indonesia, Jepang memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk membicarakan persiapan kemerdekaan melalui badan yang dibentuk pada Maret 1945. Ini merupakan salah satu bentuk realisasi ‘janji kemerdekaan’ yang akan ‘diberikan’ Jepang kepada bangsa Indonesia. Faktor yang melatarbelakangi tindakan itu adalah karena Jepang mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran melawan pasukan Sekutu. Badan yang diberi nama Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdiri dari 60 anggota. Panitia Hukum dasar terdiri dari 19 anggota di bawah pimpinan Ir. Sukarno. Sebagian anggota dari kepanitiaan itu duduk pula dalam Panitia Kecil Perancang UUD dipimpin Mr. Soepomo. Dalam melaksanakan tugasnya BPUPKI melaksanakan sidang-sidang resmi dan tidak resmi. Sidang resmi pertama 28 Mei hingga 1 Juni dan sidang resmi kedua antara 10—17 Juli 1945 untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan UUD yang dipimpin Dr. Radjiman Wediodiningrat. Adapun sidang tidak resmi dihadiri 38 orang anggota BPUPKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan kedua. Sidang-sidang ini membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 dibawah pimpinan Ir. Sukarno.

Merupakan catatan historis tersendiri bahwa para anggota itu bekerja dalam suasana masa perang dunia kedua. Itu artinya mereka bekerja dalam suasana yang tidak menentu oleh sebab itu ada semacam “tenggat” waktu yang mereka hadapi oleh karena dugaan kekalahan tentara jepang di berbagai medan pertempuran semakin nyata. Jika kemudian UUD 1945 sebagaimana yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dianggap sebagai konsitusi tertulis yang singkat, bahkan sering bersifat fleksibel, mungkin karena alasan waktu yang singkat itu.

Catatan dan rumusan sidang yang kemudian dihimpun sebagai risalah sidang BPUPKI (Sekneg RI 1996) kini dapat disebut sebagai dokumen politik bangsa yang sangat berharga. Berbagai pertanyaan sejarah yang diajukan mengenai pemikiran kenegaraan bangsa ini mestilah bertolak dari dokumen itu. Faham kolektivisme atau individualisme dan demokrasi adalah pokok pembahasan yang menjadi bahan perdebatan pemikiran mengenai kenegaraan Indonesia. Pada prinsipnya ada dua proses yang menjadi wahana untuk mewujudkan suatu negara yang kuat dan kehidupan masyarakatnya yang sejahtera yaitu melalui proses demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemimpin untuk tujuan negara bangsa yang kuat dan berdaulat sehingga dapat melindungi kepentingan nasional. Sedangkan demokrasi ekonomi adalah jalan yang ditempuh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur yang sejahtera.

Negara yang (kelak) akan dibentuk untuk tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menikmati kesejahteraan merupakan pemikiran yang semakin konkret dibahas di dalam sidang-sidang BPUPKI pada Mei-Juli 1945. Melalui proses perdebatan yang dinamis tujuan itu dapat dibaca pada rumusan alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. Sebagai suatu konsep sejahtera menunjukkan pada sifat dari suatu kondisi yang aman sentosa dan makmur atau selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran. Sedangkan kata “cerdas” menunjuk pada sifat sempurna dari suatu perkembangan akal budi manusia untuk mampu berpikir dan mengerti terhadap kehidupan sekitarnya.

Perspektif historis memberi sumbangan penting bagi upaya untuk memahami perjalanan pemikiran bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena pengalaman masa lalu sebagai bangsa yang dijajah oleh kolonialisme dan imperialisme asing itulah lalu tampak dengan jelas dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945: “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Sedangkan makna perjuangan bangsa dalam melawan dan mengakhiri penjajahan sehingga dicapainya kemerdekaan terungkap dalam alinea ke-dua “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Kemiskinan dan kebodohan adalah dua kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang terus menerus diperangi, justru ketika kemerdekaan dalam arti politik sudah dicapai. Itu artinya bahwa usia kemerdekaan Indonesia telah diperingati ke-68, masih saja terdengar adanya pertanyaan kapan kemerdekaan yang “sesungguhnya” telah tercapai. Itu artinya masih terdapat masalah mendasar bagi bangsa Indonesia yang belum diatasi dengan memuaskan, yakni kemiskinan dan kebodohan. Angka kemiskinan sekitar kurang lebih 30 juta jiwa penduduk yang dianggap moderat tentu harus disikapi serius. Demikian pula dengan data yang mengemukakan bahwa kurang lebih separuh penduduk Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana hidup sejahtera segera terwujud. Pengertian sejahtera seperti yang dimaknai sebagai makmur dan aman sentosa. Konsep makmur tentu menunjuk pada kondisi sosial-ekonomi yang baik yang mendukung kehidupan dasar manusia. Sedangkan aman sentosa mestilah menunjuk pada kondisi negara yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Permasalahan bangsa ini masih relevan, kalau bukan malahan isu-isu kedaulatan pangan sama krusialnya dengan kedaulatan negara dalam arti politik, yang justru kini semakin mencuat.

Tujuan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pemerintahan NKRI untuk mewujudkannya. Tulisan ini memaparkan perjalanan pemikiran bangsa mengenai kenegaraan dan pemerintahan dalam periode demokrasi : parlementer, terpimpin dan Pancasila. Tulisan ini tidak mengambil tema filsafat pemikiran atau sejarah pemikiran yang ketat, tetapi merupakan paparan sejarah mengenai pemikiran yang dikaitkan dengan sejarah dalam arti apa yang terjadi. Pemikiran di sini

dimaknai sebagai refleksi atau pantulan aktor sejarah dalam hal ini pemimpin atau elite bangsa dalam memikirkan kebaikan dan kemaslahatan bangsa yang mereka pimpin. Dalam hal ini pemikiran yang dilontarkan para tokoh bangsa merupakan fakta sebagai hasil dari refleksi atas kenyataan, yang merupakan tema penulisan sejarah.

Berbicara mengenai sejarah suatu prinsip atau konsep yang melekat pada dirinya adalah mengenai interpretasi. Taufik Abdullah dalam tulisannya mengenai hubungan sastra (*literature*) dan sejarah (*history*), mempertautkan antara karya novel dengan pemahaman sejarah. Jika perilaku dapat dianggap sebagai hasil dari suatu interpretasi dari aktor dalam menanggapi situasi di sekitarnya, maka dengan menggunakan novel dapat diperluas untuk mendapatkan landasan interpretasi itu. Opini, suasana hati (*mood*), perasaan, sentiment dan sejenisnya pada dasarnya tidak dapat direkonstruksi oleh sejarah, akan tetapi dapat dilakukan di dalam novel sebagai karya sastra. Lalu melalui novel ini pula sejarah intelektual atau sejarah pemikiran dapat ditulis. Lebih jauh Abdullah mengemukakan selain novel dapat menjadi sumber sejarah pemikiran ia juga sebagai indeks kesinambungan dan perubahan kultural (Abdullah 1986:233),

Meskipun yang akan tampak mendominasi sosok kepemimpinan yang dimunculkan pada diri Sukarno dan Soeharto, tetapi itu bukan berarti mengabaikan tokoh-tokoh di sekitarnya. Sebab sudah tentu pemikiran kedua tokoh bangsa dan negara itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dan interaksi dengan lingkungannya.

Sejarah bangsa telah menorehkan dua model kepemimpinan yakni Sukarno dan Soeharto yang begitu mendalam memberikan dampak kuat dalam perkembangan masyarakat bangsa. Mereka merefleksikan pemikiran politik kebangsaan dan kenegaraannya yang pada dasarnya memiliki komitmen yang sama. Juwono Sudarsono adalah satu di antara yang dengan tegas memberi predikat pada Presiden Sukarno sebagai bapak bangsa (*nation builder*) sedangkan Presiden Soeharto sebagai “bapak negara” (*state builder*). Dalam talian itu maka kedua tokoh tersebut diletakkan sama yang memiliki kedudukan setara dalam hal pemikirannya tentang bangsa dan negara.

Bagian akhir dari buku ini diberi judul **“Pemikiran kebangsaan dan kenegaraan dalam masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru”** dengan sub-sub sebagai berikut:

6.2. Kekecewaan Terhadap Demokrasi Parlementer : Kembali ke UUD 1945

Selepas perang kemerdekaan (1945-1949) muncul harapan yang tinggi dari masyarakat Indonesia agar segera terwujud hidup yang aman dan sejahtera. Tentu saja aspirasi tersebut sangat wajar mengingat perang telah mengakibatkan banyak penderitaan dan keadaan tidak menentu. Banyaknya prasarana yang hancur sehingga tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera memperbaiki keadaan perekonomian yang memenuhi harapan. Namun keinginan yang wajar itu tidak terpenuhi bahkan memunculkan rasa frustrasi yang berkepanjangan. Kehidupan bangsa dalam periode sesudah masa perang itu diwarnai dengan ketidakstabilan pemerintahan karena sering bergantinya kabinet. Banyak program yang seharusnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terbengkelai. Benih-benih kekecewaan terhadap kondisi itu mulai mengemuka.

Persoalan yang segera dihadapi bangsa Indonesia di awal periode itu justru yang mengemuka pada aspek politik adalah soal bentuk negara serikat dan konstitusi Sementara (UUUDS) tahun 1950. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerima “penyerahan kedaulatan” dari Belanda pada Desember 1949, bukan merupakan bentuk negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan. Tidak itu saja tetapi juga karena ada anggapan kuat bahwa bentuk negara federal yang sebagian besar terbentuk oleh karena disponsori H.J. van Mook maka hal itu tidak ada alasan lain kecuali untuk menghancurkan Republik Indonesia. Ide van Mook yang menawarkan bentuk negara yang cocok bagi masyarakat kepulauan yang beragam sukubangsa dan kebudayaannya dianggap logis dan oleh sebab itu diterima di banyak daerah. Van Mook kemudian mensponsori untuk menyelenggarakan Konferensi Malino 1946, yang merupakan awal dorongan pembentukan negara bagian atau federal di Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945. Gagasan ini dimungkinkan oleh karena melalui NICA yang hendak mendirikan kembali penjajahan, mendapat lahan yang subur dari sikap dukungan daerah terutama di luar Jawa.

Begitulah maka berbagai tuntutan dari berbagai kalangan dalam masyarakat dan daerah untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan RI. Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri berperan besar dalam upaya mewujudkan terbentuknya NKRI. Sementara itu UUD 1950 yang mengamanatkan praktik pemerintahan negara dijalankan dengan sistem parlementer dianggap tidak sesuai

dengan demokrasi yang berkepribadian bangsa Indonesia. Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang menyatakan konsitusi negara kembali ke UUD 1945 menandai bermulanya ciri kehidupan politik yang kemudian disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Periode 1950-1957 dalam sejarah bangsa kita memperlihatkan ketidakstabilan politik. Herbert Feith memilih istilah untuk menyebut periode itu sebagai masa “demokrasi konstitusional”.

Menurut konstitusi 1950 sistem pemerintahan kita adalah parlementer. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Wilopo menyebut periode ini sebagai “zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya”. Wilopo juga menyebut masa ini sebagai “zaman kabinet silih berganti”. Proses demokratisasi sebenarnya telah dicoba dalam periode itu. Feith mengemukakan mengenai faktor yang menyebabkan kegagalan zaman demokrasi parlementer. Terdapat enam faktor: kaum sipil memainkan peran dominan; partai-partai politik mempunyai kedudukan sangat penting; persaingan untuk merebut kekuasaan menghargai “*rules of the game*” yang erat dengan konstitusi; kebanyakan elite politik memiliki jenis kesetiaan yang berkaitan dengan demokrasi konstitusional; kebebasan sipil dilanggar dan pemerintah menggunakan kekerasan.

Kegagalan demokrasi parlementer menurut Wilopo, yang menyebut periode itu sebagai “zaman pemerintahan partai-partai”, karena seringnya terjadi pergeseran dukungan partai terhadap kabinet. Pergeseran itu dapat berarti adanya partai yang menarik dukungan kepada pemerintah dengan menarik menteri-menterinya mundur, sehingga kabinet tidak dapat bertahan lama. Kelemahan lain adalah soal tawar-menawar alias “dagang sapi” di dalam pembentukan kabinet. Fraksi-fraksi besar pendukung kabinet tidak selalu mampu menanggulangi kumpulan fraksi-fraksi sedang dan kecil, yang selalu dapat menjadi oposisi, dan akhirnya menjatuhkan kabinet.

6.3. Kepribadian Nasional Masa Demokrasi Terpimpin

Gagalnya percobaan untuk menerapkan demokrasi parlementer telah mendorong lahirnya jenis tawaran baru demokrasi yang lain yang disebut “demokrasi terpimpin”. Protagonis sistem politik Indonesia dalam periode berikutnya itu adalah Presiden Soekarno yang didukung militer, khususnya Angkatan Darat. Presiden Soekarno muncul kembali di panggung politik setelah negara menghadapi ancaman perpecahan

bangsa. Faktor pemersatu pada diri Soekarno tampaknya menjadi alternatif yang ditunggu-tunggu, setidaknya demikian Soekarno mempersepsikan dirinya. Ia melihat bahwa sistem politik masa lalu itu tidak sesuai dengan “kepribadian bangsa”. Dengan tegas ia mengatakan bahwa demokrasi seperti itu (maksudnya “demokrasi parlementer”) adalah demokrasi liberal.

Ketidaksabaran Presiden Soekarno dalam untuk mengakhiri demokrasi parlementer sudah terlihat ketika ia sebagai Presiden menunjuk Soekarno sebagai seorang warga negara untuk menjadi formatur pembentuk kabinet sesudah kabinet Ali Sastroamidjojo II (1957). Maka terbentuklah kabinet karya yang dipimpin oleh Ir. Djuanda. Apa yang dimaksud “kepribadian bangsa” oleh Presiden Soekarno adalah jiwa gotong-royong yakni sebagai ciri sekaligus kekuatan bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan yang dihadapinya. Jelaslah dengan cara pandang demikian, maka periode yang baru saja dilalui (1950-1957) dianggap sebagai “penyimpangan dari pola dasar kepribadian nasional”. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno kini juga memberi penilaian tertentu terhadap revolusi fisik, nama yang ia berikan pada periode tahun 1945-1949.

Dengan konsepnya mengenai “revolusi yang belum” selesai, Presiden Soekarno menganggap bahwa maklumat politik (Bung Hatta) tanggal 1 November 1945 sebagai penyebab arah “revolusi kita” telah berubah kiblatnya dari arah dan nada yang revolusioner menjadi nada yang kompromistis, dan akhirnya di antara sekian jalan kompromi (Linggarjati dan Renville), “revolusi kita” harus tunduk pada hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah menelurkan UUDS-Republik Indonesia Serikat (RIS). Bagi Soekarno UUD itu bukan saja jauh bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga sama sekali mengubah bentuk negara kesatuan RI menjadi negara RI. Sekalipun RI masih ada tetapi berubah statusnya hanya sebagai sebuah negara bagian.

Dilihat dari perspektif Soekarno, yakni menjadikan revolusi sebagai konsep yang terus bergejolak, pandangan ini terlihat dalam periode 1955-1959 sebagai “kelip api dalam kegelapan”. Dalam periode ini tampak ketidaksabaran Presiden Sukarno dalam “mencampuri” pemerintahan yang sesungguhnya bukan merupakan kewenangannya. Itu karena sebagai ‘hanya’ kepala negara ia tidak boleh secara langsung turut campur urusan eksekutif yang dijalankan oleh seorang perdana menteri. Tampaknya kemudian bahwa Presiden Sukarno sudah tidak lagi menyukai banyaknya partai politik yang dianggapnya telah

menjadikan kehidupan tidak stabil. Jika dicermati lebih dalam, kekuatan pendukung tindakan Presiden Soekarno mengubur “demokrasi liberal” tak dapat lain adalah peran tentara Angkatan Darat (AD). Munculnya kekuatan tentara perlu dilacak dari peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 1952. Suatu peristiwa kontroversial di dalam sejarah kontemporer Indonesia terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 di Istana Merdeka, Jakarta. Ribuan orang berunjuk rasa yang menyerbu gedung parlemen memporakporandakan sejumlah dokumen dan peralatan ruangan.

Sementara itu pasukan artileri AD mengepung dan mengarahkan moncong-moncong senjatanya ke Istana. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa maksud pasukan itu. Apakah mereka tengah mengancam presiden atau hendak melindunginya (Idris, 1996: 136-142). Kepala Staf dan Wakil kepala Staf AD di damping Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, menghadap Presiden Soekarno. Mereka mendukung demonstrasi tentara untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan Parlemen (Sementara).

Mereka juga menolak campur tangan politikus sipil, terutama yang berasal dari PNI di Parlemen ke dalam urusan intern tentara. Pihak tentara melihat campur tangan itu sebagai batu sandungan bagi proses modernisasi tentara revolusioner. Dengan didampingi Wakil Presiden Hatta dan sejumlah menteri, pembicaraan menjadi panas, dan Presiden Soekarno tidak memenuhi tuntutan mereka. Soekarno lalu berpidato di depan massa demonstran dan mengatakan: “Saya tidak ingin menjadi seorang diktator”. Peristiwa 17 Oktober 1952 itu berakibat timbulnya gejolak di dalam tubuh tentara AD sendiri. Muncullah dua blok, yakni kelompok yang merencanakan pembangunan AD yakni Simatupang dan A.H. Nasution, kelompok pro peristiwa 17 Oktober dan kelompok Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) yakni Kolonel Bambang Supeno dan Zulkifli Lubis, kelompok yang anti demonstrasi 17 Oktober.

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan awal ketegangan berkepanjangan antara pandangan “revolusi belum selesai” dan kebutuhan konsolidasi dan rasionalisasi” tentara. Inilah untuk pertama kalinya tentara terlibat dalam kancah politik nasional. Ketidakpercayaan militer terhadap politisi sipil telah mendorong pemimpin-pemimpinnya mengkonseptualisasikan pemikiran tentang eksistensi yang tepat. Mereka menyebut dirinya sebagai “anak kandung revolusi” dalam konstelasi politik di sebuah negara bangsa yang baru berdiri.

Sebagai republik yang masih muda, Indonesia mencoba menerapkan kehidupan demokrasi dengan dinamika yang kompleks terkait dalam aspek internal dan eksternal. Dalam aspek ke dalam masih ada masalah kedaulatan wilayah Irian Barat (Papua) yang belum masuk ke dalam negara kesatuan Indonesia. Perjuangan untuk membebaskan Irian barat berjalan panjang dan menimbulkan pertikaian partai-partai politik dan pengeluaran anggaran sehingga memperberat perekonomian negara. Masalah keamanan dalam periode ini ditandai dengan gejolak di beberapa daerah bahkan sampai menimbulkan gerakan dan pemberontakan terhadap negara. Gerakan Darul Islam yang muncul pertama kali di Jawa Barat pada tahun 1948 dipimpin S.M. Kartosuwiryo, mendapat dukungan dan meluas pada awal tahun 1950-an di Aceh dipimpin Daud Beureueh dan di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar.

Sementara itu PRRI/Permesta meletus di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1957-58. Terlepas dari apakah peristiwa tersebut sebagai suatu pemberontakan atau bukan latar belakangnya adalah karena masalah ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Dilihat dari perspektif keindonesiaan, fakta ini merupakan masalah integrasi bangsa.

Bagaimana pemikiran para pemimpin bangsa menghadapi permasalahan kehidupan masyarakat yang muncul di kalangan para pemimpin bangsa masa ini sebagaimana dikelompokkan Herbert Feith: *solidarity maker*, (SM) dan administrator (Adm). Kelompok SM memiliki kemampuan membangun dan memperkuat solidaritas yang berperan mempersatukan bangsa dalam menghadapi ancaman: neo-kolonialisme dan imperialisme, tujuan utopis dan administrators lebih masa depan. Ciri-ciri Tokoh utama kelompok ini adalah Presiden Soekarno dengan nama-nama yang menjadi perdana menteri dalam kabinet parlementer seperti Wilopo, Ali Sastroamijoyo, sedangkan kelompok administrasi dengan keahlian mengelola pemerintah lebih secara teknis legal formal berlandaskan hukum.

Kepemimpinan revolusi berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan selama periode demokrasi parlementer. Pada prinsipnya mereka berbeda pandangan terhadap pilihan apakah “revolusi sudah selesai” atau “revolusi belum selesai”. Mohammad Hatta dan kelompoknya menganggap bahwa “revolusi sudah selesai”. Sesudah perang menghadapi Belanda yang diakhiri di meja perundingan KMB--setelah didahului dinamika perlawanan bersenjata dan diplomasi—Hatta

berpendapat bahwa pasak-pasak pada tiang masyarakat bangsa yang longgar dan bangunan yang nyaris hancur segera diperkuat, dan jangan dilanjutkan dengan revolusi selanjutnya. Kondisi yang aman merupakan modal bangsa untuk membangun dan segera mewujudkan kemakmuran bersama.

Sebaliknya, Sukarno dan kelompoknya berpendapat bahwa “revolusi belum selesai”, alasannya bahwa meskipun benar Belanda telah kalah, tetapi musuh bangsa Indonesia masih tetap ada dalam bentuk baru yakni neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Bagi Sukarno revolusi merupakan alat vital untuk menggelorakan perlawanan rakyat terhadap musuh-musuh tersebut.

Masa demokrasi terpimpin ternyata tidak memberi jawab atas masalah bangsa. Wacana dan pemikiran Presiden yang terus digaungkan secara retorik memang memukau dan memesona rakyat sebagai pendengar setia. Soekarno sendiri terpukau pada dialektika revolusi yang terus digelorakan.

Perbedaan Sukarno dan Mohammad Hatta mulai tampak secara tajam sejak awal 1956. Puncaknya adalah dengan pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Dalam perkembangan selanjutnya setelah dikeluarkannya Konsepsi Presiden Soekarno 21 Februari 1957, Mohammad Hatta segera memberi tanggapan berupa surat pribadi. Ini petikan surat pribadi Bung Hatta kepada Bung Karno tanggal 27 Februari 1957 :

“Bung Karno,

Sejak saya kemaren sore kembali dari Bandung sampai hari ini sudah banyak keluhan kesah dari masyarakat yang disampaikan kepada saya, bahwa pemuda-pemuda bersenjata yang berpakaian militer giat sekali mengadakan terror untuk menekankan supaya konsepsi Saudara diterima. Bung Tomo didatangi oleh seorang dengan bersenjata untuk memaksakan, supaya ia menyetujui “konsepsi Bung Karno”. [...] Djamaludin Malik sudah dua kali diancam dengan pistol, sehingga dia sekarang menyingkir ke Sumatera Tengah. Kiai Dahlan didatangi di rumahnya dan diancam supaya menyetujui konsep Bung itu. Nyonya Mr. Maria Ulfah Santoso dibawa dengan paksa dengan jeep dari gedung sensor film ke markas besar pemuda TP di Jalan Waringin, katanya untuk mempertanggungjawabkan pemutaran film cabul, tetapi diakhiri dengan gertak supaya konsepsi Bung Karno itu disetujui. [...] Kalau konsepsi Saudara itu oleh pengikut-pengikut Saudara, yang sering bertindak *plus royalists que de le roi*, mau

dipaksakan menerimanya dengan jalan terror dan intimidasi, maka konsepsi itu *pada dasarnya* sudah gagal” (Lubis ed, 1986: 18-19).

Umumnya kemudian orang percaya bahwa dengan mengadakan pemilihan umum akan menjadi jalan bagi kestabilan politik dan pemerintahan. Sejak dirancang pada tahun 1946, pemilu dapat dilaksanakan pada tahun 1955 yakni untuk memilih anggota Konstituante yang akan menetapkan UUD dan anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Meskipun Pemilu 1955 sebagai proses demokrasi merupakan prestasi tersendiri yang tercatat dengan tinta emas sejarah karena berjalan lancar aman dan sukses, namun dalam kenyataan kestabilan politik tidak segera terwujud.

Pertikaian partai dalam membentuk kabinet masih terus berlanjut. Tuntutan PKI sebagai peraih keempat peroleh terbanyak Pemilu untuk membentuk “kabinet empat kaki” tidak terlaksana. Sementara itu gejolak daerah dengan lahirnya PRRI dan Permesta mendorong Presiden Sukarno tampil dengan pemikiran untuk menjadikan nilai-nilai kepribadian bangsa sebagai landasan membangun bangsa. Pada bulan Februari 1957 Sukarno mengemukakan Konsepsi Presiden.

Pemilihan Umum 1955 yang semula diharapkan sebagai jalan keluar yang dapat mengatasi kemelut dan ketidakstabilan politik ternyata tidak menjadi kenyataan. Pemilu sebagai upaya untuk memperkuat sistem politik demokrasi liberal tidak berhasil. Ketidakstabilan politik menjadi faktor minimnya upaya yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan stabilitas politik, Presiden Sukarno mengumumkan gagasannya pada 21 Februari 1957 diberi judul “menyelamatkan republik Indonesia”. Pernyataan ini dikenal sebagai “Konsepsi Presiden” yang menegaskan bahwa pada dasarnya bahwa sistem politik yang terbaik dan paling cocok bukan praktik demokrasi liberal yang liar, demokrasi “zonder” pimpinan. Lebih lanjut Presiden Sukarno menganjurkan agar dibentuk pemerintah “stijl baru”.

Pidato Presiden Sukarno untuk memperbaiki sistem politik dan kehidupan bernegara yang sedang mengalami keterpurukan meskipun Pemilu sudah diselenggarakan, tidak cukup hanya dengan melakukan perombakan kabinet.

Presiden mengatakan “ ... tetapi kita harus merombak gedung ini sama sekali; bukan saja merombak tiang-tiangnya, peratapannya, dinding-dindingnya, tetapi kita rombak sama sekali sampai ke fondamen-fondamennya. Dan kita mengadakan fondamen baru, mendirikan gedung baru sama sekali, yaitu gedung ketatanegaraan Republik Indonesia style baru ..[...] telah lebih daripada 11 tahun ini, kita tidak pernah mencapai kestabilan pemerintahan. [...] memang kita selalu gandrung kepada demokrasi dan ingin menyelenggarakan demokrasi itu, oleh karena memang demokrasilah yang menjadi api pembakar hati kita, api pewahyu daripada segenap tindakan kita. Tetapi menurut keyakinan kita sebagai hasil pengalaman yang 11 tahun ini, demokrasi yang kita ambil, demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi yang tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. yaitu apa yang kita namakan demokrasi Barat, namakanlah ini demokrasi parlementer. Tetapi tegas bagi saya demokrasi yang kita pakai 11 tahun ini adalah satu demokrasi impor, demokrasi yang bukan demokrasi Indonesia. [...] bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap ekses-ekses daripada sekadar memakai barang impor. Segenap ekses-ekses daripada penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri” (Kumpulan Pidato Bung Karno, 2001, 33-37).

Ada dua gagasan yang harus diwujudkan pertama dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas orang-orang yang mewakili semua partai atau semua fraksi-fraksi yang mencerminkan seluruh perimbangan kekuatan yang di dalam DPR. Gambarnya seperti yang dikemukakan Presiden dengan istilah “*alle leden aan de werk en eet tafel*”, bahwa “semua anggota dalam kerja dan meja makan bersama”. Kedua, dengan membentuk Dewan Nasional. Gagasan itu didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat berbagai golongan di dalam masyarakat yang berdasarkan fungsi dan pekerjaannya ikut dalam menentukan kehidupan negara, yang terwakili di dalam DPR.

Pada awal tahun 1959 tampak gejala makin berkurangnya ancaman terhadap disintegrasi bangsa dilihat dari gejolak dan pemberontakan daerah. Dalam pidato peringatan HUT 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno telah menemukan jawab atas permasalahan yang bersifat dualistik: “dualisme antara pemerintah dan kepemimpinan revolusi” antara “masyarakat adil makmur dan masyarakat kapitalis” antara “gagasan revolusi belum selesai dan kebutuhan akan konsolidasi”.

Situasi politik dan dukungan kuat tentara di bawah Jendral A.H. Nasution—yang telah belajar dari pengalaman masa lalu—telah memungkinkan Presiden Sukarno mengajukan gagasan dijalankannya demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin telah ditegakkan dengan “kembali ke UUD 1945” dan menolak UUD Sementara tahun 1950 dan dengan membubarkan parlemen yang dibentuk sebagai hasil Pemilu 1955. Tindakan yang dilakukan Sukarno ini menjadi salah satu faktor bagi terkendalanya perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini menandai masa transisi perjalanan ke demokrasi terpimpin sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev.

Demokrasi terpimpin seperti dikatakan Sukarno merupakan “penemuan kembali revolusi kita rakyat Indonesia”. Dalam sistem politik ini Presiden Sukarno bukan saja sebagai Presiden melainkan juga sebagai Kepala Negara tetapi juga pemimpin besar revolusi. Dalam peristiwa 17 Oktober 1952 tentara gagal memaksa presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen.

Sejak awal 1963 muncul suatu upaya pencarian kembali landasan ideologi Demokrasi Terpimpin yang esensial. Wongsonegoro menekankan hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan istilah kawula-gusti. Rakyat harus dibimbing sebaliknya pemimpin berkewajiban mengarahkan dan melindungi rakyat. Ini bukan sifat paternalistik. Wongso sudah sejak Persatuan Indonesia Raya (PIR) yang dibentuk pada 1948, setelah menyatakan keluar dari PNI. Roeslan Abdulgani menyatakan kembali relevansi ide-ide Ki Hajar Dewantara bagi revolusi Indonesia. Sementara itu Soepomo menekankan pada kerukunan dan persatuan spiritual dalam pidato-pidato BPUPKI pada 1945. David Reeve mengemukakan terdapat empat polemik dalam perdebatan tentang kemana arah demokrasi terpimpin (Reeve, 2013:244-249).

Pertama, berasal dari Manifest Kebudayaan (Manikebu) yang dikeluarkan pada 17 Agustus 1963. Sesungguhnya selalu terdapat hubungan antara kebudayaan dan politik, sejak tahun 1920-an. Namun sejak tahun 1950-an terjadi perpecahan mendalam antara para penulis yang mengajukan tanggungjawab seniman untuk memilih tema dan presentasi dan mereka yang menyokong fungsi seni dalam melayani revolusi.

Tema kedua disokong secara lebih agresif pada akhir dekade 1960-an oleh lembaga seniman PKI yang terorganisasi, yaitu Lekra. Isu impor film Amerika berkembang menjadi tema polemik ketiga. Dibentuk Komando penganyangan Film Imperialis Amerika, sedangkan tema

polemik keempat adalah mengenai isu reformasi agrarian. Kedua isu terakhir ini menjadi tema yang berdampak bagi keseluruhan sistem politik.

Dalam karyanya “Demokrasi Kita” Mohammad Hatta (1960) menegaskan bahwa “sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Apalagi sejak dua tiga tahun yang akhir ini kelihatan tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang dasar. Presiden, yang menurut Undang-undang dasar tahun 1950 adalah Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan ikut dapat diganggu-gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatir kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tiada memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang ganjil itu diterima begitu saja oleh Parlemen dengan tiada menyatakan keberatan yang prinsipil. Malahan ada yang membela tindakan Presiden itu dengan dalil “keadaan darurat”.

Kemudian Presiden Sukarno membubarkan Konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaannya membuat undang-undang dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit pada 5 Juli 1959 dinyatakan berlakunya kembali undang-undang dasar tahun 1945.

6.4. NEFOS Versus OLDEFOS

Sukarno melihat kolonialisme dan imperialisme sebagai musuh-musuh revolusi yang tidak pernah akan hilang. Kalaupun bentuknya berubah esensinya tetap. Mereka akan tampil dengan bentuk-bentuk baru. Oleh karena semangat dan jiwa revolusioner harus selalu ditanamkan di dada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks itu Sukarno bertekad dan berkeyakinan Indonesia adalah bangsa yang besar justru yang karena keberhasilannya memperjuangkan dalam merebut kemerdekaan sudah terbukti dalam sejarah. Inilah kekuatan negara baru yang terus muncul dan berkembang (“*new emerging forces*”, atau NEFOS) menjadi kekuatan dunia yang hendak menandingi kekuatan lama, negara yang sudah mapan (*old developed forces* atau OLDEFOS).

Pemikiran Sukarno mengenai Indonesia sebagai bangsa yang besar direfleksikan ke dalam monumendan bangunan seperti Tugu Monumen nasional yang mencerminkan semangat menentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Selain itu Monas juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Pada 27 Juni 1960 di Istana Negara

Jakarta, Presiden Sukarno menerangkan makna Tugu adalah sesuatu yang menjulang:

“ ... adalah laksana satu *‘greep naar de sterren’* hendak memegang bintang menjulang mencapai bintang di langit.. Buatlah rakyat itu rakyat yang berjiwa. Buatlah Rakyat itu yang menuju pula kepada suatu kebudayaan yang tinggi. Buatlah Rakyat itu satu Rakyat yang mempelajari dan melatih dirinya dalam yang tinggi. Buatlah Rakyat itu Rakyat yang bangga atas dirinya sendiri. Buatlah Rakyat itu satu Rakyat yang bangga atas perjuangannya. Buatlah Rakyat itu Rakyat yang menghormati pahlawan-pahlawannya yang telah gugur sesuai dengan ucapan saya: bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati pahlawan-pahlawannya yang gugur; bangsa yang demikian itu bisa menjadi bangsa yang besar. Itu semuanya masuk di dalam golongan kebutuhan yang urgen (Salam 1989:22-23).”

Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 mendorong Sukarno lebih keras dalam menentang kolonialisme di dunia. Dunia saat itu bagi Sukarno adalah zaman masih terdapat banyak bangsa yang belum merdeka yang sebagian besar di Asia Afrika. Tahun 1960-an meskipun sudah mulai banyak bangsa memperoleh kemerdekaannya, namun bentuk baru penjajahan tetap berlangsung. Kolonialisme belum benar-benar hapus di muka bumi. Dalam konteks itu Sukarno mengemukakan gagasan dan menggalang negara-negara Asia Afrika sebagai kekuatan baru untuk melawan negara-negara kolonialis yang sudah mapan, apa yang disebut sebagai “kekuatan lama” (Old established forces=OLDEFOS).

Oleh karena itu sebagai antitesisnya Presiden Sukarno hendak membangun “*new emerging forces*” (NEFOS), yakni negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang. Dalam kerangka itu pula Presiden Sukarno berpidato di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1960 berjudul “membangun dunia baru”. Presiden Sukarno melihat situasi zaman ketika itu memperlihatkan tatanan dunia yang timpang antara negara-negara yang kaya dan maju dengan yang miskin dan masih terbelakang.

Pidato Presiden Sukarno di PBB :” Di jaman perang urat syaraf ini (PBB) haruslah dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau ke daerah netral lainnya di luar salah satu blok. PBB dilahirkan di saat umat manusia sedang bangkit kembali dari neraka peperangan. Dalam banyak hal, Piagamnya mencerminkan sekarang. PBB sekarang adalah bukan PBB di bulan Juli di San Fransisco duapuluh tahun yang lalu, pula

dunia sekarang bukanlah dunia pada waktu itu. PBB hanya menjadi medan perdebatan (Sosroatmodjo dalam Katoppo (ed), 1982:323).

Lebih lanjut Presiden Sukarno menegaskan:

“Karena PBB didirikan di saat berakhirnya Perang Dunia Kedua agar terjamin koeksistensi secara damai, maka sekarang prinsip dasarnya sudah menjadi kuno. Ketidakseimbangan dunia pada waktu sekarang ini tidak terletak antara negara-negara besar yang sekarang ini senantiasa saling menguji kekuatan masing-masing, akan tetapi terletak dalam pertentangan hidup antara bangsa-bangsa yang baru berkembang dengan bangsa-bangsa imperialis. Seperti terbukti dengan ketegangan di Asia tenggara dan Kongo, maka kekuatan-kekuatan yang baru berkembang meliputi setiap orang. Oleh karena itu justru mereka yang menjadi perhatian dari PBB. Akan tetapi baik Piagam PBB maupun Preambulenya tidak menyebut-nyebut perkataan kolonialisme. Selama dua puluh tahun revolusi yang meliputi tiga perempat bagian dari muka bumi ini, Barat terhindar dari peperangan. Timur tidak pernah mengenal keadaan damai. Setelah datang perdamaian untuk Eropa, kami merasai keganasan bom atom. Kami mengalami Revolusi Nasional kami sendiri di Indonesia. Kami merasai penyiksaan di Vietnam. Kami menderita penganiyaan di Korea. Kami menghadapi sakratul maut di Aljazair. Dan di saat luka-luka di Asia masih belum sembuh, maka saudara-saudara kami di Afrika dianiaya—herankah orang bahwa sekarang ini kami menuntut, ya, menuntut penghentian siksaan terhadap kami? (Sosroatmodjo dalam Katoppo ed, 1982:323).

Pada masa ini Presiden Sukarno dengan sangat antusias mencanangkan prgram pembangunan karakter bangsa. Istilah yang terlanjur dikenal “nation and charater building” sejatinya tidak sekedar membangun bangsa tetapi juga membangun karakter (nya) bangsa itu. Dalam pidatonya pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1963, Presiden memberi judul “Genta Suara Revolusi Indonesia”. Sukarno berpidato “saya telah mengemukakan fikiran-fikiran yang mendasari proses “nation building”, yaitu adanya keinginan bersama untuk membangunkan jiwa yang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme” (Capita Selecta Kesatuan bangsa, 1964:11). Dari ungkapan itu dapat dikatakan bahwa “pembangunan bangsa” dilakukan dengan “pembangunan karakter”.

Pemikiran Bung Karno terhadap Indonesia adalah suatu bangsa besar yang karena perjuangan panjang dan hebat mampu merebut kemerdekaan. Dan nilai dan semangat itu harus terus digelorakan. Obsesi Presiden Sukarno dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar tampak dalam kebijakan dan program pemerintah di saat itu. Untuk menyelenggarakan Asia Games IV, Indonesia sebagai tuan rumah harus menyediakan sarana olah raga yang bukan saja memadai mestinya yang megah. Itulah sebabnya di dalam ingatan kita masa ini disebut sebagai zaman pembangunan proyek mercu suar, akan tetapi bagi Sukarno ini soal harga diri dan martabat bangsa. Menanggapi tuduhan itu Presiden Sukarno menegaskan:

” Aku harus membangun bangsa Indonesia. Banyak orang yang berhati katak dengan mentalitas warung kopi menghitung-hitung pengeluaran itu dan menuduhku menghambur-hamburkan harta rakyat. Ini semua bukanlah untuk kejayaanku, semua ini dibangun demi kejayaan bangsa. Supaya bangsaku dihargai oleh seluruh dunia. Tulang punggung tanah airku membeku ketika mendengar pertandingan Asian Games 1963 akan diadakan di ibukotanya. Kota-kota lain mempunyai stadion yang lebih besar, tapi tak satupun yang mempunyai atap melingkar seperti kepunyaan kami. Yah, memberantas kemiskinan memang penting, akan tetapi memberi makan jiwa yang telah diinjak-injak dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebangsaan mereka ini pun penting (Adams 1966:432).

Patut dicatat di dalam ASEAN Games IV tahun 1963 di Jakarta, kontingen Indonesia menempati urutan kedua setelah Jepang di dalam mengumpulkan medali. Meskipun Indonesia ‘hanya’ mengumpulkan sebelas medali sedangkan Jepang 37 medali. Jauhnya keterpautan perolehan medali itu tetap menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang membanggakan. Ini boleh dibanding dengan keikutsertaan Indonesia di SEA Games, yang tidak mudah untuk menduduki di peringkat satu peroleh medali. Sebagai gambaran saja pada SEA Games 2011, Indonesia “hanya” di tempat ketiga.

Masa demokrasi terpimpin dikenal dalam Sejarah pemikiran bangsa sebagai kuatnya sistem wacana yang bersifat hiperbol—serba diperbesar—dalam menggambarkan dunia realitas. Dalam suasana seperti ini keharusan indoktrinasi semakin diperluas. Negara menjadi penentu ukuran kebenaran dan realitas kehidupan sosial. Sementara itu Sukarno semakin tegar mempersonifikasikan sebagai “pemimpin besar”, yang tak kekurangan inspirasi dan gagasan dalam membawa masyarakat

ke arah yang ingin dicapai. Di saat Sukarno lebih suka mengidentifikasikan dirinya sebagai “Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat” bukan sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan yang harus mengurus administrasi pemerintahan, maka ketika itu semakin jelas telah terjadi krisis dalam kehidupan sosial-politik (Abdullah 2013:xxvii).

6.5. Dari Tragedi Nasional ke Pembangunan Nasional

Akhir masa pemerintahan demokrasi parlementer berujung pada peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dinihari 1965. Suatu aksi yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tiga Puluh September telah melakukan penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira TNI. Tindakan kudeta terhadap pemerintah yang syah itu telah menimbulkan gejolak politik yang berkepanjangan. Sejak itu situasi krisis yang terus menerus menyebabkan ketidakstabilan kehidupan sosial dan politik. Setelah mendapat desakan kuat dari massa demonstrasi di akhir tahun 1965 dan awal 1966, maka Presiden Sukarno memberikan Surat Perintah kepada Jendral Soeharto untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah bangsa tersebut.

Soeharto tidak menginginkan terjadinya goncangan yang lebih keras. Pada bulan Juni 1966 dalam sidang umum ke IV MPRS menetapkan keabsyahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Atas landasan ini Soeharto mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan dalam masa transisi kekuasaan.

Tampaknya Soeharto tidak mau mengambil suatu tindakan yang terlampau drastis yang jelas akan menimbulkan ketegangan politik dan yang akan menimbulkan pertentangan fisik karena Angkatan Bersenjata akan terlibat di dalamnya, sehingga sebagian besar rakyat akan terganggu hidupnya dan Orde Lama akan mendapat angin.

Terbentuklah “Kabinet Ampera” yang mau tidak mau masih menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru. Beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih masuk dalam kabinet ini, dan Soeharto ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet/Menteri Utama Hankam.

Seminar Angkatan darat di Bandung merumuskan Orde Baru, menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis,

walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan, diutamakan kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialism. Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada peringatan hari Proklamasi 17 Agustus 1966 Presiden Soekarno berpidato “Jangan Sekali-Sekali meninggalkan Sejarah” (Jasmerah). Jika dicermati seksama pidato itu sesungguhnya memperlihatkan aspek psikologis Sukarno sebagai tokoh utama bangsa yang sedang mengalami masa surut. Sukarno khawatir rakyat Indonesia akan melupakan perannya yang begitu hebat dalam membangun solidaritas bangsa. Bagi Soeharto pidato itu terasa sekali bahwa Soekarno mengkritik keputusan yang dikeluarkan MPRS beberapa bulan sebelumnya. Sejak pidato itu timbul reaksi di kalangan masyarakat yang memihak dan kontra terhadap Bung Karno.

Orde Baru lahir dari runtuhnya kehidupan politik Demokrasi Terpimpin yang revolusioner dan menimbulkan konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat bangsa. Harapan kehidupan bangsa yang menjadi lebih baik gagal diwujudkan, mirip seperti aspirasi yang muncul setelah perang kemerdekaan. Harapan suatu kehidupan politik yang stabil pun tidak terwujud, malahan yang terjadi adalah “jor-joran” politik. Akar-akar dan sumber konflik berlatar sosial-ekonomi yang lama tersembunyi tiba-tiba muncul dan mengobarkan konflik antar golongan ideologis yang saling berkompetisi.

Gambaran suasana harmonis berubah dalam sekejap ketika bukan saja konflik dan kekerasan melainkan juga terjadi pembunuhan. Malam bencana 1 Oktober dini hari dengan gugurnya 6 jenderal dan seorang perwira TNI menandai tonggak sejarah sebelum dan sesudahnya. Peristiwa ini seperti “point of no return” bagi akhir nasib sebuah partai yang memperoleh suara terbanyak keempat Pemilu 1955, PKI.

Di awal masa Orde baru, Soeharto dan dukungan tentara menghadapi masalah yang segera harus diatasi adalah ketidakstabilan politik sebagai warisan zaman liberal dan Orde Lama. Mirip ketika Sukarno bersikeras untuk memaksakan “retooling” dan “herordering” atau “rekonstruisasi sistem politik”, Soeharto dengan Orde Baru-nya juga berbicara tentang pentingnya “restrukturisasi politik” dalam kerangka kehidupan yang stabil dan harmonis. Sebagai pengganti

gagasan yang terus-menerus melekat pada Demokrasi Terpimpin yaitu “paradigma konflik” melawan “musuh-musuh revolusi”, Orde Baru merumuskan “paradigma konsensus”. Demokrasi terpimpin memakai kata-kata hiperbola dan ungkapan bernada keras seperti “hancurkan kepala batu” “retool”, maka Orde Baru memperkenalkan istilah halus atau eufemisme seperti “diamankan” tetapi artinya “ditangkap” atau “dibunuh” bukan bermakna “dilindungi”. Jadi kedua rezim itu sesungguhnya mengaburkan realitas.

Pemerintah Orde Baru tidak menawarkan teori baru atau ideologi revolusi. Meskipun “revolusi” itu sendiri seperti “ideologi” untuk waktu lama dianggap sebuah kata kotor setidaknya dihindari karena tidak disukai. Sebagai pengganti teori revolusi Orde baru mengajukan “Trilogi Pembangunan” yang terdiri dari tiga aspek penting yakni “stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan”. Perhatikan aspek pertama yang menekankan pentingnya “stabilitas” sebagai landasan kehidupan politik bangsa. Ini karena faktor trauma yang ditimbulkan peristiwa tragis tahun 1965-66.

Presiden Soeharto berpidato di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1967:

“Fungsi dan tujuan Orde Baru adalah mempertahankan memurnikan wujud dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru tidak lain adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-undang dasar 1945”.

Kata-kata “diletakkan kembali” dalam konteks itu karena Orde Baru bereaksi untuk mengadakan koreksi total atas “penyimpangan” terhadap pancasila dan UUD 1945 rezim sebelumnya. Dalam pidatonya itu, pejabat Presiden juga menyerang Orde Lama meninggalkan sila-sila Pancasila. Orde Lama telah mengabaikan hak-hak azasi manusia karena semua aspirasi ditentukan ditentukan oleh kemauan penguasa.

Presiden Soeharto mengulangi pidato kenegaraan tahun 1968 berjanji untuk mengatasi keterbengkelan proses demokratisasi yang harus dihidupkan kembali. Soeharto tidak menyukai istilah “revolusi multi kompleks” yang akan menutup jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa masyarakat adil dan makmur. Tiga masalah berat yang dihadapi adalah merekonstruksi tatanan masyarakat-bangsa, merehabilitasi ekonomi bangsa, dan merumuskan format politik yang cocok masyarakat-bangsa. Dalam pandangan Soeharto kegagalan

pembangunan pada masa demokrasi liberal karena terjadi ketidakstabilan politik dan masa demokrasi dipimpin kehidupan politik didominasi oleh Presiden Sukarno dan PKI. Dalam masa ini politik menjadi panglima.

Dalam kunjungan ke Lampung, Juni 1968 mengemukakan agar masyarakat meninggalkan pertentangan politik dan agama, sehingga dapat dicapai stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak pembangunan nasional. Dalam konteks ini Presiden Soeharto menemukannya pentingnya Pancasila sebagai azas tunggal bagi landasan setiap perilaku individu maupun masyarakat Indonesia. Pada masa ini pula kemudian Pancasila ditasbihkan sebagai azas tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik.

Salah satu gagasan terbesar masa Orde Baru adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan. Sudah menjadi komitmen Orde baru bahwa sektor ekonomi harus menjadi prioritas pembangunan, oleh karena pengalaman tingginya tingkat inflasi dan merosotnya daya beli masyarakat. Orde Baru menginginkan agar orientasi terhadap politik yang pada periode yang lalu sebagai 'panglima' harus diganti dengan ekonomi. Kata "pembangunan" menggantikan "revolusi". Pembangunan yang akan membawa bangsa Indonesia pada pemenuhan kebutuhan dasar, harus diletakkan ke dalam perencanaan yang jelas dan bertahap. Dalam talian itulah GBHN dirumuskan dan pembangunan setiap lima tahun (Pelita) direncanakan dan dilaksanakan, serta dievaluasi untuk kemudian disempurnakan dalam tahap-tahap berikutnya.

6.6. Jatidiri dan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan faham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung: unsur-unsur kesadaran religious dan menolak atheism; kebenaran, kecintaan dan berlandaskan budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia; berkeselimbangan dalam arti menuju keseimbangan, antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin.

Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam kebebasan itu harus selalu melekat tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dalam Demokrasi

Pancasila keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan. Dengan demikian dalam system dan mekanisme Demokrasi Pancasila tidak akan terjadi “dominasi mayoritas” maupun “tirani minoritas”, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan.

Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sbb: (1) formal, bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. (2) Materiil yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya, memanusiakan warganegara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. (3) Kaidah yang mengikat warga dan warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. (4) Tujuan yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan dan negara berkebudayaan. (5) Organisasi yang menggambarkan perwujudan Demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (6) Semangat yang menekankan bahwa Demokrasi Pancasila memerlukan warganegara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian (Bahan Pentaran P-4, 1984: 392-293).

Masyarakat Indonesia dalam visi Suharto adalah kehidupan yang berdasarkan Pancasila di mana warga negara Indonesia hidup yang selaras dan berdampingan tanpa memedulikan perbedaan di antara mereka.

Selain meletakkan landasan dan kerangka bagi pemulihan ekonomi, Soeharto berhati-hati sekali dalam menekankan landasan ideologis pemerintahannya. Agar jangan sampai terulang seperti terjadi pada masa lalu, maka stabilitas suatu kondisi yang tak boleh ditawar. ABRI adalah kunci stabilitas itu. ‘sejarah’ bagi Soeharto yang dikemukakannya pada April 1969 telah menempatkan Angkatan Bersenjata Indonesia sebagai stabilisator dalam mewujudkan perjuangan bangsa”. Soeharto menempatkan peran ABRI sedemikian penting, seperti tampak dalam kaitannya dengan penanaman ideologi Pancasila.

ABRI adalah salah satu Modal Dasar Pembangunan yaitu sebagai kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Peranan ABRI sejak

dilahirkan pada tahun 1945, sangat besar dan bahkan menentukan dalam perjuangan bangsa, baik dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dan dalam mengkonsolidasikan masa pembangunan. Dwifungsi ABRI sebagai alat Hankam dan alat sosial politik.

Bagi Soeharto Orde Baru adalah orde Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau pribadi. Mereka yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 akan berhadapan dengan ABRI (Elson 2001: 305).

Pemikiran Soeharto mirip dengan Sukarno dalam hal kepribadian atau jati diri bangsa. Soeharto mengatakan bahwa “masyarakat yang tidak mengenal dirinya sendiri, masyarakat yang tidak memiliki kepribadian sendiri—seperti halnya orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak memiliki kepribadian—akan senantiasa gelisah. Masyarakat yang gelisah tidak akan bahagia; ia akan selamanya lemah. Dan masyarakat yang lemah tidak mungkin membangun untuk mencapai cita-citanya (Bahan Penataran P-4, 1984:425).

Sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang tajam jika dibandingkan antara pemikiran Presiden Soeharto dan Presiden Sukarno dalam hal karakter bangsa. Dengan menekankan istilah “jati diri” pada dasarnya sama dengan “kepribadian bangsa”. Kedua nya tidak menginginkan pengaruh asing ke dalam ciri bangsa yang bangun dari nilai-nilai dari dalam sendiri.

Dasar pemikiran Soeharto untuk meletakkan landasan ideologis pemerintahannya dilakukan dengan sangat berhati-hati. Elson mencatat bahwa pemikiran Soeharto itu dengan memanfaatkan, memperkuat, dan memperluas gagasan-gagasannya yang ia kembangkan pada tahun 1950-an, yaitu Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila meletakkan dasar konsensus bagi dinamika kehidupan masyarakat di bidang politik. Dalam pengamatan Elson pula bahwa pandangan Soeharto tentang Pancasila begitu sempit. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soeharto pada 15 April 1968 yang menegaskan bahwa “mencoba-coba menggunakan dasar negara yang lain dari Pancasila atau menyelewengkan pelaksanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa seperti pengalaman pahit masa lalu” (Elson 2001: 330).

6.7. Wawasan Nusantara dan Globalisasi

Perjuangan bangsa Indonesia untuk terus menerus mewujudkan NKRI sebagai suatu ruang kehidupan bersama yang terintegratif merupakan tantangan yang tidak mudah apalagi dihadapkan pada arus globalisasi. Akan menjadi lebih berat lagi ketika abad ke-21 ini kita menyaksikan terjadinya pergeseran kekuatan dunia ke Asia Pasifik. Dengan apa yang disebutnya sebagai “*re-balancing of power*”, Amerika Serikat kini telah menggeser fokus politik globalnya ke wilayah Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) berada di antara dua benua dan samudera yang secara geostrategik memengaruhi perubahan geopolitik.

Presiden Soeharto “ kita memiliki kurang-lebih 13.000 pulau. Di tengah itu ada lautan dan selat-selat yang cukup luas. Bahkan dari keseluruhan wilayah kita sekarang yang lebih dari 5,5 juta km², 2/3nya adalah lautan, perairan, dan Cuma 1/3-nya daratan. Secara geografis, Indonesia mempunyai kekhususan. Kita di persimpangan jalan antara dua benua, antara Asia dan Australia, antara dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan demikian, letak Indonesia sangat strategis. Deklarasi 13 Desember 1957 merupakan salah satu sendi pokok dari kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia, menyangkut soal kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan deklarasi itu pemerintah RI mengemukakan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia. ... semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat”

“undang-undang yang ditetapkan 1960 mengubah penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis rendah (*low water line*) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh hampir 200 buah garis pangkal lurus dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar lebih dari 8.000 mil laut.

“keuntungan yang kita peroleh dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan ini tidak kecil, yaitu kedaulatan RI yang penuh atas kurang lebih 3.000.000 km² lautan dengan dasar serta tanah di bawahnya di dalam batas-batas negara Nusantara, ditambah dengan 800.000 km² landas kontinen di laut batas-batas

negara kepulauan dengan ditambah pula dengan 3.000.000 km² hak mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan zone ekonomi eksklusif.

Wawasan Nusantara ditetapkan pada tahun 1973 sebagai Tap IV MPR-RI, namun beberapa negara tidak mengakui RI sebagai negara kepulauan berdasarkan konsepsi itu, mereka adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru.

Wawasan Nusantara diperjuangkan dalam forum internasional sejak juli 1974 dalam konferensi Hukum laut Internasional, memperjuangkan konsepsi Hukum Negara Kepulauan. Diperjuangkan dalam forum internasional, setelah konsepsi itu disahkan menjadi bagian dari Konvensi Internasional, berarti lebih menetapkan negara RI sebagai negara Nusantara ditinjau dari sudut Hukum Internasional. Sementara kita harus memberi jalan keluar yang akomodatif bagi kepentingan negara dan bangsa lain, yakni untuk menghubungkan antara lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan Afrika, baik melewati darat maupun udara. Memang banyak yang mempunyai kepentingan dengan wilayah kita ini, kalau kita ingin memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan, Negara Nusantara, dimana kita mempunyai kedaulatan di darat, di laut, maupun di udara, kita harus memberikan jalan kepada mereka. Presiden Soeharto menekankan hal itu dengan mengatakan:

“di banyak kunjungan kenegaraan saya langsung mengemukakan masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi, banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional. Secara pribadi saya juga turut memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah sulit, antara lain masalah lintas kapal perang. Sistem sumbu adalah salah satu hasil pemikiran saya yang timbul pada saat masalah ini saya bicarakan dengan Mochtar Kusumaatmaja di tahun 1976”.

Presiden Soeharto melanjutkan pernyataannya: “Sementara pihak asing merasa lautan kita itu lautan bebas. Maka mereka melakukan dengan caranya sendiri melewati lautan kita yang mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka saya berikan petunjuk, tentukan porosnya, jangan sampai perairan kita ini bisa dijelajahi dengan semau-maunya” kita izinkan mereka menggunakan poros yang kita tentukan itu. Tetapi tentu saja dengan syarat, yakni harus memberi tahu lebih dahulu, “saya mau lewat”, begitu isyarat mereka, dan kita izinkan mereka lewat. Dengan demikian, kita bisa

mengawasi mereka dan kita tidak merasa kedaulatan kita dilanggar oleh mereka yang mau menggunakan jalur itu. Dalam rangka memperkenalkan dan memperjuangkan prinsip Wawasan Nusantara itu, gagasan kita lontarkan melalui forum internasional, yakni konferensi PBB tentang Hukum Laut. Demikian Presiden Soeharto mempertelakan pemikriannya.

Dalam sidang di bulan April 1982, telah berhasil disahkan rumusan-rumusan tentang Hukum Laut sebagai yang telah dibahas selama hampir 10 tahun, menjadi konvensi Hukum Laut Internasional Baru yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip Hukum Laut tentang Wawasan Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan.

Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan ini, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Konvensi Hukum Laut 1982 itu telah ditandatangani oleh Indonesia dan oleh lebih dari 150 negara lainnya. Setelah DPR kita menyetujui konvensi itu di bulan Desember 1985, saya sebagai Presiden mensahkan konvensi itu dengan UU no.17, pada akhir Desember tahun itu. Tinggallah sekarang kita mendorong supaya negara-negara ASEAN, Pasifik, khususnya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara maju, dan negara berkembang lainnya meratifikasinya.

Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan (17 Agustus 1945) tidak seluas dari cakupan yang berdasarkan pengakuan UNCLOS. Pada tahun 1945 wilayah Indonesia sekitar 3 juta km persegi dan bertambah menjadi 5 juta km persegi. Untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang demikian luas diperlukan sistem komunikasi satelit domestik sebagai wahana memperlancar hubungan.

Adalah menarik untuk mengetahui bahwa pemikiran Presiden Soeharto dalam hal wilayah Indonesia tampaknya mengacu pada sejarah zaman Majapahit. Begitulah Soeharto lalu mengingat pada sejarah Majapahit, ketika Gadjah Mada dulu yang telah bersumpah. Inti dari ikrar itu, seperti banyak dirumuskan bahwa tidak akan makan buah palapa sebelum persatuan dan kesatuan Kerajaan Majapahit menjadi kenyataan. Soeharto pun berpendapat kekokohan persatuan dan kesatuan Nusantara diperteguh dengan diluncurkannya satelit Palapa itu yang merupakan bagian penting daripada sistem satelit domestik. Dengan sistem ini hubungan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat. Karena itulah sistem satelit domestik itu kita beri nama "Palapa" sebagai lambang terjelmanya sumpah Gadjah Mada untuk mempersatukan Nusantara.

Juwono Sudarsono, profesor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mantan Menteri Pertahanan, pernah mengemukakan bahwa bangsa Indonesia memiliki dua pemimpin nasional yang memberikan sumbangan besarnya sehingga disebut sebagai “pembangun bangsa” (nation builder) yakni Presiden Sukarno, sedangkan Presiden Soeharto disebut sebagai “pembangun negara” (state builder). Dalam masa Soeharto memang tampak semakin terintegrasinya wilayah negara kesatuan Indonesia. Banyak jaringan infrastruktur jalan darat maupun pelabuhan dibangun dalam masa ini.

Tahun 1980-an, Presiden Soeharto mengatakan “Kita di tengah Dunia Sekarang” dunia masih jauh dari aman. Pertarungan kekuatan adikuasa Amerika dan Rusia. Politik seperti tampak kita cenderung ke barat, namun tetap bebas dan aktif. Mengenai hal ini Presiden Soeharto telah mengemukakan pada tahun 1978 dalam pidatonya kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus, di kawasan Indochina terjadi ketegangan-ketegangan baru akan mengundang kepentingan-kepentingan kekuatan besar dunia. Sementara perkembangan di Afrika juga sedang berkembang ketegangan-ketegangan baru. Perang Dingin yang selama tahun-tahun terakhir ini agak menyejukkan dunia, kini ada tanda-tanda akan menghangat lagi” (ibid:524). Dalam memandang perkembangan ini Presiden Soeharto mengemukakan pentingnya “tampilnya kembali gerakan non-blok. Namun dengan catatan kini gerakan Non-Blok sedang mengalami masa-masa sulit karena timbulnya gejala keretakan dan benih-benih perpecahan, juga karena berhasilnya menyusup kepentingan kekuatan besar dunia. Jadi menurut Presiden Soeharto agar Indonesia sebagai negara pendiri terus berusaha sekuat tenaga agar sebanyak mungkin anggota non-blok tetap bertahan dan tidak membiarkan dirinya menjadi ujung-ujung tangan kekuatan-kekuatan besar yang sedang bersaing (Ibid).

Antara pemikiran dan praktik memang merupakan dua ranah yang tidak selalu bertemu bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Pemikiran yang bagus dan cemerlang tidak atau mungkin jarang terjelma dalam kenyataan di lapangan apalagi dirasakan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan orang dengan ungkapan apa yang di atas kertas dengan yang dalam kenyataan, seperti jauhnya panggung dari api, adalah untuk mengungkapkan ketidakserasian antara ide dan praktik. Persoalan di lapangan banyak dimunculkan yang memperlihatkan logikanya sendiri. Namun demikian bukan tidak dapat dijelaskan.

Pemikiran Sukarno yang sudah sejak muda mengenai kekuatan bangsa yang terdiri atas nasionalisme, agama (Islam) dan Marxisme yang kemudian dimanifestasikan menjadi komunisme, justru menjadi

malapetaka bangsa di kemudian hari. Secara konseptual tentu dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak ada pilihan untuk menggantikan komunisme menjadi sosialisme. Jadi bukan harus disingkat menjadi NASAKOM (Nasionalisme Agama Komunis) tetapi NASASOS (Nasionalisme Agama Sosialisme).

Jika sistem wacana Presiden Sukarno bersifat hiperbola maka Presiden Soeharto bersifat efumisme. Namun kedua gaya penyampaian ide baik masa demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila sama bukan saja mengalami distorsi tetapi juga ketidakmampuan menangkap dunia realitas.

Di tahun 1990-an, ada ungkapan Presiden Soeharto yang mungkin masih diingat dalam menghadapi globalisasi, yang intinya begini: mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap kita harus memasuki era globalisasi, zaman keterbukaan. Ini menarik dicermati karena tidak sampai satu dekade kemudian, justru salah satu faktor yang menjatuhkan Soeharto adalah arus globalisasi yang tak mudah dibendung, dengan satu kata kunci “keterbukaan”. Media sosial yang semakin berkembang dua dekade yang lalu seperti jaringan internet, twitter, blogger, yang memfasilitasi orang mengirimkan pesan telah mempermudah hubungan antar individu atau kelompok masyarakat terutama yang digerakkan dari kampus-kampus yang kemudian menjadi faktor menguatnya ikatan mereka dalam suatu gerakan menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Meskipun begitu, pemikiran Presiden Soeharto untuk menghadapi globalisasi dengan memperkuat jatidiri bangsa telah menjadi catatan sejarah tersendiri.

Dalam kekinian Indonesia yang dihadapkan pada ancaman kedaulatan yang tidak hanya dalam arti politik dan keutuhan wilayah, tetapi kemandirian bangsa, pemikiran “berdikari” (“Berdiri di atas kaki sendiri”) Presiden Sukarno misalnya kembali sepertinya diharapkan kembali bergaung. Dalam makna ini pula ada relevansi apa yang dikemukakan Abdullah bahwa sejarah pemikiran—yang digambarkan melalui pemanfaatan novel—adalah tidak hanya pemahaman sejarah hendak didapatkan melainkan juga diperolehnya kembali ‘semangat zaman’ dari masa yang hilang itu secara lebih penuh. Kini tinggal lagi bagaimana bangsa ini dapat mengambil hikmah dari pemikiran kedua pemimpinnya. Kiranya sejarah pemikiran dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendidikan politik bagi setiap warga negara dalam kerangka pembentukan bangsa dan penguatan negara.***

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.K. Pringgodigdo; Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Jakarta: Dian Rakyat, 1984.
- Abdullah, Taufik (ed). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Abdullah, Taufik dan AB Lopian (editor). *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012.
- Abdullah, Taufik, H. Misbach Yusa Biran, S.M. Ardan, *Film Indonesia: Bagian I (1900-1950)*, Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993.
- Abdullah, Taufik, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia; Jakarta: LP3ES, 1987.
- Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933* (Ithaca, New York: Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program Cornell University, 1971).
- Abdullah, Taufik. "Historical Reflections on Three Novels of Pre-war Indonesia" dalam Taufik Abdullah ed. *Literature and History: volume two*. Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference Yogyakarta 24—29 July 1983. Gadjah Mada University Press, 1986.
- Abdullah, Taufik. *School and Politics: the Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933), Monograph Series*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
- Abdullah, Taufik; *Indonesia : Toward Democracy*, Singapore; ISEAS, 2009.
- Abdullah, Taufik; *Nasionalisme dan Sejarah*; Bandung: Satya Historika, 2001.

- Adams, Cindy, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, edisi revisi (terjemahan), Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2007.
- Adams, Cindy. *Sukarno: An Autobiography as Told as Cindy Adams*. New York: The Bobbs Merrils Company, 1965.
- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Djakarta: Gunung Agung, 1966.
- Adinegoro, "Kritik Atas Kritik," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Alam, Wawan Tunggul, *Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003.
- Anhar Gonggong. *HOS Cokroaminoto*, Jakarta : Depdikbud, 1985.
- Anonim. *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945..* Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.
- Aqib Suminto, H. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Bahan Penataran P-4, 1984.
- Bahder Djohan, Bahder Djohan: *Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1980.
- Bambang Sokawati Dewantara, R.M. Suryopranoto, *Bangsawan, Pendekar Rakyat Jelata*, Jakarta: Roda Pengetahuan, 1982.
- C. Hooykaas, Perintis Sastra, terj. Raihoel Amar Gelar Datoek Besar, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981.
- Deliar Noer; *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*; Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dewantara, Bambang Sokawati. R.M. Suryopranoto: *Bangsawan, Pendekar Rakyat Jelata*. Jakarta: Roda Pengetahuan, 1982.
- Dewi Yuliati, *Semaoen Pers Bumi Putra Dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*, Semarang. 2000.

- Djojoadisurjo, Ahmad Subardjo. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1978.
- Dr. A. Rivai, *Student Indonesia di Eropa*, Jakarta: KPG, 2000
- Dr. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Elson, Robert. *Suharto Sebuah Biografi*. (terjemahan)
- Faith, Herbert. *The Decline of Constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. 1972.
- Feith, Herbert, Castle Lance (eds). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Terjemahan Min Jub Hoon. Jakarta: LP3ES. 1988.
- Frederick, William H. Soeri Soeroto (eds). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES. 1982.
- George Mc Turnan Kahin; *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- H.O.S. Tjokroaminoto; *Islam dan Sosialisme (Cet ke IV)*, Djakarta: Bulan Bintang; 1950.
- Hans Van Miert,; *Dengan Semangat Berkobar Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918 – 1930*; Jakarta: KITLV-Pustaka Utan Kayu, 2003.
- Harahap, H.A.H dan B.S. Dewantara, *Ki Hajar Dewantara dkk : Ditangkap, Dipenjarakan dan diasingkan*, Jakarta : PT. Gunung Agung. 1980.
- Herbert Feith & Lance Castles (eds), *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*, Ithaca and London; Cornell University Press, 1970.
- Hisyam, Muhamad ed. *Orde Baru dan Krisis Masa Kini*. Penerbit Yayasan Obor, 2005.
- Hoffer, Eric. *Gerakan Massa* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor. 1993.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia* (terj). Yogyakarta: Qalam. 2002.
- I.O. Nanulaita, *Johannes Latuharhary, SH*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983.

- Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (editor), *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- John Ingleson; *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*; Jakarta: Grafiti Pers, 1993.
- John Pattikaihattu, *Dr. Jacob Bernadus Sitanala: Hasil Karya Dan Pengabdiannya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Depdikbud, 1982/1983.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Negara Dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 1995.
- Kartodirdjo, Sartono. *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: KOMPAS. 2005.
- Katoppo, Aristides ed. *80 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Sinar Harapan. 1982.
- Ki Hajar Dewantara, "Pembauran Adab: Pesan Kepada Tuan-Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, dan Sanusi Pane," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihadja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kutoyo, Sutrisno. *Prof. H. Muhammad Yamin*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud. 1981/1982.
- Legge, John D. *Sukarno : Sebuah Biografi Politik*, Jakarta : Sinar Harapan. 1972.
- M. Amir, "Pertukaran dan Pertikaian Pikiran: Antara Tuan Sutan Takdir Alisjahbana, Adinegoro, dan Dr. Sutomo tentang Peradaban dan Kemajuan Bangsa Kita untuk Masa Depan," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Ke-4, ed. Achdiat K. Mihadja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- M. Hatta, "Beranta Indah," *Jong Sumatra*, Tahun IV (9), September 1921.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

- Madjid, Nurcholis. *Indonesia Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mas Marco, *Hubungan Orang Buangan Di Boven Digul*, Jakarta, Cet I, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Matanasi, Petrik. *Sejarah Tentara: Munculnya Bibit-Bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Narasi, 2011.
- Mawardi, Sidi. *Bibit Perseteruan Nasionalis Islam Vs nasionalis Sekuler: Pengalaman Jong Islamieten Bond 1925-1942*. Jakarta: yayasan Studi Perkotaan (SandiKota), 2000.
- Mintz, Jeanne S. *Mohammed, Marx, and Marhaen: the Roots of Indonesian Sosialism..* New York: Frederick A Praeger, 1965.
- Mohammad Hatta, “ *Indonesie vrij*” dalam *Verspreide Geschriften*, Djakarta, Amsterdam, Surabaya : C.P.J van der Peet, 1952.
- Mohammad Hatta; *Berjuang dan Dibuang, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi (Buku II)*; Jakarta: Kompas; (Cet. Ke III), 2013.
- Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*; Jakarta: Tanpa Penerbit, 1960.
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Tanpa Penerbit, tahun 1959.
- Nalenan, R. *Iskaq Tjokroadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1982.
- Nanulaitta, I.O.. *Johannes Latuharhary, SH*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud. 1982/1983.
- Newland, Kathleen, Kemala Candrakirana (eds). *Menjelajah Cakrawala (Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko)*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Oetojo Oesman, Alfian (eds). *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat. 1992.
- Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-70; *Bung Hatta: Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjoengan Bangsa*; Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-7-, 1972.

- Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara: Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Djakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Purbatjaraka, "Sambungan Zaman," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan IV*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- R. Nalenan, *Iskaq Tjokroadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.
- R. Sutomo, "Kongres Pendidikan Nasional: Menyambut Pandangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan Ke-4*, ed. Achdiat K. Mihadja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rahardjo, Iman Toto K dan Herdianto WK (editor) *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Ramadhan KH dan Dwipayana. *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan*. Jakarta, 1989.
- Reeve, David. *Golkar Sebuah Sejarah Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2013.
- Reksodihardjo, Soegeng. *Dr. Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Depdikbud. 1981/1982.
- Restu Gunawan, dalam Taufik Abdullah (ed); *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan (jilid V)*; Jakarta: IBVH, Kemendikbud, 2012.
- Restu Gunawan; *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia*; Yogyakarta: Ombak Komuniti, 2005.
- Rivai, Abdul. *Student Indonesia di Eropa: Kumpulan Karang-karangan Dr. A. Rivai Redactuer Bintang Timoer di Eropa dari November 1926 sampai Mei 1928..* Jakarta: KPG. 2000.
- Roem, Mohammad. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: PT Gramedia. 1989.
- Roestam Effendi, "Bebasari," *Antologi Drama Indonesia, Jilid I: 1895-1930*, Jakarta: Amanah Lontar, 2006.
- Salam, Solichin. *Tugu Nasional dan Soedarsono*. Jakarta: Penerbit Kuningmas, 1989.

- Sanusi Pane, *"Persatuan Indonesia," Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan IV*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische Sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas Gramedia, 2005.
- Saskia Eleonora Wieringa; *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*; Jakarta: Garba Budaya; 1999.
- Savitri Prastiti Scherer; *Keselaran dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*; Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Scherer, Savitri Prastiti. *Harmony and Dissonance Early Nationalist Thought in Java*. Ithaca: Cornell University Press. 1975.
- Scherer, Savitri Prastiti. *Keselaran dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, (Terjemahan Jiman S. Rumbo). 1985. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 25 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Shiraishi Takashi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Silalahi, S. *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Singodimedjo, Kasman. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Sjahrir, Sutan. *Sosialisme Indonesia Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Leppenas, 1982.
- Soe Hog Gie, *Di Bawah Lentera Merah Cet II*, Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 2005.
- Soe Hog Gie, *Orang-Orang di Persimpang Kiri Jalan, Cet III*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Soekarno. *Mentjapai Indonesia Merdeka*, Jakarta: Departemen Penerangan. 1933. Reprint 1959.

- Soeratman, Darsiti, *Ki Hajar Dewantara*, Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud. 1983/1984.
- Soewito, Irna H.N. Hadi. *Soewardi Soerjaningrat Dalam Pengasingan*. Jakarta: PN Balai Pustaka 1985.
- Sri Sutjiatiningsih, *Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983.
- Suhartono; *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908 – 1945*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Sunaryo, Mr. *Apakah Negara Hukum itu?* Tanpa Tahun. Djakarta: Usaha Penerbitan Gapura.
- Sunoto. *Mengenai Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Suratmin, dkk; *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*; Jakarta: Depdikbud, 1991.
- Suratmin. *Dr. Sutomo*. Jakarta: Direktorat dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/1983.
- Sutan Takdir Alisjahbana, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-PraeIndonesia,” *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan IV*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- Sutan Takdir Alisjahbana, “Semboyan yang Tegas: Kritik Terhadap Beberapa Prasaran Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia,” *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan Ke-4*, ed. Achdiat K. Mihadja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Sutjiatiningsih, Sri. *Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983.
- Takhasi Siraishi, *Jaman Bergerak*, Jakarta, Cet I, Pustaka Utama Grafiti, 1997,
- Tashadi. *Dr. D.D. Setiabudhi*. Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1984.
- Tirtoprodjo, Susanto. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan Jakarta, 1984.

- Tjindarbumi, "Mencari Perbandingan (*Verhouding*)," *Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Cetakan Ke-4*, ed. Achdiat K. Mihardja, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Warrington, Marnie Hughes. *Fifty Key Thinkers on History*. New York: Routledge, 2005.
- Watson, Peter. *Ideas, History from Ine to Freud*. London: Phoenix, 2006.
- Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta: Penerbit Idayu, 1975.
- Zuhdi, Susanto 2012. "Monumen Nasional dan Simbol Perjuangan bangsa Dalam Perspektif Sejarah" dalam Hansiswany Kamarga dan Yani Kusmarni ed. Pendidikan Sejarah Untuk Manusia dan Kemanusiaan: Refleksi Perjalanan Karir Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA. Jakarta: Penerbit Bree Media Indonesia :223-231.

Majalah, Koran, Buletin, Artikel

- Abdullah, Taufik, "*Nation Formation and Structural Concern: a Problem in Indonesian Historiography*" dalam Prisma The Indonesian Indicator, No 29 (September 1983).
- Abdullah, Taufik, "Otentisitas dan Saling Penetrasi dalam Lintasan Sejarah," Nabil Forum, Edisi IV, Januari-Juni 2012.
- Abdul Rivai: *Pionir Pers Pribumi di Luar Negeri*. "Majalah Basis, No.11-12, Tahun ke-59, 2010.
- Bayangan Fasisme Perspektif Sjahrir. *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- Bung Karno. *Negara Nasional dan Cita-cita Islam*, Reprint 1953. Depok: Visi Gagas Komunikasi, 2007.
- Bung Natsir: *Menghadang Konflik, Membangun Toleransi*. Majalah Driyarkara, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- Dari Abdul Rivai Sampai Sarjana Indonesia Abad XX. *Majalah Basis*, No.1-2, Tahun ke-45, 1996.

- I.J. Kasimo dan Partai Politik. *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- Kasimo: Politik Bermartabat. *Majalah Basis*, No.11-12, Tahun ke-59, 2010.
- Marco Kartodikromo dan Pemikiran Anti-Kolonial. *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- Marco, “*Surat Perlawanan Persdelict*”, Koran Perstoean Hindia, 7 Agustus 1920.
- Muhammad Yamin, *Perdjoeangan Menoedjoe Parlement*, Majalah Partai Persatoean Indonesia, No. 1, Desember 1939.
- Muhammad Yamin, *Perjoangan Democratie Diseloeroeh Doenia*, Majalah Partai Persatoean Indonesia, No. 1, Desember 1939.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*, Jakarta : KOMPAS, 2012
- Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya. *Majalah Driyarkara*, No. 3 Tahun XXII, 1996.
- Tjokroaminoto dan Obsesi Persatuannya. *Majalah Berkala Kajian dan Pengembangan*, No. 1, Vol. IV Tahun 1987.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS BUKU SEJARAH PEMIKIRAN INDONESIA MODERN

1. Prof. Dr. Taufik Abdullah

Lahir di Bukittinggi, 3 Januari 1936. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dari Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada pada tahun 1961, kemudian melanjutkan pendidikan master dan doktoral di Cornell University, Ithaca AS dengan disertasi berjudul *School and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Pada periode 2000-2002, Prof. Dr. Taufik Abdullah menjabat sebagai Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sempat menjadi Ketua Eksekutif Program Kajian Asia Tenggara (ISEAS) di Singapura serta Wakil Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional. Hingga kini telah menerbitkan puluhan buku dan jurnal yang diterbitkan di Indonesia dan mancanegara.

2. Dr. Restu Gunawan

Lahir di Karanganyar, Surakarta pada 16 Juli 1969. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di Jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Sebelas Maret. Gelar master dan doktor Bidang Sejarah diperoleh di Universitas Indonesia, dengan disertasi berjudul “Ketika Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat : Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta tahun 1911-1985”. Saat ini bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Kasubdit Diplomasi Budaya. Selain itu aktif sebagai pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), sebagai sekretaris II. Aktivitas lain adalah menjadi narasumber di berbagai media televisi dan menulis artikel serta buku.

3. Dr. G. Ambar Wulan, M.Hum

adalah PNS Pusat Sejarah TNI, pengajar di Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) Program Pascasarjana UI, di KIK Program Pascasarjana UNAIR, di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), dan Instruktur Suspajarah di Kodiklat TNI. Gelar Doktor diraihnya dari Program Studi Sejarah - FIB-UI (2008). Sebelumnya, gelar master (2001) dan sarjana (1986) diperoleh dari jurusan Sejarah FIB-UI. Adapun karya-karyanya, diantaranya Polisi Dan Politik: Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945 - 1949 (Rajawali Pers, 2009), Sejarah Komunisme Di Indonesia (Tim. Pusjarah TNI, 2009), Bedah Caesar Dewan Revolusi 1 Oktober 1965 (Tim, Java pustaka, 2005), Sejarah kepolisian Di Indonesia Masa Pra Kolonial - 2005 (Tim,YBB, 2006), Sejarah Nasional Indonesia (Tim, Balai Pustaka, 2008), Malam Bencana 1965 (Tim, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), Indonesia Dalam Arus Sejarah (Tim, Van Hoeve, 2012), Sejarah Reformasi TNI (Tim, Pusjarah TNI, 2013).

4. La Ode Rabani

Lahir di Buton, tanggal 27 September 1973. Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini menjadi Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya sejak 2005 sampai sekarang. Publikasi internasional yang dihasilkan di antaranya Port Cities in Southeast Sulawesi, *Monograph Series 4* University of Malaya, Kuala Lumpur, 2008. "Hikayat Sipanjonga dan Konsekuensi Historiografisnya", *Proceeding International Seminar Antar Bangsa* di University of Malaya, 2009, *Shipping and Trading Network of Tukang Besi Island Society: a Linguistic Approach*, Pusat Bahasa Makassar, 2009, *Bajau Communities: Change and Continuity in Wakatobi Southeast Sulawesi*, International Seminar on Maritime, Culture and Geopolitics, University of Malaya, 2010. Karya lainnya yang juga sudah dipublikasikan si antaranya, "Social Movement in Southeast Sulawesi 1906-1960, dalam *Jurnal Humaniora* UGM, 2010, *Kota-Kota Pantai Di Sulawesi Tenggara*, (buku), Ombak, 2010. Buku *Kampung Perkotaan Indonesia*, (sebagai editor), Elmatara, Yogyakarta, 2011. Menulis Artikel dalam buku *Ruang Publik, Ekopolitik, dan Budaya Jawa Timur*, UK2JT, 2012.

5. Ibnu Wahyudi, MA

Lahir di Ampel, Boyolali pada 24 Juni 1958, merupakan sastrawan yang telah menulis kumpulan puisi dan prosa mini, antara lain *Ketika Cinta* (2009), *Nama Yang Mendera* (2010). Buku *Masih Bersama Musim* (2005) terpilih dalam 10 besar penghargaan Khatulistiwa Literary Award tahun 2005. Aktivitas beliau saat ini adalah mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Universitas Multimedia Nusantara, dan Prasetya Mulya Bussiness School.

6. Saleh As'Ad Djamhari

Semasa aktif sebagai tentara, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah TNI. Beberapa buku yang ditulisnya antara lain *Ichtiisar Sedjarah Perjuangan ABRI: 1945-sekarang* (1971), *Strategi Menjinakkan Diponegoro : Stelsel Benteng 1827-1830*, *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional : Memoar Jenderal TNI (Purn.) Soemitro* (1999), *Markas Besar Komando Djawa* (1967), *Monumen Perjuangan Daerah Kalimantan Barat* (Saleh As'Ad Djamhari, dkk, 1987). Aktivitas beliau sekarang adalah mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Jurusan Sejarah.

7. Prof. Dr. Susanto Zuhdi

Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini lahir di Banyumas, Pada 04 April 1953. Ia alumnus Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah (1979). Kemudian meraih gelar Master dari Prog. Studi Sejarah Program Pascasarjana UI (1991) dan gelar Doktor dari Program Pascasarjana UI Prog. Studi Sejarah (23/10/99). Ia mengajar pada Program Pascasarjana UI Studi Ilmu Sejarah.

Karya-karya ilmiah di bidang penelitian antara lain: Beberapa Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah, artikel pada Jurnal pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm. 81-92, Jakarta, Oktober 1999 ISSN: 0215-2673; Keterasingan Sosial Pengungsi Buton, artikel pada Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal, Hlm.193--208, Sub Tema: Konflik

Komunla dan Ketersingkirkan Sosial, Jakarta: Depdiknas, 2001; Kebaharian Dalam Proses Integrasi Bangsa, Hlm. 213--228, Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta, Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jakarta, 2002, ISBN 979-96468-10-x; Pelestarian BCB dan Perspektif Sejarah suatu penukaran tentang Revisi UU NO. 5 th 1992 dan rapat tentang Cagar Budaya , Bogor, 12-14 September 2002; Jejak orang buton dalam Sejarah Maritim Indonesia, makalah pada Seminar Eksplorasi Sumber daya Budaya Maritim Indonesia, PSJ UI, Depok, 6 Juni 2002; Sawerigading dan Haluoleo di Sulawesi Tenggara (Ingatan masa Lampau dan Tafsir Masa Kini), Hlm. 133--146, La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia, Pusat Studi La Galigo, ISBN 797-97666-0-5, 2003; "Arung Samudera" Editor Buku bersama Edi Sedyawati LPUI Depok 2002; "VOC: Het Begin van de Koloniale Overheersing (in Indonesie), Hlm. 1--32, De VOC in De Indonesische Archipel I handeldriven en koloniseren, Balai Pustaka, 2002; Perjajniaan Linggar Jati 1947: Sebuah Refleksi Bangsa yang Cinta Damai, artikel dalam buku Pameran dan Simposium Refleksi Linggar Jati, Hlm. 15—16; Sejarah lokal dalam perspektif Keindonesiaan Makalah seminar Nasional Bumi Siliwangi, 22 Februari 2003;

Akar nasionalisme Indonesia bermula ketika kehidupan yang pluralistik dirasakan tidak adil. Nasionalisme yang membayangkan terwujudnya suatu komunitas baru yang bersifat trans-etnik, yang melampaui ikatan primordial dan tradisional lama, merupakan sebuah ideologi yang dikembangkan oleh perantau. Di daerah rantau ini--di kota-kota kolonial yang bersifat pluralistik--mereka membandingkan berbagai corak situasi kehidupan. Setelah sekolah didirikan oleh pemerintah kolonial, kemajemukan yang bersifat hierarkis itu terbuka. Para perantau melihat hubungan yang jelas antara tingkat kemajuan pengetahuan, kekuasaan dan jenjang sosial ekonomi. Sejak itu mulai datang hasrat untuk memasuki dunia pengetahuan-cita-cita kemajuan pun mulai memasuki kesadaran. Cita-cita kemajuan dan hasrat demokrasi, yang semula berarti keinginan akan kesetaraan sosial, kemudian menumbuhkan solidaritas yang mengatasi batas-batas primordial. Benih lahirnya sebuah bangsa pun mulai tertanam.

Surat kabar dan penerbitan lain telah memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan rasa kebangsaan yang trans-etnik. Menurut Anderson, kapitalisme-cetak mempercepat kemungkinan bertambah cepatnya jumlah penduduk yang memikirkan diri sendiri dan menyampaikannya kepada orang lain dengan gaya baru. Pembentukan asosiasi sukarela yang beragam itu--perkumpulan keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial--telah mengalami proses urbanisasi. Ini dapat dilihat sebagai saluran untuk menyampaikan impian dan cita-cita yang tumbuh sebagai pengaruh kebudayaan cetak.

Sumpah pemuda (28 Oktober 1928) menjadi pembuka lembaran baru dalam proses nation formation (pembentukan bangsa). Ketika itu landasan kepulauan dan daerah dari komunitas baru, yang disebut bangsa, secara simbolik dianggap berakhir. Sejak itu, secara ideologis keabsahan organisasi kedaerahan ditentukan oleh keterkaitannya dengan komunitas baru yang disebut bangsa Indonesia. Dengan meninggalkan ikatan kedaerahan atau kepulauan sebagai ikatan landasan solidaritas final, maka secara ideologis organisasi-organisasi ini membebaskan diri dari belenggu masa lalu-suatu masa yang terpecah-pecah.

Demikianlah, Indonesia adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa untuk mengikat masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa di tengah keragaman etnis, suku, agama atau golongan. Kesepakatan yang ada bukanlah kemudian dimaknai sekedar ada Indonesia melainkan ada sebuah kemauan bersama untuk memikirkan dan memajukan bangsa serta upaya mewujudkan cita-cita bersama. Pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa di masa lampau yang menjadikan terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba melainkan lahir dari sebuah proses yang panjang (antara lain dengan adanya kesadaran nasional yang melahirkan pergerakan nasional) dengan meneteskan keringat, airmata, dan darah untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan dan kemajuan.

